

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat, dengan jumlah penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa¹. Dari jumlah itu, pemeluk agama Islam di Indonesia mencapai 85% yang menempatkan Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia.² Fakta Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia dan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia ini menyiratkan betapa penting dan strategisnya kedudukan partai politik sebagai instrumen utama demokrasi di satu sisi, dan agama Islam pada sisi yang lain dalam kehidupan bernegara maupun dalam pergaulan internasional. Partai politik dalam kehidupan negara demokrasi merupakan prasyarat bagi berdirinya sebuah negara demokrasi dan partai politik sebagai keterwakilan rakyat menjadi penyeimbang kekuasaan eksekutif. Sedangkan Islam pada sisi yang lain adalah jumlah mayoritas yang juga merupakan salah satu prasyarat demokrasi lainnya. Demokrasi memang meletakkan titik tekan pada jumlah terbesar suara rakyat untuk mendapatkan hak dalam menjalankan negara. Namun meski partai-partai Islam telah

1 Jumlah ini merupakan hasil sensus penduduk Badan Pusat Statistik 2010. Penduduk tersebut bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118.320.256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen). Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk.

2 Pada tahun 2009 Michael Buehler menulis jumlah penduduk Indonesia 230 juta dengan pemeluk agama Islam sebanyak 85% (lihat Michael Buehler, "Islam and Democracy in Indonesia", *Insight Turkey*, Vol. 11/No. 4/2009, h. 51). Sumber lain yakni Jan Woischnik dan Philipp Müller pada tahun 2013 menulis jumlah penduduk Indonesia 240 juta jiwa dengan pemeluk agama Islam sebanyak 88% (lihat Woischnik, Jan/ Müller, Philipp, "Islamic Parties And Democracy In Indonesia", *Kas International Reports*, 10|2013, h.60). Bandingkan pula dengan jumlah yang disajikan *CIA World Factbook* data Juli 2013 yang dikutip *World Almanac Of Islamism* yang dilansir *America Foreign Policy Council* bahwa jumlah penduduk Indonesia 251,160,124 jiwa dengan masing-masing pemeluk agama; Muslim 86.1%, Protestan 5.7%, Roman Katolik 3%, Hindu 1.8%, dan lainnya 3.4%.

eksis dan terlibat dalam Pemilu, namun nyatanya Indonesia masih jauh dari sebuah negara Islam.³

Kehadiran agama sebagai sebuah kerangka acuan terpenting manusia menjadikannya tak bisa begitu saja diabaikan dalam kajian untuk memahami realitas sosial dengan segenap dimensinya. Determinasi nilai agama dalam dinamika politik merupakan suatu keniscayaan yang memang semestinya terjadi. Agama sejauh ini telah mapan sebagai salah satu variabel penting yang turut menentukan warna sebuah pentas politik. Bahkan penggunaan bendera agama di atas panggung politik sejak Pemilu pertama tahun 1955 digelar, hingga saat ini telah sangat lazim. Artinya, kehadiran suatu kekuatan politik yang berpijak pada nilai dasar keagamaan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Apalagi jika agama itu menjadi anutan mayoritas, seperti Islam di Indonesia.⁴

Seorang sosiolog bidang sosiologi humanistik, Peter L. Berger dengan tegas menyatakan bahwa agama telah memainkan peran strategis dalam usaha manusia membangun dunia. Agama berarti jangkauan terjauh dari eksternalisasi-diri manusia, dari peresapan makna-maknanya sendiri ke dalam realitas. Agama berarti, bahwa tatanan manusia itu diproyeksikan ke dalam totalitas kedirian. Dengan kata lain, agama adalah usaha berani untuk membayangkan adanya keseluruhan semesta sebagai bernilai manusiawi.⁵ Signifikansi agama sesungguhnya tidak hanya dapat dipandang semata-mata dari dimensi teologisnya. Betapapun agama bersumber dari Tuhan—karenanya *transenden* dan *absolutistik*—agama lebih banyak difungsikan guna memberikan kesemestaan makna (*meaning universe*) kehidupan manusia. Karena itu agama juga bercorak antropologis, dikarenakan eksistensi primordialistik manusia yang terikat sepenuhnya dengan agama, sebagai bagian dari dimensi

3 Lihat lebih jauh Paul J. Carnegie, "Political Islam and Democratic Change in Indonesia," dalam *Asian Social Science Journal*, Vol.4, No.11, November 2008, h.5.

4 Abdul Gafar Karim, "Islam Di Panggung Politik Indonesia: Latar Belakang, Dinamika, dan Pergeserannya", *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JSP)* Fisipol UGM, t.t. h.42.

5 Lihat lebih jauh Peter L. Berger, 1994. *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, alihbahasa Hartono (Jakarta: LP3ES, 1994), h.35.

historis-sosiologisnya. Singkat kata, agama akan selalu terlibat dalam dialektika-historis dengan peradaban manusia.⁶

Sejak Pemilihan umum (Pemilu) pertama tahun 1955, sangat besar peran partai politik (Parpol) berbasis organisasi Islam atau partai yang berbasis massa Islam, atau yang mengklaim berideologi Islam.⁷ Pemilu pertama pada 29 September 1955 ini diikuti 30 Parpol⁸ untuk memilih badan perwakilan, lima di antaranya adalah Parpol Islam menguasai hampir separuh suara parlemen yakni 43,72%. Parpol tersebut yakni Masyumi (memperoleh 20,92 % suara), Nahdlatul Ulama/NU (memperoleh 18,41% suara), Partai Syarikat Islam Indonesia/PSII (memperoleh 2,89% suara), Pergerakan Tarbiyah Indonesia/Perti (memperoleh 1,28% suara), dan Partai Politik Tarikat Islam/PPTI (memperoleh 0,22% suara). Selain memilih anggota badan perwakilan, di Pemilu pertama ini juga dilakukan pemilihan untuk membentuk badan Konstituante pada 15 Desember 1955⁹. Pemilu yang diikuti 34 Fraksi yang

6 Ridwan Lubis, *Agama Dalam Perbincangan Sosiologi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h.6. Lebih jauh di dalam bab agama dan politik dijelaskan bahwa ada dua pilihan dalam merumuskan hubungan agama dengan politik. Apabila agama digunakan untuk kepentingan politik maka agama akan kehilangan esensi karena agama sekedar alat legitimasi untuk memperoleh kekuasaan. Akan tetapi sebaliknya manakala politik digunakan untuk tujuan dari substansi agama maka kehidupan masyarakat menjadi integratif karena yang dikejar setiap orang adalah makna di balik setiap pesan-pesan agama.

7 Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang diartikan tidak sekedar agama atau suatu konstruksi teologi, tetapi lebih dari itu Islam sebagai ideologi politik yang memiliki seperangkat aturan dalam tatanan perpolitikan. (Lihat Mohammad Ayyub, "Political Islam: Image and Reality", *World Policy Journal*, 21, 3 (Fall 2004). Hubungan Islam dan negara baik dalam tatanan empiris dan teoritis juga dilihat dalam variasi pandangan beragam yang disebabkan oleh perbedaan tingkat penetrasi Islam dan pengalaman politik negara-negara Islam, juga disebabkan perbedaan dalam memahami sumber-sumber Islam. (Lihat juga Katimin, *Politik Islam Indonesia, Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional* (Bandung: Ciptapustaka Media, 2007), h.11.

8 www.kpu.go.id yang memuat arsip Pemilu Nasional sejak Pemilu pertama tahun 1955 sampai Pemilu terakhir tahun 2014.

9 Herbert Feith, dalam Katimin, h. 103-104. Kalau pada Pemilu 29 September 1955 yang diikuti 30 partai politik, untuk membentuk pemerintahan parlementer menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sedangkan Pemilu membentuk Konstituante yang diikuti 34 fraksi memunyai tugas sekali pakai yaitu untuk membentuk undang-undang dasar yang definitif.

terdiri dari tiga kelompok ini memperebutkan 514 kursi dengan partai Islam dalam kelompok Islam memperoleh 230 kursi. Perolehan suara umat Islam ini diwakili Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) 112 kursi, NU (Nahdlatul Ulama) 91 kursi, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) 16 kursi, Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) 7 kursi, PPTI 1 kursi, Gerakan Pilihan Sunda 1 kursi, dan Pusat Penggerak Pencalonan L.E.Idrus Effendi-Sulawesi Tenggara 1 kursi.¹⁰

Pemilu tahun 2009 diikuti 8 partai Islam, dari 38 partai peserta Pemilu dengan perolehan partai Islam hanya 23,84% total suara. Delapan partai tersebut yakni Partai Keadilan Sejahtera/PKS (memperoleh 7,88% suara), Partai Amanat Nasional/PAN (memperoleh 6,01% suara), Partai Persatuan Pembangunan/PPP (memperoleh 5,32%), Partai Kebangkitan Bangsa/PKB (memperoleh 4,94% suara), Partai Bulan Bintang/PBB (memperoleh 1,79% suara), Partai Kebangkitan Nasional Ulama/PKNU (memperoleh 1,47% suara), Partai Bintang Reformasi/PBR (memperoleh 1,21% suara), Partai Matahari Bangsa/PMB (memperoleh 0,40% suara), Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia/PPNUI (memperoleh 0,14% suara).¹¹

Membandingkan hasil Pemilu pertama (1955) dengan hasil Pemilu 2009 menunjukkan ketidaksinkronan antara jumlah umat Islam yang mayoritas di Indonesia dengan jumlah pemilih partai Islam. Jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia berdasarkan sensus 1971 sebanyak 103,57 juta atau 87,51% dari total 118,36 juta penduduk Indonesia.¹² Jika kita mengambil perbandingan Pemilu 1955 dengan Pemilu 2009, terdapat peningkatan partai politik Islam dari segi kuantitas, namun menurun dari segi kualitas. Islam dan politik merupakan dua aspek yang menyatu dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Islam tidak memisahkan persoalan akhirat dengan persoalan dunia, melainkan mencakup kedua segi ini. Nyatanya memang dalam syariat hukum Islam mengatur kedua hal ini secara menyatu, baik hubungan antara manusia dengan Allah SWT (*hablumminallah*), dan

¹⁰ *Ibid*, h.104-106.

¹¹ Data ini diambil dari situs www.kpu.go.id dan dikompilasikan dari beberapa sumber lainnya.

hubungan manusia dengan sesama manusia (*hablumminanas*). Maka umat Islam membutuhkan kekuasaan politik sebagai instrumen bagi pelaksanaan nilai-nilai Islami. Ibnu Taimiyah dalam kitab *al-Siyasah al-Syar'iyah*, mengungkapkan bahwa nilai (organisasi politik) bagi kehidupan kolektif manusia merupakan keperluan agama yang terpenting. Tanpa tumpangnya, agama tidak akan tegak dengan kokoh.¹³

Namun nyatanya keberadaan partai politik Islam yang menempatkan wakil-umat Islam di parlemen belum bisa memenuhi kebutuhan mendasar umat Islam sebagai konstituennya. Setidaknya dua contoh di bawah ini bisa menunjukkan betapa persoalan utama dalam ajaran Islam yang belum bisa terakomodir dalam bentuk regulasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini memberi gambaran betapa masih rendahnya peran politik partai politik Islam di parlemen. *Pertama* menyangkut jaminan akan produk halal. Persoalan makanan halal adalah persoalan penting dalam Islam karena memakan makanan halal adalah kewajiban setiap umat Muslim yang diperintahkan Allah SWT dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُونُوا مَعَ الْإِصْحَابِ طَيِّبِينَ وَلَا تَبِعُوا حُطُوبَ
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

12 Ada jeda waktu 17 tahun antara hasil Pemilu 1955 dengan Sensus Penduduk tahun 1971. Perbandingan jumlah perolehan suara Papol Islam pada Pemilu 1955 dengan pemeluk agama Islam tahun 1971. Ini karena data-data agama dari Sensus Penduduk tahun 1961 tidak dipublikasikan oleh pemerintah karena dirasakan sensitif. Pengakuan agama-agama yang hidup di Indonesia dikukuhkan oleh Surat Keputusan Presiden Soekarno tahun 1965. Dalam Keppres itu, enam agama diakui secara resmi: Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. Pada tahun 1979, sidang kabinet masa Orde Baru tidak mengakui agama Kong Hu Cu sehingga agama tersebut terakhir tercantum dalam sensus tahun 1971. Angka pemeluk Islam di atas membuat Indonesia adalah negara dengan jumlah pemeluk Islam terbanyak di dunia. Selengkapnya lihat Suryadinata, Leo, dkk, *Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik* (Jakarta: LP3ES, 2003), h.103.

13 Taimiyah, Ibnu, *al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1952), h. 174. Lihat juga Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, Jilid XXVIII, disunting oleh Muhammad Abdurrahman Ibnu Qasim, Riyadh: Matabi' al-Riyadh, 1963, h. 62.

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Q.S. al-Baqarah/2: 168)

Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Muhammad SAW bahkan menegaskan ancaman bagi orang yang memakan makanan haram. Rasulullah SAW bersabda yang artinya "Setiap tubuh yang tumbuh dari (makanan) yang haram, maka api neraka lebih utama baginya (lebih layak membakarnya)." (H.R. At-Tabrani)¹⁴

Dengan demikian, persoalan makanan halal-haram adalah masalah penting bagi umat Islam. Namun kenyataannya setelah hampir 70 tahun Indonesia merdeka sejak diproklamirkan 17 Agustus 1945, negara yang dihuni mayoritas umat Islam ini belum juga memiliki perangkat undang-undang yang menjamin produk yang dijual bebas di tengah-tengah masyarakat adalah barang halal. Bahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) pembahasannya sempat terkatung-katung di parlemen. Padahal, RUU ini sudah diajukan pertama sejak tahun 2006 atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berbagai kepentingan dan kekuatan yang tidak menginginkan RUU ini menjadi UU seolah tak tertembus oleh kekuatan wakil umat Islam di parlemen. Meski pada akhirnya pada tanggal 25 September 2014 disahkan menjadi UU No.23 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, fakta sulitnya regulasi tentang jaminan produk halal ini adalah senyatanya sebagai kekalahan partai politik Islam dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Kedua, pengelolaan sistem perbankan yang non riba. Akan halnya larangan praktek riba dalam perdagangan adalah aturan yang dinyatakan dalam Al-Quran, seperti firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً
 رَبُّكَ أَكْبَرُ ۝ ١٣٠

14 At-Tabrani, *Al-Mu'jam Al Awsath*, h.35.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S.Ali 'Imran/3: 130)

Dalam ayat lain dinyatakan secara lebih tegas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (Q.S.al-Baqarah/2:168)

Larangan Al-Qur'an terhadap penghasilan *al-Riba* adalah jelas dan pasti. Sepanjang pengetahuan tidak seorang pun mempermasalahkannya.¹⁵ Namun larangan tegas dalam Al-Qur'an tersebut tidak terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia karena sistem perbankan pada umumnya menggunakan instrumen riba sebagai salah satu perangkat utamanya. Setiap transaksi yang dilakukan melalui perbankan konvensional, akan selalu menggunakan bunga utang sebagai keuntungan. Sistem riba seperti ini dilakukan dalam membiayai beragam proyek pembangunan di negeri ini seperti para pengusaha kecil, menengah maupun pengusaha besar yang akan memulai atau mengembangkan usahanya. Hal yang sama dilakukan dalam program-program pembangunan pemerintah di berbagai sektor. Ini tentu menegaskan bahwa negeri ini dibangun dengan pengelolaan keuangan melalui sistem riba. Bahkan cadangan devisa Indonesia pada periode 30 Januari 2014 yang berjumlah US\$100,651 miliar¹⁶ sebagian besar berasal dari utang luar negeri.¹⁷ Sedangkan di tahun sebelumnya, cadangan devisa 2012 mencapai US\$105,343 miliar yang jumlah terbesarnya yakni sebanyak US\$83,299 miliar berasal dari surat

15 Fajar M. Hidayanto, "Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial," *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, Desember 2008, t.h.

16 www.bi.go.id.

berharga.¹⁸ Posisi utang luar negeri dalam paradigma pembangunan di Indonesia saat ini merupakan nafas bagi pembangunan yang dilaksanakan. Hampir tidak ada sektor pembangunan yang dijalankan yang tidak terlibat pada sistem riba yang ditopang oleh utang luar negeri tersebut. Utang luar negeri ini sendiri sudah menjadi suatu kelaziman dan memiliki posisi strategis dalam pembangunan Indonesia. Artinya adalah apabila utang luar negeri meningkat maka neraca modal Indonesia akan meningkat sebab utang luar negeri dicatat di neraca modal. Peningkatan ini tentunya akan berdampak terhadap peningkatan neraca pembayaran. Naiknya neraca pembayaran akan menambah aset luar negeri Indonesia sendiri. Aset luar negeri inilah yang akan menyebabkan cadangan devisa meningkat. Begitu sebaliknya, utang luar negeri yang menurun akan berimplikasi terhadap turunnya dana dari luar yang masuk ke dalam negeri. Penurunan utang luar negeri akan mengontraksi penurunan neraca modal sehingga neraca pembayaran akan tertekan atau menurun. Penurunan neraca pembayaran akan berimplikasi terhadap penurunan berbagai aset luar negeri sehingga cadangan devisa pun akan mengalami penurunan.¹⁹

Akan halnya perbankan syariah belakangan muncul sebagai jawaban terhadap sistem perbankan konvensional yang nyata-nyata menggunakan sistem riba dalam prakteknya. Perbankan syariah dipercaya sebagai alternatif umat Islam untuk bisa bertransaksi dengan bank tanpa harus terlibat riba. Tetapi nyatanya perbankan syariah sendiri belum sepenuhnya tidak menggunakan sistem riba dalam aktivitas transaksinya. Sistem pemberian kredit oleh bank syariah nyatanya masih mendapat kritik dari sementara pihak yang menilai praktek *interest* (bunga) dalam proses pinjam meminjam. Namun demikian, dari sudut pandang ajaran Islam, beberapa

17 Prabowo Subianto dalam sebuah dialog interaktif di radio Smart.FM yang berjangkauan nasional, Senin 3 Maret 2014, menyatakan bahwa hanya 30% dari cadangan devisa tersebut yang merupakan devisa asli nasional, selebihnya berasal dari utang luar negeri.

18 Aditya Nugraha, *et.al.*, *Wajah Perekonomian Indonesia Dan Prospeknya*, Paket Informasi Publik Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, h.8.

19 Mega Febriyenti, *et.al.*, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Devisa Dan Net Ekspor Di Indonesia", *Jurnal Kajian Ekonomi*, Juli 2013, Vol. II, No.03, h.167.

pandangan mengatakan bahwa perbankan syariah masih lebih baik dari perbankan konvensional. Hanya saja hingga akhir tahun lalu, jumlah perbankan syariah masih lebih sedikit dibanding perbankan konvensional.²⁰

Dari gambaran di atas terlihat betapa pentingnya partai politik sebagai penyalur aspirasi umat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentunya ini terkait erat dengan keterwakilan umat Islam yang belum proporsional di parlemen, dibandingkan dengan jumlah umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah mengapa umat Islam kebanyakan tidak memberikan perwakilan politiknya kepada partai politik Islam? Penelitian ini adalah suatu upaya untuk menjelaskan hubungan antara partai politik Islam dengan konstituennya yakni umat Islam Indonesia melalui pendekatan komunikasi Islam.

Al-Qur'an sebagai pedoman hidup diyakini oleh umat Islam sebagai kitab yang mengatur semua persoalan kehidupan, tak terkecuali dalam berkomunikasi. Al-Qur'an juga berbicara tentang prinsip-prinsip komunikasi yakni perkataan yang baik atau *qaulan Ma'rûfâ* (Q.S.al-Baqarah/2: 235 & 263; An-Nisâ/4: 5 & 8; Al-Ahzab/33: 32); perkataan lemah lembut atau *qaulan layyinâ* (Q.S.Thaha/20: 44); perkataan yang benar atau *qaulan Sadîdâ* (Q.S.An-Nisâ/4: 9; Al-Ahzab/33: 70); perkataan yang berbekas pada jiwa atau *qaulan balîghâ* (Q.S.An-Nisâ/4: 63); perkataan yang mulia atau *qaulan karîmâ* (Q.S.Al-Isrâ'/17: 23); perkataan yang pantas atau *qaulan maysûrâ* (Q.S.Al-Isrâ'/17: 28). Untuk mendekati apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an terkait prinsip-prinsip komunikasi Islam tersebut, penelitian ini akan mengelaborasikannya dengan pendekatan tafsir yang disampaikan dari beberapa *mufassirin*, termasuk melihatnya dalam konteks yang bagaimana prinsip-prinsip tersebut disampaikan oleh Al-Qur'an. Adapun buku tafsir yang digunakan yakni Tafsir *Al-Misbah*, Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an*, dan Tafsir *Ibnu Katsir*. Dari penjabaran oleh para *mufassirin* tersebut kemudian dilihat bagaimana partai politik Islam mengimplemtasikannya dalam kampanye Pemilu 2014.

20 Pada Agustus 2013 tercatat jumlah perbankan syariah sebanyak 11 unit, sedangkan perbankan konvensional mencapai 24 unit. (Lihat *Statistik Perbankan Syariah*, Bank Indonesia, Agustus 2013), h.1.

Pilihan partai politik Islam yang dikaji dalam penelitian ini adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PKS sebagai partai yang dilahirkan dari rahim reformasi relatif lebih baru dibandingkan PPP, namun perolehan suara partai ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari Pemilu pertama yang diikutinya di tahun 1999. Di Pemilu tahun 2009, PKS bahkan menjadi partai politik yang memperoleh suara terbesar di antara partai politik Islam yang ada. Sedangkan PPP adalah partai politik yang memiliki sejarah panjang dalam pentas perpolitik bangsa Indonesia. Membandingkan PKS dan PPP sebagai objek penelitian ini merupakan usaha untuk memberi gambaran yang lengkap tentang interaksi antara partai politik Islam dengan konstituennya yang tidak lain adalah umat Islam.

Bagi partai politik Islam seperti PKS, nilai Islam menjadi objek utama dalam banyak pergulatannya di ranah politik. Partai yang terinspirasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir ini dibangun dari gerakan dakwah para mahasiswa di kampus-kampus, sehingga kemudian dikenal sebagai partai gerakan (*movement party*). Kalangan PKS sendiri menyebut aktivitas politiknya sebagai pekerjaan dakwah yang juga adalah terminologi agama. Pekerjaan dakwah yang disebut dengan proyek peradaban itu dilakukan dalam empat tahapan yakni *mihwar tanzhimi*, *mihwar sya'bi*, *mihwar muassasi*, dan *mihwar daulah*.²¹

Pertama; mihwar tanzhimi yakni gerakan membangun sebuah organisasi yang solid sebagai kekuatan utama yang menjadi operator dakwah. Organisasi mana yang didesain menjadi tulang punggung yang kuat dan mampu menanggung beban berat dalam waktu yang lama. Untuk menjadi kuat maka syaratnya organisasi ini harus diisi dengan orang-orang yang tangguh dan kuat pula dalam seluruh aspek kepribadiannya. Selanjutnya untuk mencetak orang-orang yang kuat tersebut diperlukan proses pembinaan dan kaderisasi yang sistematis, integral, dan waktu yang relatif panjang. Dasar inilah kemudian yang menjadikan PKS sebagai partai dakwah, karena dalam sub-ordinatnya ada *halaqah-halaqah* dalam bentuk pengajian yang sekaligus berfungsi sebagai pengkaderan.

21 Anis Matta, *Menikmati Demokrasi; Strategi Dakwah Meraih Kemenangan* (Jakarta: Pustaka Saksi, 2002), h.8-11.

Kedua; mihwar sya'bi yakni membangun basis sosial yang luas dan merata sebagai kekuatan pendukung dakwah. Kalau basis organisasi bersifat elitis-eksklusif dan berorientasi pada kualitas yang dibentuk melalui rekrutmen kader dan tarbiyah, maka basis sosial bersifat masif, terbuka dan berorientasi pada kuantitas yang dibentuk melalui opini publik, media massa dan tokoh publik. Pada tahap ini juga mengisyaratkan bahwa para kader yang dibangun dan dibentuk adalah orang-orang yang terpesona karena tingkat intelektualitasnya, maka massa terpesona pada tokoh dan kadar emosinya yang dominan.

Ketiga; mihwar muassasi yakni tahap membangun berbagai institusi yang ditujukan mewadahi gerakan dakwah. Pada tahap ini mensyaratkan membentuk institusi-institusi baru dalam berbagai bidang seperti sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya. Selain itu juga mengisi institusi-institusi yang sudah ada baik yang ada di masyarakat maupun di pemerintahan seperti politik, militer, ekonomi, sosial. Maka para kader disebar ke seluruh institusi melakukan mobilitas vertikal seperti di dalam struktur legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bertujuan untuk memberikan legalitas politik terhadap opini publik. Inilah pranata yang dibutuhkan untuk menata kehidupan bernegara yang Islami.

Keempat; mihwar daulah adalah dakwah yang menegara atau sampai pada tingkat institusi negara yang meralisasikan secara legal dan kuat seluruh kehendak Allah SWT atas kehidupan masyarakat. Namun negara dalam tahap ini tetap dipandang sebagai sarana dan bukan tujuan. Karena tujuan yang ditetapkan tetaplah tujuan dakwah.

Rumusan empat tahapan dakwah PKS ini senafas dengan apa yang pernah dinyatakan oleh Hassan Al-Banna pendiri Ikhwanul Muslimin: Kita mulai (gerakan dakwah) dari individu, keluarga, lingkungan sekitar atau komunitas, dan kemudian masyarakat secara lebih luas. Ketika masyarakat itu sendiri telah meyakini Islam secara hakiki, maka tinggal persoalan waktu sebelum syariah Islam mampu diperluas (diimplementasikan) ke ranah negara.²² Artinya bersatunya agama Islam dan partai

22 Carrie R. Wickham, "Mobilising Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt" (New York: Columbia University Press, 2002) dalam Muhtadi, Burhanuddin, *Dilema PKS, Suara dan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), h.177.

politik adalah suatu keniscayaan. Hal ini ditekankan lagi dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS yang menegaskan lagi tujuan dan cara partai mencapai tujuannya.²³

Pasal 5 Anggaran Dasar (AD) PKS memuat “tujuan dan kegiatan” partai tersebut. Pasal ini berbunyi: Tujuan Partai yaitu:

- (1) Terwujudnya cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
- (2) Terwujudnya masyarakat maani yang adil dan sejahtera yang diridloi Allah subhanahu wa ta’ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan pada Pasal 6 dinyatakan: Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 5, Partai menjalankan kegiatan antara lain politik, dakwah, pendidikan ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan memberikan alternatif solusi terhadap berbagai persoalan bangsa dan negara.

Dalam Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga PKS dijelaskan tujuan dan sasaran partai berikut:

- (1) Untuk mencapai tujuan Partai, dirumuskan sasaran berikut:
 - a. Terwujudnya masyarakat yang mandiri, bermartabat, bertanggung jawab, peduli, sejahtera, dan bahagia di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Terwujudnya pemerintahan yang jujur, bersih, transparan, berwibawa dan bertanggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hukum perundang-undangan serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang menjamin hak-hak rakyat dan bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia.
- (2) Sasaran Partai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam kebijakan Dasar dan Rencana Strategis Partai.

23 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PKS ini dimuat dalam buku *Memperjuangkan Masyarakat Madani Partai Keadilan Sejahtera* yang disusun Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera Maret 2008, h.590.

Sedangkan dalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga disebutkan cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan partai, dan di Pasal 4 disebutkan sarana yang digunakan antara lain dengan dakwah²⁴. Pasal 3 tersebut berbunyi:

Untuk mencapai tujuan Partai maka dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

- a. Menyampaikan dakwah dan tarbiyah Islamiyah kepada masyarakat, khususnya umat Islam, secara benar, jelas, utuh, dan menyeluruh;
- b. Mendorong kebajikan di berbagai bidang kehidupan;
- c. Memberantas kebodohan, kemiskinan, dan kerusakan moral;
- d. Menghimpun jiwa dan menyatukan hati manusia di bawah naungan prinsip-prinsip kebenaran;
- e. Mendekatkan berbagai persepsi antara *madzhab-madzhab* di kalangan Umat Islam;
- f. Memberi alternatif solusi terhadap berbagai persoalan umat dan bangsa serta pembangunannya;
- g. Membangun peradaban manusia atas dasar keseimbangan iman dan materi;
- h. Meningkatkan kesejahteraan Anggota Partai dan masyarakat;
- i. Merealisasikan keadilan dan solidaritas sosial serta ketentraman bagi masyarakat;
- j. Mengembangkan dan melindungi kekayaan Bangsa dan Negara;
- k. Memajukan perlindungan hak-hak asasi manusia.

Pasal 4 berbunyi: Dalam melaksanakan sasaran dan kegiatan tersebut Partai menggunakan sarana-sarana antara lain:

- a. Dakwah:
 - 1) Melalui media massa cetak dan elektronik serta media komunikasi lainnya;
 - 2) Pengiriman delegasi di dalam dan ke luar negeri;
 - 3) Melalui lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga-lembaga strategis lainnya.

Di antara partai politik Islam yang menonjol dalam perolehan suara saat ini adalah PKS yang merupakan partai Islam terbesar di Indonesia. PKS adalah satu-satunya partai kader yang nyata di Indonesia. Para anggotanya yang terdiri dari orang muda itu bekerja secara sistematis untuk mendidik politisi masa depan serta terlibat

²⁴ *Ibid*, h.603-604.

dalam langkah-langkah profesional. Rekrutmen dan pelatihan anggota PKS harus menjalani tahun pelatihan dalam grup kecil, yang tidak hanya mencakup kuliah politik dan topik seperti mengelola, kampanye Pemilu tapi juga tafakur dan latihan berdoa serta kelas membaca Al-Qur'an. Para pengkritik menyebutnya agama/ideologi indoktrinasi.²⁵

Partai ini menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam perolehan suara dari satu Pemilu ke Pemilu lainnya. Pemilu pertama diikuti partai ini pada tahun 1999, yang saat itu bernama Partai Keadilan (PK). Perubahan nama menjadi PKS karena pada Pemilu 1999 tersebut PK hanya memperoleh 1,36% suara dan tidak *electoral threshold* (memenuhi ambang batas suara) yang ditetapkan.²⁶ Pemilu 2004, PKS memperoleh suara 7,34%, dan Pemilu 2009 memperoleh suara 7,89%. Kecenderungan secara nasional ini sama seperti yang terjadi dengan PKS Sumatera Utara.

Kecenderungan peningkatan perolehan suara ini, menjadikan PKS sebagai partai Islamis paling sukses kedua di dunia setelah *the ruling party* di Turki, AKP (*Adelet ve Kalkinma Partisi*) atau Partai Keadilan dan Pembangunan. Kedua partai ini sama-sama bertarung melalui mekanisme demokrasi elektoral dan prosedural.²⁷ Baik PKS maupun AKP sama-sama partai gerakan (*movement party*). Ciri ini membedakan PKS dengan partai-partai Islam yang ada. Ciri PKS ini tidak terlepas dari asal-usulnya yang dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus.²⁸ Karena ia merupakan *movement party* maka partai ini memiliki jaringan organisasi massif dari struktur tertinggi sampai ke bawah, dan inilah yang menjadikan PKS menjadi besar.

25 Matthias Heilmann, *Islamismus in Indonesien: Der Erfolg der Gerechtigkeits- und Wohlfahrtspartei und seine möglichen Auswirkungen*, ASEAS – Österreichische Zeitschrift für Südostasienwissenschaften, No. 1, 2008, 21, http://seas.at/aseas/1_1/ASEAS_1_1_A3.pdf.

26 *Electoral threshold* Pemilu 1999 sebesar 2% dari total perolehan suara, sedangkan pada Pemilu 2004 *electoral threshold* meningkat menjadi 3% dari total perolehan suara. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 pasal 9 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa partai yang tidak melewati batas 3 % diharuskan mengganti nama dan tanda gambar.

27 Greg Fealy, dalam Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS, Suara dan Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), h.xiii

Untuk itu perlu diketahui bagaimana implementasi *setting* tujuan dan sasaran PKS Sumatera Utara dalam melaksanakan tahapan sasarannya? Apa yang dilakukan PKS Sumatera Utara dalam perencanaan kampanye politiknya. Sejauh mana PKS Sumut melakukan implementasi secara spesifik sasaran-sasaran politiknya, dan ketika sasaran telah dilaksanakan, apakah yang dilakukan PKS dalam mencapai tujuannya.

Akan halnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berbeda secara historis dengan PKS. PPP adalah partai Islam yang telah lebih dahulu lahir, tepatnya dilahirkan oleh suatu sistem otoritarianisme negara yang begitu kuat terhadap organisasi partai politik. PPP dilahirkan melalui fusi (penggabungan) empat partai politik Islam peserta Pemilu 1971, yaitu Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), dan Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Dalam naskah deklarasi pembentukan PPP yang ditandatangani oleh KH. Idham Khalid (NU), H.M.S. Mintaredja (Parmusi), H. Anwar Tjokroaminoto (PSII), Rusli Halil (Perti), dan K.H. Masykur (NU), dikatakan bahwa kelahiran PPP merupakan wadah penyelamat aspirasi umat Islam dan cermin kesadaran serta tanggung jawab tokoh-tokoh umat dan pemimpin partai untuk bersatu, bahu membahu, serta membina masyarakat agar dapat lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, melalui perjuangan partai politik.²⁹

Selama masa Orde Baru sampai dengan sebelum masuknya Orde Reformasi, keberadaan PPP bersama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya sebagai partai politik pelengkap demokrasi Pancasila saat itu. Kedua partai ini selalu menjadi partai yang kalah selama lima kali Pemilu yakni Pemilu tahun 1977 sampai 1997. Dalam kondisi seperti ini aspirasi umat Islam mengalami ketersumbatan politik oleh kuatnya

28 Lihat lagi Burhanudin Muhtadi, *Dilema PKS, Suara dan Syariah* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012) h.31. Dalam penjelasan tentang PKS dan gerakan dakwah kampus, Burhanuddin menjelaskan bahwa secara etimologis dakwah berarti "menyeru" kepada Islam atau seruan agama untuk membangkitkan iman untuk menjaga masyarakat Islam dari kejahatan. Dalam pengertian terminologis dakwah berarti mengajak masuk agama, atau seruan kepada *al-din* (agama). Para aktivis dakwah disebut *du'ah* (bentuk jamak dari *da'i*) yang berarti orang yang melakukan seruan agama, ceramah, artau penyebaran pemahaman mengenai ajaran Islam.

29 Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia; Ideologi dan Program 2004 -2009* (Jakarta: Kompas, 2004), h.88.

intervensi negara yang menguasai militer dan kekuatan politik Golkar pada masa itu. Azas politik PPP di masa Orde Baru mengalami pasang surut di mana selama dua Pemilu menggunakan azas Islam yakni Pemilu tahun 1977 dan 1982, sedangkan pada Pemilu tahun 1987, 1992, 1997 PPP menggunakan azas Pancasila. Pemilih partai ini sebagian besar masih didominasi oleh anggota Nahdlatul Ulama (NU) dan anggota dari masyarakat kelas menengah. PPP masih mencoba untuk membedakan dirinya dari partai Islam lainnya melalui program Islam diucapkan. Segera setelah awal era reformasi yang membuka demokrasi pada tahun 1999, misalnya, pengenalan hukum syariat menjadi salah satu tujuan program PPP.³⁰

Sebagai satu-satunya partai Islam selama kepemimpinan Presiden Soeharto di masa Orde Baru (setelah 1971) PPP adalah partai yang paling cangguh sebagai organisasi partai politik Islam. PPP juga mendapat keuntungan dari ketuanya yakni Hamzah Haz yang menjabat sebagai Wakil Presiden bagi Megawati Sukarnoputri. PPP memiliki beragam profil ideologi, berubah dari pendukung jihad ultra-konservatif menjadi moderat-konservatif dengan latar belakang NU. PPP juga adalah partai yang memiliki komitmen mengubah konstitusi dan memberlakukan hukum Islam bagi umat Muslim. Proposal PPP dibuat bersama dengan partai yang lebih konservatif yakni PBB (Partai Bulan Bintang), telah membuat sedikit kemajuan di parlemen. Tetapi kampanye bekerja untuk memperkuat citra PPP sebagai basis pertahanan pro-syariah Islam. Konstituen PPP terutama terdiri dari masyarakat sayap konservatif NU dan Muhammadiyah, dan umat Muslim menunjukkan implementasi hukum Islam sebagai prioritas. Ketika PPP berupaya meningkatkan dan mengembangkan basis pemilihnya sejak jatuhnya kekuasaan Soeharto, partai ini mengalami guncangan di akhir tahun 2001 oleh pertempuran sengit antar faksi-faksi dan pembelotan beberapa tokohnya ke PPP Reformasi. Saat itu PPP Reformasi menjadi partai politik yang kurang efektif dan masa depannya tidak menjanjikan. PPP memiliki kader militan, dan memiliki wakil presiden.³¹

30 Woischnik, dan Müller, "Islamic Parties", h.65.

31 Robert W. Hefner, *Islam in Indonesia's Political Future* (Alexandria, Virginia: The CNA Corporation, 2002), h.30-31.

Kehadiran PPP di pentas politik nasional pada tahun 1973 adalah berdasarkan pada kebijakan pemerintah kala itu yang melakukan penyederhanaan partai melalui fusi. Untuk merepresentasikan identitas keislamannya, PPP menggunakan lambang Ka'bah sebagai lambang partai. PPP kemudian menjadi satu-satunya partai yang berazaskan Islam dan menjadi pilihan umat Islam melabuhkan aspirasinya. Namun Pemilu yang berjalan di bawah tekanan pemerintahan Orde Baru tidak memungkinkan suara Islam sebagai aspirasi umat Islam mengungguli suara Golkar sebagai partai penguasa.

Kecenderungan suara umat Islam ini kemudian dipandang sebagai gelagat yang tidak menguntungkan penguasa Orde Baru sehingga dikeluarkanlah kebijakan baru menyangkut kepartaian. Identitas keislaman PPP kembali direduksi oleh pemerintah berkuasa pada masa itu melalui larangan partai politik menggunakan azas Islam dan mengganti lambang partai menjadi Bintang. Hasilnya memang cukup efektif karena pemungutan suara pada yang diikuti 93.737.633 pemilih (suara sah mencapai 85.869.816/91,32 persen) PPP kehilangan 33 kursi dibandingkan Pemilu 1982 sebelumnya, sehingga hanya mendapat 61 kursi. Namun setelah tumbangnya Orde Baru, PPP kembali menggunakan lambang Ka'bah sebagai lambang partai. Secara resmi penggantian lambang partai tersebut dilakukan melalui Mukhtar VII Partai Persatuan Pembangunan di Bandung, 3-6 Juli 2011. Sesuai dengan Anggaran Dasar PPP yang dihasilkan Mukhtar Pasal 4 PPP memuat prinsip-prinsip perjuangan partai tersebut yakni:³²

- a. Prinsip ibadah;
- b. Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*;
- c. Prinsip kebenaran, kejujuran, dan keadilan;
- d. Prinsip musyawarah;
- e. Prinsip persamaan, kebersamaan, dan persatuan;
- f. Prinsip istiqamah.

32 *Rumah Besar Umat Islam*; Ketetapan Mukhtar VII Partai Persatuan Pembangunan tentang Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015, h.4-6.

Pada Pasal 5, tujuan PPP adalah terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera lahir-batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah *Subhanahu Wata'ala*. Pasal 6 menyebutkan;

(1) Untuk mencapai tujuan, PPP berkhidmat untuk berjuang:

- a. mewujudkan serta membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah *Subhanahu Wata'ala*, meningkatkan mutu kehidupan beragama, serta mengembangkan *ukhuwah Islamiyah*. Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/ leninisme, sekularisme, dan pendangkalan agama;
- b. menegakkan hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memerhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan *ukhuwah insaniyah*. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, liberalisme, paham yang melecehkan martabat manusia, proses dehumanisasi, diskriminasi, dan budaya kekerasan;
- c. memelihara rasa aman, mempertahankan, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathaniyah*. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan, dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika;
- d. melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang menzalimi rakyat;
- e. mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridai oleh Allah *Subhanahu Wata'ala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial,

kesenjangan pendidikan, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan;

Jika dilihat begitu konsistennya PPP membawa simbol-simbol Islam dalam partainya, maka akan terlihat secara jelas bahwa partai ini memiliki kekentalan keislaman dalam identitasnya. Apalagi secara *de jure* partai ini berazaskan Islam dan memiliki tujuan untuk mendorong terciptanya iklim yang sebaik-baiknya bagi terlaksananya kegiatan peribadatan menurut syariat Islam, sebagaimana tercantum di dalam pasal 4 angka (1) huruf b di atas. Ini menunjukkan bahwa di dalam tubuh PPP ada tuntutan ajaran Islam menjiwai sikap dan perilaku partai pada aplikasinya dalam sistem politik di Indonesia.

Keberadaan PKS dan PPP ini menunjukkan betapa Islam telah hadir dalam perpolitikan bangsa Indonesia sejak demokrasi menjadi pilihan. Apalagi ketika memahami bahwa agama Islam adalah jalan hidup (*the way of life*) yang mesti terimplementasi dalam setiap bidang kehidupan pemeluknya. Namun kenyataan tidak proporsinya perwakilan umat Islam di legislatif dengan jumlah umat Islam menyiratkan adanya distorsi antara konsep partai politik Islam atau partai politik berbasis Islam dengan aplikasinya. Karena itu melalui penelitian ini penting dan menarik dikaji bagaimana interaksi antara partai politik Islam dengan umat Islam sebagai konstituen dalam masa kampanye di Pemilu 2014. Dengan melihat efektivitas komunikasi yang dilakukan, atau tercapainya kesamaan pesan antara komunikator dengan komunikan, dan komunikan mau melakukan apa yang diinginkan komunikator. Hal ini sesuai dengan tujuan asas komunikasi itu sendiri, yaitu terjadinya perubahan pendapat, sikap dan perilaku pada diri komunikan sesuai dengan yang diinginkan oleh komunikator.³³ Kajian ini menggunakan prinsip-prinsip komunikasi Islam sebagai kerangka acuan komunikasi partai politik Islam, yang mana dia adalah prinsip-prinsip berkomunikasi yang dijelaskan dalam Al-Qur'an

³³Syukur Kholil, "Komunikasi Efektif Pembimbing Manasik Haji: Tinjauan Dari Sudut Psikologi Komunikasi", *Analytica Islamica*, Vol.16, No.1, Mei 2014, h.2.

atau dengan kata lain suatu bentuk komunikasi yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sebagai sebuah partai yang mengusung simbol Islam, para elit partai politik Islam diasumsikan sebagai orang-orang yang sudah mengetahui bahkan mengenal dengan baik prinsip-prinsip komunikasi yang diajarkan dalam Islam. Namun untuk memberikan gambaran secara lebih utuh tentang hal tersebut, setidaknya ada tiga pertanyaan mendasar yang perlu mendapatkan jawaban yaitu bagaimanakah pemahaman para elit PKS dan PPP terhadap prinsip-prinsip komunikasi Islam, bagaimanakah para elit tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam komunikasi politiknya di kampanye Pemilu 2014, dan bagaimana strategi komunikasi kedua partai politik tersebut dalam kampanye Pemilu 2014.

Penelitian ini menggunakan teori atribusi (*Attribution Theory*) untuk menjelaskan bagaimana melakukan interpretasi terhadap efektivitas sebuah organisasi. Sedangkan untuk memberi perbandingan sekaligus memberi dukungan data penelitian, maka komunikasi politik bermedia PKS dan PPP akan diukur melalui pendekatan analisis isi yang bersifat deskriptif kuantitatif. Hal ini karena peran media dinilai sangat penting dalam konteks dakwah. Ciri media dipilih untuk meningkatkan dan mendorong terciptanya manusia *basyariah*, *insaniyah*, *ulil albab*, keluarga *sakinah*, *khairil ummah*, organisasi yang profesional, dan negara bangsa yang beradab dan *rahmatan lil'alam*.³⁴ Dakwah melalui media ini sebagai ikhtiar Muslim untuk membuat syariat Islam menjadi kenyataan dalam kehidupan *syakhsyah* (individu), *usrah* (keluarga), *jama'ah* (komunitas), dan *ummah* (khalayak) secara berjamaah sehingga terwujud khair al-ummah (umat terbaik) yang berkehidupan *hasanah* di dunia kini dan *hasanah* di akhirat kelak.³⁵ Dua surat kabar terbitan kota Medan yang dipilih dalam analisis isi ini adalah Harian *Waspada* dan Harian *Analisa*. Pilihan terhadap kedua surat kabar ini didasarkan pada pengaruh dan jumlah tiras, serta keragaman pembaca dari kedua surat kabar tersebut.

³⁴Armawati Arbi, *Psikologi Komunikasi dan Tabligh* (Jakarta: Amzah, 2012), h.219.

³⁵Syukri Sambas, *Komunikasi Penyiaran Islam: Mengembangkan Tabligh melalui Mimbar, Media Cetak, Radio, Televisi, Film, dan Media Digital* (Bandung: Benang Merah Pers, 2004), h.xiv.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, ada tiga pertanyaan utama yang menjadi fokus utama penelitian ini:

1. Bagaimanakah implementasi prinsip-prinsip komunikasi Islam oleh politik Islam untuk tujuan electoralnya dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014?
2. Bagaimanakah pemahaman para elit partai Islam tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam dalam dunia politik?
3. Bagaimanakah strategi komunikasi politik PKS dan PPP dalam Pemilu 2014 untuk tujuan elektoralnya. Apakah impelementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi Islam atau tidak.

C. Batasan Istilah

Untuk memberi pengertian yang lebih tegas dan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pemahaman dan penggunaan istilah serta untuk memberikan fokus pada penelitian ini, perlu dijelaskan batasan-batasan istilah yang digunakan. Batasan-batasan istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi; Merupakan pelaksanaan atau penerapan yang dalam penelitian ini adalah pelaksanaan atau penerapan prinsip-prinsip komunikasi Islam oleh partai politik Islam dalam Pemilu 2014.
2. Prinsip-prinsip Komunikasi Islam; Merupakan prinsip-prinsip dalam melakukan kegiatan komunikasi yang didasari oleh ajaran Islam yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Prinsip-prinsip komunikasi Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Qaulan Ma'rûfâ*(Q.S.al-Baqarah/2: 235 & 263; An-Nisâ/4: 5 & 8; Al-Ahzab/33: 32); *Qaulan Sadîdâ*(Q.S.An-Nisâ/4: 9; Al-Ahzab/33: 70); *Qaulan Layyinâ* (Q.S.Thaha/20: 44); *Qaulan Balîghâ* (Q.S.An-Nisâ/4: 63); *Qaulan Karîmâ* (Q.S.Al-Isrâ'/17: 23); *Qaulan Maysûra* (Q.S.Al-Isrâ'/17: 28). Dalam penelitian ini membatasi diri pada bagaimana partai politik Islam berinteraksi dengan menyampaikan pesan kepada khlayak dalam Pemilu Legislatif 2014.
3. Partai Politik Islam; Merupakan partai politik yang berasaskan Islam atau memiliki basis massa umat Islam. Penelitian ini tidak mengkhususkan pada partai politik yang memiliki azas Islam dalam Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangganya semata. Karena sangat sulit untuk menggolongkan partai yang tidak menggunakan azas Islam sebagai *platform*-nya namun kental berbasis massa umat Islam seperti PKS.

4. Tujuan Elektoral; Merupakan tujuan dalam Pemilu 2014 yakni memperoleh suara sebanyak-banyaknya dari khalayak pemilih di Indonesia.³⁶

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjawab pertanyaan tentang pemahaman para praktisi partai Islam tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam di dalam dunia politik. Untuk ini diperlukan mengeksplorasi prinsip-prinsip komunikasi Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan membandingkannya rumusan langkah-langkah penerjemahan prinsip-prinsip tersebut ke dalam dunia politik oleh para praktisi partai politik Islam. Dunia politik yang dimaksud adalah konteks demokrasi yang mensyaratkan partai politik berlabuh pada logika elektoral yang berlaku saat sekarang ini.³⁷ Melalui perspektif pendekatan tafsir, menjadi suatu hal

36 Penting untuk menjadi catatan bahwa sering terjadi "pertentangan" antara tujuan elektoral dengan tujuan idealisme partai Islam. Jika tujuan elektoral bertumpu pada sebanyak-banyaknya perolehan suara semata, maka pada tujuan idealisme partai Islam terikat prinsip-prinsip yang Islami. Burhanuddin Muhtadi memberi catatan pada apa yang disebutnya sebagai "Islam politik". Meminjam definisi Quintan Wiktorowicz yang menyebut "aktivisme Islam" adalah mobilisasi perjuangan dan gagasan untuk mendukung cita-cita kaum Muslim. Secara lebih jelas terlihat perbedaan antara "Islam politik" yang memiliki kekentalan unsur politik dengan "aktivisme Islam" yang merupakan usaha atau perjuangan untuk kepentingan umat Islam. Walaupun pada dasarnya definisi yang disampaikan Wiktorowicz ini secara kolektif memasukkan juga gerakan-gerakan dakwah, bahkan kelompok terorisme., namun ada kesamaan gerakan untuk perjuangan kepentingan Islam dalam terminologi "aktivisme Islam".

37 Logika elektoral yang dimaksud adalah keniscayaan demokrasi yang menitikberatkan pada perolehan suara terbanyak dalam Pemilu, yang pada praktiknya tak bisa menghindari pragmatisme politik yang pada akhirnya menimbulkan penyakit kronis yang sulit sembuh. Ini pula yang menyebabkan dunia politik lebih cenderung profan. Pada sisi lain Islam sebagai ajaran yang *kaffah* melingkupi berbagai bidang hidup tak terkecuali dunia politik. Oleh karenanya ajaran Islam dan dunia politik sering diasumsikan berhadap-hadapan karena titik tekanannya yang masing-masing berbeda. Jika politik menekankan pada kuantitas, maka Islam lebih menekankan pada kualitas (Lihat Q.S.Yunus: 99, yang artinya: *Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya*)

yang penting untuk digunakan sebagai pisau analisis untuk mendekati ayat-ayat yang berkenaan dengan prinsip-prinsip komunikasi Islam.

2. Tujuan yang kedua ini untuk menjawab rumusan masalah yang kedua tentang cara partai-partai politik Islam mengimplementasikan prinsip-prinsip komunikasi Islam tersebut dalam melancarkan komunikasi politiknya di Pemilu Legislatif 2014 sehingga diterima oleh khalayak yang menjadi bakal konstituen bagi PKS dan PPP?
3. Tujuan penelitian ketiga adalah mencaritau strategi komunikasi politik PKS dan PPP dalam Pemilu 2014 untuk tujuan elektoralnya. Apakah implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip komunikasi Islam atau tidak. Seperti dirumuskan oleh banyak penelitian, bahwa PKS adalah partai gerakan (*movement party*) sekaligus mengusung agenda-agenda Islamis dalam komunikasi politiknya. Sebaliknya PPP adalah partai struktural murni yang memiliki pemilih tradisional di beberapa basisnya. PPP juga mengusung agenda Islamis dalam komunikasi politiknya, yang semakin ramai terdengar terutama di saat-saat menjelang Pemilu. Studi ini akan meneliti komunikasi politik kedua partai Islam tersebut di Sumatera Utara, baik yang mengusung isu-isu Islamis maupun isu-isu non-Islamis baik melalui saluran media massa maupun dalam performa kampanyenya. Dalam hal ini penelitian akan meneliti berita-berita kampanye PKS dan PPP selama masa kampanye yang disiarkan dua surat kabar yakni Harian *Waspada* dan Harian *Analisa*. Pemilihan kedua surat kabar ini didasarkan pada besaran tiras di Sumatera Utara. Untuk itu pendekatan analisis *framing* digunakan untuk menganalisisnya. Sesuai keputusan Muktamar PPP di Bandung tahun 2011, partai ini mengusung tema “Rumah Besar Umat Islam” dalam kampanye 2014. Sedangkan PKS yang pada pemilu 2009 mengusung tema besar “Bersih Dan Lebih Peduli” tetapi karena beberapa batu sandungan karena terjerumusnya beberapa pengurusnya dalam kasus korupsi, partai ini mengusung tema berbeda dalam Pemilu 2014, yakni “Memperjuangkan Masyarakat Madani”. Sejauh mana tema besar itu senafas dengan kampanye 2014, kiranya teori

atribusi, *organizational behavior* dan *Strategic Communications Planning* yang akan digunakan untuk menganalisisnya.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan sudut pandang ideal bahwa partai politik Islam merupakan representasi umat Islam bahkan ajaran Islam. Islam dalam hal ini dipandang sebagai ideologi politik yang memiliki seperangkat aturan dalam tatanan perpolitikan. Namun kenyataannya ketika partai politik memasuki panggung politik, berbagai dinamika yang terjadi dan berbagai kepentingan termasuk kepentingan politik itu sendiri telah memengaruhi perilaku politik partai politik Islam memiliki kecenderungan pragmatis dan transaksional ketimbang perjuangan cita-cita Islam di ranah politik. Studi Bernhard Platdash misalnya, menyimpulkan bahwa pragmatisme partai-partai Islam masih dominan di antara tiga partai politik Islam yang menjadi objek studinya yakni Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan (PK).³⁸ Untuk itu, *pertama*, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemikiran akan rumusan aplikasi komunikasi Islam di tengah akselerasi partai politik Islam dalam Pemilu. Sebagai disiplin ilmu yang baru, pengkajian Komunikasi Islam dalam ranah politik masih terbilang sedikit dibanding dengan karya-karya ilmiah para sarjana yang membahas tentang partai Islam pada umumnya. Bahwa perkembangan politik Islam di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dapat dilihat dari sudut pandang komunikasi Islam, atau dari perbandingan antara rumusan prinsip-prinsip komunikasi Islam dengan aplikasinya oleh partai politik Islam.

Kedua, secara praktis diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi pertimbangan bagi partai politik dalam meluncurkan komunikasi politiknya. Pada kenyataannya partai-partai Islam, yang direfleksikan para kadernya dan para calon legislatif yang diusung partai politik Islam sering terlihat kehilangan orientasi keislamannya. Pada satu sisi kecenderungannya akan pragmatisme politik sedemikian kentalnya sehingga sering melakukan segala cara demi tujuan politiknya. Di sisi lain, meskipun memiliki komitmen pada nilai-nilai keislaman, namun sulitnya

38 Bernhard Platdash, "Religious Dogma, Pluralism and Pragmatism: Constitutional Islamism in Indonesian Politics (1998-2002)", disertasi Ph.D yang tidak terpublikasikan, RSPAS, ANU, 2005, dalam Muhtadi, h.9.

ditemui *pattern* komunikasi politik Islam yang mesti dijalani. Tarikan kepentingan demokrasi ada kalanya bertemu dengan tarikan ajaran Islam hingga tak jarang menimbulkan kegamangan partai politik Islam, yang berujung pada sikap pragmatis. Padahal, partai politik Islam dengan ajaran Islam, sebagaimana umat Islam dengan ajaran Islam diidentifikasi sebagai satu kesatuan dalam satu tarikan nafas.

Ketiga, secara akademis, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan bagi perkembangan disiplin ilmu komunikasi Islam, khususnya dalam aplikasinya di dunia perpolitikan daerah maupun nasional. Selain itu diharapkan pula menjadi masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengambil tema komunikasi Islam dan politik.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

Untuk mengemukakan adanya kebutuhan akan teori adalah suatu hal; sedangkan untuk mengetahui apa yang harus diperbuat untuk itu merupakan hal yang lain. Dalam membicarakan kebutuhan akan teori dalam bidang komunikasi manusia, hampir semua kritikus kelihatannya tidak memiliki ide yang jelas tentang apa yang membentuk tujuannya.³⁹ Dalam buku berjudul *Theories of Human Communication*, Stephen Little Jhon mengatakan bahwa secara umum teori pada dasarnya memiliki cara yang sama. *Pertama*, sebagai seperangkat abstraksi karenanya bukanlah mencakup semua yang dikonseptualisasikannya, ia parsial dan karenanya pula tak bakal ada teori tunggal soal kebenaran. *Kedua*, sebagai sebuah konstruk, teori adalah hasil bentukan manusia, bukan Tuhan. Ia menyediakan beragam cara mengamati lingkungan, tetapi dirinya bukanlah refleksi semua realitas.⁴⁰

Jika teori diartikan bukan sebagai suatu sistem pandangan yang mirip aturan hukum, melainkan sebagai sejumlah gagasan yang status dan asalnya bervariasi dan dapat dipakai untuk menjelaskan atau menafsirkan fenomena, maka kita akan dapat membedakan sekurang-kurangnya empat teori yang berkenaan dengan komunikasi massa.⁴¹ Teori jenis *pertama* yang biasanya dicakup dalam buku teks semacam ini adalah teori ilmu pengetahuan sosial, yakni pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan sifat dasar, cara kerja, dan pengaruh komunikasi massa, yang bersumber dari observasi sistematis yang sedapat mungkin diupayakan bersifat objektif. Juga

39 Aubrey Fisher, *Teori-teori Komunikasi* (Bandung: Rosdakarya, 1986), h.38.

40 Lihat lebih jauh Stephen W. Little Jhon, *Theories of Human Communication, 6th Edition* (California: Wadawort Publishing Company, 1999). Di buku ini Little Jhon juga mengutip Abraham Kaplan yang menyatakan bahwa pembentuk sebuah teori tidak sekedar menemukan fakta tersembunyi, karena teori juga adalah jalan atau cara yang mengorganisir dan merepresentasikannya.

41 Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar, Edisi Kedua* (Jakarta: Erlangga, 1989), h.4.

bersumber dari kenyataan tentang media. Teori jenis ini sering kali tergantung pada teori ilmu pengetahuan sosial lainnya.

Teori ragam *kedua* disebut teori normatif (cabang filsafat sosial) yang lebih berkenaan dengan masalah bagaimana seharusnya media berperan bilamana serangkaian nilai sosial ingin diterapkan dan dicapai sesuai dengan sifat dasar nilai-nilai sosial tersebut. Jenis teori ini penting karena ia memang berperan dalam pembentukan institusi media dan berpengaruh besar dalam menentukan sumbangsih media, sebagaimana yang diharapkan oleh publik media itu sendiri dan organisasi, serta para pelaksana organisasi sosial itu.

Jenis teori *ketiga* adalah yang sebagian bersifat normatif tetapi bersifat praktis juga. Jenis teori ini ditemukan dan dikembangkan oleh para pelaksana media itu sendiri. Ragam teori ini dapat disebut sebagai teori praktis, karena ia menyuguhkan penuntut tentang tujuan media, cara kerja yang seharusnya diterapkan agar dapat seirama dengan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan sosial yang sifatnya lebih abstrak, dan cara-cara pencapaian beberapa sasaran tertentu. Teori-teori tersebut bersifat praktis karena ia membantu dalam menemukan jawaban dari pertanyaan, misalnya “Apakah yang dapat menyenangkan publik?”, “Apakah yang dapat membuahkan hasil?”, “Berita apakah yang berharga?” Permasalahan-permasalahan tersebut mungkin tidak dipersoalkan secara sadar, namun merupakan suatu hal yang tidak dapat diabaikan. Untuk itulah kemudian kita menemukan teori Atribusi (*Attribution Theory*) yang mencoba menjelaskan tentang perilaku individu dalam masyarakat.

Selain itu, yang *keempat* ada juga seperangkat pengetahuan yang kurang tepat disebut sebagai teori. Meski demikian sifatnya tetap saja berpengaruh bahkan sering ditemukan dalam penelitian komunikasi. Barangkali kita dapat menyebutnya *common senses* yang merupakan pengetahuan atau gagasan yang dimiliki orang dengan berdasarkan pengalaman empirik atau datang dengan sendirinya dalam benaknya begitu saja. Selanjutnya apa yang coba dijelaskan melalui pendekatan teori komunikasi yang akan dipaparkan di bawah ini adalah ketidakproporsinya perwakilan umat Islam melalui partai politik Islam dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dari Pemilu ke Pemilu tidak menunjukkan proporsi yang sepadan.

Pada Pemilu tahun 2009 ini, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa partai peserta Pemilu harus mencapai *Parliamentary*

Threshold (PT) yaitu ambang batas minimal perolehan suara partai politik peserta Pemilu secara nasional sebesar 2,5 %. Hal ini berarti bahwa setiap partai politik peserta Pemilu akan tersingkir dengan sendirinya atau dengan kata lain tidak dapat mengikuti Pemilu berikutnya jika perolehan suaranya tidak mencapai ambang batas minimal 2,5 %.⁴² Selanjutnya ada sembilan Parpol yang lolos PT Pemilu 2009 dan kemudian secara otomatis menjadi peserta Pemilu 2014 ditambah Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sedangkan tiga lagi merupakan partai lokal di Aceh yakni Partai Damai Aceh (PDA), Partai Nasional Aceh (PNA), Partai Aceh (PA). Partai lokal Aceh ini tidak dipilih secara nasional, namun hanya mengikuti Pemilu untuk Provisi Aceh.

TABEL 1:

**Partai Politik Lolos Parliamentary Threshold dan Perolehan Kursi DPR
Pemilu Legislatif 2009**

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Parlemen	
			Perhitungan I	Revisi
	Demokrat	20,85%	148	150
	Golkar	14,45%	108	107
	PDIP	14,03%	93	95
	PKS	7,88%	59	57
	PAN	6,01%	42	43
	PPP	5,32%	39	37
	PKB	4,94%	26	27
	Gerindra	4,46%	30	26
	Hanura	3,77%	15	18
	Jumlah	100%	560	560

Sumber: KPU.go.id

⁴² Muhammad Yahya Selma, "Perjalanan Panjang Pemilu Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Muhammadiyah Palembang*, Volume I Nomor 1, Juni 2009, h.10.

A. Implementasi Prinsip-prinsip Komunikasi Islam

Sebelum memasuki pembahasan tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam, secara umum komunikasi yang sering diperbincangkan para pakar, dapat disebutkan setidaknya ada tiga kerangka pemahaman komunikasi, yaitu;⁴³

1. Komunikasi sebagai tindakan satu arah. Komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan searah dari seseorang atau lembaga kepada seseorang atau kelompok lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemahaman komunikasi sebagai suatu proses satu arah ini oleh Michael Burgoon disebut sebagai “definisi berorientasi sumber” (*source-oriented definition*).

2. Komunikasi sebagai interaksi. Komunikasi dipahami sebagai proses aksi-reaksi, sebab-akibat, yang arahnya bergantian. Komunikasi interaksi dipandang lebih dinamis dari pada komunikasi satu arah. Unsur penting dalam komunikasi interaksi adalah *feedback* (umpan balik).

3. Komunikasi sebagai transaksi. Komunikasi dipahami sebagai kegiatan menafsirkan perilaku orang lain. Ada proses *encoding* dan *decoding* pesan verbal maupun nonverbal. Semakin banyak peserta komunikasi maka transaksi yang terjadi akan semakin rumit. Kelebihan konsep ini adalah komunikasi dipahami sebagai konsep yang tidak membatasi pada komunikasi yang disengaja saja. Pemahaman ini mirip dengan “definisi berorientasi penerima” (*receiver-oriented definition*), yaitu menekankan pada variabel-variabel yang berbeda yaitu penerima dan makna pesan bagi penerima. Penerimaan pesan di sini bersifat dua arah.

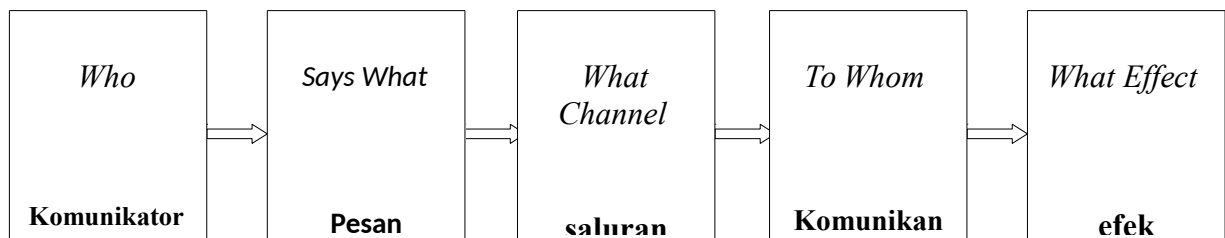
Sedangkan Al-Qur'an menyebut bahwa komunikasi adalah salah satu fitrah manusia. Al-Qur'an juga memberikan beberapa kata kunci (*keyconcept*) yang

⁴³ Tiga kerangka pemahaman komunikasi yang dipaparkan ini mengutip pendapat John R. Wenburg dan William W. Wilmot juga Kenneth K. Sereno dan Edward M. Bodaken. Lihat lebih jauh Islami, Dian Ismi, “Konsep Komunikasi Islam Dalam Sudut Pandang Formula Komunikasi”, *Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)*, *Jurnal Wacana Volume XII No.1*, Februari 2013, h.41-42.

menuntun manusia berkomunikasi tidak saja dengan baik dan benar, tetapi juga agar mendapat ridha Allah SWT. Ada beberapa kata kunci yang dilansir Al-Qur'an dalam komunikasi yang kemudian menjadi prinsip dalam melancarkan komunikasi berdasarkan ajaran Islam yang kita sebut prinsip-prinsip komunikasi Islam.

Pada hakikatnya komunikasi meliputi unsur-unsur komunikator sebagai penyampai pesan, komunikan sebagai penerima pesan, pesan itu sendiri sebagai sesuatu yang disampaikan baik berupa lambang dan gambar serta suara, *channel* sebagai alat penyampai pesan, serta *feedback* atau umpan balik yang diharapkan muncul sebagai efek dari pesan yang disampaikan tersebut. Beberapa pakar menyimpulkan unsur-unsur komunikasi yang sama, dan model komunikasi Harold D.Lasswell kiranya memainkan peran untuk menjelaskan tentang proses komunikasi komunikasi yang berlangsung. Formulanya yang menyebutkan *Who* (komunikator) *says what* (pesan) *in what channel* (saluran) *to whom* (komunikan) *with what effect* (efek)?⁴⁴ Lebih jelasnya, komunikasi dapat dilihat dari gambar sebagai berikut:

Gambar 1: Formula Laswell



Al-Qur'an ketika berbicara tentang komunikasi, pada dasarnya juga telah memuat unsur-unsur komunikasi tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam proses komunikasi. Dari enam prinsip komunikasi yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang diteliti dalam penelitian ini, telah merangkum satu per satu unsur-unsur tersebut dari mulai siapa yang berbicara, apa yang disampaikan, kepada siapa, dengan apa, dan efek apa yang akan terjadi dari komunikasi yang dilancarkan tersebut.

44 Harold D.Lasswell, dalam L. Bryson, Ed., *Communication of ideas* (New York: Harper & Row, 1948), h.37-51.

1. Qaulan Ma'rûfâ

وَمِنْ جَمِيعِ سِيَمٍ حَيْثُمَا حَرَصْتُمْ بِهِ مِنْ حَبِيبٍ أَوْ إِسَاءٍ أَوْ كَسَمٍ
فِي أَنْفُسِكُمْ عَلَّمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ
سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ
حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang baik. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S.Al-Baqarah/2: 235)

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا إِذَى وَاللَّهُ عَنِّي

كَا

Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (Q.S.Al-Baqarah/2: 263)

وَلَا تُولُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

أَمْوَالَكُمْ

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Q.S.An-Nisâ/4: 5)

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ

فَلْيُقِمْ لَهُمْ مِنْهُمُ الْقِسْمَةَ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (Q.S.An-Nisâ/4: 8)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنْ اتَّقَيْتَ فَلَا تَخْضَعْنَ

بِأَقْلَامِكُنَّ، فَطَمَعُ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقَدْ خَلَّأَ مَعَهُ فَكَا

Artinya: Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. (Q.S.Al-Ahzab/33: 32)

Unsur-unsur komunikasi dalam ayat-ayat yang disebutkan di atas antara lain adalah:

Komunikator; Dalam QS.Al-Baqarah/2: 263 disebutkan komunikator atau penyampai pesan adalah orang yang memberikan sesuatu pemberian kepada orang lain. Dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat, orang yang memberikan sesuatu pemberian (sedekah) biasanya adalah orang yang berada dalam posisi yang lebih baik ketimbang orang yang menerima pemberian. Sayyid Qutbh mengatakan sedekah itu bukan suatu kelebihan bagi si pemberi atas si penerima, melainkan sebagai pinjaman kepunyaan Allah.⁴⁵ Selanjutnya dalam QS. Al-Baqarah/2: 235 disebutkan komunikator adalah pihak yang akan melamar perempuan, yakni laki-laki terhadap perempuan, atau pihak yang memiliki maksud dan keinginan dalam hatinya terhadap pihak lain. Komunikator dilarang untuk mengadakan janji secara rahasia kepada penerima pesan (komunikan), kecuali sekedar perkataan yang baik (*ma'ruf*). Sayyid Qutbh mengatakan komunikator adalah orang yang diperbolehkan memendam rasa

45 Sayyid Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.362

cinta (keinginan) dalam hati yang tidak dinyatakan secara transparan ataupun dengan sindiran, karena Allah mengetahui bahwa kecintaan ini tidak dapat dikuasai oleh manusia.⁴⁶ Sedangkan Quraish Shihab menyebut komunikator dalam ayat ini adalah pria yang ingin kawin dengan sindiran kepada wanita-wanita yang telah bercerai meski masih dalam masa *iddah* dengan suaminya secara *ba'in* yakni telah putus hak bekas suaminya untuk rujuk kecuali dengan akad nikah baru sesuai syarat-syaratnya. Namun dilarang baik sindiran maupun terang-terangan meminang wanita yang status perceraianya *raj'iy* atau yang masih dapat rujuk dengan suaminya.⁴⁷ Ini bermakna bahwa maksud meminang wanita bercerai mesti memerhatikan status sang wanita. Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang firman Allah SWT pada Q.S.An-Nisâ/4: 5, ia berkata mereka (belum sempurna akalnya) adalah anak-anakmu dan kaum wanita. Begitu pula yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud.⁴⁸ Ini bermakna bahwa komunikator yang dimaksud dalam ayat ini adalah orangtua laki-laki dalam sebuah keluarga. Dalam QS. An-Nisâ/4: 8 komunikator adalah pihak yang membagikan harta warisan. Quraish Shihab menulis ayat ini ditujukan kepada yang berada di sekeliling seorang yang sakit dan diduga segera akan meninggal. Pendapat ini adalah pilihan banyak pakar tafsir, seperti Ath-Thabari, Fakhruddin ar-Râzi, dan lain-lain. Ada juga yang memahaminya sebagai ditujukan kepada mereka yang menjadi wali anak-anak yatim agar memperlakukan anak-anak yatim itu seperti perlakuan yang mereka harapkan kepada anak-anaknya yang lemah bila kelak wali itu meninggal dunia. Mengutip Muhammad Sayyid Thanthâwi, Quraish Shihab menulis ayat di atas ditujukan kepada semua pihak, siapapun, karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang benar dan tepat, dan semua khawatir

⁴⁶ *Ibid*, h.304

⁴⁷ *Ibid*, M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol.10 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.616

⁴⁸ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2 Cet.6* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2013), h.299

akan mengalami apa yang digambarkan di atas.⁴⁹ Sedangkan QS.Al Ahzab/ 33/32 yang menjadi komunikator adalah istri-istri Nabi. Dari kelima ayat yang berbicara tentang perkataan yang baik dapat dikelompokkan sebagai berikut: Dalam Q.S.Al-Baqarah/2: 235 komunikasi yang berlangsung adalah antara pria (komunikator) dengan perempuan (komunikan); dalam Q.S.Al-Baqarah/2: 263 antara pemberi (komunikator) dengan penerima pemberian (komunikan); dalam Q.S.An-Nisâ/4: 5 antara orang yang sempurna akalnya atau pihak yang menguasai (komunikator) dengan pihak yang belum sempurna akalnya atau pihak yang dalam penguasaan (komunikan); dalam Q.S.An-Nisâ/4: 8 antara orang yang membagikan harta warisan (komunikator) dengan kerabat, anak yatim dan orang miskin (komunikan); dalam Q.S.Al-Ahzab/33: 32 antara istri-istri Nabi atau para perempuan dengan orang yang ada keinginan dalam hatinya. Dari kelima ayat ini terlihat bahwa perkataan yang baik disampaikan dari komunikator yang memiliki derajat sosial dan derajat moral yang lebih tinggi dari komunikan.

Pesan; Sedangkan pesan yang disampaikan dalam QS.Al-Baqarah/2: 263 adalah pesan yang merupakan perkataan yang baik (*ma'rûf*) dan do'a bagi orang Muslim.⁵⁰ Perkataan yang baik juga perkataan yang dapat membalut luka di hati dan mengisinya dengan kerelaan dan kesenangan.⁵¹ Sementara *qaulan ma'rûfân* dalam QS.Al-Baqarah/2: 235 adalah tidak mungkar dan tidak jorok, serta tidak melampaui batas-batas yang telah dijelaskan Allah secara halus (yakni tidak mengadakan janji menikah diam-diam sebelum habis masa *iddah* seorang wanita yang ditinggal suaminya).⁵² Beberapa ulama Salaf dan para imam, berkenaan dengan masalah meminang wanita dengan sindiran (tanpa terang-terangan), mereka mengatakan dibolehkan melamar wanita yang ditinggal mati suaminya secara sindiran (tidak terus

⁴⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.2, h.426.

⁵⁰ Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu, Jilid 1*, h.672.

⁵¹ Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h.362.

⁵² *Ibid*, h.304.

terang). Pesan dari komunikator yang memiliki keinginan hati kepada komunikan disampaikan dalam bentuk sindiran atau tidak secara terang-terangan. Sedangkan Mujahid berkata mengenai QS. An Nisaa'/4: 5 "Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." Yaitu kebaikan dan silaturahmi.⁵³ Quraish Shihab menulis *qaulan Ma'rûfân* dalam QS. An Nisaa'/4: 8 yakni kalimat-kalimat yang baik sesuai dengan kebiasaan dalam masing-masing masyarakat, selama kalimat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai *Ilahiyah*. Ayat ini mengamanahkan agar pesan hendaknya disampaikan dalam bahasa yang sesuai dengan adat kebiasaan yang baik menurut ukuran setiap masyarakat.⁵⁴ Sedangkan dalam QS. Al Ahzab/33: 32 yang dimaksud adalah melembutkan kata-kata jika berbicara dengan laki-laki, *sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu niat busuk. Dan ucapkanlah perkataan yang baik*, Ibnu Zaid berkata: Kata-kata yang baik, bagus dan *ma'ruf* dalam kebaikan. Makna ini adalah bahwa wanita berbicara kepada kaum pria dengan kata-kata yang tidak mengandung kelembutan. Artinya, janganlah seorang wanita berbicara dengan kaum pria seperti berbicara dengan suaminya.⁵⁵ Quraish Shihab menulis, ucapkanlah perkataan yang baik dan dengan cara wajar, tidak dibuat-buat.⁵⁶

Saluran; Perihal saluran yang digunakan dalam ayat ini adalah saluran komunikasi interpersonal dengan *face-to face communication* atau komunikasi tatap muka secara langsung. Namun hal yang menjadi substansi dari ayat ini adalah posisi komunikator sebagai pemberi dan komunikan sebagai penerima pemberian dan perkataan yang baik serta pemberian maaf dari komunikator. Ayat ini menerangkan pola perkataan yang baik, sehingga ia akan aplikatif digunakan melalui saluran komunikasi yang lain seperti komunikasi kepada khalayak dalam kelompok besar

53 Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Jilid 2*, h.300.

54 Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h.427.

55 Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu, Jilid 7*, h.348

56 Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.10 h.462

atau komunikasi dengan menggunakan media atau yang komunikasi bermedia (komunikasi massa).

Komunikan; Komunikan atau penerima pesan dalam ayat ini adalah orang yang menerima suatu pemberian (sedekah) dari komunikator. Komunikan adalah orang yang akan tersakiti perasaannya apabila si pemberi atau komunikator mengiringi pemberiannya dengan kata-kata yang tidak baik, dan tidak memberikan maaf. Sayyid Qutbh ketika menafsirkan QS.Surah Al Baqarah/2: 235 komunikan adalah wanita yang ditinggal suaminya yang ketika habis masa *iddah*-nya dia memiliki kebebasan mutlak untuk menempuh jalan hidup yang mulia dalam batas-batas kepatutan sesuai dengan Sunnah Allah dan syariat-Nya. Dia boleh mengenakan perhiasannya yang mubah sebagaimana layaknya seorang Muslimah. Dia boleh menerima pinangan laki-laki yang hendak meminangnya. Dia boleh kawin dengan siapa saja yang disukainya. Dia tidak boleh dihalang-halangi haknya oleh tradisi yang telah usang ataupun kebenaran palsu. Tidak ada pengawas baginya kecuali Allah.⁵⁷

Efek; Ketika menafsirkan QS.Al Baqarah/2:263, Sayyid Qutbh mengatakan perkataan yang baik dan rasa toleran lebih utama daripada sedekah seperti itu (menyakiti si penerima). Perkataan baik yang dapat membalut luka di hati dan mengisinya dengan kerelaan dan kesenangan. Pemberian maaf dapat mencuci dendam dan kebencian dalam jiwa, dan menggantinya dengan persaudaraan dan persahabatan. Maka, perkataan yang baik dan pemberian maaf dalam kondisi seperti itu akan dapat menunaikan fungsi utama sedekah, yaitu membersihkan hati dan menjinakkan jiwa.⁵⁸

Alur unsur-unsur komunikasi seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an Surah Al Baqarah/2: 235 dan 263, an-Nisa/4: 5 dan 8, dan surah Al Ahzab/33: 32 dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵⁷ Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h.303

⁵⁸ *Ibid*, h.362

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir atas (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.S. an-Nisa'/4: 9)

هَيُّواْ لِلّٰهِ وَاِلٰى اٰلِهٖكُمْ خُشُوْاْ ۖ وَبِقَوْلِهٖ سَبِّحُوْا ۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. (Q.S. al-Ahzab/33: 70)

Prinsip berbicara dengan benar di dalam Islam diberitakan ketika Al-Qur'an berbicara tentang keturunan yang lemah (QS.4:9) dan ketika menyeru kepada orang-orang beriman (QS.33: 70). Kedua ayat ini juga memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa sebelum menggandengkannya dengan perintah berkata benar (*qaulan sadidâ*). Unsur-unsur komunikasi yang dimuat kedua ayat ini yakni:

Komunikator; Komunikator dalam kedua ayat ini adalah orang-orang beriman yang diseru kepada takwa atau derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Sayyid Qutbh menafsirkan komunikator ayat ini (QS.4: 9) adalah para orang tua. Tulis Sayyid Qutbh, bahwa sentuhan pertama ayat ini untuk menyentuh lubuk hati, hati orang-orang tua yang amat sensitif terhadap anak-anak yang masih kecil.⁵⁹ Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Katsir mempertegas bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang meninggal, kemudian seseorang mendengar ia memberikan wasiat yang membahayakan ahli warisnya, maka Allah SWT memerintahkan orang yang mendengar tersebut untuk bertakwa kepada Allah serta membimbing dan mengarahkannya (anak yang ditinggal orangtuanya tersebut) pada kebenaran.⁶⁰ Dengan kata lain, komunikator adalah orang yang sudah dewasa yang akal nya sudah terbentuk dengan sempurna.

⁵⁹ Ibid, h.287.

⁶⁰ Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu, Jilid 2*, h.307.

Pesan; Pesan yang disampaikan dalam ayat ini adalah perkataan yang benar (*qaulan Sadîdâ*). Sayyid Qutbh menyebutkan: Al-Qur'an mengarahkan orang-orang yang beriman agar berkata benar, jelas, dan terperinci, mengetahui sasaran dan arahnya, sebelum mereka mengikuti dan bergaul dengan orang-orang munafik dan para tukang penyebar fitnah. Al-Qur'an mengarahkan orang-orang yang beriman agar berkata benar dan saleh yang dapat menuntun kepada amal saleh pula. Karena Allah pasti menjaga orang-orang yang benar, menuntun langkah-langkah mereka, dan memperbaiki amal-amal mereka sebagai balasan atas kebenaran dan kejujuran mereka.⁶¹ Perkataan yang benar juga merupakan perkataan yang lurus, tidak bengkok dan tidak menyimpang. Allah menjanjikan mereka, jika melakukan demikian, Allah akan membalas mereka dengan diperbaikinya amal-amal mereka, yaitu dengan diberi taufiq untuk beramal salih, diampuni dosa-dosanya yang lain, serta apa yang akan terjadi pada mereka di masa yang akan datang.⁶² Quraish Shihab ketika menafsirkan QS.An Nisaa'/4: 9 menulis, kata *sadîdân* terdiri dari huruf *sîn* dan *dâl* yang menurut pakar bahasa Ibn Faris, menunjuk kepada makna *meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya*. Ia juga berarti *istiqâmah/konsistensi*. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk kepada sasaran. Seorang yang menyampaikan sesuatu ucapan yang benar dan mengena tepat pada sasarannya dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian, kata *Sadîdâ* tidak sekedar benar, tetapi juga harus berarti *tepat sasaran*. Dalam konteks ayat ini anak yatim hakikatnya berbeda dengan anak kandung, dan ini menjadikan mereka lebih peka, sehingga membutuhkan perlakuan lebih hati-hati dan kalimat-kalimat yang lebih terpilih, bukan saja kandungannya benar tetapi juga yang tepat. Kalau kita memberi informasi atau menegur, jangan sampai menimbulkan kekeruhan dalam hati mereka, tetapi teguran hendaknya meluruskan kesalahan sekaligus membina mereka. Pesan ayat ini berlaku umum sehingga pesan-pesan agama pun, jika bukan pada tempatnya, tidak diperkenankan untuk disampaikan.

⁶¹ Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 9, h.294.

⁶² Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu*, Jilid 7, h.430.

Ucapan yang meruntuhkan harus dalam saat yang sama memperbaiki dalam arti kritik membangun atau informasi yang mendidik.⁶³

Saluran; Saluran dalam menyampaikan pesan pada ayat ini adalah komunikasi interpersonal *face to face communication* atau komunikasi tatap wajah secara langsung. Namun esensi dari komunikasi yang disampaikan ada pada caranya. Karenanya komunikasi dengan menggunakan saluran lain lainnya seperti komunikasi bermedia, atau komunikasi dengan jumlah massa yang besar menjadi relevan untuk dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana menyampaikan pesan kepada yang benar kepada anak yatim.

Komunikan; Komunikan dalam ayat-ayat tersebut di atas adalah anak-anak yang ditinggal orangtuanya. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, komunikan dalam QS.4: 9 adalah ahli waris yang menerima wasiat seperti halnya Sayyid Qutbh yang menyebut anak-anak yatim. Sedangkan ketika menafsirkan QS.33: 70, tafsir Ibnu Katsir tidak menyebut secara spesifik komunikan penerima pesan, seperti halnya redaksi ayat dimaksud. Sementara Sayyid Qutbh menyebut orang munafik dan tukang penyebar fitnah sebagai komunikan.⁶⁴ Hal ini bisa bermakna bahwa pesan perkataan yang benar adalah perkataan yang secara khusus kepada anak-anak (yatim) dan secara umum kepada manusia keseluruhan.

Efek; Efek yang disebutkan dalam ayat ini ketika berbicara dengan perkataan yang benar adalah menjadikan anak-anak tidak lemah (terpelihara). Sayyid Qutbh menafsirkan QS. 4: 9 mengatakan ... mengucapkan perkataan yang baik kepada anak-anak yang mereka didik dan mereka pelihara itu, sebagaimana mereka memelihara harta mereka.⁶⁵ Quraish Shihab menulis, ayat ini dijadikan juga oleh sementara ulama sebagai bukti adanya dampak negatif dari perlakuan kepada anak

⁶³ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.2, h.426-427

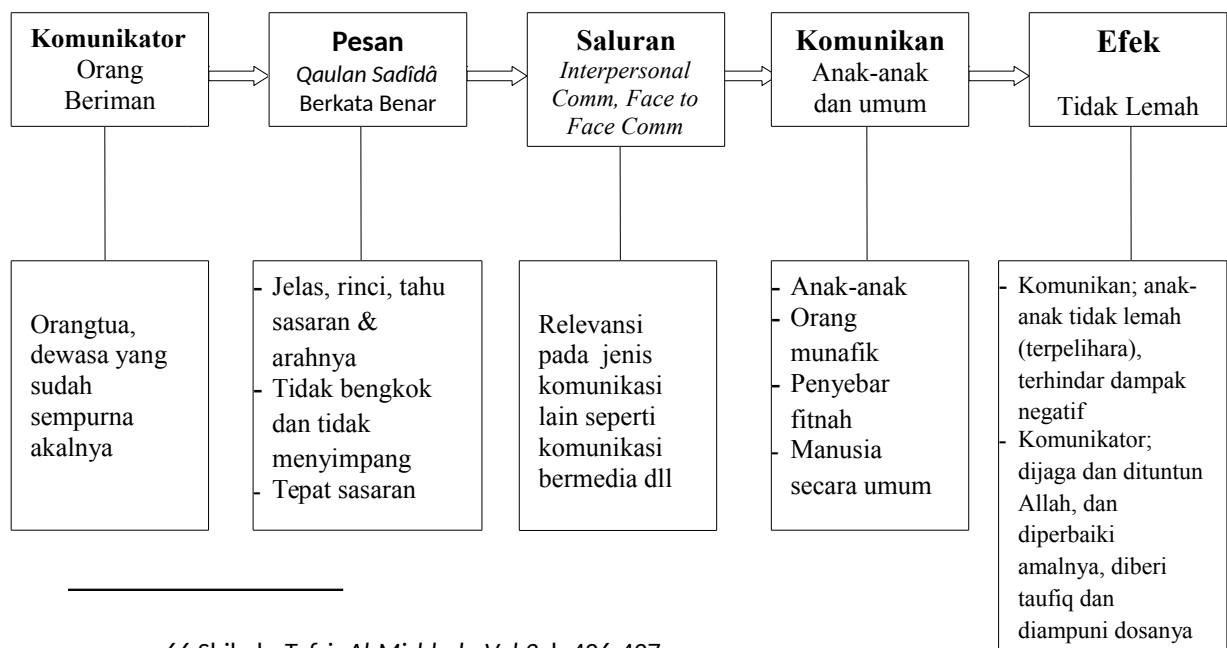
⁶⁴ Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.

⁶⁵ *Ibid*, Jilid 2, h.287.

yatim.⁶⁶ Sedangkan di QS.33: 70 Sayyid Qutbh menyebut bahwa mereka yang berkata benar akan dituntun kepada amal saleh pula, karena Allah pasti menjaga orang-orang yang benar dan menuntun langkah mereka, dan memperbaiki amal-amal mereka sebagai balasan atas kebenaran dan kejujuran mereka. Seperti halnya Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan Allah menjanjikan mereka, jika mereka melakukan demikian (berkata benar), Allah akan membalas mereka dengan memperbaiki amal-amal mereka, yaitu dengan diberinya taufiq untuk beramal salih. Diampuni dosa-dosanya yang lalu, serta apa yang akan terjadi pada mereka di masa yang akan datang. Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa perkataan yang benar tidak saja dapat berefek pada komunikan yang merupakan anak-anak menjadi kuat (tidak lemah dan terpelihara), namun juga berdampak berefek pada komunikator, dengan efek yang baik.

Alur unsur-unsur komunikasi seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an Surah An-Nisâ'/4: 9 dan surah Al Ahzab/33: 70 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3: Alur Prinsip Komunikasi *Qaulan Sadîdâ*



66 Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.2, h.426-427.

3. *Qaulan Layyinâ*

Prinsip berbicara lemah lembut (*qaulan layyinâ*) dikabarkan dalam Al-Qur'an ketika memerintahkan Nabi Musa as untuk menghadapi Fir'aun, agar menasehati dan mendakwahnya agar ia kembali ke jalan Allah SWT.

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

فَقُلْ لِّمَاذَا تَعْبُدُونَ إِلَّا لِلَّهِ يَكْفُرُ بِالْعُلَافِ

Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas; maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut.(Q.S. Thaha: 43-44)

Ayat ini memuat beberapa unsur komunikasi juga karakteristik komunikan sebagai penerima pesan serta cara menyampaikan dan efek yang akan terjadi dengan pesan yang disampaikan tersebut.

Komunikator; Komunikator dalam ayat ini adalah Nabi Musa as dan Nabi Harun as atau orang yang menyampaikan pesan dakwah. Dalam kedudukannya di hadapan Allah SWT, Nabi Musa as adalah seorang yang mulia dan memiliki tugas sebagai penyampai pesan keilahiyah. Namun dalam hubungan hirarki sosial yang berlangsung saat itu, Nabi Musa as dan Nabi Harun as berada di bawah kedudukan Firaun yang merupakan seorang raja yang berkuasa.

Pesan; Sedangkan pesan yang disampaikan adalah pesan yang lemah lembut (*Layyinâ*). Sayyid Qutbh menafsirkan bahwa kata-kata lembut tidak akan membuat orang bangga dengan dosanya, tidak membangkitkan kesombongan palsu yang menggelora di dada para tiran. Kata-kata lembut berfungsi untuk menghidupkan hati sehingga ia menjadi sadar dan takut akan dampak tirani mereka.⁶⁷ Sedangkan dalam

67 Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 7, h.404.

tafsir Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa seruan lemah lembut agar bisa menyentuh jiwa lebih mendalam, dan mengenai sasaran.⁶⁸ Firman-Nya *fa qûlâ lahû qaulan layyinâ/maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut* menjadi dasar tentang perlunya sikap bijaksana dalam berdakwah yang antara lain ditandai dengan ucapan-ucapan sopan yang tidak menyakitkan hati sasaran dakwah. Karena Fir'aun saja, yang demikian durhaka, masih juga harus dihadapi dengan lemah lembut. Memang, dakwah pada dasarnya adalah ajakan lemah lembut. Namun bukan berarti tidak boleh kritik, hanya saja harus disampaikan dengan tepat, bukan saja pada kandungannya tetapi juga waktu fsm dan tempatnya serta susunan kata-katanya, yakni tidak dengan memaki atau memojokkan,⁶⁹

Saluran; Saluran yang digunakan Nabi Musa as dan Nabi Harun as dalam menyampaikan pesan kepada Fir'aun melalui komunikasi kelompok dengan *face to face communication* atau komunikasi tatap wajah secara langsung. Tentu saja pada masa itu belum ada saluran komunikasi canggih seperti beragam media yang ada saat ini. Namun esensi dari komunikasi yang disampaikan Musa as ada pada caranya dan kepada siapa pesan itu disampaikan. Oleh karenanya komunikasi dengan menggunakan media lainnya seperti komunikasi massa menjadi relevan untuk dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana Musa menyampaikan pesan kepada Fira'un.

Komunikan; Komunikan atau penerima pesan dalam ayat ini adalah seorang yang memiliki kedudukan hirarki tinggi dalam strata sosial. Firaun sebagai sebagai simbol dari pemimpin zalim yang menjadi sasaran pesan-pesan komunikasi. Pada dasarnya seorang pemimpin akan selalu perlu untuk diingatkan karena dalam setiap singkap, langkah dan kebijakannya berpotensi salah atau menyimpang dari yang seharusnya. Kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan seorang pemimpin akan berdampak luas kepada orang banyak baik pihak-pihak yang berada dalam pengaruh kekuasaannya maupun pihak lain yang berada dalam posisi kemitraan dengan sangat

⁶⁸ Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu, Jilid 6*, h.21.

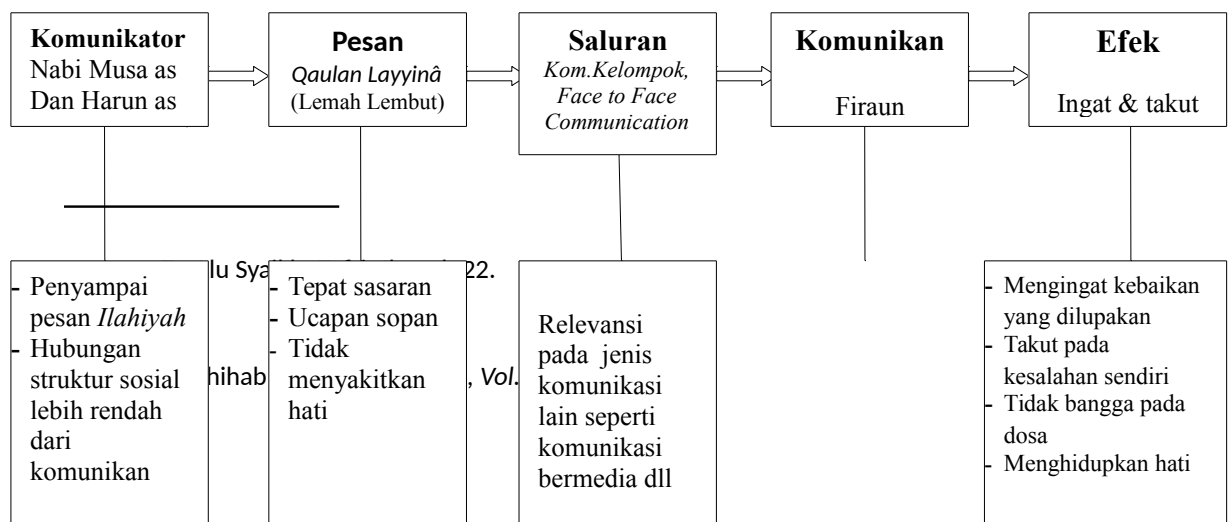
⁶⁹ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Vol.7*, h.594-595.

pemimpin. Pernyataan atau kebijakan seorang pemimpin akan selalu memiliki konsekuensi logis terhadap hubungannya dengan rakyatnya maupun dengan pihak lain yang berminat dengan pemimpin. Al-Qur'an berbicara tentang pembicaraan yang lemah lembut ketika mengingatkan atau mendakwahi seorang pemimpin, bukan dengan kata-kata yang tegas, ataupun tajam.

Efek; Ayat ini menyebutkan bahwa tujuan komunikasi yang lemah lembut kepada para pemimpin adalah agar mereka ingat atau agar mereka takut. Ini adalah efek yang dimunculkan ketika sebuah proses komunikasi berlangsung dengan seorang pemimpin sebagai komunikannya dan dengan isi pesan berupa mengingatkan dengan cara yang lemah lembut. Efek tersebut berupa meninggalkan kesesatan dan kehancuran yang digelutinya, atau dia takut, atau dia memperoleh ketaatan dari rasa takut kepada Rabb-nya. Mengingat di sini berarti berpaling dari larangan, sedangkan takut berarti tercapainya ketaatan.⁷⁰ Atau dengan kata lain kata-kata yang disampaikan dengan lemah lembut akan membuat penerima pesan akan mengingat sesuatu kebaikan yang telah mereka lupakan atau rasa ketakutan karena kesalahan yang telah mereka lakukan. Quraish Shihab menulis, peringkat *zikir* (mengingat) Allah merupakan peringkat yang lebih tinggi daripada peringkat *takut*. Ini karena kekaguman menghasilkan cinta dan cinta memberi tanpa batas serta menerima apapun dari yang dicintai; sedang rasa takut tidak menghasilkan kekaguman, bahkan boleh jadi antipati.⁷¹

Alur unsur-unsur komunikasi seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an Surah Thaha: 43-44 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4: Alur Prinsip Komunikasi *Qaulan Layyinâ*



Raja, orang
yang memiliki
kedudukan
hirarki tinggi
dalam strata
sosial

4. *Qaulan Balighâ*

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ فَهُمْ لَا يَفْعَلُوا بِأَمْرٍ إِلَّا جَاءَكُمْ بِهِ

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”. (QS. An-Nisâ/4: 63)

Komunikator; Komunikator ayat ini dapat dirunut dari ayat sebelumnya pada ayat sebelumnya yakni orang-orang beriman (QS.An-Nisâ/4: 59). Ayat ini berbicara kepada orang-orang beriman tentang beberapa hal, seperti menaati Rasul dan *ulil amri*, dan jika berbeda pendapat maka kembali kepada Al-Qur’an dan Rasul (Al-Hadis), juga berbicara tentang perkataan yang berbekas di jiwa kepada orang munafik.

Pesan; Quraish Shihab menyatakan pesan dalam ayat adalah pesan yang sampai kepada yang dituju (komunikan). Secara panjang lebar menafsirkan ayat ini. Ia menyebutkan kata *balighân* terdiri dari huruf *bâ*, *lam*, dan *ghain*. Pakar-pakar bahasa menyatakan bahwa semua kata yang terdiri huruf-huruf tersebut mengandung arti sampainya sesuatu ke sesuatu yang lain. Ia juga bermakna “cukup” karena kecukupan mengandung arti sampainya sesuatu kepada batas yang dibutuhkan. Seorang yang pandai menyusun kata sehingga mampu menyampaikan pesannya dengan baik lagi cukup dinamai *baligh*. Pakar-pakar sastra menekankan perlunya

dipenuhi beberapa kriteria sehingga pesan yang disampaikan dapat disebut *Balīghâ*, yaitu:

- a. Tertampung seluruh pesan dalam kalimat yang disampaikan.
- b. Kalimatnya tidak bertele-tele tetapi tidak pula singkat sehingga mengaburkan pesan. Artinya, kalimat tersebut, tidak berlebih atau berkurang.
- c. Kosakata yang merangkai kalimat tidak asing bagi pendengaran dan pengetahuan lawan bicara, mudah diucapkan serta tidak “berat” terdengar.
- d. Kesesuaian kandungan dan gbahasa dengan sikap lawan bicara. Lawan bicara atau orang kedua tersebut—boleh jadi—sejak semula menolak pesan atau meragukannya atau—boleh jadi—telah meyakini sebelumnya, atau belum memiliki ide sedikit pun tentang apa yang akan disampaikan.
- e. Kesesuaian dengan tata bahasa.

Ayat di atas mengibaratkan hati mereka sebagai wadah ucapan, sebagaimana dipahami dari kata *fi anfusihim*. Wadah tersebut harus diperhatikan sehingga apa yang dimasukkan ke dalamnya sesuai, bukan saja dalam kuantitasnya, tetapi juga dengan sifat wadah itu. Ada jiwa yang harus diasah dengan ucapan-ucapan halus dan ada juga yang harus dihendakkan dengan kalimat-kalimat keras atau ancaman yang menakutkan. Walhasil, disamping ucapan yang disampaikan, cara penyampaian dan waktunya pun harus diperhatikan. Bisa juga kata itu dipahami dalam arti sampaikan nasihat kepada mereka secara rahasia, jangan permalukan mereka di hadapan umum, karena nasihat atau kritik secara terang-terangan dapat melahirkan antipati, bahkan sikap keras kepala yang mendorong pembangkangan yang lebih besar lagi.⁷² Sedangkan Sayyid Qutbh, mengatakan *qaulan balīghâ* adalah sebuah ungkapan deskriptif. Seakan-akan perkataan itu memberi bekas secara langsung pada jiwa, dan menetap secara langsung di dalam hati. Itu adalah perkataan yang mempersuasi mereka untuk sadar kembali, bertobat, bersikap istiqamah, dan merasa tentang di bawah lindungan Allah dan jaminan Rasul-Nya, setelah tampak jelas dari mereka kecenderungan untuk bertahkim kepada thagut dan tidak mau mengikuti Rasulullah SAW ketika mereka diseru untuk bertahkim kepada Allah dan Rasul-Nya.⁷³ Sementara dalam tafsir Ibnu Katsir *qaulan balīghâ* yaitu nasihat kepada mereka

⁷² Ibid, Vol.2, h.595-597.

⁷³ Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid.2, h.404.

dalam semua perkara yang terjadi antara engkau dan mereka, dengan kata-kata yang berbekas yang dapat mencegah mereka.⁷⁴

Saluran; ; Seperti ayat-ayat yang merupakan prinsip komunikasi Islam sebelumnya, saluran yang digunakan dalam menyampaikan pesan melalui komunikasi interpersonal dengan *face to face communication* atau komunikasi tatap wajah secara langsung. Namun esensi dari komunikasi yang disampaikan juga ada pada caranya dan kepada siapa pesan itu disampaikan. Komunikator, komunikan dan bentuk pesan yang disampaikan adalah esensi kajian yang disesuaikan dengan jumlah komunikan yang dituju. Karenanya komunikasi yang ingin meraih komunikan yang jumlahnya banyak dan tak terhitung menjadi domain komunikasi massa atau komunikasi bermedia. Dengan demikian esensi komunikasi dalam prinsip komunikasi Islam juga menjadi esensi dalam bentuk komunikasi yang lainnya. Oleh karenanya komunikasi dengan menggunakan media lainnya seperti komunikasi massa menjadi relevan untuk dilakukan dengan cara yang sama sebagaimana Musa menyampaikan pesan kepada Fira'un. Bahwa kepada pemimpin yang lalim, atau lupa diri, maka komunikator harus menyampaikannya secara lemah lembut untuk membuatnya ingat dan takut.

Komunikan; Komunikan adalah mereka yang menyembunyikan niat dan motivasi mereka yang sebenarnya, dengan berargumentasi dan dengan alasan-alasan (kaum munafik). Sebagai taktik yang harus dilakukan terhadap kaum munafik—pada waktu itu—ialah membiarkan mereka, membimbingnya dengan lemah lembut, dan memberikan nasihat dan pelajaran kepada mereka.⁷⁵

Efek; Efek yang ditimbulkan dari kata-kata yang berbekas adalah yang dapat mencegah (dari kemunafikan).⁷⁶ Selain itu kata-kata yang berbekas pada jiwa agar mereka (kaum munafik) sadar kembali, bertobat, bersikap istiqamah, dan merasa

74 Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu, Jilid 2*, h.438.

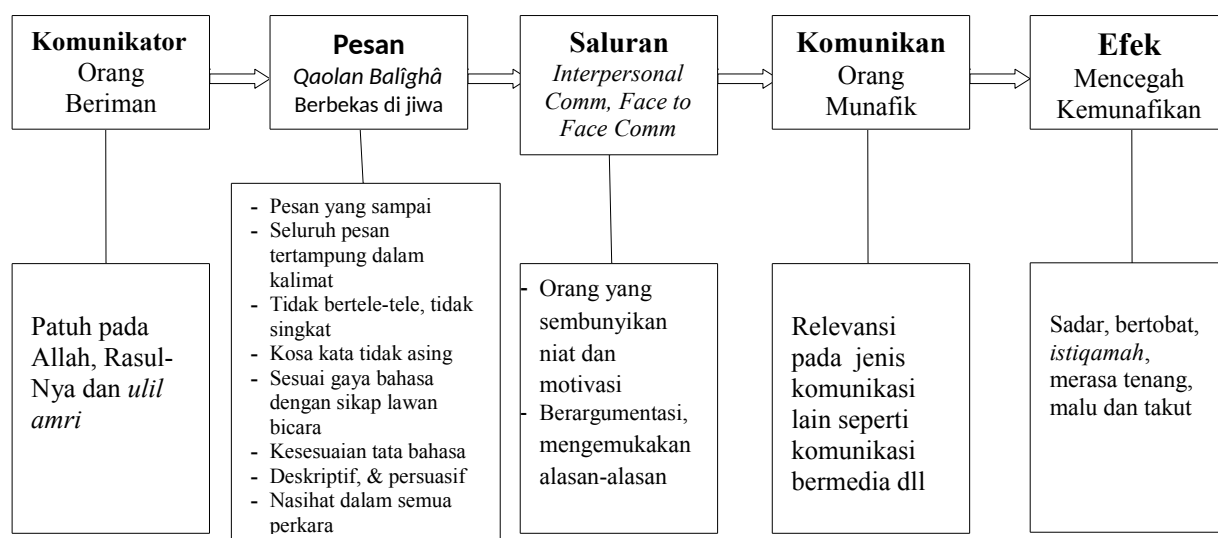
75 Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.

76 Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu*.

tenang di bawah lindungan Allah dan jaminan Rasul-Nya.⁷⁷ Dengan kata-kata yang berbekas pada jiwa, diharapkan mereka kaum munafik malu dan takut sehingga menginsyafi kesalahannya.⁷⁸

Seperti halnya alur unsur komunikasi seperti sebelumnya, terdiri dari lima unsur utama yakni komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan efek. Dengan demikian, alur unsur-unsur komunikasi seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an Surah An-Nisâ/4: 63 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5: Alur Prinsip Komunikasi *Qaulan Balighâ*



5. *Qaulan Karîmâ*

وَقَصِّنْ رَبَّنَا لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَنبِيَائِهِ إِحْسَنًا إِنَّمَا يَبْلُغُنْ
عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا وَلَا
يَعْرِضُ لَكَ الْغَيْبُ وَفِي الْغَيْبِ مَا لَبِثَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْغَيْبِ لَنَذَرَكَ الْغَيْبُ وَفِي الْغَيْبِ مَا لَبِثَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِ الْغَيْبِ لَنَذَرَكَ الْغَيْبُ

⁷⁷ Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.

⁷⁸ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, h.456.

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik." (Q.S. Al-Isrâ'/17: 23)

Komunikator; Komunikator dalam ayat ini adalah anak-anak yang telah mencapai umur dewasa yang berbicara kepada orangtuanya. Dalam tafsir Ibnu Katsir ditulis, maksudnya, dia menyuruh hamba-Nya untuk berbuat baik kepada kedua orangtua.⁷⁹ Anak yang perlu dorongan kuat terhadap kesadaran hati nuraninya agar selalu ingat akan kewajiban generasi terdahulu.⁸⁰ Komunikator dalam hal ini adalah orang yang bisa jadi orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dari komunikan (orangtua), tetapi status tersebut tidak memengaruhi jenis ucapan yang disampaikan dan komunikator tetap merendahkan diri di hadapan komunikan.

Pesan; *Qaulan karîmâ* atau perkataan yang mulia menurut Sayyid Qutbh adalah sikap positif yang sangat tinggi tingkatannya. Yakni hendaknya ucapan sang anak kepada orangtuanya menunjukkan sikap hormat dan cinta. Jangan sampai muncul sikap yang menunjukkan kemarahan atau membuat sedih orangtua, apalagi menghina atau bersikap tidak hormat.⁸¹ Selain itu *qaulan karîmâ* juga berarti dengan lemah lembut, baik, penuh sopan santun disertai pemuliaan dan penghormatan. Komunikator juga dilarang memperdengarkan kata-kata yang buruk, bahkan sampai “ah” sekalipun yang merupakan tingkatan ucapan buruk yang paling ringan.⁸²

79 Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu, Jilid 5*, h.296.

80 Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Jilid 7*, h.248.

81 *Ibid*, h.249.

82 Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu, h.297*.

Saluran; Dalam ayat ini saluran komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari anak kepada orangtua juga melalui komunikasi interpersonal dengan *face to face communication* atau komunikasi tatap wajah secara langsung. Namun esensi dari komunikasi yang disampaikan ada pada caranya dan kepada siapa pesan itu disampaikan. Oleh karenanya komunikasi dengan menggunakan media lainnya seperti komunikasi massa menjadi relevan untuk dilakukan dengan cara yang sama.

Komunikan; Komunikan adalah orangtua yang sudah berusia lanjut. Sayyid Qutbh menyebutkan orangtua yang telah berkorban apa saja, bahkan mengorbankan dirinya demi sang anak. Dalam ayat ini penyebutan usia lanjut kedua orangtua tentu menimbulkan rasa hormat, dan kondisi yang lemah di masa tua, mereka akan membawa inspirasi tersendiri.⁸³

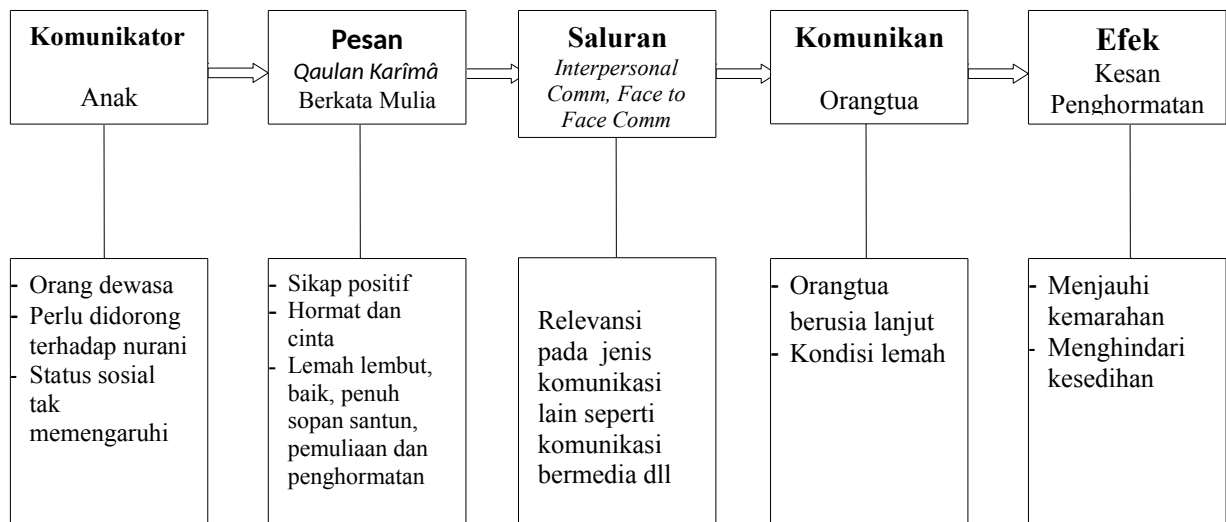
Efek; Sayyid Qutbh menulis, jangan sampai muncul sikap yang menunjukkan kemarahan atau membuat sedih orangtua, apalagi menghina atau bersikap tidak hormat.⁸⁴ Hal ini menunjukkan bahwa perkataan yang buruk atau bukan perkataan yang mulia terhadap kedua orangtua dapat menimbulkan kemarahan atau membuat sedih bagi orangtua.

Dengan demikian, alur unsur-unsur komunikasi seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an Surah Al-Isrâ'/17: 23 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 6: Alur Prinsip Komunikasi *Qaulan Karîmâ*

⁸³ Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.

⁸⁴ *Ibid*,



6. *Qaulan Maysûrâ*

وَأِمَّا عَرْضُكُمْ عَنْهُمْ فَأْتُوا بِهِمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقْوُونَ
 وَأَمَّا عَرْضُكُمْ عَنْهُمْ فَأْتُوا بِهِمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقْوُونَ

Artinya: Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. (Q.S. Al-Isrâ'/17: 28)

Komunikator; Komunikator dalam ayat ini, seperti dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, maksudnya, jika kaum kerabatmu dan orang-orang yang Kami perintahkan agar kami memberikan mereka, mereka meminta kepadamu sedang kamu tidak memunyai sesuatu pun, lalu kamu berpaling dari mereka karena tidak ada yang dapat dinafkahkan untuk mereka.⁸⁵ Sedangkan Sayyid Qutbh menulis jika seseorang tidak memunyai apa yang bisa ditunaikan untuk para kerabat dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, sedang ia merasa malu untuk bertemu mereka dan ia berharap semoga Allah memberikan rezeki kepada dirinya dan kepada mereka, maka hendaknya dia memberikan janji kepada mereka jika kelak

⁸⁵ Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu*, h.302.

dia mendapatkan keluasan harta.⁸⁶ Sementara Quraish Shihab menulis bahwa yang dimaksud ayat ini (komunikator) adalah orang yang tidak selalu memiliki harta atau sesuatu untuk dipersembahkan kepada keluarga mereka yang butuh.⁸⁷

Pesan; Quraish Shihab menafsirkan kata *qaulan maysûrâ* sebagai ucapan yang mudah yang tidak menyinggung perasaan dan yang melahirkan optimisme, serta harapan memenuhi keinginan peminta di masa datang.⁸⁸ Sedangkan Sayyid Qutbh menyebutkan *qaulan maysûrâ* sebagai janji untuk memberikan sesuatu kepada orang-orang yang meminta, yang diucapkan dengan lemah lembut.⁸⁹ Sama halnya dengan tafsir Ibnu Katsir yang mengutip Mujahid, 'Ikrimah, Sa'id bin Jubair, al-Hasan al-Bashri, Qatadah, dan beberapa lainnya, menulis *qaulan maysûrâ* sebagai janji yang pantas dan lemah lembut.

Saluran; Saluran dalam ayat ini sama dengan ayat lainnya yakni menyampaikan pesan dari orang yang diminta kepada orang yang meminta melalui komunikasi interpersonal dengan *face to face communication* atau komunikasi tatap wajah secara langsung. Esensi komunikasi yang disampaikan ada pada caranya dan kepada siapa pesan itu disampaikan. Oleh karenanya komunikasi dengan menggunakan media lainnya seperti komunikasi massa menjadi relevan untuk dilakukan dengan cara yang sama, karena memiliki esensi yang sama dalam komunikasi yang dilancarkan.

Komunikan; Komunikan dalam ayat ini adalah orang-orang yang meminta sesuatu. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan: ...mereka meminta kepadamu sedang kamu tidak mempunyai sesuatu pun.⁹⁰ Sedangkan Sayyid Qutbh menyebutkan para

⁸⁶ Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, h.250.

⁸⁷ Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Vol.7, h.74.

⁸⁸ *Ibid*,

⁸⁹ Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.

⁹⁰ Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu*.

kerabat dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan sebagai orang-orang yang meminta tersebut.⁹¹ Sementara Quraish Shihab mengutip pendapat sementara ulama menyebutkan orang yang meminta (komunikasikan) adalah orang secara umum—bahwa ayat ini turun ketika Nabi SAW atau kaum Muslimin menghindari orang yang meminta bantuan karena merasa malu tidak dapat memberinya.⁹²

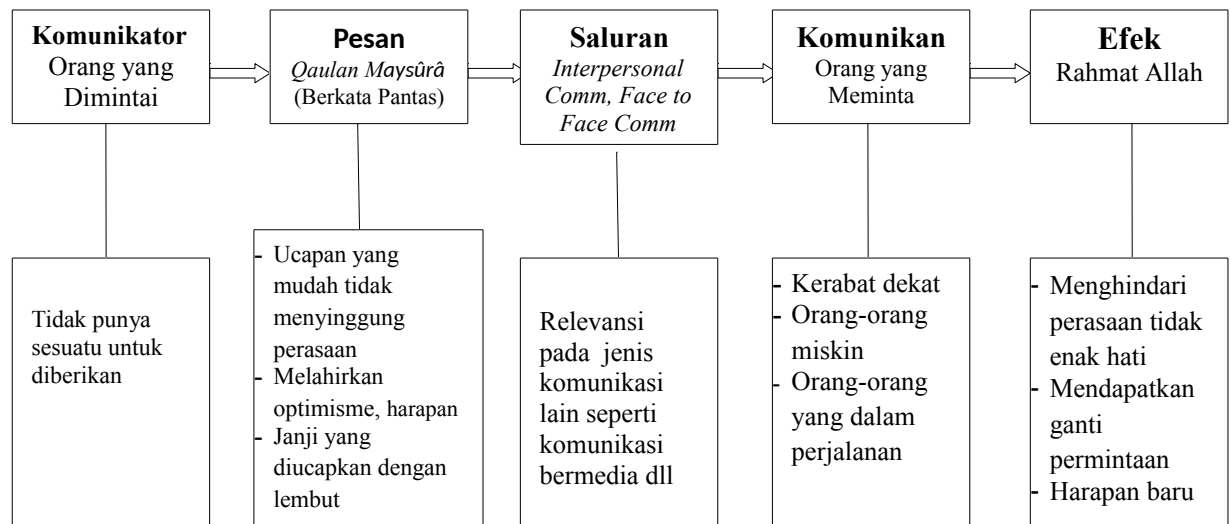
Efek; Perkataan yang pantas untuk menghindari efek sesak dada terhadap orang yang diminta—karena tidak bisa memberi, dan menghindari perasaan tidak enak hati dari si peminta, dan agar si peminta merasa mendapatkan ganti dari apa yang seharusnya mereka terima, dan mereka juga mendapatkan harapan baru. Sayyid Qutbh menulis, jangan sampai dia merasa sesak dada kepada mereka, juga janganlah ia bersikap diam dan menjauhi mereka, karena, dengan sikapnya itu mereka justru merasa tidak enak hati. Hanya dengan kata-kata yang pantas dan lembut mereka merasa mendapatkan ganti dari apa yang seharusnya mereka terima. Dengan sikap yang baik, mereka mendapatkan harapan baru.⁹³ Sedangkan Quraish Shihab ucapan yang mudah untuk memperoleh rahmat dari-Nya. Ulama ini menulis: katakanlah kepada mereka ucapan yang mudah untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu.

Dari uraian di atas dapat terlihat beberapa unsur komunikasi yang saling berhubungan satu sama lainnya. Antara satu unsur memiliki keterkaitan dengan lainnya, dan masing-masing unsur adalah hal yang mesti didekati dan dikenali untuk efek yang diharapkan dan untuk efektivitas komunikasi. Dengan demikian, alur unsur-unsur komunikasi seperti yang digambarkan oleh Al-Qur'an Surah Al-Isrâ'/17: 28 dapat digambarkan sebagai berikut:

91 Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.

92 Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*.

93 Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.

Gambar 7: Alur Prinsip Komunikasi *Qaulan Maysûrâ*

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa, dari enam prinsip-prinsip komunikasi Islam tersebut dapat dirangkum dan disimpulkan ke dalam beberapa bagian yang saling kait mengait antara satu dengan yang lain. Bagian-bagian tersebut adalah:

1. Pihak menyampaikan pesan (komunikator) yang jumlahnya juga beragam. Kommunikator adalah beberapa pihak yang juga dibedakan dari karakter yang dimilikinya masing-masing yang dibedakan dalam beberapa kelompok.
 - Kelompok *pertama*, adalah para pria, orang yang memberikan sesuatu, orang yang sudah sempurna akalnya (dewasa), orang yang berada di sekitar anak yatim dan pembagi warisan, serta istri-istri Nabi (para wanita). Kommunikator kelompok pertama ini adalah orang-orang yang memiliki posisi sosial di masyarakat yang lebih tinggi dari komunikannya, orang yang punya keinginan (melamar), seorang kepala rumah tangga, dan orang yang memiliki posisi moral lebih tinggi.

- Kelompok *kedua*, orang-orang yang beriman, yakni para orangtua dan orang yang sudah sempurna akalnya (dewasa).
- Kelompok *ketiga*, adalah Nabi Musa as dan Nabi Harun as. Karakter yang melekat dalam diri keduanya adalah penyampai pesan *Ilahiyah* (juru dakwah), dan secara struktural memiliki hubungan sosial lebih rendah dari komunikan.
- Kelompok *keempat*, adalah orang beriman, dengan karakter khas sebagai orang-orang yang patuh kepada Allah SWT, pada Rasul-nya, dan kepada *ulil amri*.
- Kelompok *kelima*, adalah anak-anak kepada orangtuanya. Anak-anak yang dimaksud di sini adalah anak-anak yang telah mencapai umur dewasa, yang perlu didorong untuk mengikuti nuraninya, serta memiliki status sosial yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dibanding orangtuanya.
- Sedangkan kelompok *keenam*, adalah orang-orang yang dimintai sesuatu oleh orang lain, namun dia sendiri tidak memiliki sesuatu untuk diberikan.

Ada beberapa karakter seorang komunikator selaku penyampai pesan yang harus disadari dan difahami sebelum menyampaikan pesan. Seorang komunikator yang tidak menyadari dan memahami dirinya sendiri akan berpotensi untuk kehilangan kontrol dalam ketika pesan kepada komunikan. Komunikator sebagai sumber pesan akan menemukan banyak *barrier* atau mendapati pesan komunikasi yang disampaikan tidak efektif sampai kepada komunikan. *Barrier* yang terjadi dan ketidakefektifan yang muncul boleh jadi disebabkan oleh ketidaksesuaian antara pesan yang disampaikan dengan komunikator sebagai penyampai pesan. Hal seperti ini bisa berupa penguasaan terhadap materi pesan, atau kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Pengenalan terhadap komunikator adalah pengenalan terhadap diri sendiri tentang seperangkat data yang kita miliki (*source analysis*). Seorang komunikator yang tidak mengenal diri sendiri dengan baik akan mengalami kesulitan dalam memperlakukan dirinya dari orang lain (komunikan) dalam berkomunikasi. Hal-hal yang berkaitan dengan diri komunikator yakni:

- Sebagai apa seseorang sedang berbicara (menyampaikan pesan)
- Apa keinginan yang sebenarnya (kejelasan ide)
- Mengenaliti sikap baik. Sebuah itikad baik tidak hanya berupa sesuatu yang

disebutkan di dalam hati semata. Namun ia juga harus ditunjukkan pada sikap dan perilaku seperti sikap siap membantu, optimis, progresif, bijaksana, dan tulus.

- Daya tahan menyampaikan pesan. Dalam konteks komunikasi massa, maka sangat penting untuk melakukan pengulangan terhadap suatu pesan, sebelum benar-benar bisa sampai secara efektif kepada publik. Dalam hal ini karena pada dasarnya manusia itu adalah keras kepala (*stubborn*) sehingga sulit untuk berubah oleh pesan yang hanya disampaikan sekali saja. Pola pengulangan pesan ini juga disampaikan dalam Al-Qur'an di mana dalam satu ayat pada surah tertentu akan diulang di ayat lain, baik dalam surah yang sama maupun dalam surah yang berbeda. Contoh pengulangan dalam surat yang sama adalah Al-Qur'an surah ar-Rahman yang mengulang ayat yang sama sebanyak 31 kali.

2. Sedangkan pengelolaan pesan dari enam prinsip komunikasi Islam yang disesuaikan terhadap masing-masing karakter komunikan, terdiri dari berapa kategori kelompok.

- Kelompok *pertama*, *qaulan ma'rûfâ* (berkata baik), termasuk di dalamnya adalah do'a-do'a, sindiran, tidak melakukan tindakan yang *munkar*, tidak jorok, tidak melampaui batas, melakukan kabaikan dan silaturahmi/lobby, menyatakan sesuatu dengan bahasa yang sesuai adat kebiasaan dengan wajar dan tidak dibuat-buat.
- Kelompok *kedua*, *qaulan Sadîdâ* (berkata benar), termasuk di dalamnya adalah perkataan yang jelas, rinci, dengan mengetahui sasaran dan arahnya, tidak bengkok dan tidak menyimpang, dan tepat sasaran.
- Kelompok *ketiga*, adalah *qaulan layyinâ* (berkata lemah lembut), termasuk di dalamnya adalah perkataan yang tepat sasaran, diucapkan secara sopan, dan bukan merupakan perkataan yang menyakitkan hati pendengarnya.
- Kelompok *keempat*, *qaulan balîghâ* (perkataan yang berbekas di jiwa). Kalimat ini ditujukan kepada kaum munafik, yakni merupakan pesan yang sampai kepada penerimanya, seluruh pesan tertampung dalam kalimat, tidak bertele-tele, tidak singkat, tidak menggunakan kosa kata asing, menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan sikap lawan bicara,

menggunakan bahasa yang sesuai tata bahasa, deskriptif, persuasif, dan berisi nasihat dalam semua perkara.

- Kelompok *kelima*, *qaulan maysûrâ* (berkata pantas), yakni ucapan yang mudah tidak menyinggung perasaan, melahirkan optimisme, harapan, dan merupakan janji yang diucapkan dengan lembut.
- Kelompok *keenam*, *qaulan karîmâ* (berkata mulia). Merupakan sikap positif, menunjukkan rasa hormat dan cinta, dan lemah lembut, baik, sopan santun, dan menunjukkan pemuliaan dan penghormatan.

Dari keragaman metode penyampaian pesan yang dilakukan, maka seorang perancang pesan komunikasi harus dapat menyesuaikan dengan karakteristik khalayak yang menjadi sasaran pesan. Oleh karenanya pesan yang dirancang harus melalui **proses adaptasi** (*content analysis*) untuk mencapai efek seperti yang diharapkan. Proses ini maksudnya adalah menyesuaikan kondisi komunikator dan komunikan dengan pesan yang akan disampaikan, baik dari segi cara penyampaian, *content* pesan yang disampaikan, dan berbagai atribut yang menyertainya. Hal lain yang penting untuk menjadi bagian dari proses adaptasi tersebut yakni kontrol terhadap penggunaan bahasa (*language control*), baik dalam bahasa dalam arti verbal maupun non verbal. Penguasaan terhadap bahasa ini merupakan hal yang sangat penting, sehingga pesan yang disampaikan akan menimbulkan kesan seperti yang diharapkan. Namun kontrol bahasa saja tidak cukup tanpa adanya kejelasan dari pesan yang disampaikan. Kejelasan (*clearness*) ini meliputi hal-hal yang mencakup pada definisi atau batasan suatu istilah, penekanan (*emphasis*) pada bagian-bagian tertentu dari pesan yang disampaikan, keterpaduan (*coherence*) antara satu bagian dengan bagian lainnya, serta penyampaian analogi dan ilustrasi untuk membuat pemahaman yang lebih bermakna. Selain itu titik tekan penyampaian juga pada kelengkapan pesan yang disampaikan. Langkah bukan berarti harus panjang

dan bertele-tele, namun singkat padat, ekonomis kata, menghindari kata-kata mubazir, sederhana dan logis.⁹⁴

3. Saluran yang digunakan pada prinsip-prinsip komunikasi Islam adalah komunikasi interpersonal (komunikasi antar pribadi) dan komunikasi kelompok dengan *face to face communication* atau komunikasi tatap muka langsung. Komunikasi jenis ini memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan komunikasi jenis lain. Tetapi makna esensi dari prinsip komunikasi Islam yang disampaikan ada pada caranya dan kepada siapa pesan itu disampaikan. Oleh karenanya komunikasi dengan menggunakan media lainnya seperti komunikasi massa menjadi relevan untuk dilakukan dengan cara yang sama. Namun karakteristik yang berbeda pula sehingga pemilihan saluran komunikasi menjadi sangat penting untuk menimbulkan efek yang diinginkan.
4. Adapun yang menjadi sasaran pesan komunikasi (komunikan) mendapat perlakuan berbeda terhadap masing-masing, untuk tujuan atau efek yang berbeda-beda pula. Komunikan dimaksud dibedakan berdasarkan karakter yang dimilikinya.
 - Kelompok *pertama*, adalah wanita yang dimintai persetujuannya, orang yang menerima pemberian, orang yang belum sempurna akalnya (anak-anak), orang yang menerima warisan, pria dengan “keinginan” dalam hatinya. Komunikan tersebut memiliki karakter yang melekat dalam dirinya yakni: berpotensi tersakiti ucapan komunikator atau memiliki sensitifitas terhadap pesan komunikasi yang disampaikan, dan memiliki kebebasan mutlak dalam membuat keputusan sendiri.
 - Kelompok *kedua*, adalah anak-anak dan manusia pada umumnya. Kelompok ini memiliki karakter sebagaimana anak-anak, serta orang munafik dan tukang penyebar fitnah, dan manusia secara umum

⁹⁴ Lihat lebih jauh, Onong Uchjana Effendy, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h.50 -51.

- Kelompok *ketiga*, adalah seorang pemimpin atau raja (Fir'aun) yang memiliki kedudukan hirarki tinggi dalam strata sosial di tengah masyarakat.
- Kelompok *keempat*, adalah kaum munafik yang menyembunyikan niat dan motivasi di dalam hatinya, serta menyampaikan argumentasi, dengan cara mengemukakan alasan-alasan tertentu.
- Kelompok *kelima*, adalah para orangtuayang sudah berusia lanjut, serta berada dalam kondisi lemah.
- Kelompok *keenam*, adalah orang-orang yang mengharapkan dan meminta sesuatu pemberian kepada orang lain. Mereka ini merupakan para kerabat dekat, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan (musafir).

Melihat keragaman orang yang menjadi penerima pesan, maka sebagai seorang komunikator perancang pesan harus terlebih dahulu memahami jenis dan karakter komunikan yang akan menerima pesannya (*audience analysis*). Dalam konteks kampanye partai politik dengan komunikan yang berjumlah banyak, maka seorang perancang pesan harus terlebih dahulu mengetahui tentang komunikannya. Caranya tidak lain dengan melakukan hal penting, yakni; **Melakukan pengenalan terhadap komunikan**. Hal ini dilakukan melalui riset atau survei untuk pengumpulan data tentang keberadaan komunikan. Komunikan perlu diketahui karakteristik yang melekat padanya, dari mulai karakteristik pendidikan, usia, pekerjaan, gender, keinginan, kebutuhan, harapan, kecenderungan dan kekhawatiran, serta ketakutannya. Dengan cara seperti ini seorang perancang pesan dan dalam sebuah partai politik yang akan berkampanye dapat menyesuaikan pesan yang akan disampaikan kepada khalayak.

5. Efek yang dihadapkan dari komunikasi yang dilancarkan dirangkum ke dalam beberapa bagian. Adapun efek tersebut yakni:
 - Kelompok *pertama*, mengantisipasi keinginan negatif yang muncul dari komunikan. Hal tersebut ditandai dengan tereduksinya keinginan negatif yang akan muncul dari hati komunikan, dapat membalut luka di hati dan mengisinya dengan kerelaan dan kesenangan, serta dapat membersihkan hati, serta menjinakkan jiwa.

- Kelompok *kedua*, dari sisi komunikan, efek yang muncul adalah adanya kondisi tidak lemah atau menjadi kuat dalam diri komunikan. Komunikan adalah anak-anak terpelihara, dan terhindar dampak negatif. Sedangkan dari sisi komunikator, efek yang muncul adalah terjaga dan dituntun Allah, serta diperbaiki amalnya, diberi taufik dan diampuni dosanya.
- Kelompok *ketiga*, adalah membuat komunikan menjadi mengingat kesalahan yang telah diperbuatnya dan menjadi takut akan pertanggungjawaban atas kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini dapat merupakan kondisi komunikan yang mengingat kebaikan yang telah dilupakan dan tidak dikerjakannya, menjadi takut pada kesalahan sendiri, dan tidak menjadi bangga pada dosa dan kesalahan yang dilakukan, serta hatinya menjadi hati.
- Kelompok *keempat*, adalah mencegah perilaku munafik pada diri komunikan sehingga menjadi sesuai antara kata dan perbuatan, menepati janji, dan menjadi amanah. Komunikan dapat menjadi orang yang menyadari kesalahannya, sehingga bertobat, istiqamah, merasa tenang hatinya, serta merasa malu dan takut.
- Kelompok *kelima*, adalah menimbulkan kesan penghormatan kepada komunikan yang merupakan para orangtua. Hal ini menjauhkan munculnya kemarahan, dan menghindari terjadinya perasaan sedih pada diri orangtua.
- Kelompok *keenam*, adalah mendapatkan rahmat Allah SWT bagi komunikator. Sedangkan bagi komunikan adalah pihak yang terhindar dari perasaan tidak enak hati, mendapatkan ganti permintaan, dan mendapatkan harapan baru dari harapan sebelumnya yang tidak didapatkannya.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa apa yang menjadi efek yang diharapkan terjadi dalam sebuah proses komunikasi, hanya bisa berlangsung dalam kondisi pengenalan terhadap diri komunikator dilakukan, dan memahami karakteristik komunikan, serta melakukan adaptasi pesan yang akan disampaikan sesuai dengan kondisi komunikator dan komunikan. Selanjutnya pesan yang disampaikan juga sudah harus dirancang sedemikian

rupa sesuai dengan enam hal yang menjadi prinsip komunikasi Islam yang di-*break-down* ke dalam beberapa kelompok dan karakternya masing-masing. Dengan demikian dalam prinsip-prinsip komunikasi Islam, bahwa komunikasi yang dilancarkan harus bertujuan, atau harus memiliki target tersebut terhadap sasaran pesan (*effect analysis*). Ada tiga kelompok efek yang dapat dikelompokkan dari hasil proses komunikasi yang berlangsung yaitu:

Pertama, menambah pengetahuan dan memberikan informasi kepada komunikan (efek kognitif). Efek ini di antaranya seperti komunikan yang mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya di masa lalu, ataupun kesalahan yang sedang dilakukannya saat ini. Namun meski mengingat kesalahannya, komunikan belum merasa menyesal ataupun takut.

Kedua, memunculkan emosi dan merangsang perasaan untuk ikut terlibat atas informasi yang disampaikan kepada komunikan (efek afektif). Pada efek ini, kesalahan yang diingat kembali tersebut menimbulkan rasa takut akan pertanggungjawaban yang akan diemban kelak di hadapan Allah SWT. Dengan demikian pesan yang disampaikan telah sampai membuat orang menjadi takut karena terlibat emosinya. Namun meski merasa takut, tetapi komunikan belum melakukan hal-hal untuk menjauh dari perbuatan tersebut dan belum bergerak untuk bertaubat.

Ketiga, menggerakkan komunikan untuk melakukan sesuatu berdasarkan pesan yang disampaikan tersebut (efek konatif). Pesan yang menyentuh efek pada tingkat ini adalah komunikan yang bergerak bertobat, menyesali segala kesalahan yang pernah dibuatnya, kemudian menjauhinya, dan berbuat amal ibadah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya tersebut.

Oleh karenanya peran pikiran sangat penting sebagai bahan dasar sebelum diturunkan ke dalam bentuk bahasa, atau rangkaian kalimat yang tersusun dalam sistematika yang baik. Dengan kata lain bahwa sebelum pesan komunikasi dilancarkan terlebih dahulu harus didahului oleh proses berpikir dan proses membahasakannya. Proses berpikir yang dimaksud di sini adalah seperti yang diutarakan oleh para pakar, yakni:

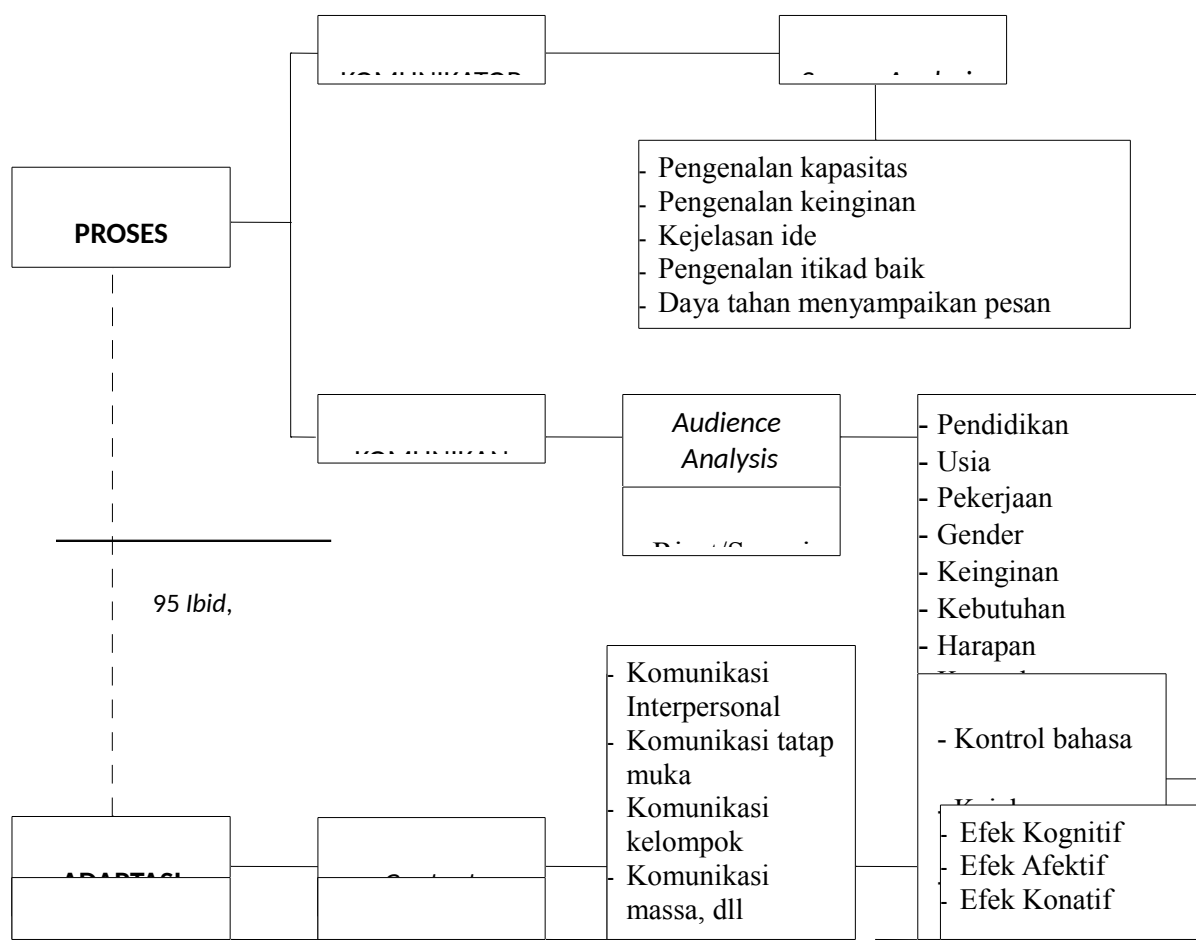
Pertama, proses berpikir yang merunut pada faktor sebab akibat (*causative thinking*) sehingga dengan demikian dapat mengantisipasi dan mencari jalan keluar dari setiap persoalan yang mungkin muncul.

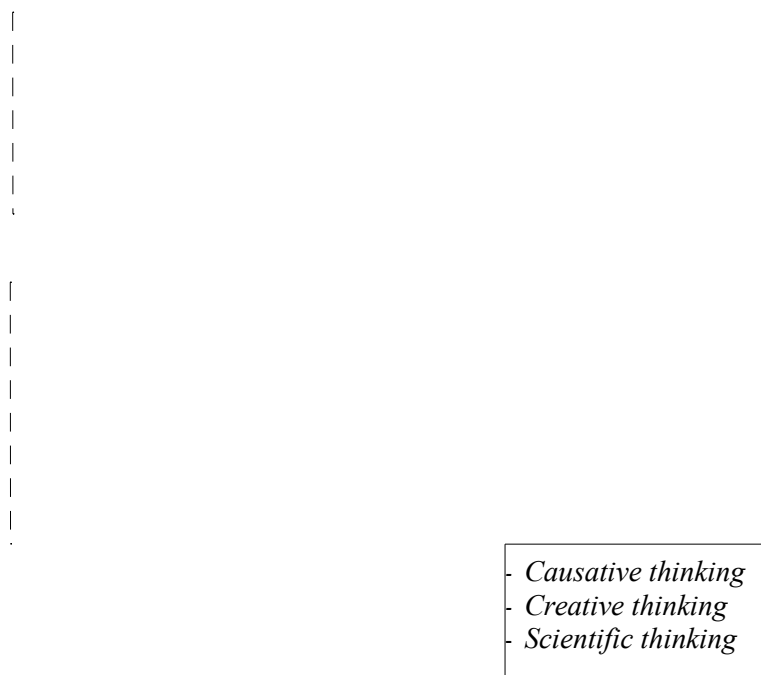
Kedua, proses berpikir yang kreatif (*creative thinking*) yaitu proses berpikir yang mendobrak kekakuan dan memberikan kesegaran dengan tanpa menabrak aturan dan norma-norma yang berlaku.

Ketiga, proses berpikir yang berdasarkan ilmu pengetahuan atau pemikiran ilmiah (*scientific thinking*) yaitu proses berpikir yang berdasarkan langkah-langkah ilmiah.⁹⁵ Berbagai strategi yang dirancang tersebut, secara teknis untuk mengantisipasi keinginan negatif, menjinakkan jiwa, memunculkan kekuatan, mengingat kesalahan, takut pada akibat buruk hingga memperbaiki diri, mencegah perilaku munafik, menjauhkan munculnya rasa marah dan sedih, serta menghindari rasa tidak enak hati, namun secara keseluruhan memiliki muara yang satu yaitu mengharapkan Ridha Allah SWT.

Proses komunikasi berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi Islam digambarkan dibawah ini:

Gambar 8: Alur Implementasi Prinsip-prinsip Komunikasi Islam





C. Landasan Teori

1. Teori Atribusi

Teori ini mencoba menggambarkan komunikasi seseorang yang berusaha meneliti; menilai dan menyimpulkan sebab-sebab dari suatu tindakan atau tingkah-laku yang dilakukan orang lain. Dengan kata lain teori ini mencoba menjelaskan proses kognitif yang dilakukan seseorang untuk menjelaskan sebab-sebab dari suatu tindakan.⁶⁶ Asumsi inti dari teori atribusi ini berkaitan dengan bagaimana individu menginterpretasikan peristiwa-peristiwa dan bagaimana ini berkaitan dengan

96 Marianne Dainton, Elaine D. Zelley, *Applying Communication Theory for Professional Life*, (Thousand Oaks, California; Sage Publication, 2005), h.30-31.

pemikiran dan perilaku mereka. Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Seseorang mencoba memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu. Menurut Heider seseorang dapat membuat dua atribusi:

1. Atribusi internal, kesimpulan bahwa seseorang berperilaku dalam cara tertentu karena sesuatu tentang orang, seperti sikap, karakter atau kepribadian,
2. Atribusi eksternal, kesimpulan bahwa seseorang berperilaku dengan cara tertentu tentang situasi yang dia masuki.

Contoh dari teori ini jika seseorang penceramah di depan *audience*-nya yang terlihat gelagapan ketika menyampaikan isi ceramahnya maka tindakan tersebut dapat dinilai dengan mengemukakan beberapa alasan; *pertama*, orang itu kelihatan grogi karena tidak membuat persiapan (alasan internal/disposisional). *Kedua*, orang tersebut grogi karena semua persiapannya yang disimpan di *flashdisk* tertinggal di rumahnya (alasan situasional/eksternal). Alasan lain adalah karena memang si penceramah tersebut memang tidak atau belum memiliki kemampuan untuk ceramah di depan *audience* yang ramai (internal/disposisional).

Dalam buku *Organizational Behavior*, Jhon R.Schermerhorn, Jr. Dkk menyatakan bahwa untuk melakukan interpretasi terhadap efektivitas sebuah

organisasi, digunakan teori atribusi (*Attribution Theory*)⁹⁷ dengan memfokuskan pada bagaimana orang berupaya untuk;

- (1) memahami penyebab terjadinya suatu peristiwa,
- (2) menilai tanggung jawab atas akibat suatu peristiwa, dan
- (3) mengevaluasi kualitas individu orang yang terlibat di dalam peristiwa.⁹⁸

Atribusi telah digunakan untuk menjelaskan perbedaan dalam motivasi berprestasi antara tinggi dan rendah. Menurut teori ini, berprestasi tinggi akan mendekati daripada menghindari tugas-tugas terkait untuk berhasil, karena mereka percaya bahwa kesuksesan adalah karena kemampuan yang tinggi dan usaha yang mereka yakini. Kegagalan dianggap disebabkan oleh nasib buruk atau ujian yang miskin dan bukan kesalahan mereka. Jadi, kegagalan tidak mempengaruhi harga diri mereka tetapi sukses membangun kebanggaan dan kepercayaan diri. Di sisi lain berprestasi rendah menghindari tugas yang berhubungan dengan keberhasilan karena mereka cenderung untuk:

97 Heider (1958) adalah orang pertama mengusulkan suatu atribusi teori psikologi, tetapi Weiner dan kawan-kawan (seperti Jones et al, 1972; Weiner, 1974, 1986) mengembangkan sebuah konstruksi yang kemudian menjadi suatu paradigma penelitian utama dari psikologi sosial. Heider mengedepankan istilah *naive* (naif) atau *commonsense* psikologi. Dalam pandangannya, orang seperti ilmuwan amatir, mencoba untuk memahami perilaku orang lain dengan menambah-nambah informasi sampai mereka tiba pada penjelasan yang masuk akal. *Attribution Theory* terkait dengan bagaimana individu melakukan interpretasi dan bagaimana hal tersebut terkait dengan pikiran dan perilaku orang. Teori ini mengasumsikan bahwa orang-orang mencoba akan selalu menebak mengapa seseorang melakukan apa yang mereka lakukan. Seseorang mencoba memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu. Teori ini digunakan untuk menjelaskan perbedaan dalam motivasi tinggi dengan motivasi rendah. Berdasarkan teori ini orang yang berprestasi melakukan pendekatan daripada menghindari tugas-tugas, karena mereka yakin sukses adalah disebabkan kemampuan dan usaha tinggi yang mereka lakukan dengan percaya diri. Kegagalan terjadi adalah karena nasib buruk atau ujian yang gagal yang bukan merupakan kesalahan mereka. Kegagalan juga tidak memengaruhi harga diri (*self-esteem*) mereka tetapi keberhasilan membangun kebanggaan dan kepercayaan diri. Di sisi lain orang yang gagal menghindari tugas-tugas terkait karena mereka cenderung (a) ragu terhadap kemampuannya sendiri dan/atau (b) berasumsi bahwa sukses terkait dengan faktor *luck* atau terkatung “siapa yang Anda kenal” atau pada faktor lain yang di luar kendali mereka. Kalaupun pada akhirnya sukses bisa dicapai, mereka tidak merasa bertanggungjawab akan hal tersebut, dan sukses itu tidak meningkatkan kebanggaan dan rasa percaya diri mereka.

98 Jhon Schermerhorn Jr, et.al., *Organizational Behavior Sevent Editions* (Amerika Serikat, Wiley. 2002), h.41.

- a. Meragukan kemampuan mereka,
- b. Menganggap kesuksesan adalah berkaitan dengan keberuntungan atau untuk “siapa yang Anda tahu” atau faktor-faktor lain di luar kendali mereka. Jadi bahkan ketika sukses, adalah tidak bermanfaat untuk yang berprestasi rendah karena dia tidak merasa bertanggungjawab, tidak meningkatkan kepercayaan dirinya.

Karena teori atribusi adalah menyangkut masalah kemanusiaan, maka asumsi epistemologinya menyatakan ada banyak realita, atau kebenaran-kebenaran yang bertentangan dengan pada hanya satu kebenaran. Asumsi ontologi kemanusiaan bahwa sifat alamiah manusia kita adalah bebas dan tidak ditentukan. Akhirnya, asumsi aksiologi menyebutkan bahwa sebagai lawan objektivitas, nilai-nilai sangat penting dalam disiplin studi komunikasi. Dalam aplikasinya, seperti disinggung di atas, teori ini fokus pada apakah perilaku seorang disebabkan oleh faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal dipercaya berada di bawah kontrol individu. Misalnya kalau Anda melihat kinerja si Polan jelek maka itu disebabkan karena ia memang malas. Sedangkan faktor eksternal terlihat di luar dari diri individu. Jika Anda melihat kinerja di Polan jelek itu disebabkan karena perlengkapan yang dipakainya sudah tua. Berdasarkan teori atribusi ini, ada tiga faktor yang memengaruhi faktor internal dan eksternal ini, yaitu: *distinctiveness* (perbedaan), *consensus* (kesepakatan), dan *consistency* (konsistensi).

Distinctiveness mempertimbangkan seberapa konsisten perilaku seseorang dalam situasi yang berbeda-beda. Jika kinerja si Polan rendah, terlepas dari kondisi peralatan kerjanya, kita cenderung memberikan penilaian kinerja jelek secara internal; jika kinerja jelek tidak biasa maka kita cenderung menentukan suatu penyebab eksternal untuk menjelaskannya.

Consensus menghitung bagaimana kemungkinan semua orang menghadapi situasi yang sama merespons secara serupa. Jika semua orang menggunakan perlengkapan seperti halnya si Polan yang memiliki kinerja buruk, kita cenderung mengelompokkan ke dalam faktor internal sebagai penyebab buruknya kerjanya.

Consistency fokus pada apakah seorang individu merespons dengan cara yang sama setiap waktu. Jika si Polan masuk dalam kelompok kinerja rendah, kita

cenderung memberikan penilaian jelek dalam internal atribusi. Berbeda jika kinerja jelek si Polan adalah suatu insiden tersendiri, kita mengelompokkannya dalam faktor eksternal.

Sebagai tambahan dari tiga pengaruh tersebut, dua kesalahan memiliki dampak pada faktor internal dan eksternal. Keduanya yakni *fundamental attribution error* dan *self-serving bias*. Ketika seorang pengawas bertanya untuk melakukan identifikasi akibat dari kinerja yang jelek anak buahnya, ia akan lebih sering memilih individu yang memiliki kekurangan internal—kurang memiliki kemampuan dan kurang memiliki upaya—daripada bertanya pada kekurangan faktor eksternal. Inilah yang menunjukkan *fundamental attribution error*—suatu kecenderungan untuk menganggap remeh pengaruh dari faktor situasional dan melebih-lebihkan pengaruh faktor individu dalam mengevaluasi perilaku orang lain. Ketika bertanya untuk mengidentifikasi penyebab dari kinerja jelek mereka, namun, pengawas sepakat adanya kurangnya dukungan—dalam eksternal atau situasional. Ini mengindikasikan suatu *self-serving bias*—kecenderungan untuk menyangkal tanggung jawab individu untuk masalah kinerja tetapi menerima tanggung jawab individu untuk kinerja yang sukses.

Kesimpulannya, ada kecenderungan melebih-lebihkan faktor internal personal orang lain dalam perilaku mereka, dan menganggap kecil faktor-faktor eksternal dalam perilaku orang lain. Sebaliknya, cenderung untuk mengalamatkan kesuksesan kepada faktor-faktor internal kita dan mengalamatkan kegagalan pada faktor-faktor eksternal. Implikasi manajerial dari teori ini dapat dilacak kembali dari fakta persepsi pengaruh respons. Contohnya, seorang manajer yang merasa anak buahnya tidak bekerja baik dan menganggap alasannya adalah kekurangan faktor internal, kemungkinan akan memotivasi anak buahnya untuk bekerja lebih baik; kemungkinan tersebut dari perubahan eksternal, faktor-faktor situasional mungkin menghapus kendala pekerjaan, namun melengkapi dukungan organisasi yang lebih baik mungkin diabaikan. Pandangan seperti ini dapat mengorbankan keuntungan kinerja utama. Ini menarik karena *self-serving bias*, ketika mereka mengevaluasi perilaku mereka, para pengawas dalam studi awal mengindikasikan kinerja mereka dapat memberikan keuntungan organisasi dengan mendapatkan dukungan. Kemudian

para pengawas yang dengan kemampuan atau keinginan sendiri bekerja keras tidak merasa menjadi masalah.

Secara aplikatif terhadap empat fungsi komunikasi yang telah diuraikan di atas, teori atribusi ini meliputi beberapa penjelasan:

1. Menyangkut fungsi menerangkan
Ada beberapa variabel dalam suatu fenomena yang terjadi yang diterangkan dalam teori ini yang menjadi landasan penyampaian. Dengan aplikasi yang mampu menerangkan fenomena melalui uraian variabel-variabel tersebut akan memberikan suatu pemahaman atas sesuatu hal yang terjadi. Teori atribusi ini berusaha menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perilaku seseorang terhadap rangsangan yang datang.
2. Menyangkut fungsi memprediksi
Teori atribusi ini menyajikan *pattern* yang dengannya, seorang dapat membingkai perilaku tertentu dan menjelaskannya. *Pattern* ini juga dapat menjelaskan sifat-sifat orang berdasarkan variabel yang beragam untuk kemudian meramalkan sikap dan perilaku seseorang terhadap suatu stimuli yang datangnya padanya. Dengan demikian, teori ini memiliki fungsi untuk meramalkan perilaku.
3. Menyangkut fungsi menjelaskan
Seperti dijelaskan di atas bahwa teori atribusi ini mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Seseorang mencoba memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu. Asumsi-asumsi ini kemudian dalam aplikasinya menjelaskan berbagai fenomena yang muncul terkait sikap manusia.
4. Menyangkut fungsi strategis
Ada beberapa peran yang dilakukan teori ini ketika mampu menerangkan, memprediksi dan menjelaskan suatu fenomena. Ini adalah suatu kelompok strategis. Karena pada dasarnya teori akan selalu mengedepankan fakta-fakta sehingga pandangan yang muncul secara sistematis dari fenomena yang diterangkan menjadi jelas dan bisa difahami secara gamblang. Dengan teori yang aplikatif ini maka orang bisa merancang suatu sikap tertentu berdasarkan respons orang lain yang telah diprediksi. Inilah yang sering menjadi dasar bagi penetapan *Standart Procedure Operations* (SOP) sebagai

sebuah sikap dan tindakan yang telah ditentukan sejak awal karena telah memahami respons yang mungkin muncul. Oleh sebabnya atribusi ini menurut hemat penulis adalah sebuah teori yang menjelaskan perilaku manusia dalam berkomunikasi.

Dalam penelitian ini teori ini digunakan mengukur kualitas internal para komunikator politik PKS dan PPP dari pesan-pesan yang verbal yang disampaikannya dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014. Sedangkan kualitas eksternal diukur berdasarkan tujuh hal yang diamati yakni; Tema kampanye, perlakuan terhadap waktu, hiburan, pelibatan anak-anak, komitmen terhadap kebersihan, waktu shalat (azan), dan kegiatan seputar kampanye.

2. *Organization Behavioral*

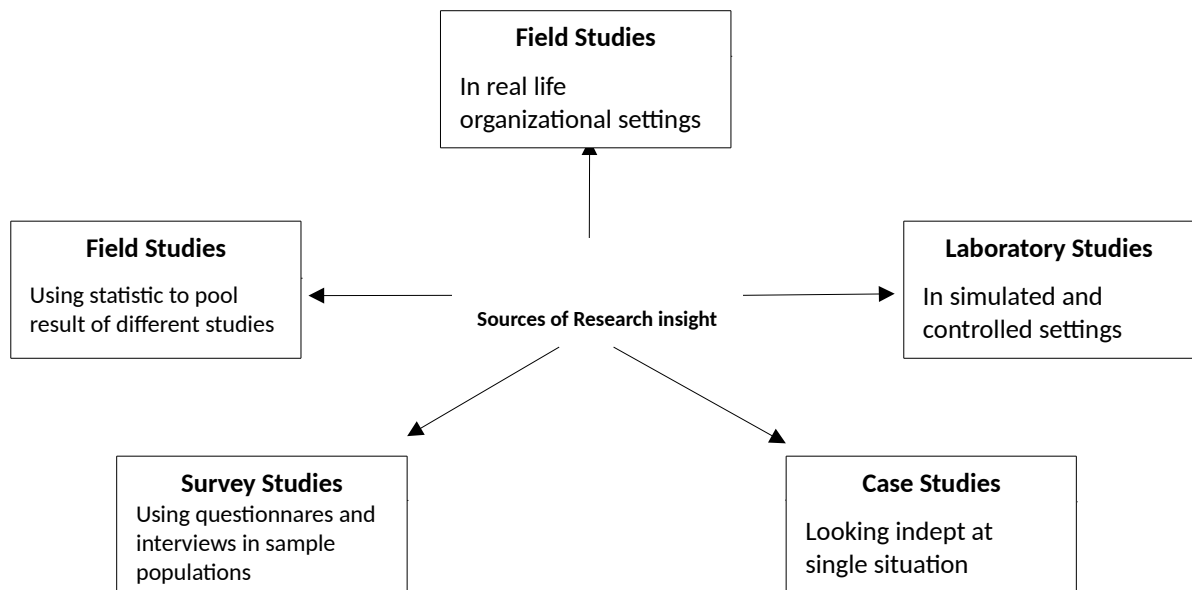
Terkait perilaku organisasi ini, suatu kajian yang secara khusus membicarakan persoalan ini adalah *Organizational Behavior*—adalah studi tentang individu-individu dan kelompok di dalam organisasi. Pada kajian ini memaparkan bahwa dalam mengambil keputusan—termasuk dalam hal kebijakan mengenai lingkungan. Aktivitas internal organisasi merupakan objek utama dari fokus untuk tujuan pengembangan berkelanjutan. Namun anggapan ini kemudian berkembang bahwa untuk perkembangan berkelanjutan. Betapa kerjasama antar-organisasi adalah suatu keharusan karena memberi keuntungan bagi organisasi. Hal ini didasarkan oleh sumber-sumber penelitian yang dilakukan, yang meliputi:

- a. *Field Studies* (studi lapangan); merupakan pengaturan jalannya organisasi sehari-hari,
- b. *Laboratory Studies* (studi laboratorium); dalam simulasi dan kendali aturan,
- c. *Case Studies* (studi kasus); melihat secara mendalam suatu situasi,
- d. *Survey Studies*; menggunakan kuesioner untuk bertanya kepada sample dalam suatu populasi,
- e. *Meta Analysis* (meta analisis); menggunakan statistis untuk mengelompokkan hasil-hasil yang diperoleh dalam studi berbeda.⁹⁹

⁹⁹ *Ibid*, h.6-7.

Untuk lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut ini:¹⁰⁰

Gambar 9: Metode Penelitian Dalam Perilaku Organisasi



Pertukaran informasi dan informasi lingkungan dalam dan antara organisasi menjadi faktor diperlukan dan penting dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pertukaran informasi antar perusahaan akan lebih rumit untuk keperluan informasi lingkungan karena dia meliputi spektrum yang luas. Data lingkungan seperti informasi tentang kondisi saat ini, dan berbagai latar belakang yang melingkupinya, ini dapat dipandang sebagai suatu krisis dalam komunikasi organisasi. Peter Frans Anthonissen menjelaskan bahwa krisis akan selalu ada bersama kita. *They take companies and organizations by surprise, and they take on a host of forms/mereka* (krisis itu) membuat organisasi terkejut dan mereka berjumlah banyak).¹⁰¹ Meskipun suatu jenis informasi tidak secara langsung berhubungan dengan lingkungan, namun dapat mengindikasikan dampak ikutannya, penyimpangan dan efek timbal balik dan lain sebagainya. Dan karena data lingkungan, informasi lingkungan dan informasi

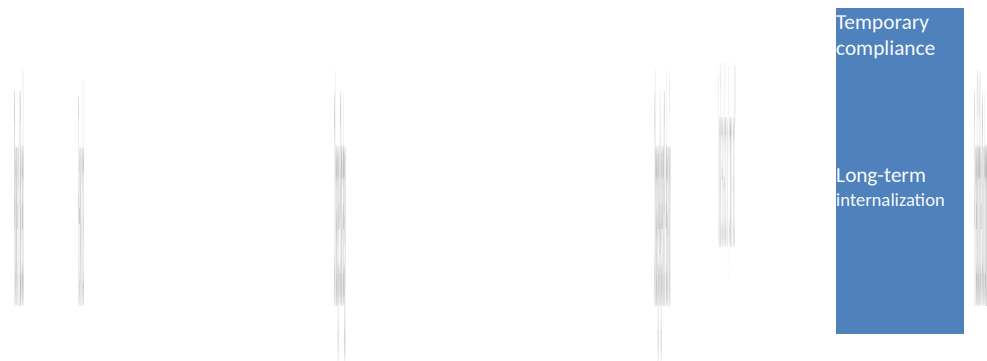
¹⁰⁰ Ibid, h.6.

¹⁰¹ Peter Frans Anthonissen, *Crisis Communication, practical PR strategies for reputation management and company survival* (London and Philadelphia: Kogan Page, 2008), h.7.

yang berhubungan dengan lingkungan adalah cita, dan menimbang dalam mengelola perbedaan jenis informasi tidak banyak berbeda, semua digolongkan ke dalam informasi lingkungan. Sebagai tambahan, ketika membahas tentang keberlanjutan, efek sosial juga harus dipertimbangkan. Ini penting untuk menambahkan informasi ke dalam aspek-aspek keberlangsungan sosial dalam informasi lingkungan.

Bisa dikatakan, suatu organisasi apabila dalam sikap dan kebijakannya tidak memiliki perhatian terhadap informasi lingkungan, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan perhatian mereka akan kepentingan lingkungan. Harus ada suatu perubahan sikap yang diikuti perubahan kebijakan dan strategi organisasi dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Perubahan sikap organisasi ini didasari oleh berbagai hal seperti tekanan lingkungan sekitar, tuntutan pasar dan lain sebagainya. Selanjutnya di dalam internal organisasi, hal itu tidak juga mudah karena ada proses yang mesti dilakukan untuk berlangsungnya sebuah perubahan sikap dan kebijakan. Peter Frans Anthonissen menggambarkan sebagai berikut:¹⁰²

Gambar 10: Proses Perubahan Sikap Dan Kebijakan



Dari gambaran tersebut di atas menunjukkan betapa perubahan sikap dan kebijakan suatu organisasi bukanlah suatu yang sederhana. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa dibutuhkan suatu instrumen untuk sebuah informasi lingkungan, yang digunakan dalam rangka meningkatkan efisiensi komunikasi? Muller dan Christ

¹⁰² Schermerhorn, *Organizational Behavior*, h.63.

mungkin bisa memberi penjelasan ketika kita mencari karakteristik informasi lingkungan. Ada beberapa hal yang dipaparkan sebagai karakteristik tersebut, yakni:

Multidisiplin: Informasi lingkungan pada umumnya berhubungan dengan banyak disiplin ilmu seperti kimia, biologi, sosiologi, hukum, bisnis administrasi dan sebagainya, dan tidak mungkin untuk membahas persoalan informasi lingkungan hanya dengan satu disiplin ilmu.

Struktur lemah: Hubungan langsung sebab akibat sering tidak jelas.

Level agregat berbeda: Untuk informasi komunikasi, dibutuhkan level agregat yang berbeda, misalnya data yang sangat rinci untuk otoritas publik atau lebih banyak informasi umum untuk keputusan strategis, misalnya seperti memilih pemasok.

Kompleksitas tingkat tinggi: Informasi lingkungan, khususnya yang berhubungan dengan sebab akibat selalu saja sangat kompleks. Sebagai konsekuensi, instruksi sederhana dan panduan mengatur masalah-masalah lingkungan, tidak bisa dengan sederhana digeneralisasi.

Bentuk lain dari penjelasan: Informasi lingkungan dapat dijelaskan dalam banyak bentuk berbeda, sebagai teks umum, dalam bentuk angka-angka statistik, atau dalam bentuk kartografis dan grafik. Karenanya, hal ini sulit untuk menggabungkan bentuk-bentuk informasi yang berbeda.

Pengalokasian informasi lingkungan dengan tepat: Informasi lingkungan selalu eksis dalam sistem informasi berbeda, dalam departemen berbeda, dan sangat desentralistik.

Kajian moneter: Sejak agregat informasi sering tidak mungkin, maka generalisasi kajian moneter dari informasi lingkungan bisa menjadi masalah besar. Selanjutnya, perbandingan data-data yang berbeda dapat menjadi rumit, dan nilai moneter dari informasi lingkungan dapat membawa kepada penyimpangan gambaran realitas.

Jadi jelas, bahwa kompleksitas dalam memahami informasi lingkungan mesti dijembatani dengan adanya peran dari *public relations*. Seorang praktisi *public relations* mesti mengetahui apa yang penting bagi organisasinya, bagaimana *public relations* menempatkan respons yang tepat bagi masalah dan peluang yang muncul, dan mengetahui betapa pentingnya publik. Mereka harus tahu apa yang harus

dilakukan, mengapa sesuatu jadi penting, dan bagaimana mengevaluasinya agar lebih efektif. Kita menyebutnya strategi komunikasi.¹⁰³ Selanjutnya, perencanaan strategi komunikasi memerlukan empat ketrampilan yang spesifik, yaitu;¹⁰⁴

1. Memahami mengapa, apa, dan bagaimana penelitian dan perencanaan,
2. Mampu untuk menggunakan keputusan-keputusan strategi untuk menentukan tujuan dan sasaran.
3. Mengetahui bagaimana implementasi kreatif dan efektif atas keputusan-keputusan tersebut dan membawa pesan-pesan organisasi kepada publik, dan,
4. Melengkapi proses dengan mengukur hasil-hasil dan mengevaluasi efektivitas program.

Untuk keberlangsungan sistem informasi lingkungan, Corcbach mengutip Korhonen (2002) yang memberi perhatian kepada dua tipe berbeda yang terkait pembangunan berkelanjutan. *Pertama*, aktivitas regional yang terkalkulasi. Dengan melakukan pendekatan geografis, jaringan perusahaan lokal yang bertujuan mereduksi dampak lingkungan seperti menciptakan taman eco-industri, dan daur ulang. *Kedua*, pendekatan siklus hidup yang mana terintegrasi dalam produk dan layanan dari produksi dari produksi bahan baku sampai menjadi barang siap pakai dan penggunaan barang daur ulang.

Selanjutnya kurangnya integrasi dan sharing informasi terlihat sebagai suatu penyebab utama tidak suksesnya kerjasama. Kerjasama dalam struktur dan sistematis dalam bentuk sistem informasi menjadi sebab tidak terintegrasinya operasional yang berbeda ke dalam suatu sistem terpadu yang mampu merespons kebutuhan konsumen untuk perubahan dalam kondisi masyarakat dan untuk kebutuhan akan arah kerjasama secara menyeluruh. Perkembangan dalam teknologi informasi dan komunikasi juga memunculkan kemungkinan untuk melakukan kerjasama. Begitupun, hal ini harus mempertimbangkan informasi, pertukaran informasi dan teknologi informasi yang hanya bisa digunakan dengan adanya saling menghormati dan kesadaran mengembangkan kerjasama untuk pembangunan berkelanjutan.

103 Roland D.Smith, *Campaign Design Management*, dalam William F.Eadie, Ed, *21st Century Communication A Reference Handbook* (Ed.), (London: SAGE, 2009), h.733.

104 *Ibid*,

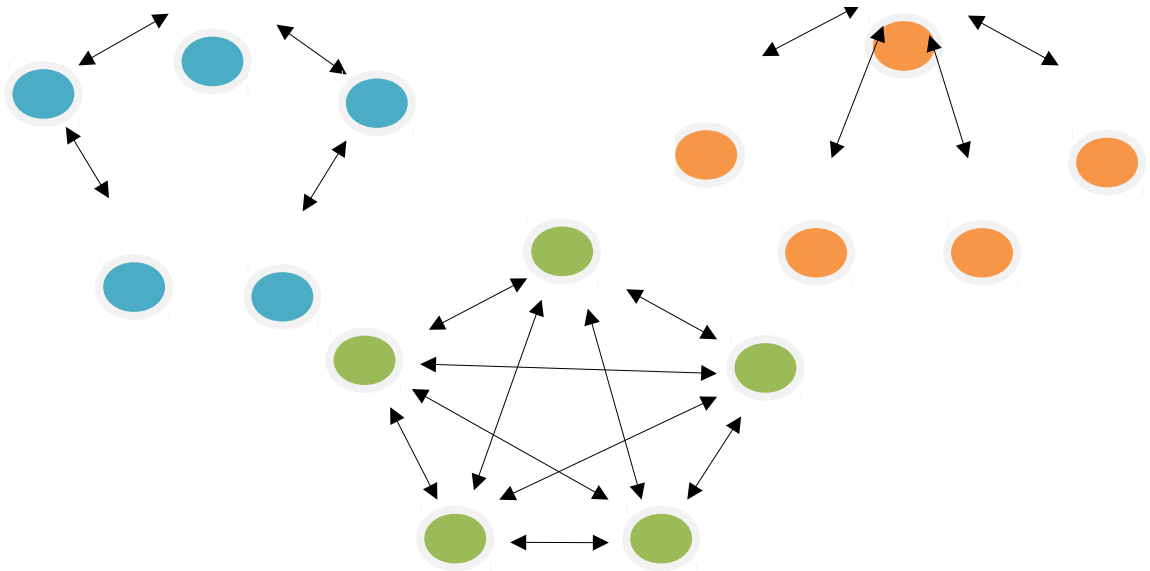
Hal ini tentu menimbulkan masalah karena informasi itu, kata Clare Beghtol, bukanlah sesuatu yang bisa didapat ketika kita menginginkan atau membutuhkannya.¹⁰⁵ Karena informasi tersebut tidak terintegrasi ke dalam pengetahuan manusia atau ke dalam pengetahuan dasar manusia. Untuk itulah diperlukan adanya katalogisasi pengetahuan yang terorganisir. Tujuan dari katalogisasi dan organisir pengetahuan ini adalah membantu orang mencapai tujuannya dalam menemukan informasi dengan mudah dan memungkinkan ketika dibutuhkan. Tujuan ini sepertinya sederhana, tetapi untuk memenuhi hal ini tidaklah benar-benar gampang atau bisa langsung dilakukan. Contohnya, cara bagaimana informasi digambarkan dan terorganisir secara ideal dan konsisten, sesuai prediksi dan layak jika dibandingkan dengan informasi dari media. Sebagai tambahan, deskripsi informasi organisasi harus cukup fleksibel untuk mengakomodir atas semua asumsi, menggambarkan dunia dan bahasa alamiah yang digunakan manusia saat ini, seperti halnya yang digunakan dalam sejarah informasi.

Kemudian aspek penting lainnya dalam pertukaran informasi lingkungan antar organisasi adalah kemungkinan adanya kekhawatiran kalau-kalau informasi akan dibocorkan kepada pesaing atau digunakan untuk mengeksploitasi mereka di masa depan. Dalam konteks *sharing* informasi, seperti halnya di manapun juga, dalam pertukaran informasi kepercayaan ditemukan meningkat. Kehandalan dalam kemitraan juga penting sejak *sharing* dan pertukaran informasi memberi kontribusi bagi rantai pengenalan terhadap resiko-resiko baru dan kerentanan. Ini penting untuk menanggapi secara tepat bagaimana informasi mengambil perannya. Dalam konteks ini digambarkan tiga jaringan kelompok kecil secara umum dan beberapa kriteria efektivitas komunikasi dari kelompok kecil organisasi yang digambarkan sebagai berikut:¹⁰⁶

Gambar 11: *Three Common Fromal Small-Group Networks*

¹⁰⁵ Clare Beghtol, *Cataloging And Knowledge Organization* dalam Schement, Jorge Reina (Ed.), *Encyclopedia of Communication and Information* (New York, Gale Group, 2002), h.117.

¹⁰⁶ Stephens P.Robbins, *Organizational Behavior* (Prentice Hall Inc., 2003), h.10.

Tabel 2: *Small-Group and Effectiveness Criteria*

Criteria	Networks		
	Chain	Wheel	All channel
Speed	Moderate	Fast	Fast
Accuracy	High	High	Moderate
Emergence of Leader	Moderate	High	None
Member of Satisfaction	Moderate	Low	High

3. *Strategic Communications Planning*

Langkah-langkah untuk menguraikan apa yang dilakukan PKS dan PPP Sumatera Utara dalam perencanaan kampanye politiknya dilakukan dengan menggunakan teori *setting goals and objectives*. Strategi yang dikembangkan Laurie J. Wilson dan Joseph D. Ogden ini memandu proses perencanaan dalam komunikasi.

Ini juga sebuah panduan analisis yang menggunakan pendekatan perencanaan komunikasi untuk mengukur efektivitas kinerja partai politik.¹⁰⁷

3.1. Perencanaan

Susunan *strategic communications planning* (strategi perencanaan komunikasi) terbagi dalam tiga bagian; rencana aksi, komunikasi, dan evaluasi—sebagai fungsi yang berbeda. Susunan perencanaan ini menekankan pada perencanaan setiap langkah di dalam proses sebelum implementasinya. Selanjutnya, rencana yang dihasilkan, meskipun dinamis, akan mengarahkan pada langkah-langkah komunikasi dan evaluasi dalam proses yang terjadi. Perencanaan yang dilakukan pada dua level yang berbeda dalam setiap organisasi. Perencanaan jangka panjang akan melihat pada keseluruhan organisasi dan misinya. Hal ini dikenali dari tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, publik, dan pesan-pesan yang diarahkan untuk penyelesaian akhir dari misi yang dimiliki. Pada level ini, perencanaan menjadi panduan untuk perencanaan jangka pendek yang lebih spesifik—yang merupakan perencanaan level kedua. Memenej krisis, meluncurkan produk baru, dan memperbaiki reputasi jelek, semuanya adalah upaya spesifik dalam keseluruhan rencana jangka panjang. Adapun susunan perencanaan tersebut terdiri dari:

1. Apakah kebutuhan khusus yang akan diselesaikan (tujuan dan sasaran untuk mengatasi tantangan),
2. Siapakah (tokoh kunci) yang perlu kita temui dan/atau dimotivasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran.
3. Apakah kita perlu menyampaikan (pesan) dalam memilih publik untuk aksi stimulasi dan membantu kita mencapai sasaran-sasaran kita, dan
4. Bagaimana (strategi dan taktik) untuk menyampaikan pesan-pesan kepada publik agar keduanya menerima dan bertindak atas mereka.

Keempat hal ini adalah kunci keputusan pada jantung susunan perencanaan. Prosesnya analitis, dengan pengambilan keputusan dan rencana aksi di setiap langkah yang mengarahkan pada pengambilan keputusan dan rencana aksi lebih lanjut. Begitulah langkah-langkah yang diambil harus berlangsung pada gilirannya.

¹⁰⁷ Selanjutnya pemaparan teori *setting goals and objectives* ini disarikan dari buku karangan Wilson, J.Laurie dan Ogden, D.Joseph, *Strategic Communications Planning* (Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company, 2008), h.72-82.

Misalnya tokoh kunci belum dapat kita pilih sampai kita menentukan tujuan dan sasaran-sasaran yang dibutuhkan.

3.2. Sasaran-sasaran

Jika dibandingkan dengan tujuan, sasaran lebih fokus dan spesifik. Rumusan sasaran terbaik adalah yang menggambarkan hasil terukur. Biasanya sasaran bersifat jamak dan mendukung tujuan yang satu di mana antara satu sasaran dengan yang lainnya saling bersinergi. Sasaran-sasaran ini memiliki empat bagian, yakni;

1. Identifikasi suatu khalayak tertentu,
2. Suatu keadaan yang terukur,
3. Merancang sebuah tingkat kecakapan,
4. Merancang suatu bingkai waktu.

Dalam literatur komunikasi, delapan karakteristik berikut muncul untuk memandu perumusan sasaran yang baik.

1. Tertulis. Karakteristik ini tampaknya jelas, tapi biasanya kita memulai merencanakan dengan berasumsi bahwa semua orang mengerti tujuan dan sasaran kita. Namun seorang anggota kelompok tertentu mungkin memiliki persepsi berbeda tentang sasaran yang akan dicapai. Karenanya membuat sasaran kelompok secara tertulis akan menghindari perbedaan persepsi.
2. Rumusan yang spesifik dan jelas. Untuk terlepas dari ambiguitas, maka tugas-tugas yang dirumuskan mesti spesifik dan jelas.
3. Terukur dan berorientasi perbaikan. Sasaran harus berorientasi perbaikan, dan ia harus menyebutkan secara pasti tugas yang satu dengan lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Untuk mendapatkan sasaran yang benar-benar memandu pada program dan mencapai puncak sukses, maka ia harus terukur.
4. Kredibel. Menjadi kredibel berarti bahwa penyelesaian yang terjadi dapat langsung dialamatkan pada upaya yang dilakukan.
5. Penerimaan. Karakteristik ini merujuk pada tingkat penerimaan sasaran untuk organisasi dan manajemen. Untuk itu, sasaran harus sejalan dengan dukungan organisasi dan mendukung misi, tujuan, sasaran organisasi. Hal ini terkait isu-isu, permasalahan dan perbaikan penerimaan manajemen.
6. Realistis dan tercapai. Mempertahankan sasaran untuk tetap spesifik dan jelas akan membantu tetap realistis.
7. Terikat ukuran waktu. Durasi komunikasi atau kampanye komunikasi ditentukan oleh masalah atau kesempatan yang datang. Kadang-kadang

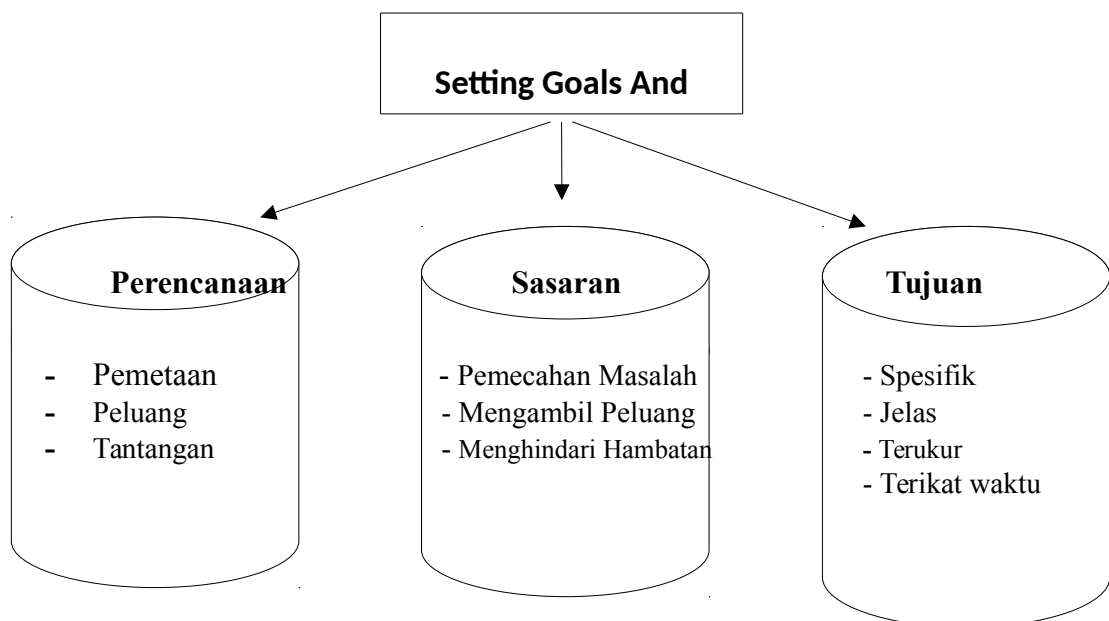
memerlukan waktu singkat, upaya cepat (hanya beberapa minggu atau bulan), sementara yang lainnya lebih lama.

8. Terikat ukuran anggaran. Anggaran yang terbatas mungkin akan memerlukan sasaran-sasaran yang kreatif dan lebih sederhana. Mungkin harus ada kreativitas terbaik dalam perencanaan. Walaupun anggaran yang lebih besar akan menunjukkan program yang lebih ambisius, namun realitas lingkungan bisnis sekarang memiliki sumber komunikasi terbatas.

3.3. Tujuan

Tujuan adalah suatu pernyataan untuk rencana. Tujuan adalah suatu kalimat yang akan diraih pada akhirnya untuk menyelesaikan masalah inti atau menangkap peluang yang signifikan. Seringnya, satu tujuan sudah cukup dan harus selalu konsisten dengan tujuan manajemen. Tujuan ini mesti dirumuskan dengan hati-hati. Ketika masalah inti atau kesempatan bisa dirumuskan secara akurat, maka *setting* tujuan menjadi sesuatu yang sederhana dengan susunan perencanaan. Tujuan adalah suatu uraian kembali yang positif dari inti permasalahan. Apabila tantangan menurunkan kepercayaan investor yang kemudian menyebabkan penurunan stok harga, misalnya, maka bangunlah kembali tujuan sehingga stok harga akan meningkat. Jika atas masalah yang datang kita kurang memiliki informasi, maka tujuan Anda adalah menyampaikan informasi yang tepat. Dari uraian yang dikemukakan di atas *setting* perencanaan, sasaran dan tujuan dari teori yang dikemukakan Wilson dan Ogden (2008) di atas digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 12: *Setting* Strategi Komunikasi



- Terbuka
- Sesuai panduan misi

4. Teori S – O – R

Teori S-O-R (Stimulus-Organism-Response), merupakan teori komunikasi yang lahir dari ilmu psikologi. Kesamaan ini karena objek material dari ilmu psikologi dan ilmu komunikasi adalah sama yakni manusia itu sendiri. Manusia dalam hal ini dipandang memiliki jiwa yang komponen-komponennya terdiri dari sikap, opini, perilaku, kognisi afeksi dan konasi. Model ini memiliki asumsi dasar yakni media massa menimbulkan efek yang terarah, segera dan langsung terhadap komunikan. Menurut stimulus response ini, efek yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Jadi unsur-unsur dalam model ini adalah ;

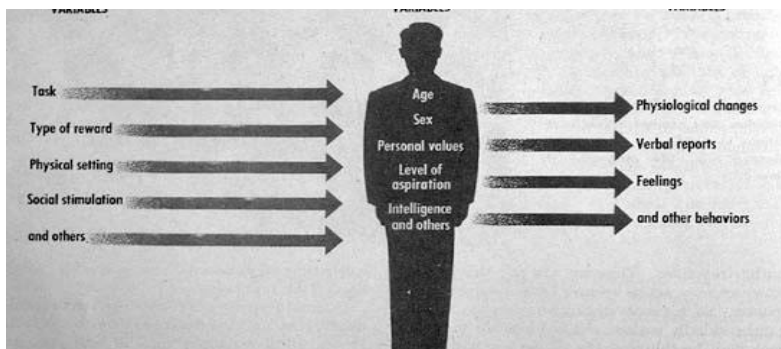
Pesan (stimulus, S) — Komunikan (organism, O) — Efek (response, R)

Stimulus (rangsang) yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti disini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. Apabila stimulus telah mendapat perhatian dari organisme (diterima) maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Setelah itu organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesiapan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya (bersikap). Akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut (perubahan perilaku).

Menurut teori ini, dalam proses komunikasi berkenaan dengan perubahan sikap adalah aspek “bagaimana“ bukan “apa“ dan “mengapa“. Perubahan sikap bergantung pada proses yang terjadi pada individu. Stimulus atau pesan yang

disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau ditolak.¹⁰⁸ Artinya dalam proses komunikasi yang berlangsung, teori ini mencoba menjelaskan bagaimana proses perubahan sikap itu terjadi. Dalam konteks kampanye partai politik adalah bagaimana kampanye yang dilakukan bisa mengubah perilaku khlayak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian, pengertian dan penerimaan komunikan, yang digambarkan dengan bagan berikut:¹⁰⁹

Gambar 13: Teori S-O-R



Stimulus atau pesan yang disampaikan kepada komunikan mungkin diterima atau mungkin ditolak. Komunikasi akan berlangsung jika ada perhatian dari komunikan. Proses berikutnya komunikan mengerti. Kemampuan komunikan inilah yang melanjutkan proses berikutnya. Setelah komunikan mengolahnya dan menerimanya, maka terjadilah kesediaan untuk mengubah sikap. Teori ini mendasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang (stimulus) yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya kualitas dari sumber komunikasi (sources) misalnya kredibilitas, kepemimpinan, gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang, kelompok atau masyarakat.

¹⁰⁸ Christopher, *Jurnal E-Komunikasi Universitas Kristen Petra, Surabaya, Vol 1. No.3 Tahun 2013*, h.288.

¹⁰⁹ Fernald Munn, & Fernald (*Basic Psychology*, 1969, Houghton Mifflin), h.24.

Kampanye partai politik baik melalui rapat akbar, pertemuan-pertemuan terbatas maupun melalui alat-alat peraga merupakan sarana kampanye memperkenalkan produk partai politik kepada khalayak. Keberadaanya dimaksudkan membantu partai politik dalam mempengaruhi afeksi pemirsa. Ia menjadi kekuatan dalam menstimulus khalayak agar mau melakukan tindakan yang diinginkan. Secara substansi sarana kampanye memiliki kontribusi memformulasikan pesan-pesan kepada khalayak. Akibatnya secara tidak langsung khalayak telah melakukan proses belajar dalam mencerna serta mengingat pesan yang telah diterimanya. Kondisi ini tentunya tanpa disadari sebagai upaya mengubah sikap khalayak.

Pendekatan teori S-O-R lebih mengutamakan cara-cara pemberian imbalan yang efektif agar komponen konasi dapat diarahkan pada sasaran yang dikehendaki. Sedangkan pemberian informasi penting untuk dapat berubahnya komponen kognisi. Komponen kognisi itu merupakan dasar untuk memahami dan mengambil keputusan agar dalam keputusan itu terjadi keseimbangan. Keseimbangan inilah yang merupakan system dalam menentukan arah dan tingkah laku seseorang. Dalam penentuan arah itu terbentuk pula motif yang mendorong terjadinya tingkah laku tersebut. Dinamika tingkah laku disebabkan pengaruh internal dan eksternal.

Dalam teori S-O-R, pengaruh eksternal ini yang dapat menjadi stimulus dan memberikan rangsangan sehingga berubahnya sikap dan tingkah laku seseorang. Untuk keberhasilan dalam mengubah sikap maka komunikator perlu memberikan tambahan stimulus (penguatan) agar penerima berita mau mengubah sikap. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti dengan pemberian imbalan atau hukuman. Dengan cara demikian ini penerima informasi akan mempersepsikannya sebagai suatu arti yang bermanfaat bagi dirinya dan adanya sanksi jika hak ini dilakukan atau tidak. Dengan sendirinya penguatan ini harus dapat dimengerti, dan

diterima sebagai hal yang mempunyai efek langsung terhadap sikap. Untuk tercapainya ini perlu cara penyampaian yang efektif dan efisien.

5. Analisis Isi Berita Media

Teknik Analisis Isi (*content analysis*) adalah suatu kajian yang digunakan setelah perang dunia II, yang dilakukan Barelson (1952) yang mungkin merupakan hasil pertama dari analisis isi. Kajian analisis isi kemudian menyebar ke berbagai disiplin ilmu.¹¹⁰ Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi: surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, peraturan, undang-undang, musik, teater, dan sebagainya.¹¹¹ Analisis isi pada dasarnya adalah analisis isi kuantitatif (*quantitatif content analysis*). Jika seseorang menyebut analisis isi, maka yang dimaksud sebenarnya adalah analisis isi yang kuantitatif.¹¹²

Syukur Kholil merangkum beberapa definisi tentang analisis isi, yakni dari Wimmer dan Dominick, Kerlinger, dan Barelson, kemudian merumuskan tiga pemahaman berkaitan dengan analisis isi:¹¹³

- a. Analisis isi adalah sistematis sesuai dengan prosedur yang benar.
- b. Analisis isi adalah objektif, berarti hasil yang sama akan diperoleh jika diuji

¹¹⁰ Klaus Krippendorff, *Content Analysis; An Introduction to Its Methodology, Second Edition* (California: Sage Publications, 2004), h.11.

¹¹¹ Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h.89.

¹¹² Kimberly A. Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook* (Thousand Oak: Sage Publications, 2002), h.14.

¹¹³ Lihat Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Cipta Pustaka, 2006), h.51-52.

oleh peneliti lain yang menggunakan kategori yang sama. Dengan demikian, makna objektif di sini adalah hasil yang diperoleh adalah tergantung kepada tatacara yang digunakan, bukan kepada seorang peneliti.

- c. Analisis isi adalah bersifat kuantitatif, namun tidak tertutup kemungkinan untuk cara lain.

Ada perbedaan tentang sifat kuantitatif yang disebutkan Neuendorf sebagai secara otomatis bersifat kuantitatif, sementara pengertian dari Dominick, Kerlinger, dan Barelson membuka peluang kemungkinan untuk dilakukan dengan cara lain. Perbedaan pengertian analisis isi tersebut, menurut Syukur Kholil disebabkan oleh keragaman pengertian analisis isi itu muncul akibat perbedaan perhatian dan pandangan tentang analisis isi itu sendiri.

Secara umum ada dua jenis aliran (paradigma) dalam studi isi.¹¹⁴ *Pertama*, aliran transmisi. Aliran ini melihat komunikasi sebagai bentuk pengiriman pesan, Komunikasi di sini dilihat sebagai proses yang statis. Proses dilihat secara linear dari pengirim ke penerima. Asumsi dari aliran ini adalah adanya hubungan satu arah dari media kepada khalayak. Peranan dalam menyampaikan pesan digambarkan sebagai yang satu aktif, dan yang lain pasif. *Kedua*, aliran produksi dan pertukaran makna. Aliran ini melihat komunikasi sebagai proses penyebaran (pengiriman dan penerimaan pesan, maka aliran ini melihat komunikasi sebagai produksi dan pertukaran makna. Yang menjadi titik perhatian bukan bagaimana seseorang mengirimkan pesan, tetapi bagaimana masing-masing pihak dalam lalu lintas komunikasi saling memproduksi dan mempertukarkan makna. Di sini tidak ada pesan dalam arti yang statis yang saling dipertukarkan dan disebarkan. Pesan itu sendiri dibentuk secara bersama-sama antara pengirim dan penerima atau pihak yang berkomunikasi.

Jalaluddin Rakhmat menyatakan analisis isi umumnya melalui tahap-tahap: (1) perumusan masalah, (2) perumusan hipotesis, (3) penarikan sampel, (4) pembuatan alat ukur (koding), (5) pengumpulan data, (6) analisis data.¹¹⁵ Sedangkan menurut Syed Arabi Idid langkah analisis isi harus mengikuti langkah-langkah

¹¹⁴ Fiske dalam Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h.3.

tertentu yang banyak dilakukan peneliti, yaitu:¹¹⁶ (1) menentukan objek penelitian, (2) menentukan bahan-bahan yang hendak dikaji, (3) menentukan kategori-kategori yang akan diteliti, (4) menentukan unit analisis, (5) memilih sampel penelitian, (6) membuat kerangka koding, (7) membuat borang koding analisis isi, (8) uji coba instrumen, (9) melatih petugas koding, (10) mengkode data, (11) menganalisis data, dan (12) membuat laporan penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, dalam mengkaji pemberitaan kampanye Parpol Islam dalam Pemilu Legislatif 2014, digunakan analisis isi deskriptif kuantitatif. Dalam analisis isi ini langkah-langkah yang dilakukan adalah:

Memilih sampel penelitian; Analisis isi yang dilakukan adalah terhadap berita-berita kampanye politik di Pemilu Legislatif 2014 di Harian Nasional terbitan kota Medan. Berita yang dimaksud adalah berita-berita yang disiarkan menjelang pelaksanaan pencoblosan 9 April 2014, yakni edisi 1 Desember 2013 sampai dengan 6 April 2014. Sedangkan surat kabar yang dipilih adalah Harian *Waspada* Medan, dan Harian *Analisa* Medan. Kedua surat kabar harian ini dipandang representatif pemberitaan surat kabar di kota Medan karena merupakan dua surat kabar mainstream di ibukota Provinsi Sumatera Utara.

Kerangka koding; Berita-berita kampanye politik Pemilu Legislatif 2014 di kedua surat kabar tersebut dikoding berdasarkan beberapa lima kategori yang ditetapkan, yakni;

1. Kecenderungan pemberitaan
2. Penempatan halaman berita PKS dan PPP
3. Pemuatan halaman warna dan black/white berita PKS dan PPP
4. Sumber laporan PKS dan PPP
5. Tema berita PKS dan PPP

Pengumpulan data; Data tentang berita PKS dan PPP tentang kampanye Pemilu Legislatif 2014 dalam rentang waktu yang ditentukan di kedua surat kabar

¹¹⁵ Rakhmat, *Metode Penelitian*, h.89.

¹¹⁶ Kholil, *Metodologi Penelitian*, h.52-53.

tersebut kemudian dikumpulkan dengan menggunakan lembar koding (*coding sheet*) yang dibuat berdasarkan lima kategori yang telah ditetapkan sebelumnya.

Analisis data; Data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan tabel tabulasi yang dilakukan secara deskriptif.

D. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang partai Islam, khususnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) banyak, kalau tidak dibilang melimpah, dilakukan oleh para peneliti baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satu penyebabnya adalah bahwa partai Islam, terkhusus partai politik yang berakar dari gerakan Islam telah menjadi fenomena di ujung masa pemerintahan Orde Baru. Di antara penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian berjudul: *Thinking Globally, Acting Locally: Analyzing the Islamist Activism of Indonesia's Prosperous Justice Party (PKS) from a Social Movement Theory Perspective*. Penelitian dilakukan oleh Burhanuddin Muhtadi di The Australian National University yang sub tesisnya telah diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul "Dilemma PKS" (Jakarta: Gramedia, 2012).

Studi ini mencari jawaban mengapa PKS lahir dan bagaimana proses kelahiran PKS? Untuk menjawabnya diperhatikan proses-proses dan faktor-faktor organisasional yang mungkin menyebabkan dan memfasilitasi kemunculan partai ini. Dalam perspektif ranah gerakan sosial, teori-teori formasi dan pembentukan gerakan digunakan sebagai pisau analisis. Pertanyaan kedua adalah bagaimana PKS menyampaikan pesan ideologinya secara jelas yang kemudian diterima oleh kelompok sasaran? Studi ini meneliti sejumlah isu non-Islamis nasional maupun internasional seperti pemberantasan korupsi dan isu Palestina yang gencar disuarakan dalam aksi-aksi kolektifnya. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana strategi elektoral PKS dalam mengembangkan pangsa pasar elektoral mereka dengan mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka.

Studi ini menggunakan pendekatan integrasi gerakan sosial yang mengkaji tiga faktor penting: *political opportunities* (kesempatan politik), *mobilising structure* (struktur mobilisasi) atau *resource mobilisation* (mobilisasi sumberdaya), dan *framing processes* (proses pembingkai). Studi ini menggunakan dua sumber utama yakni penelitian pustaka dan lapangan. Penelitian pustaka dilakukan dengan meneliti

sejumlah buku, artikel, laporan penelitian, jurnal, tesis, desertasi, dan semacamnya. Juga dilakukan melalui eksplorasi elektronik (internet) dan media cetak (surat kabar dan majalah) yang berhubungan dengan subjek studi. Sedangkan sumber utama adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Jakarta, dan sejumlah basis politik PKS di Depok, Padang, Bandung, Bekasi, dan Tangerang.

Teknik penelitian menggunakan Besaran-N, Analisis Level-Nasional dengan menggunakan metode analisis peristiwa-protes (*protest-event*) yang biasa dipakai dalam penelitian gerakan sosial. Penelitian lapangan yang dilakukan selama dua bulan di Jakarta, penelitian ini menggunakan dua harian nasional yakni *Kompas* dan *Republika*. Pengumpulan data dari dua koran ini menjangkau rentang waktu 27 tahun (1980-2007).

Penelitian ini merumuskan kesimpulan bahwa sebagai partai Islamis, PKS melipatgandakan dukungan elektoral hingga 600 persen, dari 1,3 persen pada 1999 menjadi 7,34 persen pada 2004. Berangkat dari sintesis pendekatan dalam teori gerakan sosial yang bersifat integral penelitian ini membuktikan bahwa PKS: (1) hadir dari kondisi sosial dan politik yang sedang bergolak yang kemudian menciptakan struktur kesempatan politik yang kondusif bagi munculnya gerakan; (2) memanfaatkan kesempatan sosial dan politik dengan mengonsolidasikan dan meningkatkan sumberdaya organisasi dan jejaring komunikasinya dalam rangka menopang keberlangsungan gerakan; dan (3) secara sadar dan subjektif menanggapi terbukanya kesempatan politik dan peningkatan kapasitas organisasi dan jejaring dengan memobilisasi para kader dan simpatisan yang memiliki gagasan, ideologi, pemahaman, dan kegelisahan yang sama.

Kedua, Yedi Purwanto (2009), menulis penelitian berjudul *Masa Depan Partai Politik Islam Dalam Pertarungan Pemilu 2009*. Studi kasus yang meneliti Partai politik Islam di Indonesia (PPP, PKS, PBB) ini menguraikan isu kepemimpinan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Objektif kajian/persoalan kajian hipotesis mengenai partisipasi politik umat Islam Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2004 dan hubungannya dengan masa depan partai politik Islam. Oleh karena itu, pembahasan mengenai teori partisipasi dan peranan umat Islam terhadap demokrasi perlu didahulukan pembahasannya.

Penelitian ini menggunakan teori Stuktural Fungsional yang menjelaskan hubungan realitas tertinggi (ideal) dengan realitas fisik yang dibingkai oleh kegiatan *conditioning* dan *controlling*. Hubungan realitas tertinggi dengan realitas fisik dibentuk oleh empat media (subsistem), yaitu subsistem kebudayaan, subsistem sosial, subsistem kepribadian, dan subsistem perilaku organik. Selanjutnya hasil kajian menunjukkan peranan umat Islam dalam pemilihan presiden tahun 2004 dapat dikelompokkan menjadi dua: (1) kelompok Muslim yang menggunakan hak pilihnya dengan bertindak sebagai gladiator, kegiatan transisi, atau kegiatan petaruh; dan (2) kelompok Muslim yang melakukan tindakan apatis (mereka memilih untuk tidak memilih) dan lebih dikenal sebagai kelompok Golput.

Perubahan yang terjadi di tubuh partai-partai Islam begitu cepat sehingga kurang tersosialisasikan kepada publik. Kesan yang muncul kemudian adalah bahwa politisi muslim-santri cenderung inkonsisten antara pernyataan dengan tindakan politik yang mereka lakukan. Inkonsistensi ini bisa dijadikan alasan oleh para pendukungnya untuk tidak memilih lagi partai-partai tersebut pada Pemilu yang akan datang, yaitu Pemilu 2009. Kekalahan pasangan Megawati-KH.Hasyim Muzadi pada pemilihan presiden putaran kedua merupakan kekalahan pihak Muslim santri alias Muslim nasionalis. Pasangan ini didukung sejumlah kiyai tradisional dan moderenis, tetapi kalah. Ini diartikan bahwa Muslim santri sudah tidak lagi ditaati oleh masyarakatnya.

Ketiga, Jan Woischnik dan Philipp Müller menulis penelitian berjudul *Islamic Parties And Democracy In Indonesia Insights From The World's Largest Muslim Country*. Penelitian ini dilakukan di Indonesia pada tahun 2013. Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: apakah jenis partai-partai Islam yang berpartisipasi dalam demokrasi di Indonesia, dan bagaimana karakteristik program-program dan ideologi-ideologinya? Apakah arti berakhirnya era otoriter (Soeharto 1998) dan terbukanya era reformasi bagi partai-partai politik Islam? Dan bagaimana mereka berkembang sejak itu? Apakah partai politik Islam harus melihatnya sebagai tantangan atau kesempatan bagi demokrasi Indonesia? Dan apakah pengalaman Indonesia dengan partai Islam ditawarkan ke dunia Arab meskipun berbeda secara budaya dan politik.

Penelitian ini menemukan bahwa sampai dengan Pemilu 2004, kampanye PKS sangat kuat untuk memperkenalkan hukum syariah. Tetapi setelah itu strategi partai terfokus isu-isu perlawanan terhadap korupsi. Sedangkan PPP tetap dipilih oleh umumnya orang Nahdlatul Ulama (NU) dan pemilih dari kelompok menengah. Partai Islam ini terus berupaya membedakan dirinya dengan partai-partai Islam lainnya dengan mengedepankan program Islamis. Kekuatan partai Islam juga dianggap masih mengakar di tengah masyarakat. Ini diindikasikan dari hasil beberapa pemilihan kepala daerah di beberapa provinsi yang menunjukkan bahwa partai Islam masih memiliki kekuatan yang harus diperhitungkan setidaknya di beberapa daerah. Di antara calon kepala daerah yang memenangkan pemilihan gubernur di tingkat provinsi yaitu Gatot Pujo Nugroho di Provinsi Sumatera Utara, dan Ahmad Heryawan di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini juga menjelaskan, bahwa keberadaan partai politik Islam membuat sejumlah besar hukum dan regulasi yang menunjukkan keuntungan bagi mayoritas pemeluk Islam di Indonesia, memberikan jaminan bagi pelaksanaan ide-ide yang bersumber dari ajaran Islam dan menempatkannya pada bagian penting dalam negara dan sistem sosial Indonesia. Namun pada saat yang sama partai-partai Islam tidak mendapatkan keuntungan dari kecenderungan Islamisasi dalam masyarakat secara keseluruhan. Maksudnya, mereka mengklaim bahwa hukum dan regulasi yang berorientasi Islam adalah hasil kerja mereka, namun mereka tidak dapat menerjemahkan perkembangan ini ke menjadi mobilisasi politik—nyatanya partai oposisi yang lebih mendapat manfaat. Salah satu alasannya dapat ditemui dalam program partai nasionalis-sekuler tradisional yang mengarahkan inisiatif program partai yang strategis untuk memungkinkan agama memainkan peran lebih besar dalam kehidupan publik. Selama 15 tahun setelah Indonesia mengenal demokrasi, peluang pun muncul untuk membangun hubungan antara Islamis dengan partai Islam dan partai-partai Islam dan inti dari kepercayaan. Namun Jan Woischnik dan Philipp Müller meragukan partai-partai Islam yang ketat memegang ajaran Islam sesuai dengan bentuk-bentuk pemerintahan demokrasi. Mereka menyebutnya dengan *self-fulfilling* atau sekedar memenuhi syarat demokrasi yang selanjutnya mereka sebut dengan “dilema demokrasi”. Kaum Islami disebut sebagai aktor antidemokrasi yang secara substansial melemahkan kemapanan demokrasi. Mereka memandang hal

ini sebagai ancaman demokrasi karena aktor yang mereka sebut itu memiliki akses mengembangkan pengaruhnya dan memiliki kesempatan membentuk masa depan.

Dari tiga kajian yang pernah dilakukan tentang partai politik Islam yang diuraikan di atas, Burhanuddin Muhtadi melakukan penelitian untuk mencari jawaban mengapa PKS lahir dan bagaimana proses kelahiran PKS. Dia menggunakan pendekatan integrasi gerakan sosial dan menyimpulkan bahwa PKS yang lahir dari kondisi yang bergolak kemudian menciptakan struktur kesempatan politik kondusif dan memanfaatkan kesempatan dengan meningkatkan sumberdaya organisasi, kemudian secara sadar memobilisasi para kader dan simpatisan yang memiliki gagasan, ideologi, pemahaman, dan kegelisahan yang sama.

Sedangkan Yedi Purwanto yang menggunakan teori Stuktural Fungsional meneliti PPP, PKS, PBB dalam isu kepemimpinan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Objektif kajian/persoalan kajian hipotesis mengenai partisipasi politik umat Islam Indonesia pada pemilihan presiden tahun 2004 dan hubungannya dengan masa depan partai politik Islam. Hasil penelitian menunjukkan peranan umat Islam dalam pemilihan presiden tahun 2004 adalah menggunakan hak pilihnya dengan bertindak sebagai gladiator, kegiatan transisi, atau kegiatan petaruh, dan melakukan apatis dengan tidak menggunakan hak pilih.

Sementara penelitian Jan Woischnik dan Philipp Müller tentang partai Islam di negara Islam terbesar di dunia. Penelitian ini menemukan bahwa sampai dengan Pemilu 2004, kampanye PKS sangat kuat memperkenalkan hukum syariah, tetapi setelah itu strategi partai terfokus isu-isu perlawanan terhadap korupsi. Sedangkan PPP tetap dipilih oleh umumnya orang Nahdlatul Ulama (NU) dan pemilih dari kelompok menengah. Selain itu juga menjelaskan, bahwa keberadaan partai politik Islam membuat sejumlah besar hukum dan regulasi yang menunjukkan keuntungan bagi mayoritas pemeluk Islam di Indonesia, memberikan jaminan bagi pelaksanaan ide-ide yang bersumber dari ajaran Islam dan menempatkannya pada bagian penting dalam negara dan sistem sosial Indonesia.

Akan halnya dalam disertasi ini meneliti tentang partai politik Islam dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip komunikasi Islam (PKS dan PPP) dalam Pemilu Legislatif 2014. Penelitian ini menggunakan teori atribusi untuk menjelaskan komunikasi politik elit partai Islam dalam kampanye. Selain itu mengetahui strategi

komunikasi politik serta pemahaman elit partai Islam dalam Pemilu Legislatif 2014. Persamaan penelitian ini dengan tiga penelitian yang disebutkan di atas adalah sama-sama meneliti tentang partai politik Islam di Indonesia. Jika penelitian Burhanuddin Muhtadi mengambil angle gerakan partai Islam, maka Yedi Purwanto meneliti tentang masa depan partai Islam dalam kaitan isu kepemimpinan dan partai politik Islam, dan Jan Woischnik dengan Philipp Müller meneliti partai Islam di negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia (Indonesia) dengan persoalan penerapan hukum-hukum syariat Islam.

E. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama adalah seperangkat aturan yang diturunkan Allah SWT untuk mengatur segala sisi kehidupan manusia, di antaranya adalah cara berkomunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi yang disampaikan di kerangka teori penelitian ini merupakan acuan aturan dalam berkomunikasi. Ketika suatu organisasi partai politik Islam didirikan, maka sudah semestinya menggunakan aturan-aturan Islam dalam segala tindakannya, tak terkecuali dalam berkomunikasi. Artinya harus ada kesamaan dalam artikulasi bahasa politik dengan artikulasi bahasa agama. Bahkan jika dilihat dari masa-masa awal keIslaman, sebenarnya dalam Islam tidak dikenal adanya pemisahan antara bahasa agama dan bahasa politik.¹¹⁷

Kedudukan partai politik Islam sebenarnya semakin strategis karena Islam sebagai agama dakwah mengharuskan adanya denyut dakwah di setiap bidang kehidupan yang berlangsung secara universal. Tak terkecuali melalui partai politik yang menyerukan kepada kebaikan dan kebenaran serta menyeru dengan cara-cara kebaikan dan kebenaran. Upaya-upaya menyeru kepada kebaikan dan kebenaran itu, selayaknyalah dilakukan berdasarkan pendekatan-pendekatan yang memungkinkan proses terjadinya kebaikan dan kebenaran itu berlangsung secara menyeluruh. Artinya, kebenaran itu bukan hanya untuk kepentingan sesaat tetapi berkelanjutan,

¹¹⁷ Katimin, *Pertumbuhan Bahasa Politik Islam, Kajian terhadap Makna Imam, Khalifah dan Amirul Mu'minin*, dalam Drajat, Amroeni (Ed), *Komunikasi Islam & Tantangan Modernitas* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008), h.170.

bersistem, sehingga kebaikan dan kebenaran itu menjadi budaya kehidupan manusia dalam lingkungan yang universal.¹¹⁸

Namun kenyataannya organisasi partai politik Islam dan Islam sendiri sebagai agama adalah dua hal yang berbeda. Karena secara substansial agama dan politik berada pada dua kutub kehidupan yang berbeda.¹¹⁹ Apalagi sebagai sebuah organisasi, partai politik Islam sebagaimana organisasi pada umumnya memiliki perilaku yang “mendua” antara organisasi di satu sisi, dan individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut di sisi lain. Kedua elemen organisasi ini memiliki perilakunya masing-masing, yang tidak selalu sama dan sebangun. Di dalam organisasi, tak terkecuali partai politik Islam akan selalu ada yang disebut dengan *a glass ceiling effect* (efek langit-langit gelas) yang merupakan hambatan tersembunyi yang membatasi individu-individu, khususnya kaum wanita dan minoritas di dalam organisasi.¹²⁰ Di samping itu di dalam organisasi juga memiliki persepsi sosial yang berhubungan dengan bagaimana seorang individu melihat dan memahami orang lain.¹²¹ Hal-hal seperti ini akan menimbulkan dinamika dalam organisasi yang bisa mempengaruhi perjalanan dan tujuan organisasi.

Dalam kondisi tarikan organisasi di satu sisi, dan ajaran agama Islam di sisi lainnya itulah realitas partai politik Islam berada. Oleh karenanya identitas nama

118 Mohammad Hatta, *Simbiotika Dakwah Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h.61.

119 Agama bersumber dari wahyu Tuhan yang sifatnya absolut kebenarannya sementara politik adalah seni untuk meraih kekuasaan yang sumbernya adalah ideologi yang diperjuangkan. Dalam sebuah proses sosial, perubahan sosial di bidang politik dapat mempengaruhi kehidupan dan agama. Agama adalah ajaran tentang nilai-nilai yang seharusnya dilakukan manusia (*das sollen*) agar kehidupan mereka menemukan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Semestinya agama tidak mungkin mengalami perubahan karena adanya perubahan politik. Akan tetapi yang terjadi adalah perubahan keberagamaan (*religiosity*) di kalangan masyarakat sebagai akibat perubahan kehidupan politik. Lihat lebih jauh lihat lagi Ridwan Lubis, *Agama Dalam Perbincangan Sosiologi* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h.167-168.

120 Selanjutnya lihat lagi Schermerhorn, *Organizational Behavior*, h.3-4.

121 Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h.159.

partai politik Islam yang disandang tidak selalu diisi oleh orang-orang yang memahami prinsip-prinsip komunikasi Islam dan mengaplikasikannya dalam interaksinya dengan khalayak. Kenyataan akan tidak proporsionalnya perolehan suara umat Islam dari Pemilu ke Pemilu semakin menguatkan bahwa partai politik Islam bukanlah identitas Islam yang sebenarnya. Untuk mengkaji pemahaman, perencanaan dan aplikasi prinsip-prinsip komunikasi Islam dalam oleh partai politik dalam Pemilu 2014 penelitian ini mengamati praktek diskursif dan sosiokultural. Selain itu juga mengamati berita-berita di dua surat kabar terbitan kota Medan yakni Harian *Waspada* dan Harian *Analisa*. Dukungan pengamatan berita media dirasa perlu karena di dalam kehidupan sosial politik yang telah mengalami *shifting* perilaku sekarang ini, media massa menjadi salah satu alternatif kunci untuk menjangkau khalayak yang luas. Oleh karenanya dia menjadi bagian yang terpisahkan dari perencanaan dan aplikasi komunikasi politik.

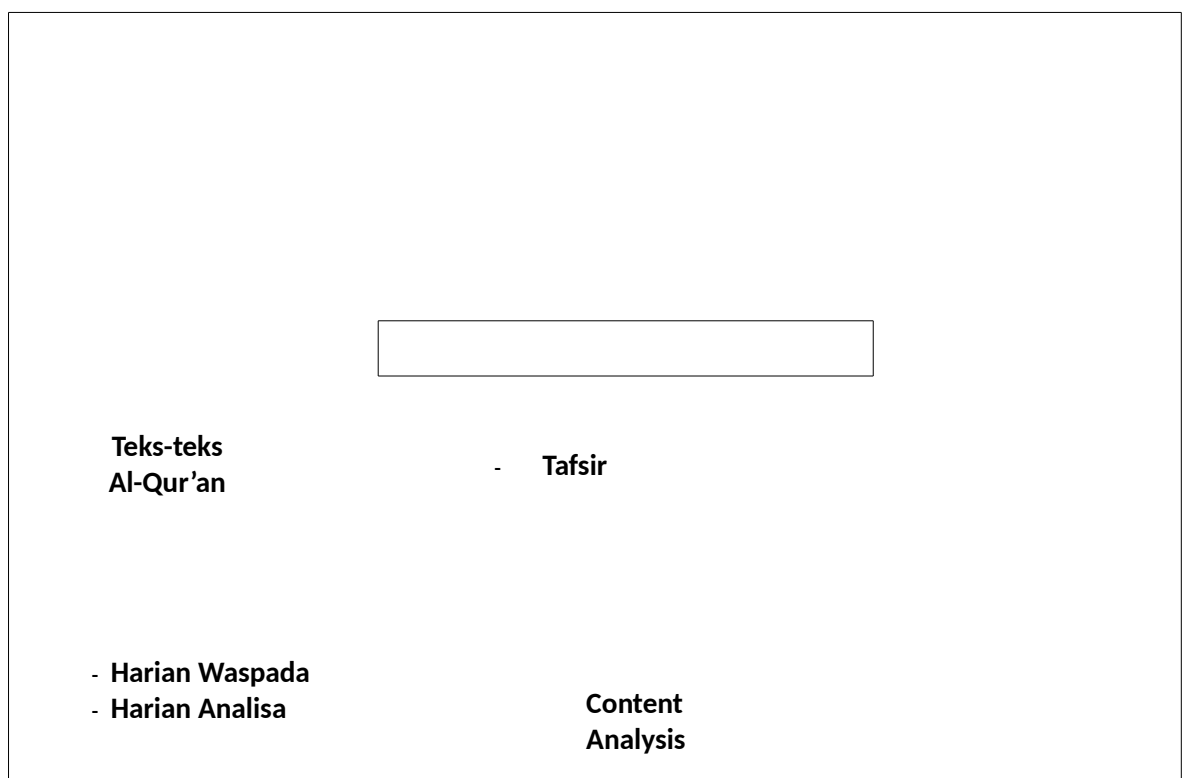
Pentingnya peran media ini, bahkan secara akademik Effendi Ghazali mengisyaratkan kelengkapan yang komprehensif dalam kajian komunikasi politik modern, yang menurutnya harus memiliki dua sisi.¹²² *Pertama*, menyangkut komunikasi politik isi media/ pesan yang sangat terkait terminologi “*who says what in which channel to whom with what effect*” (Laswell, 1948: 37). *Kedua*, menyangkut politik komunikasi sebagaimana disampaikan oleh Chaffee (2001) bahwa Laswell mungkin akan membuat frasa baru: “*Who gets to say what to whom?*” (Laswell, 1948: 243). Artinya bisa dibaca ke arah: kapankah dan di mana media mau mulai menggunakan aksesnya sekaligus sebagai “pembongkar pesan pencitraan”, sekalipun sedang atau telah pernah dibayar untuk membawa pesan-pesan pencitraan politik dalam pemilu atau pada masa pemerintahan.

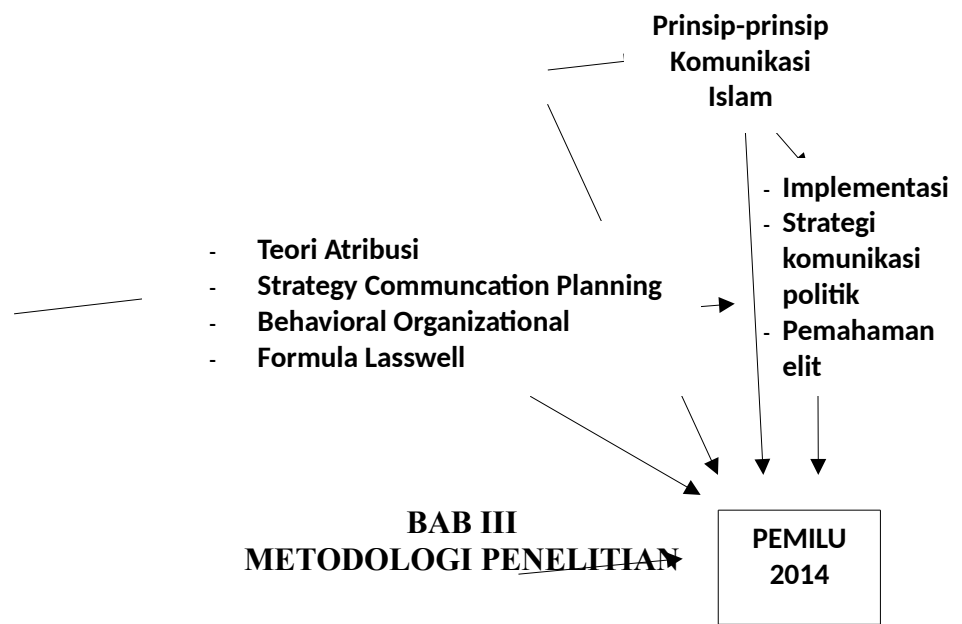
Akhirnya dari penelitian ini diharapkan ditemukan aplikasi komprehensif dari prinsip-prinsip komunikasi Islam yang mengubah perilaku khalayak. Bahwa ajaran Islam yang diturunkan secara sempurna (*kaffah*) melingkupi segala aspek.¹²³ Atas dasar keyakinan ini, maka dalam menguraikan nilai-nilai dalam prinsip komunikasi

122 Lihat Effendi Ghazali, “Menuntut Kelengkapan Peran Media: Tidak Hanya Membawa Tetapi Juga Membongkar Pencitraan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14, Nomor 3, Maret 2011 (275-296) ISSN 1410-4946, h.279.

Islam dengan pendekatan deduktif, dalam arti bahwa apa yang dikabarkan melalui Al-Qur'an sudah pasti merupakan kebenaran yang implikatif dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Teks-teks ayat Al-Qur'an yang menyangkut prinsip-prinsip komunikasi dielaborasi dengan pemahaman para ulama melalui buku-buku hadis yang ditulis yakni di dalam buku *Tafsir Al-Misbah*, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, dan *Tafsir Ibnu Katsir*. Dengan menggunakan uraian dari kitab-kitab tafsir tersebut, kemudian dirumuskan lebih jauh dalam proses komunikasi yang berlangsung. Bahwa kampanye yang dilakukan dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip komunikasi memiliki dimensi keakuratan yang lebih presisi terhadap tujuan komunikasi itu sendiri. Sebaliknya penyimpangan ajaran Islam pada perilaku berkomunikasi juga memiliki konsekuensinya sendiri.

Untuk lebih jelas pembahasan dalam penelitian ini, berikut disajikan alur penelitian dari kerangka pemikiran yang akan dilakukan:





BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan analisis dengan penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Oleh karenanya penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif.¹²⁴ Penelitian lapangan dilakukan di kota Medan dan sekitarnya, tepatnya di titik-titik kampanye PKS dan PPP yang dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara. Selanjutnya penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti sejumlah dokumen, buku, jurnal, berita media cetak Harian *Waspada* dan Harian *Analisa*, dan semacamnya, di samping melakukan eksplorasi penggunaan internet. Penelitian lapangan akan mendokumentasikan kampanye yang dilakukan PKS dan PPP melalui para juru kampanyenya dan kemudian meneliti muatan prinsip-prinsip komunikasi Islam dalam kampanye yang dilakukan. Selain itu penelitian juga dilakukan atas komunikasi bermedia yang dilakukan PKS dan PPP melalui Harian *Waspada* dan Harian *Analisa*. Rentang masa pemberitaan di kedua media massa tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2013 hingga akhir masa kampanye Pemilu 2014.

Objek penelitian dalam analisis *content analysis* yang dilakukan adalah keseluruhan berita tentang PPP dan PKS di Harian *Waspada* dan Harian *Analisa* edisi Desember 2013 sampai dengan Maret 2014 untuk melihat fenomena kampanye Pemilu 2014 disajikan dalam berbagai liputan seperti *hard news*, *soft news*, dengan menyajikan data *feature*, opini serta foto dalam skala Sumatera Utara. Seperti disinggung di latar belakang masalah, alasan memilih Harian *Waspada* dan Harian *Analisa* yaitu sebagai representasi media nasional di daerah yang liputannya sarat dengan nuansa kebijakan-kebijakan politis di antara kedua surat kabar lokal yang merupakan paling besar di Sumatera Utara. Objek penelitian tidak berdasarkan pada judul-judul tertentu, akan tetapi lebih dititikberatkan pada sejauh mana kampanye tersebut diinformasikan kepada khalayak dengan berbagai model liputan seperti yang telah disebutkan di atas. Adapun untuk menuntun kejelasan penelitian ini maka diuraikanlah model analisis isi deskriptif kuantitatif.

¹²⁴ Penelitian ini lebih mendekati pada penelitian deskriptif kualitatif di mana teori digunakan sebagai awal menjawab pertanyaan penelitian. Lihat Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h.28.

Pada intinya penelitian ini dilakukan untuk menilai perilaku partai politik Islam PKS dan PPP dalam Pemilu 2014 dalam tinjauan Komunikasi Islam. Karena itu langkah-langkah penelitian dilakukan dengan menawarkan bentuk-bentuk komunikasi politik yang Islami, dan bagaimana partai politik mengaplikasikannya dalam Pemilu 2014. Dari pendekatan kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat longgar dan akan mengalami penyempurnaan dalam proses penelitian.¹²⁵

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini mengambil daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara yang menjadi daerah kampanye pengerahan massa oleh PKS dan PPP tingkat Sumatera Utara, sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Provinsi Sumut. Penelitian dilakukan dengan observasi terhadap implementasi prinsip-prinsip komunikasi Islam yang dilakukan kedua partai peserta Pemilu 2014 tersebut dalam kampanye Pemilu 2014. Lokasi penelitian adalah dua kampanye PKS di kota Medan dan kampanye PPP di Kabupaten Langkat.

C. Instrumen Penelitian

Untuk itu penelitian ini akan menggunakan instrumen wawancara mendalam dan informan sebagai sumber informasi. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam wawancara mendalam tersebut adalah menyangkut tiga hal utama yaitu tentang implementasi prinsip-prinsip komunikasi Islam partai politik Islam dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014, strategi komunikasi politik partai politik Islam dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014, dan pemahaman para elit partai politik Islam tentang Pprinsip-prinsip komunikasi Islam. Tiga pertanyaan utama ini kemudian diikuti pertanyaan turunannya masing-masing. Adapun pihak-pihak yang akan menjadi informan dan objek wawancara adalah; masing-masing dua orang unsur pimpinan PKS dan PPP, dan dua orang tokoh akademisi yang banyak memiliki pengalaman berhubungan dengan kedua partai tersebut. Dengan demikian, jumlah informan kunci sebanyak 6 (enam) orang. Sedangkan untuk *content analysis* akan

¹²⁵ Lihat Syukur Kholil, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Ciptapustaka Media, 2006), h.32.

menggunakan borang koding data pemberitaan Harian *Waspada* dan Harian *Analisa* tentang PKS dan PPP selama periode pemberitaan Desember 2013 sampai dengan edisi Maret 2013.

D. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dipegaruhi oleh faktor-faktor nilai subyektivitas, metode pengumpulan dan sumber data penelitian. Untuk mengurangi keraguan kebenarannya data penelitian kualitatif dibutuhkan beberapa cara untuk meningkatkan keabsahan yaitu dengan kredibilitas, transferabilitas dan konfirmabilitas. *Pertama*, kredibilitas meliputi beberapa kriteria adalah lama penelitian, observasi yang detail, triangulasi, *per debriefing*, analisis kasus negatif, membandingkan dengan hasil penelitian lain, dan *member check*. Cara memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, yaitu: memperpanjang masa pengamatan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bisa mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi, dan untuk membangun kepercayaan. Triangulasi, pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. *Peer debriefing* (membicarakannya dengan orang lain) yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Mengadakan *member check* yaitu dengan menguji kemungkinan dugaan-dugaan yang berbeda dan mengembangkan pengujian-pengujian untuk mengecek analisis, dengan mengaplikasikannya pada data, serta dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang data. *Kedua*, transferabilitas yaitu apakah hasil penelitian ini dapat diterapkan pada situasi yang lain. *Dependability* yaitu apakah hasil penelitian mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan. *Ketiga*, konfirmabilitas menyangkut pertanyaan apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar hasil dapat lebih objektif.

E. Teknik Analisis Data

Sebelum data dianalisis, peneliti melakukan pengorganisasian data yang dilakukan melalui:

- 1) Membangun sebuah matrik atau tabel sumber.
- 2) Mengorganisasikan materi/data berdasarkan tipe data misalnya pengamatan, wawancara, dokumen dan data visual (foto, video). Hal ini juga dapat dilakukan berdasarkan partisipan (informan) dan latar penelitian.
- 3) Menyimpan salinan seluruh data. Setelah data diorganisasikan dan ditranskrip (proses pengalihan data mentah ke dalam bentuk narasi/teks data), selanjutnya mengeksplorasi data yakni upaya untuk mendapatkan gambaran umum, ide dan pemikiran yang lebih dalam untuk menentukan apakah data telah memadai dan tepat. Pengkodean data merupakan langkah penting lainnya. Secara garis besar proses pengkodean yakni: 1) membaca data secara keseluruhan. 2) membagi/memilah data ke dalam segmen-segmen. 3) menamai segmen dengan kode. 4) mengurangi tumpang tindih kode dan kode yang tidak penting. 5) menurunkan kode ke dalam tema-tema.

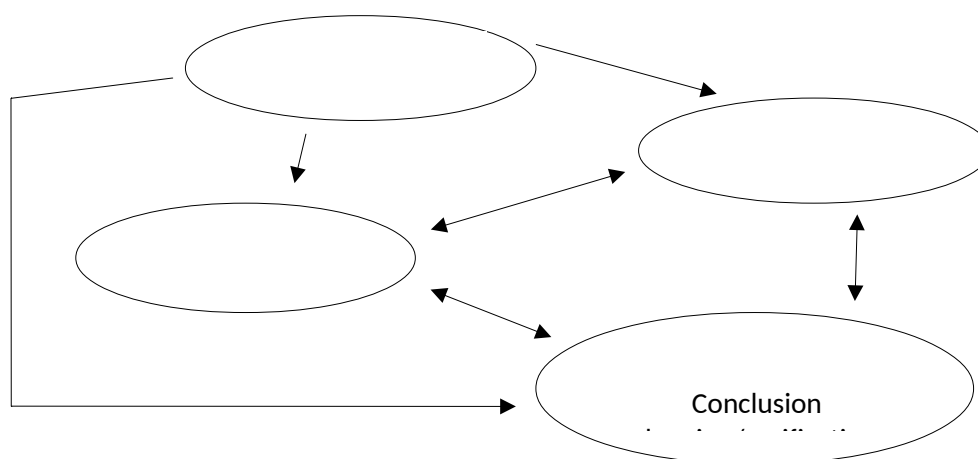
Seperti halnya Miles dan Huberman menyarankan tahapan analisis data kualitatif dalam tiga prosedur. *Pertama*, reduksi data (*data reduction*) yang merujuk pada proses memperoleh data kualitatif yang mungkin didapat—wawancara, transkrip, catatan lapangan, pengamatan dan sebagainya—yang dibuat ringkasannya seperti dengan koding data, menulis kesimpulan-kesimpulan, menghapus data yang tak relevan dan seterusnya. Pada tahap ini semua informasi yang tidak relevan disisihkan sementara, dan baru digunakan lagi kalau ditemukan data yang relevan.

Kedua, menampilkan data (*data display*). Untuk menggambarkan kesimpulan Miles dan Huberman menyarankan bahwa menampilkan data yang baik, dalam bentuk tabel-tabel, *charts*, jaringan, dan format grafik lainnya sangat penting. Ini adalah proses yang terus menerus dan bukan dilakukan sekali saja di akhir masa pengumpulan data.

Ketiga, menggambarkan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Analisis yang dilakukan harus memungkinkan mulai mengembangkan kesimpulan-kesimpulan mengenai studi yang dilakukan. Kesimpulan awal ini kemudian dapat diverifikasi, keabsahannya diperiksa melalui referensi catatan-catatan lapangan yang ada untuk pengumpulan data lebih lanjut.

Mengggambarkan kesimpulan dan verifikasi adalah tahap ketiga dari analisis yang melibatkan pengembangan proporsi dan secara konseptual berbeda dengan tahap lainnya tetapi terjadi secara bersamaan.¹²⁶ Berikut bagan analisis data kualitatif yang dikembangkan Miles dan Huberman.¹²⁷

Gambar 15: Analisis Data Kualitatif



F. Sistematika Pembahasan

Bab I menjelaskan tentang latar belakang perolehan suara partai-partai, khususnya partai Islam dari Pemilu ke Pemilu yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Bab ini juga menjelaskan tentang PPP dan PKS serta prinsip-prinsip

¹²⁶ Keith F.Punch, *Introduction To Research Methods In Education* (Los Angeles: SAGE, 2009), h.175.

¹²⁷ Miles, M & Huberman, A, *Qualitative Data Analysis*, (Newbury Park: Sage, 1994), h.12.

komunikasi Islam. Selanjutnya bab ini merumuskan permasalahan berupa pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan oleh sejumlah data yang disajikan dalam latar belakang masalah. Kemudian di dalam bab ini juga memberikan *guidelines* untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, di samping mengajukan beberapa manfaat dari penelitian ini.

Bab II berisi tentang kajian teori dan kerangka berpikir yang akan menjadi dasar untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip komunikasi Islam itu diaplikasikan dalam pemilu 2014 oleh PPP dan PKS.

Bab III merumuskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan instrumen penelitian, teknik keabsahan data, dan teknik analisis data yang digunakan, di samping memaparkan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab IV menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana PKS dan PPP mengimplementasikan prinsip-prinsip komunikasi Islam dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014, bagaimana pemahaman para elit partai Islam tersebut tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam, dan bagaimana strategi komunikasi politik partai politik Islam yang dijalankan dalam kampanye untuk kepentingan elektoralnya.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diajukan dari hasil penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampanye PKS

Pada tanggal 1-3 Februari 2008 PKS melaksanakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali. Agenda rutin tahunan ini mengambil tema “Bangkit Negeriku! Harapan itu Masih Ada”. Sejak Mukernas tersebut PKS kemudian dikenal

sebagai partai terbuka (inklusif). Setahun kemudian, di Pemilu 2009, di beberapa provinsi, seperti di Provinsi Papua yang merupakan provinsi yang dihuni mayoritas umat non Islam, PKS kemudian mencalonkan calon legislatif (Caleg) dari kalangan non Islam.

Metamorphosis PKS menjadi partai inklusif kiranya suatu hal yang tak terhindarkan sebagai konsekuensi dari Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 3 ayat (1) huruf c yang berbunyi: *Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.*

Di Undang-undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebelum mengalami perubahan, pada Pasal 3 ayat (2) huruf d berbunyi: *Kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan.*

Maka setelah terjadi perubahan Undang-undang No.2 Tahun 2011 ini mensyaratkan setiap Parpol peserta Pemilu memiliki pengurus di seluruh provinsi (100%) dan minimal di 75 % kepengurusan kabupaten/kota, dan minimal di 50% kepengurusan kecamatan. Padahal Indonesia terdiri dari daerah-daerah konsentrasi umat Islam di satu sisi, dan umat non Islam di sisi lain. Secara nyata Undang-undang ini adalah aturan yang tidak menguntungkan bagi partai yang berbasiskan agama. Oleh karenanya tidak mengherankan jika Parpol seperti Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) yang berbasis massa Kristen tidak dapat bertahan untuk sekedar eksis sehingga kedua Parpol ini harus bubar dan tidak dapat menjadi peserta Pemilu 2014.

Pada saat digelarnya Mukernas PKS di Bali tahun 2008, perubahan Undang-undang No.2 Tahun 2008 sedang menjalani pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Membaca dinamika yang terjadi di parlemen ini, PKS kemudian menjalankan strategi menjadi partai inklusif untuk menyiasatinya agar tetap bisa bertahan sebagai sebuah partai politik. Strategi ini ternyata berhasil membuat PKS

bertahan sebagai Parpol dan menjadi peserta Pemilu 2014 yang mengacu pada Undang-undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tersebut. Meski dalam wacananya yang berkembang, PKS menjadi partai inklusif, namun secara substansial sebetulnya PKS tidak mengalami perubahan, baik dari pola gerakan yang dilakukan, maupun idiologi partai dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) tentang mencantumkan Islam sebagai ideologinya.

Wacana partai terbuka itu sendiri sebenarnya merupakan istilah yang diberi *highlight* oleh para wartawan dari Mukernas PKS di Bali tahun 2008. Pada sesi wawancara waktu itu, wartawan menanyakan tentang kemungkinan PKS menjadi partai terbuka dalam Pemilu mendatang. *Angle* berita tentang partai terbuka itu esok harinya kemudian menjadi topik pemberitaan di berbagai media massa sehingga secara nasional PKS kemudian dikenal sebagai partai terbuka. Namun perubahan istilah baru tersebut, dari partai dakwah menjadi partai terbuka sebenarnya tidak mempengaruhi kondisi internal PKS yang tetap sebagai partai dakwah yang tetap berideologi Islam dan merupakan suatu gerakan dakwah yang melembaga.¹²⁸

Dengan kondisi latar belakang seperti diuraikan di atas, PKS menggelar kampanye rapat akbar di berbagai tempat yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Sumatera Utara. Selama masa kampanye Pemilu Legislatif 2014, PKS menggelar kampanye rapat akbar pengerahan massa sebanyak empat kali, yakni;

1. Kampanye rapat akbar di lapangan Gajahmada, Krakatau Medan pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014. Dalam kampanye ini PKS menghadirkan juru kampanye Presiden PKS Anis Matta, Sekjen PKS Taufik Ridlo, Wakil Ketua DPP PKS yang juga Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujonugroho, tiga anggota DPR RI *incumbent* dari PKS yakni Anshori Siregar, Idris Luthfi, dan Iskan Qolba Lubis.
2. Kampanye akbar di Lapangan Parasamya Kisaran, Kabupaten Asahan pada hari Minggu tanggal 30 Maret 2014. Juru kampanye yang dihadirkan antara lain Wakil Ketua DPP PKS yang juga Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, Anshori

¹²⁸ Muhammad Hafez, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sumatera Utara, wawancara di Medan, Senin 24 Maret 2014.

Siregar, Lc, Syamsul Qodri Marpaung, Lc, Sigit Pramono Asri, SE, Zulkarnain, dan Ahmad Kosim Marpaung, M.Si

3. Kampanye rapat akbar di Lapangan Rengas Pulau, Marelan, Medan pada hari Kamis tanggal 3 April 2014. Kampanye ini dihadiri juru kampanye Wakil Ketua DPP PKS Gatot Pujo Nugroho dan Caleg DPR-RI yang juga Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Tiffatul Sembiring.
4. Kampanye rapat akbar di Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 dihadiri juru kampanye Iskan Qolba Lubis anggota DPR RI dan beberapa Caleg asal Kabupaten Labuhan Batu.

Dalam setiap kampanyenya, PKS membawa jargon atau *tag line* baru yakni “Cinta, Kerja, Harmoni”. *Tag line* ini mengalami perubahan dari sebelumnya yakni “Bersih Dan Lebih Peduli”. Perubahan ini mulai terjadi ketika pada tahun 2010, salah seorang kader PKS yang juga pemilik PT Selalang Prima Internasional Muhammad Misbakhun tersangkut kasus hukum. Persoalan hukum yang menimpa kader PKS ini dengan sendirinya mereduksi jargon “bersih” yang selama ini digunakan. Kata “bersih” dalam jargon tersebut kemudian seolah kehilangan makna. Dalam sebuah wawancara dengan wartawan di Semarang tanggal 18 April 2013 Presiden PKS Anis Matta mengatakan, jargon baru yang diharapkan mampu melekatkan kader PKS dengan warga ini memiliki maksud tersendiri. Jargon cinta, kerja dan harmoni dinilai selaras dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Penjabaran “cinta” adalah pendekatan ke konstituen dengan sentuhan kemanusiaan, tidak *black campaign*, *character assassination* dan politisasi hukum. Karena cara politik keras telah mengubah wajah demokrasi Indonesia menjadi ajang *dangerous game*. Jargon “cinta” ini sesuai karakter bangsa Indonesia yang lebih kental nuansa spiritual. Sedangkan “kerja” juga mewakili semangat masyarakat Indonesia keseharian. Masyarakat Indonesia itu suka kerja, kerja apa saja tanpa melihat jenis pekerjaan. Sementara “harmoni” dinilai merupakan langkah natural bangsa Indonesia melihat kondisi demografis dan geografis. Harmoni membuat Indonesia sebagai bangsa yang beragam tetap utuh, dan pada waktu yang sama Indonesia bisa terus tumbuh. Tiga kata yang berbeda dalam jargon ini terinspirasi oleh film *Eat, Pray, Love* yang

diperankan aktris Hollywood Julia Roberts. Pengambilan gambar film ini sendiri banyak dilakukan di Bali.

Melalui jargon dan strategi baru tersebut, dalam Pemilu Legislatif 2014 ini PKS menargetkan menjadi pemenang ketiga atau menjadi Parpol peraih suara terbanyak ketiga secara nasional (tiga besar). Sedangkan untuk Sumatera Utara, PKS mendapat target yang lebih besar yakni menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2014 atau memperoleh suara terbanyak.¹²⁹ Target ini dipasang, karena dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu), PKS telah menempatkan kadernya yang menjadi calon Gubernur Sumatera Utara yakni Gatot Pujonugroho yang berpasangan dengan T. Erry Nuradi sebagai pemenang Pilgubsu yang digelar pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013.

Tetapi hasil Pemilu Legislatif yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014 menunjukkan hasil yang berbeda, karena perolehan suara PKS untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara hanya berada di posisi kelima di bawah perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang memperoleh 15,29 persen suara, Partai Golongan Karya (Partai Golkar) memperoleh 15,29 persen suara, Partai Demokrat memperoleh 13,26 persen suara, Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) memperoleh 10,86 persen suara. Sedangkan PKS yang mendapat nomor urut 3 dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 ini memperoleh 7,26 persen suara di DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3: Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Partai Politik
Pemilu Legislatif 2014

PERINGKAT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	PDI-P	23.681.471	18.9%
2	GOLKAR	18.432.312	14.8%
3	GERINDRA	14.760.371	11.8%
4	P.DEMOKRAT	12.728.913	10.2%
5	PKB	11.298.957	9.0%
6	PAN	9.481.621	7.6%
7	PKS	8.480.204	6.8%
8	NASDEM	8.402.812	6.7%

129 Wawancara Muhammad Hafez.

9	PPP	8.157.488	6.5%
10	HANURA	6.579.498	5.3%
11	PBB	1.825.750	1.5%
12	PKPI	1.143.094	0.9%
TOTAL		124.472.491	100%

Diolah dari data KPU

Tabel 4: Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik DPRD Provinsi Sumut
Pemilu Legislatif 2014

PERINGKAT	PARTAI	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Golkar	948.529	15,29%
2	PDI-P	920.741	14,84%
3	Demokrat	822.837	13,26%
4	Gerindra	673.668	10,86%
5	Hanura	506.524	8,16%
6	PKS	450.440	7,26%
7	Nasdem	423.198	6,82%
8	PAN	420.431	6,78%
9	PKB	303.967	4,9%
10	PPP	294.974	4,75%
11	PKPI	267.680	4,31%
12	PBB	171.707	2,77%

Diolah dari data KPU Sumut

Tabel 5: Perolehan Suara PKS Di DPRD Provinsi
Sumatera Utara Berdasarkan Daerah Pemilihan

Nomor	SUMUT I	MEDAN A	67.648
Urut 3	SUMUT II	MEDAN B	48.425
	SUMUT III	DELI SERDANG	66.158
PKS	SUMUT IV	SERDANG BEDAGAI, TEBING TINGGI	32.233
	SUMUT V	ASAHAN. TANJUNG BALAI, BATUBARA	42.558
	SUMUT VI	LAB.BATU, LAB.BATU UTARA, LAB.BATU	41.834
	SUMUT VII	SELATAN	52.908
	VII	TAPSEL, MADINA, PALAS, PALUTA,	5.913
	SUMUT VIII	PD.SIDIMPUAN	12.277
	VIII	NIAS, NIAS SELATAN, NIAS UTARA, NIAS	39.220
	SUMUT IX	BARAT, GN.SITOLI	6.691
	SUMUT X	TAPTENG, TOBASA, SAMOSIR, SIBOLGA, TAPUT,	34.575
	SUMUT XI	HUMBAHAS	
	SUMUT XII	SIMALUNGUN, PEMATANG SIANTAR	
		DAIRI, PAKPAK BHARAT, KARO	
		LANGKAT, BINJAI	

			450.440 7,26%
--	--	--	------------------

Diolah dari data KPU Sumut

Tabel di atas menunjukkan perolehan suara terbesar diraih PKS di daerah pemilihan (Dapil) Sumut I yakni di kota Medan A dengan raihan sebanyak 67.648 suara. Medan A sendiri terdiri dari 11 kecamatan di dalam kota Medan yakni Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Deli, Medan Belawan, Medan Area, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Timur. Suara terbanyak kedua diraih di Dapil Sumut III Kabupaten Deli Serdang dengan 66.158 suara. Suara terbanyak ketiga diraih PKS di Dapil Sumut VII yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas (Palas), Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Sidempuan (Pd.Sidempuan) dengan 52,908 suara. Berbeda dengan perolehan suara di Dapil Sumut I Medan A, perolehan suara PKS di Sumut II Medan B lebih kecil, yakni sebesar 48.425 suara atau merupakan perolehan suara terbanyak keempat. Medan B terdiri dari Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Selayang. Perolehan suara PKS terbanyak kelima di Dapil Sumut V sebesar 42.558 suara yang terdiri dari Kabupaten Asahan, Tanjung Balai, Batubara. Perolehan suara PKS terbesar keenam di Dapil VI meliputi Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan dengan 41.834 suara. Perolehan suara PKS terbesar ketujuh di Dapil Sumut X meliputi Simalungun, dan Pematang Siantar dengan 38.220 suara. Perolehan suara PKS terbesar kedelapan diraih di Dapil Sumut XII meliputi Kabupaten Langkat, dan Binjai dengan 34.575 suara. Perolehan suara PKS terbesar kesembilan diraih di Dapil IV meliputi Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi dengan 32.233 suara. Perolehan suara PKS terbesar kesepuluh dicapai di Dapil IX meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Toba Samosir (Tobasa), Samosir, Sibolga, Tapanuli Utara (Taput), dan Humbang Hasudutan (Humbahas) dengan perolehan 12.277 suara. Perolehan dua terkecil terjadi di Dapil Sumut XI meliputi Kabupaten Dairi Pak-pak Bharat, dan Tanahkar

dengan 6.691 suara dan di Dapil Sumut VIII meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli dengan 5.913 suara.

B. Gambaran Umum Kampanye PPP

Sejak Presiden Republik Indonesia keempat KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur meninggal dunia pada akhir 2009 lalu, dan terpecahnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibesarkan Gus Dur, praktis tak ada partai Islam yang secara tradisional menjadi tempat berkumpulnya para ulama di Nusantara. Argumentasi ini dipandang oleh para petinggi PPP sebagai momentum untuk menjadi PPP sebagai tempat berkumpulnya para ulama. Partai ini kemudian mendeklarasikan sebagai Rumah Besar Umat Islam.¹³⁰ Sebagai Rumah Besar Umat Islam PPP mendeklarasikan sebagai partai tempat umat Islam menyalurkan aspirasi dan memerjuangkan kepentingannya; tempat umat Islam bernaung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; tempat umat Islam merapatkan barisan; wadah pengaderan untuk melahirkan pemimpin nasional; menjadi partai pemersatu untuk semua kelompok; dan berjuang bersama membangun PPP sebagai Rumah Besar Umat Islam.

Jargon Rumah Besar Umat Islam itu sendiri mulai terdengar pasca Mukhtamar PPP VII di Bandung tahun 2011 atau setelah terpilihnya kembali Suryadharma Ali memimpin PPP untuk periode 2011-2016. Dengan jargon ini tampak sekali bahwa PPP berupaya menghimpun kembali kekuatan umat Islam dalam satu payung politik. Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin yang belakangan menjabat sebagai Menteri Agama menggantikan Suryadharma Ali karena tersangkut kasus korupsi. Dalam Mukernas I dan Halaqah Nasional Alim Ulama PPP di Pondok Pesantren Lirboyo, 21-23 Februari 2012 Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa dalam pengertian konkret, Rumah Besar Umat Islam adalah berupa Ka'bah, masjid, mushalla, atau surau, dan tentu juga pesantren. Oleh karena itu, PPP mengajak segenap umat Islam untuk kembali ke rumah-rumah ini. Sebab di sinilah Rasulullah SAW dan para pendahulu kita merintis perjuangan membangun masyarakat berkeadaban.

130 Penegasan ini dinyatakan dalam Buku ke-PPP-an yang diterbitkan DPP PPP, t.t.

Jargon Rumah Besar Umat Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Rapat Pleno DPP PPP 2011-2015, pada 21-22 Oktober 2011 di Jakarta, setidaknya ada tiga pengertian dari PPP sebagai Rumah Besar Umat Islam, yaitu: *Pertama*, PPP merupakan tempat kembalinya orang Islam, terutama untuk menyalurkan aspirasi dan menindaklanjutinya. *Kedua*, PPP merupakan tempat bernaung atau berlindung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, PPP merupakan tempat untuk menyatukan aspirasi umat Islam dan menindaklanjutinya, sehingga aspirasi umat Islam dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berbeda dengan strategi yang dijalankan oleh PKS yang mendengungkan diri sebagai partai terbuka, namun tidak begitu dengan PPP. Partai berlambang Ka'bah ini malah terdengar lebih eksklusif dengan jargon Rumah Besar Umat Islam tersebut. Tetapi pada kenyataannya dalam Pemilu Legislatif 2014 PPP juga mencalonkan umat non Islam sebagai calon legislatif (Caleg) di beberapa daerah yang minoritas umat Islam. Seperti halnya PKS, PPP juga terikat pada aturan Undang-undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Pasal 3 ayat (1) huruf c yang berbunyi: *Kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan*. Tanpa melibatkan Caleg maupun pengurus dari kalangan non Islam di daerah minoritas umat Islam, mustahil rasanya partai ini bisa tetap eksis dan mengikuti Pemilu.

Dengan jargon Rumah Besar Umat Islam inilah kemudian PPP melangkah dalam irama dinamika politik di tanah air, tak terkecuali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) maupun dalam Pileg 2014. Jargon ini digunakan juga dalam Pemilukada Gubernur Sumatera Utara tahun 2013, juga dalam Pileg 2014. Para juru kampanye PPP menggunakan jargon tersebut dalam setiap kampanye yang dilancarkan. Meskipun dalam orientasi politiknya, sebagai Parpol, PPP berorientasi meraih, merebut dan memertahankan kekuasaan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, mencerdaskan bangsa, memelihara kesatuan dan keutuhan NKRI melalui kekuasaan PPP dapat berkhidmat sesuai dengan prinsip perjuangan partai. Orientasi kepada kekuasaan agar memperoleh kepercayaan umat untuk memperbanyak

anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/ Kota, dan menguasai pemerintah di pusat dan daerah.

Dengan jargon Rumah Besar Umat Islam ini pula PPP meluncurkan kampanye di Sumatera Utara. Dari jadwal yang ditetapkan KPUD Sumatera Utara, PPP hanya memanfaatkan tiga kali kampanye akbar pengerahan massa, di mana satu dalam bentuk rapat akbar, dan dua lagi dalam bentuk konvoi kendaraan bermotor.

Kampanye yang diselenggarakan di Sumatera Utara tersebut selengkapnya meliputi;

1. Kampanye rapat akbar pengerahan massa yang diselenggarakan di Kebun Lada, kota Binjai, Jumat 4 April 2014. Kampanye ini menghadirkan Ketua DPW PPP Sumatera Utara H.Fadly Nurzal yang juga merupakan calon legislatif untuk DPR RI.
2. Kampanye konvoi di Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan pada tanggal 5 April 2014. Kampanye ini dihadiri Caleg DPRD Sumut PPP Julianto Putra LH Caleg DPRD Kabupaten Asahan Azwim.
3. Kampanye konvoi di Lapangan Bola Atas Kota Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2014. Kampanye ini dihadiri politisi setempat dan berlangsung singkat karena kondisi ujan dan sedikitnya massa yang hadir.

Dengan mengusung jargon Rumah Besar Umat Islam, PPP Sumatera Utara menargetkan memperoleh 10-12 % di provinsi ini. Target regional ini lebih sedikit atau hampir sama dengan target secara nasional sebesar 12 %.¹³¹ Namun baik target secara nasional maupun target regional untuk Sumatera Utara sama-sama meleset, sebab perolehan suara PPP kurang dari target yang ditetapkan. Suara PPP secara nasional hanya mencapai 6,53 persen, sedangkan suara PPP untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara hanya mencapai 4,75 % atau sebanyak 294.974 suara yang terkumpul.

Tabel 6: Perolehan Suara PPP Di DPRD Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Daerah Pemilihan

131 Wawancara dengan Ketua DPP PPP Hasrul Azwar, di Medan, Senin, 24 Maret 2014.

Nomor Urut 9 PPP	SUMUT I	MEDAN A	40.311
	SUMUT II	MEDAN B	17.495
	SUMUT III	DELI SERDANG	42.675
	SUMUT IV	SERDANG BEDAGAI, TEBING TINGGI	24.290
	SUMUT V	ASAHAN. TANJUNG BALAI, BATUBARA	49.972
	SUMUT VI	LAB.BATU, LAB.BATU UTARA, LAB.BATU	28.661
	SUMUT VII	SELATAN	43.760
	SUMUT VIII	TAPSEL, MADINA, PALAS, PALUTA,	2.301
	SUMUT IX	PD.SIDIMPUAN	7.678
	SUMUT X	NIAS, NIAS SELATAN, NIAS UTARA, NIAS	15.750
	SUMUT XI	BARAT, GN.SITOLI	1.023
	SUMUT XII	TAPTENG, TOBASA, SAMOSIR, SIBOLGA, TAPUT, HUMBAHAS, SIMALUNGUN, PEMATANG SIANTAR, DAIRI, PAKPAK BHARAT, KARO LANGKAT, BINJAI	21.058
			294.974 4,75%

Diolah dari data KPU Sumut

Dari tabel di atas menunjukkan perolehan suara terbesar di raih PPP di Dapil Sumut V sebesar 49.972 suara yang terdiri dari Kabupaten Asahan, Tanjung Balai, Batubara. Suara terbanyak kedua diraih PPP di Dapil Sumut VII yang meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Mandailing Natal (Madina), Padang Lawas (Palas), Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Sidempuan (Pd.Sidempuan) dengan 43.760 suara. Suara terbanyak ketiga diraih di Dapil Sumut III Kabupaten Deli Serdang dengan 42.675 suara. Perolehan suara PPP di Tabel di atas menunjukkan perolehan suara terbesar keempat diraih PPP di Dapil Sumut I yakni di kota Medan A dengan raihan sebanyak 40.311 suara. Medan A sendiri terdiri dari 11 kecamatan di dalam kota Medan yakni Kecamatan Medan Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Medan Deli, Medan Belawan, Medan Area, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Timur. Perolehan suara PPP terbesar kelima di Dapil VI meliputi Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan dengan 28.661 suara. Perolehan suara PKS terbesar keenam diraih di Dapil IV meliputi Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi dengan 24.290 suara. Perolehan suara PPP terbesar ketujuh diraih di Dapil Sumut XII meliputi Kabupaten Langkat, dan Binjai dengan 21.058 suara. Perolehan suara PPP di Dapil Sumut II Medan B sebesar 17.495 suara atau merupakan perolehan suara terbanyak kedelapan. Medan B terdiri dari Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Barat, Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Maimun, Medan Polonia, Medan

Baru, Medan Petisah, Medan Selayang. Perolehan suara PPP terbesar kesembilan di Dapil Sumut X meliputi Simalungun, dan Pematang Siantar dengan 15.750 suara. Perolehan suara PPP terbesar kesepuluh dicapai di Dapil IX meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Toba Samosir (Tobasa), Samosir, Sibolga, Tapanuli Utara (Taput), dan Humbang Hasudutan (Humbahas) dengan perolehan 7.678 suara. Perolehan dua terkecil terjadi di Dapil Sumut VIII meliputi Kabupaten Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, dan Gunung Sitoli dengan 2.301 suara, dan di Dapil Sumut XI meliputi Kabupaten Dairi Pak-pak Bharat, dan Tanahkaro dengan 1.023 suara.

C. Gambaran Umum Harian *Waspada*

Harian *Waspada* mulai terbit pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 1947 di Medan ketika kota yang tadinya berpenduduk sekitar 300 ribu ini sudah sepi sekali. Waktu itu *de facto* atas kota Medan baru lebih kurang sebulan ditimbangterimakan Inggris pada pasukan Belanda.¹³² Kota Medan banyak disebut sepi sekali karena di tengah-tengah suasana bangsa Indonesia yang sedang berjuang memertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu.¹³³ Mohammad Said menggambarkan banyak rumah/gedung mewah yang kosong, kelihatan menyeramkan. Rumput pekarangan sudah meninggi, pasukan pihak mana saja bisa mengendapi orang lalu lalang dari situ. Banyak di kamp Polonia yang masih termasuk pusat kota dan di daerah-daerah Tionghoa kelihatan manusianya, mereka diperlindungi selain oleh serdadu Belanda, juga oleh *Poh An Tui*.¹³⁴

Mohammad Said adalah seorang wartawan dan tokoh pers nasional Indonesia yang telah memiliki banyak pengalaman dalam dunia pers sejak zaman perjuangan merebut kemerdekaan. Sebelum mendirikan Harian *Waspada* Mohammad Said telah mendirikan surat kabar lainnya seperti *Pewarta Deli*. Di tengah situasi politik

¹³² Mohammad Said dalam Prabudi Said, *Berita Peristiwa 60 Tahun WASPADA* (Medan: PT Prakarsa Abadai Press, 2006), h.180.

¹³³ Sri Rizki, Dan Juni Wati, *Kepemilikan Media Dan Ideologi Pemberitaan* (Bandung: Disertasi Universitas Padjadjaran, 2013), h.98.

semakin tidak menentu di tahun 1947. Pasukan Belanda melalui aksi polisionil terus menyerang dan menguasai kota Medan dengan maksud ingin menegakkan kembali masa emas kejayaan kekuasaan kolonial. Di tengah situasi ini Mohammad Said ingin agar pers tetap terjaga kehadirannya sebagai obor pemberi kebenaran informasi. Apalagi di masa itu tidak ada koran pembela republik yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaan dari penguasa asing. Karena itu, Mohammad Said bertekad kuat mendirikan surat kabar di tengah kemelut politik masa itu. Tekad itu diwujudkan dengan mendirikan *Waspada* 11 Januari 1947.¹³⁵ Harian *Waspada* yang sampai sekarang masih tetap menjadi media paling terpendang di Sumatera Utara didirikan bersama Hj. Ani Idrus yang tidak lain merupakan istri Mohammad Said.¹³⁶ Seperti halnya Mohammad Said, Ani Idrus juga merupakan tokoh pers nasional yang memiliki rekam jejak yang tak kalah berjasanya bagi bangsa dan negara.

Kehadiran Harian *Waspada* yang memihak perjuangan mempertahankan kemerdekaan membuat Belanda tidak merasa senang. Beberapa kali koran ini harus mengalami tantangan dari pemerintah kolonial tersebut. Pada tanggal 23 Juli 1948 tentara Belanda mengepung kantor *Waspada* untuk dibreidel. Tidak itu saja karena tindakan ini diikuti pembreidelan kedua pata ganggal 19 Agustus 1948. Tentara Belanda kembali mendatangi kantor *Waspada* dan mengancam sambil mencari dokumen yang mereka inginkan sampai-sampai tas anak sekolah tak luput diperiksa.

134 Kesatuan *Poh An Tui*, yaitu pasukan keamanan China yang dipersenjatai Inggris. Mereka ini meronda daerah Pecinan di Medan, Binjai, dan Pematang Siantar. Kesatuan tersebut bersama dengan pasukan Belanda turut serta mempersiapkan berdirinya NST (Negara Sumatra Timur) yang disponsori Belanda dan bangsawan setempat. Lihat lebih jauh Rinardi, Haryono, *Dari Negara Federal Menjadi Negara Kesatuan, Proses Perubahan Negara Republik Indonesia Serikat Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia* (Bandung: Jurnal Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro, 2010), h.5.

135 Budi Agustono, *Pemikiran Sosial Mohammad Said* (Medan: Makalah Seminar *The Big Thinkers; Melacak Pemikiran Mohammad Said dan Ani Idrus* dalam rangka HUT *Waspada* ke-67, di Hotel Soechi 11 Januari 2013).

136 Ahmad Taufan Damanik, *Hajjah Ani Idrus, Perempuan Pejuang Tak Kenal Lelah* (Medan: Makalah Seminar *The Big Thinkers; Melacak Pemikiran Mohammad Said dan Ani Idrus* dalam rangka HUT *Waspada* ke-67, di Hotel Soechi 11 Januari 2013).

Namun tindakan ini tidak menyurutkan perjuangan di dunia pers yang dilakukan, karena setelah dibreidel selama 14 hari *Waspada* kembali tebit. Pada April 1949 Belanda mendalangi suatu konferensi yang dilaksanakan di Sumatera Barat. Dalam pemberitaannya, *Waspada* melakukan kritik terhadap konferensi tersebut hingga membuat Belanda kembali marah dan lagi-lagi membreidel koran ini.

Pendirian koran yang dilandasi semangat nasionalisme yang kental membuat *Waspada* selalu berpihak pada perjuangan pada keutuhan negara Indonesia. Semangat ini tetap terpelihara setelah Belanda angkat kaki dari bumi nusantara yang ditunjukkan dari sikap dan pemberitaan *Waspada* terhadap pemberontakan yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hal inilah yang membuat *Waspada* pada tahun 1954 dinyatakan sebagai bacaan terlarang oleh pemberontak di Aceh. Selanjutnya pada tahun 1956 *Waspada* juga dinyatakan terlarang oleh pemberontak PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia). Begitu juga di tahun 1964 *Waspada* ikut dalam Barisan Pendukung Soekarno (BPS) untuk menentang Partai Komunis Indonesia (PKI) pada masa itu yang mengakibatkan *Waspada* dan semua koran BPS di seluruh Indonesia dilarang terbit. Namun pada tahun 1967, setelah sekian lama dilarang terbit, *Waspada* kembali terbit dalam iklim pemerintahan yang baru yakni di masa Orde Baru.

Dalam perjalanannya kemudian Harian *Waspada* menjadi koran nasional yang terbit di Medan, Sumatera Utara. Selama sekian lama bersama Harian Analisa, dan Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), koran ini menjadi terbesar di Sumatera Utara. Pembacanya juga tersebar sampai ke Provinsi Aceh. Pembaca Harian *Waspada* didominasi oleh umat Islam dan warga pribumi atau penduduk asli Indonesia. Titik tekan pemberitaan *Waspada* ada pada persoalan politik dan agama. Tampilan berita-berita di halaman pertama sering diisi dengan *content* berita politik baik dalam skala nasional maupun lokal, sehingga *Waspada* sering dijadikan barometer perkembangan politik daerah. Harian *Waspada* juga merupakan satu-satunya koran di Sumatera Utara yang menyediakan lima halaman khusus untuk artikel agama Islam sekaligus *content* yang berkenaan dengan agama Islam. Rubrik yang diberinama *Mimbar Jumat* ini sudah ada sejak tahun 70-an dalam bentuk kolom satu tulisan yang terbit setiap hari Jumat. Kini sejalan dengan perkembangannya, kolom *Mimbar Jumat* tersebut sudah menjadi lima halaman Rubrik *Mimbar Jumat*

yang terbit setiap hari Jumat. Selain berisi artikel agama dari penulis lepas, rubrik ini juga berisi konsultasi agama Islam, hadis-hadis Nabi serta daftar khattib Jumat yang mengisi khutbah Jumat di masjid-masjid di kota Medan maupun di daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara.

Sekarang ini Harian *Waspada* menjadi perusahaan keluarga dan dikelola oleh generasi kedua yakni anak-anak pendirinya, yakni Hj.Rayati Syafrin menjabat sebagai Pemimpin Umum, H.Prabudi Said menjabat sebagai Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab, H.Teruna Jasa Said menjabat sebagai Wakil Pemimpin Umum/Wakil Pemimpin Redaksi. Sirkulasi Harian *Waspada* beredar dan terkonsentrasi di Provinsi Sumatera Utara pada umumnya, kemudian di Provinsi Aceh, dan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Harian *Waspada* terbit dari Senin sampai Minggu.

D. Gambaran Umum Harian *Analisa*

Harian *Analisa* adalah surat kabar harian lokal yang terbit di kota Medan pertama kali pada tanggal 23 Maret 1972. Awal mula terbit, Harian *Analisa* berbentuk tabloid dengan durasi penerbitan seminggu sekali (mingguan). Setahun kemudian tepatnya tanggal 23 Maret 1973, Harian *Analisa* juga terbit dengan *broadsheet* (lebar dengan 9 kolom) dengan tebal delapan halaman. Pada waktu sudah ada Harian *Waspada*, juga Harian *Mimbar Umum* yang terbit empat halaman sebagai surat kabar tertua di kota Medan. Harian *Analisa* didirikan dan didanai oleh sekelompok pengusaha China yang bergerak di bidang percetakan dan surat kabar berbahasa Mandarin (Harian *Indonesia*).¹³⁷ Di awal-awal masa berdirinya, jajaran redaksional Harian *Analisa* diisi oleh para wartawan seperti N.F.Zainuddin, Soffyan, Nasmin Sati, Manan Karim, Wan Ghazali, Amir Siregar, Ali Soekardi dan lainnya.

Meskipun surat kabar ini secara khusus diberi nama *Analisa*, namun tidak ada makna khusus dari nama tersebut. Artinya pemberian nama tidak merujuk suatu makna lain selain dari makna harfiahnya. Setelah beberapa nama diusulkan, akhirnya pilihan jatuh pada nama *Analisa* karena nama tersebut dinilai gampang diucapkan

¹³⁷ Soffyan, Pemimpin Redaksi/Penanggungjawab Harian *Analisa*, wawancara di Medan, tanggal 3 September 2014.

baik oleh warga pribumi maupun oleh orang asing.¹³⁸ Kehadiran *Analisa* berdiri lebih dilatarbelakangi oleh faktor bisnis sebagaimana dikatakan oleh H. soffyan bahwa latar belakang berdirinya surat kabar ini adalah untuk memajukan dan meningkatkan mutu dan sirkulasi surat kabar daerah, khususnya di Medan, Sumatera Utara. Meski demikian pada saat didirikan, iklim sosial politik di bawah pemerintahan Orde Baru saat itu, semua surat kabar diharuskan mempunyai tema, baik tema politik, ekonomi dan pembangunan. Pilihan Harian *Analisa* sebagai tema adalah “Membangkitkan Partisipasi Rakyat Dalam Pembangunan”. Di masa Orde Baru pula banyak perizinan yang harus dipenuhi untuk menerbitkan sebuah surat kabar. Untuk posisi sebagai Pemimpin Umum (PU) misalnya, harus ada rekomendasi dari Serikat Penerbit Surat kabar (SPS)¹³⁹, Pemimpin Redaksi (Pemred) harus ada persetujuan dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)¹⁴⁰. Selain itu harus ada surat dari percetakan dan surat persetujuan dari Departemen Penerangan setempat yang menyebutkan bahwa surat kabar yang akan terbit memang masih dibutuhkan di daerah terkait.

Sejak didirikan, perkembangan selanjutnya dari Harian *Analisa* berlangsung secara baik dengan mendapat respons yang baik pula dari pembacanya. Namun diakui masih banyak yang harus diperbaiki dari tampilan surat kabar ini, baik dari segi redaksional maupun dari segi tata letak. Di bidang redaksi, banyak berita yang sebenarnya terlalu panjang, kesalahan koreksian, bahkan ada berita yang kurang atau tidak layak muat. Namun begitu Harian *Analisa* saat ini masih dipercaya pembacanya dan berkembang dengan sirkulasi dari 200 eksemplar dalam bentuk

138 Wawancara Soffyan.

139 SPS kini berganti nama menjadi Serikat Perusahaan Pers. Pada waktu Harian *Analisa* didirikan, SPS memiliki peran sentral untuk mengatur distribusi kertas koran, namun seiring perkembangan masa dan perubahan situasi sosial politik, peran SPS lebih pada organisasi tempat bernaung para penerbit surat kabar.

140 PWI pada masa Orde Baru waktu itu adalah satu-satunya organisasi profesi kewartawanan sehingga secara otomatis memiliki nilai strategis dan pengaruh yang sangat kuat. Namun sekarang seiring beralihnya ke masa reformasi, banyak bermunculan organisasi kewartawanan selain PWI.

tabloid, kini sirkulasinya mencapai 60.000 sampai 70.000 dalam sehari.¹⁴¹ Sedangkan pembaca Harian *Analisa* diidentifikasi sebagai kelompok ekonomi menengah ke atas yang pada umumnya merupakan para pengusaha turunan China.

Titik tekan pemberitaan Harian *Analisa* adalah bidang ekonomi dan keuangan, di banding pada persoalan politik dan sektor lainnya. Bahkan dalam melihat persoalan politik, misalnya, surat kabar ini akan melihatnya dari sisi ekonomi. Sedangkan *policy* pemberitaannya dalam persoalan politik lebih cenderung bersifat netral dalam arti memberi kesempatan yang sama dari para *stakeholders* politik untuk mendapatkan porsi pemberitaan si surat kabar ini sepanjang tidak menjelek-jelekkan, menghina, menghasut dan bermuatan kebencian SARA (Suku Agama Ras, dan Antargolongan). Sesuai dengan temanya, misi utama Harian *Analisa* adalah mencoba mengajak masyarakat terutama para pembacanya untuk bersama membangun negara untuk kesejahteraan bangsa dan negara.

E. Implementasi Prinsip-prinsip Komunikasi Islam Dalam Pemilu Legislatif 2014

Berdasarkan pemahaman tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam para elit Parpol Islam, kemudian penelitian ini melihat bagaimana implementasi pemahaman terhadap prinsip-prinsip komunikasi Islam tersebut dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014. Jika PKS mengedepankan “Keindonesiaan” dengan mereduksi simbol-simbol agama Islam dalam kampanye, maka PPP semakin mantap menonjolkan simbol-simbol Islam. Kedua cara ini dilakukan sama-sama untuk kepentingan *electoral* yakni meraih sebanyak-banyaknya dukungan dan pemilih dalam Pemilu Legislatif 2014. Berikut ini uraiannya:

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pada kampanye akbar di Lapangan Gajah Mada Medan tanggal 26 April 2014, kampanye PKS membawa tema utama Cinta, Kerja, Harmoni. Jargon-jargon tersebut menjadi tema utama yang terpampang di spanduk-spanduk, poster-poster yang dibawa para peserta kampanye di lapangan sepakbola tersebut. Jadwal

141 Wawancara Soffyan.

kampanye di undangan ditetapkan dimulai pada pukul 14:00 sampai pukul 16:00 Wib. Massa kampanye tampak dimobilisasi dengan menumpang berbagai angkutan seperti angkutan kota (Angkot), beca bermotor, sepedamotor, bus dan sebagainya. Di lapangan Gajah Mada tersebut, sebelum jam 14:00 ratusan kader dan simpatisan PKS yang menjadi peserta kampanye telah meramaikan sekitar lapangan tempat diselenggarakan pengobatan gratis seperti pemeriksaan kadar gula darah, dan kolesterol. Di tempat tersebut juga ada aktivitas menjual buku-buku yang ditulis Presiden PKS Anis Matta, selain aktivitas pedagang asongan yang memang ramai setiap ada kegiatan kampanye. Selain itu ada pula tempat penitipan anak yang memang disediakan bagi para peserta kampanye yang membawa anak-anak ke tempat tersebut. Anak-anak itu dijaga oleh petugas yang memang disediakan selama orangtuanya mengikuti kampanye di tempat tersebut. Tepat pukul 14:00 Wib ribuan massa telah memadati lokasi kampanye di depan panggung utama, dan pembawa acara membuka acara kampanye akbar tersebut secara resmi dengan mengucapkan salam kepada ribuan orang yang memadati tempat tersebut. Acara dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh seorang qori dengan membacakan penggalan Surah al-Anfal yang kutipan artinya sebagai berikut:

Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman". Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhanlah mereka bertawakkal, (yaitu) orang-orang yang mendirikan shalat dan yang menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezki (ni'mat) yang mulia. (QS.Al-Anfal: 1-4)

Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling daripada-Nya, sedang kamu mendengar (perintah-perintah-Nya), dan janganlah kamu menjadi sebagai orang-orang (munafik) yang berkata: "Kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan. Sesungguhnya binatang (makhluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan bisu yang tidak mengerti apa-apa pun. (QS.Al-Anfal: 20-22)

Dalam kampanye ini disajikan hiburan berupa lagu-lagu nasyid baik lagu yang dimodifikasi sendiri oleh PKS yang liriknya bermuatan dakwah dan nadanya

menghentak-hentak memancing semangat para pendengarnya. Lagu-lagu tersebut antara lain:

Judul lagu: **TSABAT (Seribu Mujahid)**

Ini adalah tekad yang telah terpatri
 Ini adalah rindu yang tak pernah berhenti
 Ini adalah jiwa mujahid sejati
 Yang tetap teguh di dalam menanti

Bila engkau satu di antara yang mencari
 Lantangkan suaramu bersama seruan ini
 Bila engkau satu di antara yang merindu
 Tunjuk satu ke atas jarimu

MARI KITA BERSERU...

Bila ada seribu mujahid akulah satu di antaranya
 Bila ada seratus mujahid akulah satu di antaranya
 Bila ada sepuluh mujahid akulah satu di antaranya
 Bila ada seorang mujahid akulah yang menggenggamnya

Ini adalah tekad yang telah terpatri
 Ini adalah rindu yang tak pernah berhenti
 Bila engkau satu diantara yang merindu
 Tunjuk satu ke atas jarimu
 MARI KITA BERSERU...

Judul lagu: **Bingkai Kehidupan**

by: Shoutul Harokah

Mengarungi samudra kehidupan
 Kita ibarat pada pengembara
 Hidup ini adalah perjuangan
 Tiada masa tuk berpangku tangan

Setiap tetes peluh dan darah
 Tak akan sirna ditelan masa
 Segores luka dijalan Allah
 Kan menjadi saksi pengorbanan

Allah ghayatuna
 Ar-Rasul Qudwatuna
 Al-Quran dusturuna
 Al-Jihadu sablluna

Al-Mautu fi sabilillah asma amanina

Allah adalah tujuan kami
 Al-Quran Pedoman hidup kami
 Jihad adalah jalan juang kami
 Mati di jalan Allah adalah
 cita-cita kami tertinggi

Judul lagu: **Kobarkan Semangat Indonesia**
 by: Shoutul Harokah

Ayo bersama Kobarkan Semangat Indonesia
 PKS Nomer 3, PKS Tetap di hati.
 Cinta Kerja dan Harmoni, kekuatan inspirasi.
 Padamu negeri mengabdikan, mengharap ridho Illahi.
 Meski beda suku, bangsa, semangat kita sama, membangun indonesia.
 Harmonikan kerja, cinta bangsa indonesia

Ayo bersama Kobarkan Semangat Indonesia
 PKS Nomer 3, PKS Tetap di hati.

Dalam sedih dan gembira, kami tetap 'kan bekerja
 dengan penuh rasa cinta, demi rakyat Indonesia
 Meski beda suku, bangsa, semangat kita sama, membangun indonesia.
 Harmonikan kerja, cinta bangsa indonesia yang adil sejahtera, Cita kita bersama.

Ayo bersama Kobarkan Semangat Indonesia
 PKS Nomer 3, PKS Tetap di hati.

Pemimpin Kaum Sejati, yang berkhidmat melayani.
 Meski tanpa puja puji, cukup Allah Mengetahui hati ini.

Ayo bersama Kobarkan Semangat Indonesia
 PKS Nomer 3, PKS Tetap di hati.

Tetapi selain lagu-lagu nasyid yang bermuatan dakwah, kampanye akbar PKS ini juga menampilkan lagu yang bersifat umum. Ajakan dalam lirik lagu yang berbahasa Batak ini adalah kesetiakawanan. Dengan irama dan lirik yang akrab di telinga masyarakat Sumatera Utara lagu ini mengajak *audience* untuk bersemangat di tengah lautan manusia yang berkumpul di tengah siang yang terik. Satu lagu yang dinyanyikan kader PKS yang menjadi Gubernur Sumatera Utara yakni Gatot Pujo Nugroho yang berjudul anak Medan.

Judul Lagu: **Anak Medan**

by: Trio Lamtama

Anak medan, Anak medan, Anak medan do au, kawan
 Modal pergaulan boido mangolu au,
 Tarlobi dipenampilan main cantik do au, kawan
 Sonang manang susah happy do diau,

Nang pe 51, solot di gontinghi,
 Siap bela kawan berpartisipasi,
 378 Sattabi majo disi,
 Ada harga diri mengantisipasi

Reff:

Horas.....Pohon pinang tumbuh sendiri
 Horas.....Tumbuhlah menantang awan
 Horas.....Biar kambing di kampung sendiri
 Horas.....Tapi banteng di perantauan

Anak medan, Anak medan, Anak medan do au, kawan
 Susah didonganku soboi tarbereng au
 Titik darah penghabisan ai rela do au, kawan
 Hansur demi kawan, ido au kawan

Presiden PKS Anis Matta, Lc tampil sebagai Jurkam dengan penampilan mengenakan baju putih polos dengan lengan panjang digulung dan celana gelap. Dia memulai kampanyenya dengan mengucapkan salam *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*, kemudian dilanjutkan dengan salam kedaeranya *horas, mejuah-juah, juuah-juah, yahobu, ahoy, kulonuwun*. Anis Matta juga membacakan pantun sebagai ciri khas etnis Melayu yang merupakan penduduk lokal di Medan.

Cantik selentak putri melayu/
 Menata bunga di atas meja/
 Kalau ingin Indonesia maju/
 Pilih saja nomor tiga

Kampanye ini selain menghadirkan artis ibukota seperti Dwi Andhika, Mudji Masaid, Sigit Antono, Media dan Anna Tarigan, juga menampilkan penyanyi dari umat non muslim yakni Rita Sitepu. Baik para penyanyi pria dan wanita mengenakan

pakaian yang tidak terbuka yang menonjol-nonjolkan aurat. Di tengah acara berlangsung, suara azan dari masjid di dekat lokasi menghentikan sementara aktivitas kampanye tersebut. Sesuai jadwal, sekitar pukul 16:00 acara selesai dan ribuan khalayak yang tadi berkumpul di lapangan tersebut membubarkan diri. Ada beberapa lembar sampah berserakan, tetapi secara umum relatif tidak terjadi tumpukan sampah di lapangan dan sekitarnya. Di tengah acara berlangsung, ada beberapa petugas yang khusus mengutip sampah di lokasi kampanye akbar tersebut dengan berbekal kantung plastik besar.

Dari kondisi ini bisa dianalisis bahwa PKS telah mempersiapkan kampanye yang akan dilakukan dengan baik, termasuk soal detail teknis acara. Ini menunjukkan bahwa perencanaan kampanye politik telah berlangsung sebagaimana kampanye sebuah organisasi politik nasional. Dari mulai pengerahan massa dengan mengoordinir kedatangan massa dari berbagai daerah di kota Medan dan sekitarnya, tema kampanye, serta komitmen untuk memulai dan mengakhiri kampanye sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Pesan yang disampaikan dari peristiwa ini adalah bahwa PKS adalah partai politik yang menghargai waktu dan lebih disiplin dalam menjalankan agenda kegiatannya. Persoalan tepat waktu ini telah menjadi persoalan krusial dalam kehidupan di berbangsa dan bernegara karena tidak banyak orang yang berilaku disiplin dan menghargai waktu. Disiplin waktu adalah hal yang selalu diabaikan dalam kehidupan sosial di semua tingkatannya. Padahal ajaran Islam sangat menekankan untuk menghargai waktu, bahkan Allah SWT bersumpah atas nama waktu (masa) dalam surah Al-‘Asr: 1-5, yang artinya: *Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya menaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*

Selanjutnya persoalan kebersihan di arena kampanye yang diantisipasi melalui pengerahan petugas khusus yang mengutip sampah menunjukkan ada kesadaran dan juga kepedulian dan tindakan aktif untuk menanganinya. Seperti halnya persoalan waktu di atas, interaksi masyarakat Indonesia dengan sampah adalah suatu masalah yang sulit terurai sampai saat ini. Di mana-mana perilaku membuang sampah sembarangan menjadi kebiasaan kolektif. Orang merasa bebas membuang puntung rokoknya, plastik bekas makanan ringan dan sejenisnya di mana

pun dia berada. Bahkan sampah rumah tangga bebas dibuang ke parit dan sungaisungai. Padahal perilaku membuang sampah sembarangan tersebut nyata-nyata menjadi bencana baik bagi lingkungan maupun bagi masyarakat. Bencana lingkungan yang disebabkan menumpuknya sampah seperti banjir karena tersumbatnya aliran parit terjadinya sedimentasi sungai. Atau parit dan sungai yang menjadi sumber-sumber penyakit datang karena kuman-kumannya yang menyebar ke seluruh penjuru. Di samping itu secara estetika, sampah menjadi persoalan serius karena sangat mengganggu keindahan kota. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berperilaku bersih dan ramah terhadap lingkungannya. Padahal dalam ajaran Islam menjaga kebersihan adalah suatu hal yang diajarkan seperti firman Allah SWT yang artinya berikut ini: *Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.* (Q.S.Al-Baqarah:2)

Dalam sebuah hadis, masalah kebersihan juga merupakan hal yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Seperti hadis berikut ini: *Nabi SAW bersabda: “Bersihkanlah badan mudah-mudahan Allah bersihkan kamu. Karena sesungguhnya tiada seorang hamba yang memelihara kebersihan melainkan menginap bersamanya Malaikat dalam kehidupannya. Tidaklah berganti waktu dari malam melainkan Malaikat berdo’a: “Ya Allah, ampunilah hamba-Mu karena sesungguhnya ia selalu menjaga kebersihan”.*

Dalam interaksi antara massa kampanye akbar Pemilu Legislatif PKS di Lapangan Gajah Mada Medan ini, atau dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan PKS, partai ini ingin meninggalkan pesan bahwa PKS adalah partai politik yang menyadari menjaga kebersihan lingkungan. Atau dengan kata lain ada upaya untuk menjaga kebersihan meskipun secara faktual hasilnya belum benar-benar 100 persen, karena masih ada sampah berserakan di sekitar lokasi acara kampanye.

Sedangkan dari jenis pertunjukkan yang ditampilkan dalam kampanye akbar Pemilu Legislatif ini menunjukkan muatan nasihat atau dakwah dalam lirik-lirik yang disampaikan para penyanyinya. Namun demikian masih terlihat aksi para artis yang masih berjoget-joget ria di atas panggung ketika menyanyikan lagu *Kobarkan Semangat Indonesia*. Meskipun kalangan ulama ada yang membolehkan tarian selama tidak melanggar norma-norma Islam. Seperti yang dikatakan oleh Imam

Ghazali: "Mendengarkan nyanyian dan musik sambil menari hukumnya *mubah* (boleh)". Namun dalam konteks dakwah, atau atribusi yang Islami, menari atau berjoget antara pria dan wanita bersama di atas panggung adalah tidak menunjukkan akhlak Islami. Oleh karenanya pada satu sisi, lirik-lirik lagu yang dinyanyikan dalam kampanye akbar PKS di lapangan Gajah Mada Medan bermuatan dakwah, tetapi pada sisi lain disampaikan dengan cara yang belum sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pesan yang disampaikan dari lirik lagu nasyid tersebut kemudian tersamarkan oleh aktivitas tari-tarian pria dan wanita di atas panggung. Namun di sisi lain, pertunjukkan yang ditampilkan menunjukkan bahwa PKS dengan sangat kuat ingin meninggalkan kesan bahwa keberadaan partai ini adalah sebagai partai yang tidak lagi bergantung pada simbol-simbol Islam, namun secara substansi membawa misi dakwah Islam. Kesan meninggalkan simbol Islam ini diperkuat dengan munculnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKS Taufiq Ridho memainkan alat musik gitar mengiringi penyanyi yang tampil di panggung, dan oleh penampilan penyanyi non muslim Rita Sitorus yang memang sengaja diundang dalam acara tersebut.

Suasana kampanye yang ramai itu dihentikan sejenak ketika suara azan terdengar dari masjid yang berada di dekat lokasi kampanye. Sikap seperti ini menunjukkan dengan kuat adanya kesan yang ingin disampaikan terkait kepatuhan pada ajaran Islam. Karena para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Ishaq bin Rahuyah, dan lainnya mengatakan bahwa berbicara ketika mendengarkan adzan hukumnya adalah makruh. Namun jika keadaan mendesak untuk berbicara, maka berbicaralah seperlunya. Dan hendaknya tidak memperpanjang pembicaraan sehingga terluput dari memperoleh keutamaan yang besar yaitu pengampunan dosa-dosa. Jika berbicara saja sudah makruh, bagaimana dengan kegiatan lain seperti berpidato dalam sebuah kampanye akbar. Oleh karenanya sikap untuk menghentikan kegiatan kampanye akbar di tengah lapangan terbuka tersebut menunjukkan ciri seorang Muslim ketika mendengar perintah untuk melaksanakan shalat.

Sedangkan dalam hal penyediaan tempat penitipan anak di dekat lokasi kampanye menunjukkan bahwa secara struktural ada kepatuhan pada peraturan yang melarang anak-anak mengikuti kampanye akbar di lapangan terbuka. Karena membawa anak-anak di bawah umur, tepatnya yang belum memenuhi syarat sebagai

pemilih adalah dilarang. Larangan melibatkan anak-anak dalam kampanye ini diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002 pasal 15 tentang Perlindungan Anak, dan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 15 tahun 2013 tentang Larangan Parpol Melibatkan Anak-Anak. Ketentuan KPU Pasal 32 Ayat (1) butir J berbunyi: *Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih.* Dengan menyediakan layanan penitipan anak maka para kader dan simpatisan tetap dapat membawa anak-anak di bawah umur ke lokasi kampanye namun tidak untuk ikut berkampanye di tengah ribuan orang yang berkumpul dan di tengah terik sinar matahari. Namun pada praktiknya masih terlihat anak-anak yang mengikuti jalannya kampanye, baik anak-anak yang datang sendiri maupun mereka yang bersama orang tuanya masing-masing. Ini menunjukkan bahwa penyediaan layanan penitipan anak ternyata tidak terlalu efektif untuk tidak terjadinya anak-anak ikut dalam kampanye akbar di lapangan terbuka. Karena partai politik penyelenggara kampanye memang tidak memiliki hak untuk memaksa anak-anak untuk datang ke lokasi kampanye ataupun melarang kader dan simpatisannya untuk tidak membawa anak-anak dalam kampanye. Apa yang dilakukan tidak lebih dari sekedar menghimbau dan menyediakan layanan penitipan anak sebagai alternatif bagi orang tua yang ingin tetap mengikuti kampanye dengan membawa anak-anaknya.

Sementara dalam aktivitas kampanye, orasi yang diisi oleh Presiden PKS Anis Matta menyampaikan bahwa target perolehan suara PKS di Sumut adalah menjadi pemenang, atau memperoleh suara terbanyak. Hal ini terlihat dari komunikasi politiknya sebagai juru kampanye yang diawali dengan pernyataan target kemenangan PKS di Sumut berikut ini: “Mengapa harus juara di Sumatera Utara? Karena Sumatera Utara ini adalah miniatur Indonesia. Jadikan PKS juara di Sumatera Utara, Insha Allah Presiden PKS jadi Presiden Indonesia.”¹⁴²

Dari pernyataan ini dengan jelas dapat dipahami bahwa PKS memiliki target untuk menempatkan kadernya menjadi pemimpin nasional atau menjadi Presiden Republik Indonesia. Untuk tujuan tersebut maka Pemilu Legislatif harus

142 Orasi politik Presiden PKS Anis Matta di arena kampanye Lapangan Gajahmada Medan.

dimenangkan di Sumatera Utara karena daerah ini dianggap sebagai minatur Indonesia. Target ini sebenarnya cukup beralasan karena pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Provinsi Sumatera Utara, PKS baru saja menempatkan kadernya yakni Gatot Pujo Nugroho sebagai pemenang atau menjabat sebagai gubernur. Meski untuk mengajukan kadernya menjadi gubernur PKS harus berkoalisi dengan partai-partai lain, yang dengannya suara untuk kader PKS juga didukung oleh suara dari pemilih partai koalisi, namun posisi kader sebagai kepala daerah dipandang sebagai sesuatu yang memiliki nilai strategis. Apalagi kemenangan kader PKS di Sumatera Utara ini terjadi di saat partai ini tengah mengalami kondisi yang tidak menguntungkan karena Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaq waktu itu terjerat kasus korupsi. Kasus ini menjadi *trending topic* untuk beberapa lama secara nasional, baik di media *mainstream* maupun di media lokal sehingga memunculkan persepsi publik yang negatif tentang PKS. Apalagi kemenangan kader PKS di Sumatera Utara menjadi gubernur ini juga terjadi di Jawa Barat pada waktu yang berdekatan. Di Provinsi Jawa Barat Ahmad Heriawan yang juga kader PKS menjadi gubernur setelah memperoleh suara terbanyak dalam Pemilukada.

Dalam menyampaikan komunikasi politiknya tentang target politik Anis Matta melakukan analogi dan rasionalisasi melalui *kiash* dalam Al-Qur'an. Ia menceritakan kembali kisah Nabi Yusuf as seperti berikut ini:

Ketika satu tahun lalu, saat PKS mendapatkan badai, saya bercerita tentang kisah Nabi Yusuf yang dibuang saudara-saudaranya ke dalam sumur. Saya bilang ke kader-kader PKS, kalau ada yang tanya mengapa PKS terjerumus jatuh ke dalam sumur, saya bilang jangan jawab pertanyaan itu. Tapi perhatikanlah satu drama bagi bangsa Indonesia bahwa kita bisa keluar dari sumur itu seperti Nabi Yusuf dulu keluar dari sumur itu. Saya mau tanya kira-kira sekarang ini PKS sudah keluar dari sumur itu atau belum? Sudah keluar dari sumur? Sudah keluar dari sumur? Sudah keluar dari sumur? Sudah keluar dari sumur?

Sekarang ada babak kedua dalam perjalanan Nabi Yusuf dari sumur. Tahu ceritanya? Nabi Yusuf dari sumur ke mana? Ke istana (jawab audience). Coba ulangi, agak enak didengar, ke mana? Ke mana? Istana (jawab audience lagi). Nabi Yusuf setelah keluar dari sumur pergi ke istana. Itulah babak kedua dari drama yang akan dijalani oleh PKS. Dari sumur ke..? Istana (jawab audience). Dari sumur ke..? istana (jawab audience). Kita punya beberapa waktu lagi Insha Allah untuk sampai ke istana.¹⁴³

143 Orasi politik Anis Matta.

Dari petikan orasi Anis Matta di atas dapat dianalisis bahwa Anis Matta melandaskan peristiwa yang sedang dialami oleh PKS dengan kisah di dalam Al-Qur'an, sekaligus juga merangkainya dengan target politik yang hendak dicapai. Komunikasi politik Anis Matta ini berusaha untuk menumbuhkan keyakinan para kader dan simpatisan akan adanya landasan untuk tetap bersikap optimis terhadap kondisi yang kurang menguntungkan yang sedang dialami. Selanjutnya tidak hanya bersikap optimis tetapi juga menunjukkan adanya peluang untuk bangkit dan menjadi pemenang dalam perhelatan demokrasi lima tahunan. Anis Matta ingin meyakinkan khalayak kampanye yang berkumpul di lapangan luas itu bahwa isu negatif yang sedang menerpa partai tersebut tidak membuat peluang untuk menempatkan kadernya sebagai presiden menjadi tertutup. Karena di dalam Al-Qur'an telah mengabarkan bahwa capaian tertinggi dalam struktur sosial yang dialami Nabi Yusuf as dilalui setelah Beliau mengalami beragam cobaan yang tidak ringan, dari mulai dimasukkan ke dalam sumur, difitnah, dan dijebloskan ke dalam penjara, sebelum akhirnya Beliau menjadi penghuni istana dan menjadi raja. Namun dalam komunikasi politiknya Anis Matta membagi kisah Nabi Yusuf tersebut ke dalam dua babak yang disebutnya drama bangsa. Babak pertama adalah saat-saat Nabi Yusuf as dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, dan babak kedua adalah saat Nabi Yusuf as menuju istana. Padahal kisah Nabi Yusuf as ini tidak serta merta menjadi raja ketika berhasil dikeluarkan dari dalam sumur oleh rombongan orang-orang yang menemukannya. Karena Nabi Yusuf lebih dahulu menjadi budak yang diperjualbelikan, kemudian menjadi budak bagi keluarga Zulaikha, sebelum digoda oleh istri majikannya itu dan akhirnya difitnah dan dijebloskan ke dalam penjara. Nabi Yusuf as juga sempat menjadi penafsir mimpi di dalam penjara sehingga menarik perhatian raja yang memanggilnya ke istana. Beliau kemudian dipercaya sebagai bendaharawan kerajaan sebelum kemudian menjadi raja di negeri Mesir. Dari gambaran ini terlihat bahwa komunikasi politik dalam kampanye akbar yang disampaikan oleh Anis Matta telah memotong sedemikian rupa kisah Nabi Yusuf as sebagai sebuah analogi terhadap apa yang sedang dialami oleh PKS saat itu. Hal seperti ini akan mendistorsi pesan yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf as sehingga tidak dapat dikatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Anis Matta tersebut

adalah kisah yang benar. Padahal salah satu prinsip dalam komunikasi Islam adalah berbicara benar (*qaulan sadidâ*).

Dalam komunikasi politiknya, Anis Matta juga menjanjikan bahwa kalau kader PKS menjadi pemimpin nasional maka orang-orang Indonesia akan memiliki ciri yang lebih baik, seperti pernyataannya berikut ini:

Orang-orang tanya, nanti kalau Indonesia ini dipimpin oleh PKS, kira-kira seperti apa wajah orang Indonesia? Seperti apa wajah orang Indonesia nanti kalau Indonesia ini dipimpin PKS? Saya bilang nanti kira-kira manusia Indonesia itu akan punya tiga ciri. Ciri yang pertama orang Indonesia Insha Allah lebih soleh, yang kedua orang Indonesia Insha Allah lebih pintar, yang ketiga orang Indonesia Insha Allah lebih kaya. Soleh, pintar, kaya. Kalau kita bolak-balik, pintar, kaya, soleh, jadi apa itu? PKS (jawab *audience*). Ide tentang manusia Indonesia yang lebih soleh, lebih pintar, dan lebih kaya ada di dalam buku ini yang saya tulis. Buku Gelombang Ketiga Indonesia. Jadi itulah ciri orang Indonesia di masa yang akan datang, Insha Allah jika PKS pemimpin Indonesia. Saya mau tanya ke sini, ibu-ibu, gadis-gadis, yang jomblo-jomblo. Ini yang gadis-gadis kalau cari suami kira-kira cirinya yang kayak bagaimana: soleh, pintar, kaya. Kalau di sini, ini kalau cari istri yang cirinya yang kayak bagaimana. Kalau yang sini katanya, boleh agak kurang pintar, boleh agak kurang kaya, yang penting sangat cantik, katanya. Jadi Insha Allah kalau PKS memimpin Indonesia ini, Insha Allah itulah yang menjadi ciri utama orang Indonesia, yaitu soleh, pintar, dan, kaya. Jadi kita ingin menggabungkan antara agama, pengetahuan, dan kesejahteraan. Selama ini kalau ada orang yang pintar biasanya kurang soleh, kalau ada orang yang soleh biasanya kurang kaya, kalau ada yang kaya biasanya malas ke masjid. Kita mau orang yang rajin ke masjid, juga punya tempat yang besar di pasar, dan otaknya encer, pintar karena pengetahuannya luas. Kita ingin semua ini bergabung jadi satu, dan Insha Allah kalau ini semua bergabung jadi satu, maka Insha Allah orang-orang Indonesia akan jadi idaman di seluruh dunia.¹⁴⁴

Dari apa yang disampaikan oleh Anis Matta dalam komunikasi politiknya ini dapat dianalisis bahwa ia sedang menjanjikan kepada khalayak bahwa jika kader PKS, atau tepatnya dirinya (sebagai Presiden PKS) menjadi Presiden RI, maka orang Indonesia akan memiliki tiga ciri yakni pintar, soleh dan kaya. Janji ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin untuk dicapai, tetapi janji ini bukan merupakan sesuatu yang mudah untuk dicapai karena menyangkut dua dimensi sekaligus yakni dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Pintar dan kaya dan soleh adalah dimensi duniawi yang merupakan tujuan bernegara yang menjadikan warganya memiliki tingkat pendidikan yang memadai (pintar) dan memiliki tingkat ekonomi yang mencukupi

144 Orasi politik Anis Matta.

(kaya). Kedua dimensi ini bisa diukur dari tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan rakyat Indonesia. Sedangkan soleh adalah dimensi ukhrawi karena ukurannya adalah ketakwaan kepada Allah SWT yang akan menemui kesulitan ketika akan mengukur tingkat ketakwaan seseorang. Oleh karenanya ciri orang Indonesia jika dipimpin PKS seperti yang dijanjikan oleh Anis Matta adalah suatu hal yang sungguh sulit untuk dicapai atau lebih mirip utopia. Apalagi ketika menyadari bahwa orang Indonesia tidak seluruhnya diisi oleh umat Islam tetapi juga oleh umat non Islam yang tidak mungkin memiliki kesolehan seperti dimaksud dalam konteks ajaran Islam. Oleh karenanya apa yang disampaikan dalam komunikasi politik di atas lebih terdengar sebagai sebuah harapan daripada sebuah janji yang dapat ditepati, namun belum tentu kebenarannya. Padahal salah satu prinsip komunikasi Islam adalah berbicara dengan benar (*qaulan sadîdâ*).

Dari arena kampanye akbar tersebut komunikasi politik PKS juga dilancarkan secara sarkastik, seperti yang disampaikan Jurkam berikut ini: “Kalau kita nomor satu di Sumatera Utara, akan menyumbat mulut orang-orang yang benci dengan PKS. Hanya ada dua golongan orang yang benci PKS yakni para koruptor dan golongan orang-orang yang bermaksiat dan melakukan penyimpangan-penyimpangan.”¹⁴⁵

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa komunikasi politik yang disampaikan dengan sangat bersemangat dan ekspresi wajah dan gestur tubuh yang berapi-api menunjukkan bahwa PKS sangat ingin untuk mencapai target politik menjadi pemenang atau peraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2014 di Sumatera Utara. Namun selain target tersebut, ada keinginan lain yakni apa yang disebut oleh Jurkam tersebut sebagai “menyumbat mulut orang-orang yang membenci PKS”. Pernyataan yang disampaikan dengan ekspresi penuh tersebut menunjukkan bahwa ada kemarahan yang ditujukan kepada para pembenci PKS, dan kebencian tersebut akan dijawab partai ini dengan menjadi pemenang Pemilu di Sumatera Utara. Pihak yang disebut sebagai pembenci PKS tersebut diidentifikasi

145 Orasi politik Anshori Siregar, anggota DPR RI dari PKS yang menjadi juru kampanye.

sebagai para koruptor, dan orang-orang yang bermaksiat serta melakukan penyimpangan. Dari identifikasi ini bisa dipahami bahwa PKS menyadari ada pihak-pihak yang tidak menyukai atau membenci keberadaan partai ini. Sikap PKS terhadap mereka yang membenci ini ditunjukkan dengan cara meledak-ledak di hadapan khalayak. Cara seperti ini tentunya tidaklah tepat karena *audience* yang mendengarkan kampanye pada hari itu bukanlah orang-orang yang diidentifikasi sebagai para pembenci PKS, melainkan para kader dan simpatisan partai tersebut. Dari apa yang disampaikan Jurkam ini yang terlihat adalah ekspresi kemarahan sebagai respons dari kebencian yang ditunjukkan pihak-pihak tertentu terhadap PKS. Padahal salah satu prinsip komunikasi Islam adalah berbicara dengan lemah lembut *qaulan layina*, dengan suara yang enak didengar, dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati maksudnya tidak mengeraskan suara, seperti membentak, meninggikan suara. Karena orang cenderung tidak menyukai mendengar orang lain berbicara kasar dan Rasulullah SAW juga selalu bertutur kata dengan lemah lembut, hingga setiap kata yang Beliau ucapkan sangat menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Dengan demikian pernyataan Jurkam PKS ini tidak sesuai dengan prinsip komunikasi Islam *qaulan layyinâ*.

Pada bagian lain Jurkam juga menyatakan bahwa para Caleg PKS memiliki ikatan secara internal melalui sumpah yang dilakukan. Ikatan sumpah tersebut disertai dengan sanksi bagi para Caleg yang melanggarnya. Pernyataan tersebut seperti apa yang disampaikan Jurkam berikut ini; “Semua Caleg PKS sudah disumpah supaya jangan lupa dengan pilihannya. Kalau ada yang melanggar sumpah, kita ganti, pecat.”¹⁴⁶

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa PKS ingin menyampaikan kepada khalayak bahwa para Caleg yang ikut dalam Pemilu Legislatif 2014 adalah orang-orang yang sudah disumpah terlebih dahulu untuk tetap melakukan interaksi dan memperjuangkan kepentingan pada pilihannya. Kalau sumpah ini dilanggar maka PKS akan memecat para Caleg yang menjadi wakil rakyat di Dewan Perwakilan

146 Orasi politik Idris Luthfi, anggota DPR RI dari PKS yang menjadi juru kampanye.

Rakyat tersebut. Apa yang diutarakan Jurkam tersebut juga merupakan bagian dari janji bahwa kalau kelak ada anggota DPR/DPRD dari PKS yang lupa dengan pemilihnya maka akan dipecat. Janji seperti ini juga masih menyisakan *bias* dalam benak *audience* karena selain indikator “lupa kepada pemilih” yang tidak menjelaskan, sejauh ini dari beberapa contoh yang pernah terjadi, kasus pemecatan terhadap anggota dan kader biasanya terkait kasus korupsi dan kasus hukum atau moral, dan bukan karena lupa dengan pemilihnya. Ketidakjelasan pernyataan ini seolah meneguhkan anggapan yang selama ini diyakini publik bahwa dunia politik tidak berada di wilayah hitam atau putih melainkan berada di wilayah di antaranya yang cenderung samar atau abu-abu. Dalam keadaan seperti ini, apa yang diutarakan tidak dapat dikatakan sesuatu yang benar ataupun salah. Padahal dalam salah satu prinsip komunikasi Islam, berbicara benar/jujur (*qaulan sadîdâ*) adalah hal yang harus dilakukan.

Selanjutnya untuk perolehan kursi di DPR RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Utara, PKS menargetkan memperoleh tiga kursi seperti halnya perolehan kursi pada Pemilu Legislatif tahun 2009. Untuk mencapai target tersebut PKS cenderung membebankannya kepada Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho yang merupakan kader PKS. Hal tersebut seperti pernyataan dalam petikan kampanye berikut ini: “Ini tantangan bagi Gubsu untuk bisa memajukan tiga kursi di DPR RI.”¹⁴⁷

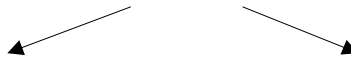
Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa ada pembebanan tanggung jawab bagi kader PKS yang menjadi kepala daerah, dalam hal ini Gubernur Sumatera Utara untuk membantu partai ini memperoleh suara. Dengan demikian maka ceruk suara PKS akan semakin banyak sehingga bisa mendudukkan kader-kadernya di kursi legislatif DPR RI. Apa yang disampaikan di depan khalayak ini jelas melanggar etika politik yang dipahami secara umum karena kepala daerah adalah jabatan yang bersifat netral dalam Pemilu. Untuk menjamin netralitas kepala daerah yang merupakan pejabat negara, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2013, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara

147 Orasi politik Iskan Qobla Lubis, anggota DPR RI dari PKS yang menjadi juru kampanye.

Dalam Kampanye Pemilu. Pada Pasal 6 disebutkan: *Pejabat negara dalam melaksanakan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus menjalankan cuti.* Sedangkan pada Pasal 8 disebutkan: *Pejabat negara dalam melaksanakan kampanye Pemilu tidak menggunakan fasilitas negara kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.* Aturan ini menegaskan bahwa kepala daerah tidak boleh menggunakan pengaruhnya maupun fasilitas negara untuk memengaruhi pemilih dalam Pemilu. Oleh karenanya apabila secara terbuka dalam komunikasi politik di depan ribuan *audience* seorang Jurkam menuntut kepala daerah dari partainya agar memihak bahkan menggunakan pengaruhnya untuk memenuhi target partai, maka hal ini adalah sesuatu yang tidak saja melanggar etika tetapi juga prinsip komunikasi Islam yang mengharuskan komunikator berbicara dengan perkataan yang baik (*qaulan Ma'rûfâ*) dan perkataan yang pantas (*qaulan maysûrâ*).

Gambar: 16 Kampanye PKS

S
K
P
e
y
j
a
k



2. Partai Persatuan Pembangunan

Kampanye rapat akbar pengerahan massa oleh PPP diselenggarakan di Kebun Lada, kota Binjai, Jumat 4 April 2014 dihadiri ratusan massa dan simpatisan partai yang datang ke lokasi kampanye dengan dimobilisasi dengan menumpang angkutan dan kendaraan pribadi seperti sepeda motor. Tidak ada tema utama yang didengungkan dalam kampanye tersebut. Dari poster-poster dan spanduk-spanduk yang dipampangkan di arena kampanye pada umumnya gambar-gambar para Caleg dan himbauan untuk memiliki para Caleg tersebut. Sesuai undangan, acara dimulai sekira pukul 14:00 Wib. Kampanye ini selain menampilkan Jurkam kabupaten dari Binjai juga menampilkan Jurkam provinsi yakni Ketua DPW PPP Sumut Fadly Nurzal. Namun sebagai Jurkam yang dinanti kehadirannya, Fadly Nurzal baru tiba di lokasi kampanye sekira pukul 16:00 Wib atau di saat acara akan berakhir sesuai jadwal yang seharusnya. Di lokasi kampanye juga terlihat anak-anak ikut di antara orang dewasa yang meramaikan lapangan tersebut, namun tidak terlihat tempat

penitipan anak bagi para orang tua yang ingin tetap berkampanye sambil membawa anak-anaknya.

Dalam kampanye ini disajikan hiburan berupa musik berisi lagu-lagu dangdut, pop, dan maupun musik India. Tidak ada lagu yang bernada dakwah atau liriknya mengajak kepada kebaikan ajaran Islam. Di antara lagu-lagu yang diperdengarkan antara lain:

Judul Lagu: **Munajat Cinta**

By: *The Rock*

*Malam ini ku sendiri
tak ada yang menemani
seperti malam-malam
yang sudah-sudah*

*Hati ini selalu sepi
tak adanya yang menghiasi
seperti cinta ini
yang selalu pupus*

*[reff]
Tuhan kirimkanlah aku
Pemimpin (kekasih) yang baik hati
yang cintai aku
apa adanya*

*Mawar ini semakin layu
tak ada yg memiliki
seperti aku ini
semakin pupus*

Judul Lagu: **Piano**

By: *Rhoma Irama feat Rita Sugiarto*

*Piano, mari main piano
Piano, mari main piano
Menyanyi diiringi dengan piano
Menari diiringi dengan piano*

*Piano, mari main piano
Piano, mari main piano
Pak Guru
Hm-hm?*

*Not ini apa namanya
Yang mana?
Oh itu
Re-la-la-fa-la-la-re*

*Pak Guru, yang ini apa namanya
Yang mana lagi?
Oh
Mi-do-do-sol-do-do-mi*

*Pak Guru, kini aku sudah tahu
Sekarang beri pelajaran baru
Memang kau muridku yang nomor satu
Yang kusayangi selama hidupku*

*Pak Guru
Hm?
Not ini apa namanya
Coba yang mana?
Oh
Re-la-la-fa-la-la-re*

*Pak Guru, yang ini apa namanya
Yang mana?
Oh itu
Mi-do-do-sol-do-do-mi*

Jurkam pertama yang tampil meneguhkan jati diri PPP sebagai partai Islam dan partai yang dilahirkan oleh Ormas dan partai Islam di masa lalu. Simbol keIslaman terasa mengental dari pernyataannya berikut ini:

Partai Persatuan Pembangunan dilahirkan oleh NU (Nahdlatul Ulama), Parmusi (Partai Muslimin Indonesia), SI (Syarikat Islam), Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah). Tetapi PPP berjuang bersama ibu-ibu lillahikalimatillah untuk menegakkan agama Allah. Setuju?Allahu akbar, Allahu akbar¹⁴⁸

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa identitas PPP sebagai partai Islam ingin disegarkan lagi dengan merujuk pada sejarah bahwa PPP dilahirkan dari fusi partai-partai Islam sebagai saluran aspirasi politik umat Islam. Islam di samping

¹⁴⁸ Orasi politik Irwansyah Pohan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP kota Binjai, dan Caleg PPP untuk kota Binjai yang menjadi juru kampanye.

sebagai jati diri juga sebagai modal utama bagi partai ini untuk berada pada ceruk pemilih umat Islam tradisional yang menjadikan simbol Islam sebagai faktor penting dalam menentukan pilihan pada Pemilu Legislatif. Oleh karenanya kesan akan keislamannya PPP perlu terus dirawat dengan mengingatkan *audience* akan sejarah lahirnya PPP sebagai partai Islam. Penyegaran kembali sejarah PPP sebagai aspirasi umat Islam untuk mengikat para pemilih tradisional tersebut pada PPP. Pernyataan Jurkam bahwa *PPP berjuang bersama ibu-ibu lii'la'ikalimatillah untuk memegakkan agama Allah* dalam petikan kalimat ini ingin menegaskan kembali bahwa PPP adalah partai Islam yang memperjuangkan aspirasi umat Islam, dan oleh karenanya ia merupakan saluran aspirasi umat Islam. Upaya mengikat pemilih tersebut semakin tergambar jelas dari pernyataan Jurkam berikut ini:

Setujukah saudara-saudara memilih PPP tanpa duit? Ayo bersumpah, *Asyhadu allailaaha illallah* kami bersumpah demi Allah. Jujur ayo... Saya tanda yang mukanya 50 ribu, 100 ribu. Jangan suruh Caleg PPP menjual akidah. Jangan suruh Caleg PPP menjual rumahnya. Yang di sana dengar nggak, nanti ada bagi-bagi kalian datang. PPP mengharamkan *money politics*.¹⁴⁹

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa Jurkam tersebut berusaha untuk mengikat *audience* dengan sumpah yang mengatasnamakan Allah SWT untuk memilih Caleg PPP tanpa mendapatkan imbalan uang. Dengan kata lain, Jurkam ingin menyampaikan bahwa Caleg PPP tidak memberikan uang kepada pemilih agar memilih mereka, karena hal seperti itu berarti *money politics* yang telah diharamkan oleh PPP seperti pernyataan *PPP mengharamkan money politics*. Pernyataan seperti ini ingin menekankan bahwa tidak ada Caleg PPP yang menggunakan *money politics* dalam Pemilu Legislatif 2014. Namun sang Jurkam tersebut tidak juga dapat memberikan jaminan apapun bahwa para Caleg tidak membayar para pemilihnya dengan sejumlah imbalan uang ataupun barang untuk memilih mereka. Apa yang disampaikan tersebut mungkin saja mengandung kebenaran namun juga berpotensi tidak benar. Apalagi lagi ketika Jurkam menggunakan terminologi *saya tanda muka 50 ribu, 100 ribu* sebagai pernyataan yang bermaksud mengatakan ada *audience* yang mengharapkan imbalan Rp50-100 ribu untuk memilih Caleg. Ini juga

149 Orasi politik Irwansyah Pohan.

mungkin saja benar, tapi mungkin juga tidak benar, namun pernyataan tersebut disampaikan dengan *bad taste* (tidak enak didengar) atau menggunakan terminologi yang vulgar dan cenderung kasar. Padahal dalam prinsip *qaulan karîmâ* (perkataan yang mulia) pada komunikasi Islam mengharuskan seorang komunikator untuk berbicara secara tidak vulgar, tidak kasar atau menggunakan terminologi yang *bad taste*. Hal menyangkut *bad taste* ini dipertegas dengan pernyataan *Yang di sana dengar nggak, nanti ada bagi-bagi kalian datang*, yang mempertegas tuduhan bahwa ada *audience* yang memang mengharapkan uang dalam Pemilu Legislatif 2014.

Selain berupaya mengingat *audience* dengan sumpah dan dan menggunakan *bad taste* dalam komunikasi politiknya, Jurkam juga antara lain, menyampaikan kalimat bernada ancaman dan janji-janji dengan menggunakan terminologi agama Islam. Hal tersebut seperti pernyataan Jurkam berikut ini:

Saudaraku yang tidak mau berpanas (yang berlindung dari terik matahari) yakinlah saudara-saudara, nanti di Padang Mahsyar, kalian merasa panas. Saudara-saudara ini (yang berpanas-panas di seputar pentas kampanye) dingin semua. Setuju. Mulai nanti malam berdoa kepada Allah agar Allah memihak kepada PPP, karena PPP tidak mengenal money politics. Setuju? PPP pandai berterimakasih, PPP akan sedekah jika PPP menang. Setuju? Allahu akbar, Allahu akbar, satukan niat menangkan PPP, terima kasih atas ibu-ibu mau berhimpun bersama kami, yakinlah Allah akan meridhoi.¹⁵⁰

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa adanya kesan kalimat ancaman dengan menggunakan terminologi agama. Kalimat *yang tidak mau berpanas yakinlah saudara-saudara, nanti di Padang Mahsyar, kalian merasa panas. Saudara-saudara ini (yang berpanas-panas di seputar pentas kampanye) dingin semua* menyatakan dengan jelas ancaman tersebut. Padahal, pemahaman dari ajaran Islam tentang Padang Mahsyar, bukanlah tempat yang panas bagi orang yang tidak mau berpanas-panas dalam kampanye PPP, dan tempat yang dingin bagi yang mau berpanas-panas. Ada tujuh golongan yang mendapat naungan ketika di Padang Mashar kelak sesuai hadis berikut:

Ada tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungan 'Arsy-Nya pada hari dimana tidak ada naungan kecuali hanya naungan-Nya semata.

150 Orasi politik Irwansyah Pohan.

1.Imam (pemimpin) yang adil; 2.Pemuda yang tumbuh besar dalam beribadah kepada Rabbnya; 3.Seseorang yang hatinya senantiasa terpaut pada masjid; 4.Dua orang yang saling mencintai karena Allah, dimana keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah; 5.Dan seorang laki-laki yang diajak (berzina) oleh seorang wanita yang berkedudukan lagi cantik rupawan, lalu ia mengatakan: “Sungguh aku takut kepada Allah.”; 6.Seseorang yang bershodaqoh lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya; 7. Dan orang yang berdzikir kepada Allah di waktu sunyi, lalu berlinanglah air matanya.” (Hadits shahih. Diriwayatkan oleh al-Bukhari, II/143 – Fat-h, dan Muslim, no. 1031).

Dari petikan hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa ancaman yang disampaikan oleh Jurkam dengan menggunakan terminologi ajaran Islam tersebut tidak didasari oleh ajaran Islam. Bahwa naungan dari Allah SWT di Padang Mashar diberikan kepada tujuh golongan manusia seperti disebutkan dalam redaksi hadis. Dari ketujuh golongan tersebut tidak satupun yang disebabkan karena mau berpanas-panas dalam kampanye PPP. Oleh karenanya bisa disimpulkan bahwa apa yang disampaikan Jurkam tersebut dalam komunikasi politiknya adalah tidak benar yang berarti melanggar salah satu prinsip komunikasi Islam yakni *qaulan Sadîdâ*(perkataan yang benar). Selanjutnya pernyataan *PPP pandai berterimakasih, PPP akan sedekah jika PPP menang* dapat dikategorikan sebagai janji politik yang disampaikan secara langsung, dan terbuka. Namun bentuk janji yang disampaikan juga tidak diperjelas dan hanya dalam bentuk kata umum yang disebut dengan *sedekah*. Padahal sedekah adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang tidak memiliki kaitan pada kondisi menangnya PPP dalam Pemilu legislatif ataupun kalah.

Penegasan bahwa PPP sebagai simbol partai Islam kembali ditegaskan oleh Jurkam berikutnya. Dalam komunikasi politiknya di arena kampanye, dia menyebut terminologi Islam, bersih, dan tak pernah korupsi sebagaimana petikan dari orasi politiknya sebagai berikut:

Karena PPP partai Islam, partai yang bersih, partai yang tak pernah korupsi, dan seluruh Calegnya adalah orang Islam, saudara-saudara. Jadi sekali lagi harapan kita semua kepada seluruh kader dan simpatisan, seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, kami seluruh PPP kota Binjai merasa bangga dengan kehadiran bapak-bapak ibu-ibu pada sore hari ini. Untuk itu sekali lagi saya mohon doanya pada seluruh yang hadir pada

sore hari ini untuk mendoakan agar nantinya PPP, kota Binjai khususnya menjadi partai pemenang Pemilu. *Amin ya rabbal 'alamiin*.¹⁵¹

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa terminologi *PPP partai Islam*, adalah terminologi yang penting bagi partai ini. Oleh karenanya kata-kata ini terus menerus diulang dalam kesempatan kampanye. Ini menegaskan bahwa PPP menjadikan simbol Islam sebagai daya tarik untuk menarik pemilih dari kalangan umat Islam tradisional. Sedangkan kalimat yang menyebutkan *partai yang bersih, partai yang tak pernah korupsi* justru terdengar ironi di tengah badai kasus korupsi yang tengah menimpa PPP dengan ditetapkannya Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pernyataan ini seolah tak menghiraukan kenyataan yang tengah terjadi tersebut atau dengan sengaja mengasumsikan bahwa *audience* kampanye tidak mengetahui atau tidak mengingat kasus yang menimpa Ketua Umum DPP PPP tersebut. Sedangkan pernyataan *seluruh Calegnya adalah orang Islam* adalah pernyataan yang kembali menegaskan identitas keislaman pada tubuh PPP yang tidak disertai dengan kenyataan empirik.¹⁵² Oleh karenanya pernyataan Jurkam dalam kampanye ini bukan perkataan yang baik dan mulia, serta tidak jujur hingga bertentangan dengan prinsip *qaulan sadîdâ*, *qaulan karîmâ*, dan *qaulan ma'rûfâ*.

Pernyataan Jurkam berikutnya juga menegaskan pernyataan di atas, bahwa PPP dan Islam sepertinya harus senantiasa didengungkan di benak khalayak untuk memantapkan memori penerima pesan tersebut. Hal tersebut seperti pernyataan Jurkam berikut ini:

Kami dari PPP yakin dan percayalah ibu-ibu, dari Sabang sampai Merauke, PPP lah yang masih istiqomah memerjuangkan aspirasi umat Islam. Yakin? Kita akan membasmi korupsi-korupsi, baik itu skala nasional maupun yang ada di kota Binjai.¹⁵³

151 Orasi politik Gazali Syam yang menjadi juru kampanye PPP.

152 Pernyataan tentang seluruh Caleg PPP adalah umat Islam, berbeda dengan yang disampaikan oleh Aswan Jaya yang juga Caleg PPP untuk Provinsi Sumut. Menurutnya ada enam Caleg kabupaten/kota di Papua Barat yang beragama non muslim. Keenamnya akhirnya terpilih dan menjadi anggota legislatif.

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa kalimat ini pada intinya meneruskan penegasan tentang simbol keislaman yang ada pada diri PPP. Pernyataan *PPP lah yang masih istiqomah memperjuangkan aspirasi umat Islam* untuk menunjukkan kaitan yang erat antara PPP dengan Islam dan umat Islam. Pernyataan itu juga ingin menunjukkan bahwa partai lain tidak lagi *istiqomah* memperjuangkan aspirasi umat Islam. Seperti diketahui, selain PPP ada beberapa partai lain yang berasaskan Islam seperti PKS, PBB. Dengan pernyataan seperti di atas, Jurkam ingin menyatakan bahwa walaupun ada partai Islam yang memperjuangkan aspirasi umat Islam, tetapi mereka sudah tidak *istiqomah* lagi, dan hanya PPP yang masih *istiqomah*. Pernyataan ini sudah tentu tidak dilengkapi lebih jauh dengan ukuran dan indikator *istiqomah* tersebut. Karena tidak adanya ukuran yang jelas, artinya pernyataan tersebut berpotensi untuk mengandung ketidakbenaran atau ketidakjujuran. Padahal, di dalam prinsip komunikasi Islam salah satunya adalah berkata dengan benar atau jujur (*qaulan sadîdâ*). Selanjutnya pernyataan *kita akan membasmi korupsi-korupsi, baik itu skala nasional maupun yang ada di kota Binjai* ini terdengar ingin menegaskan komitmen PPP terhadap pemberantasan korupsi, baik dalam skala lokal maupun nasional. Namun pernyataan seperti ini berpotensi memiliki makna yang *bias* karena tugas dan tanggung jawab yang dibebankan negara untuk memberantas korupsi ada di pundak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI (Polri), dan Kejaksaan RI, bukan wewenang dan kewajiban partai politik seperti PPP. Oleh karenanya komitmen yang ingin ditunjukkan dengan kalimat tersebut terasa tidak tepat dan jauh dari kenyataan, hanya bersifat pemicu semangat dan euforia massa di tengah massa kampanye akbar di tengah lapangan luas. Kalimat ini juga melanggar prinsip perkataan yang pantas, benar dan jujur (*qaulan maysûrâ, qaulan sadîdâ*).

Kemudian Jurkam juga menyampaikan janji politiknya kepada *audience* yang hadir di lapangan sepakbola tersebut. Janji politik tersebut terkait memperjuangkan

153 Aswan Jaya, Caleg PPP untuk Provinsi Sumut. Dalam perkembangan di akhir tahun 2014 sampai awal tahun 2015, DPP PPP mengalami dualisme pengurus antara kubu Suryadharma Ali dan Romahurmuziy. Aswan Jaya kemudian diangkat oleh Suryadharma Ali menjadi Ketua DPW PPP Sumut, sedangkan Ketua DPW PPP versi Romahurmuziy adalah Fadly Nurzal yang merupakan kepengurusan sebelumnya.

aspirasi umat Islam sebagaimana kutipan pernyataan sebagai berikut:

Sekarang umat Islam selalu termarginal. Masyarakat kota Binjai sebanyak 85 persen adalah umat Islam. Jika kami terpilih, jika kami nanti dengan target 6 kursi, ibu-ibu bisa memilih PPP yakin dan percaya perubahan kota Binjai akan lebih Islami. Betul? Kami juga dari PPP tetap memperjuangkan aspirasi umat Islam. Kami juga telah memberikan dan berjuang dan disetujui oleh Wali Kota Binjai, bagaimana guru-guru ngaji, bilal-bilal mayat, sekarang sudah mendapatkan kontribusi dari pemerintah. Kami juga akan memperjuangkan bagaimana guru-guru ngaji, muazzin, dan imam-imam masjid untuk mendapatkan bantuan lagi dari APBD kota Binjai. Ibu-ibu, bapak-bapak dan seluruh masyarakat yang hadir di lapangan ini, yakin dan percaya perubahan jika ibu-ibu memilih PPP, kami tetap memperjuangkan bagaimana kesejahteraan rakyat kota Binjai, bagaimana perubahan baik itu dari kesehatan, pendidikan, dan seluruh usaha-usaha kecil. Kami akan mengubah semua di pemerintah kota Binjai. Karena kota Binjai adalah kota kita yang kita cintai.¹⁵⁴

Dari kutipan pernyataan ini dapat dianalisis bahwa pernyataan di atas yang merupakan janji politik yang diucapkan saat kampanye dengan menekankan pada sentimen keagamaan. Pernyataan *Sekarang umat Islam selalu termarginal. Masyarakat kota Binjai sebanyak 85 persen adalah umat Islam. Jika kami terpilih, jika kami nanti dengan target 6 kursi, ibu-ibu bisa memilih PPP yakin dan percaya perubahan kota Binjai akan lebih Islami*, menunjukkan hal tersebut. Kalimat ini ingin mengutarakan bahwa meskipun umat Islam di kota Binjai--sebagai tempat kampanye digelar--adalah mayoritas, namun kepentingan umat Islam masih termarginalkan. Dan PPP lah yang dianggap bisa memperjuangkan kepentingan umat Islam tersebut dengan memperjuangkan perubahan-perubahan. Apa yang disebut dengan aspirasi umat Islam tersebut dijelaskan dalam kalimat selanjutnya yakni *Kami juga telah memberikan dan berjuang dan disetujui oleh Wali Kota Binjai, bagaimana guru-guru ngaji, bilal-bilal mayat, sekarang sudah mendapatkan kontribusi dari pemerintah. Kami juga akan memperjuangkan bagaimana guru-guru ngaji, muazzin, dan imam-imam masjid untuk mendapatkan bantuan lagi dari APBD kota Binjai*. Kalimat ini menjelaskan kalimat di awalnya yaitu apa yang dimaksud aspirasi umat Islam yang diperjuangkan adalah bantuan bagi guru-guru ngaji, para bilal mayit, muazzin, dan imam-imam masjid agar mendapat bantuan dari APBD kota Binjai melalui pendekatan yang dilakukan kepada Wali Kota Binjai. Apa yang

154 Orasi politik Aswan Jaya Caleg PPP yang menjadi juru kampanye.

disampaikan tersebut adalah hal-hal yang dianggap sebagai kesuksesan yang telah dilakukan PPP di kota Binjai dan selanjutnya apabila pemilih kembali memilih PPP dalam Pemilu legislatif 2014, maka mereka akan melakukan hal lainnya, yang bisa diketahui dalam sambungan kalimat berikut; *jika ibu-ibu memilih PPP, kami tetap memperjuangkan bagaimana kesejahteraan rakyat kota Binjai, bagaimana perubahan baik itu dari kesehatan, pendidikan, dan seluruh usaha-usaha kecil.* Dengan demikian perjuangan selanjutnya yang akan dilakukan partai ini jika masih memilih PPP adalah kesejahteraan rakyat kota Binjai, dan masa kesehatan, pendidikan serta usaha kecil. Namun tidak seperti sebelumnya, pernyataan kedua ini masih merupakan janji yang abstrak dalam arti masih disebutkan secara umum, dan tidak spesifik sehingga belum berwujud secara nyata. Janji-janji politik seperti ini sering dilontarkan para Jurkam setiap kali kampanye, namun karena ia tak berwujud nyata maka tidak dapat ditagih ketika nanti sudah menjadi anggota legislatif. Oleh karenanya dia melanggar prinsip *qaulan maysûrâ*.

Jurkam selanjutnya berbicara tentang keberadaan PPP sebagai partai Islam yang banyak tidak disukai kalangan-kalangan tertentu. Hal tersebut seperti petikan kalimatnya berikut ini:

Ada yang tidak menginginkan PPP tetap eksis di pentas politik nasional. Tahun 99 mereka menyurvei bahwa PPP akan habis, PPP akan ditinggalkan oleh pemilih. Karena komunitas Muhammadiyah mendirikan PAN, komunitas NU mendirikan PKB, maka PPP akan ditinggalkan oleh pemilihnya. Mereka terkejut hasil Pemilu, PPP bertahan sebagai partai besar di Indonesia bahkan pak Hamzah (Haz) tetap menjadi wakil presiden. Tahun 2004 mereka mengatakan hal yang sama, PPP akan tutup, PPP akan selesai, tetapi PPP masih selamat. Tahun 2009 Pemilu lima tahun yang lalu, masih nyaring di telinga kita, masih terdengar di kuping kita sampai hari ini, mereka juga mengatakan bahwa PPP juga akan habis, PPP akan tutup, mereka malu PPP masih bertahan, partai politik Islam masih bertahan. Baru kemarin mereka tobat, kemarin mereka tobat. Kemarin mereka mulau tobatan nasuha, mereka mengatakan bahwa PPP akan selamat 2014 sebagai partai politik Islam. Kita doakan semoga mereka tetap ditunjukki oleh Allah SWT tidak mengejek-ngejek partai Islam. Cocok?¹⁵⁵

Dari kutipan pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa Jurkam ingin mengatakan keberadaan PPP terus mendapat tekanan dan serangan dari pihak-pihak

155 Orasi politik Fadly Nurzal, Caleg PPP untuk DPR RI yang menjadi juru kampanye.

tertentu. Bahwa sebagai partai Islam, PPP ada yang tidak menyukainya, dan melakukan berbagai hal untuk meyakinkan publik bahwa PPP tidak akan dapat bertahan sebagai partai politik. Kalimat *ada yang tidak menginginkan PPP tetap eksis di pentas politik nasional* menunjukkan dengan jelas kondisi tersebut. Bahwa karena PPP berasaskan Islam dan membawakan suara dan aspirasi umat Islam, maka ada pihak-pihak yang tidak menyukainya. Pernyataan ini secara tersirat merefleksikan firman Allah SWT: *Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka.* (QS. Surah Al-Baqarah: 120). Kenyataannya memang umat non Islam bersama orang-orang yang berpikiran sekuler, pluralis, liberal, dan sejenisnya akan selalu menghadang apapun aturan dalam ketatanegaraan yang mengikat masyarakat secara umum yang bersumber dari ajaran Islam. Kasus Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal salah satu contohnya—yang memerlukan waktu selama delapan tahun sebelum disahkan dalam sidang paripurna DPR RI tanggal 25 September 2014 lalu, sejak mulai dibahas pada tahun 2006. Kalimat *Tahun 99 mereka menyurvei bahwa PPP akan habis, PPP akan ditinggalkan oleh pemilih. Karena komunitas Muhammadiyah mendirikan PAN, komunitas NU mendirikan PKB, maka PPP akan ditinggalkan oleh pemilihnya. Mereka terkejut hasil Pemilu, PPP bertahan sebagai partai besar di Indonesia bahkan pak Hamzah (Haz) tetap menjadi wakil presiden. Tahun 2004 mereka mengatakan hal yang sama, PPP akan tutup, PPP akan selesai, tetapi PPP masih selamat. Tahun 2009 Pemilu lima tahun yang lalu, masih nyaring di telinga kita, masih terdengar di kuping kita sampai hari ini, mereka juga mengatakan bahwa PPP juga akan habis, PPP akan tutup, mereka malu PPP masih bertahan, partai politik Islam masih bertahan* menjelaskan betapa upaya yang dilakukan pihak-pihak yang tidak menginginkan partai Islam dalam pentas politik nasional menggunakan berbagai cara. Melakukan survei yang menunjukkan hasil PPP tidak akan mampu bertahan menunjukkan adanya upaya dari kajian akademik sedangkan alat yang kedua yang disebutkan secara inplisit adalah media massa sebagai alat memengaruhi opini publik. Nyatanya PPP masih bertahan sejak Pemilu pertama di masa reformasi digulirkan, dan itu berarti apa yang disampaikan lembaga-lembaga survei tersebut adalah sesuatu yang tidak benar atau penyesatan opini publik. Penjelasan yang diutarakan Jurkam akan polarisasi tekanan terhadap partai Islam dari tahun 1999,

2004, sampai 2009 menyegarkan memori publik tentang kekuatan di luar Islam yang terus menekan keberadaan partai Islam. Beberapa lembaga survei memang telah merilis hasil penelitiannya bahwa partai-partai Islam, termasuk PPP tidak akan mampu bertahan karena dan akan ditinggal pemilihnya. Hasil penelitian tersebut disiarkan secara luas melalui media massa dan menjadi perbincangan di berbagai media televisi *mainstream* dengan satu kesimpulan utama yakni partai Islam seperti PPP tidak akan sanggup bertahan. Apa yang disampaikan oleh Jurkam ini relatif berbeda dengan Jurkam sebelumnya yang cenderung memberikan janji, janji dan menekankan simbol-simbol keIslaman. Pernyataan *Baru kemarin mereka tobat, kemarin mereka tobat. Kemarin mereka mulai tobatan nasuha, mereka mengatakan bahwa PPP akan selamat 2014 sebagai partai politik Islam. Kita doakan semoga mereka tetap ditunjuki oleh Allah SWT tidak mengejek-ngejek partai Islam* menunjukkan sikap terhadap orang yang menginginkan PPP tidak lagi berperan sebagai partai politik secara nasional adalah mendoakan mereka agar ditunjukki oleh Allah SWT adalah sikap yang elegan atau perkataan yang *ma'ruf*.

Namun di ujung orasi politik Jurkam ini juga menyelipkan pernyataan yang bernada sarkastik, seperti petikan pernyataannya berikut ini:

Mari kita angkat tangan, setiap saya katakan takbir, jawab dengan *Allahu Akbar*. Itu pertanda kita mengundang Allah bersama kita, supaya Allah menjaga kita dengan rahmat. Angkat tangannya tinggi-tinggi, saya meyakini bahwa ketiak kita tidak bau. Yakin? Kalau bau tahankan.¹⁵⁶

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa Jurkam mengajak *audience* untuk membesarkan Allah SWT dan memohon rahmatnya. Namun pernyataannya yang berbunyi *Angkat tangannya tinggi-tinggi, saya meyakini bahwa ketiak kita tidak bau. Yakin? Kalau bau tahankan* seperti sebuah paradoks yang tiba-tiba muncul. Maksudnya tentu untuk bercanda dan memunculkan efek segar dan rileks bagi *audience* yang hadir, namun kesan serius dan sungguh-sungguh yang disampaikan pada kalimat sebelumnya menimbulkan *shifting* yang sangat konstan dalam kalimat yang disampaikan hingga memberi kesan seolah seperti mainan kata-kata semata. Persoalan *ketiak bau, dan tahankan kalau bau* adalah kalimat yang

156 Orasi politik Fadly Nurzal.

sarkastik bila diucapkan. Karena setiap orang memiliki kondisi ketiaknya masing-masing, ada yang bau dan ada pula yang tidak terlalu bau. Bagi yang memiliki ketiak yang bau, akan sering merasa rendah diri dan tak jarang membuat malu untuk bergaul. Kemudian apabila hal seperti ini yang menjadi bahan candaan, maka secara langsung maupun secara tidak langsung akan menyinggung dan merendahkan orang yang memiliki bau ketiak, oleh karenanya ini bukanlah perkataan yang *ma'ruf*.

Selanjutnya dalam pandangan informan yang merupakan akademisi yang *concern* meneliti partai Islam, baik PKS maupun PPP memiliki kesamaan dalam aplikasi nilai-nilai keIslaman. Keduanya masih menerapkan nilai-nilai Islam pada tataran tertulis, namun dalam aplikasinya masih belum ideal. Hal ini seperti pernyataan informan sebagai berikut: “PKS dan PPP relatif sama dengan partai konvensional. Nilai-nilai Islam tidak dijadikan pedoman bagaimana mereka bersikap.”¹⁵⁷

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa ada jarak yang jauh antara tataran tertulis dan aplikasinya, atau antara apa yang diucapkan dan dikomunikasikan kepada khalayak dengan realitas politik yang berlangsung di antara kedua partai tersebut. Partai politik Islam yang semestinya membawa nilai-nilai Islam dalam setiap gerak dan perilakunya, namun hanya berlaku parsial dalam arti hanya menerapkannya dalam wacana dan secara tertulis administratif saja. Karena jika dibaca anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kedua partai ini, maka nilai-nilai keislaman akan secara kental mewarnainya, namun dalam tataran praktis, nilai-nilai Islam itu tereduksi oleh berbagai kepentingan seperti uang dan jabatan, serta *bargaining* politik. Padahal, nilai-nilai Islam semestinya menjadi pembeda antara partai politik yang membawa simbolisasi Islam, dengan partai konvensional lainnya. Namun dalam pandangan informan partai politik Islam masih melakukan praktek yang sama dengan partai konvensional dengan minimnya aplikasi nilai-nilai ajaran Islam. Dalam pandangan informan, apa yang dilakukan PKS dan PPP dalam realitas politiknya tidak mencerminkan aplikasi nilai-nilai keislaman. Jika di dalam Islam dituntut untuk menyampaikan sesuatu sesuai realitas politik, tapi mereka tidak

¹⁵⁷ Wawancara Warjio, akademisi dari Universitas Sumatera Utara, di Medan pada tanggal 9 September 2014.

melakukan hal tersebut sesuai dengan etika keIslaman. Misalnya perdebatan-perdebatan yang terjadi di internal di PPP maupun PKS seringkali tidak mencerminkan sebuah musyawarah yang ditata menurut kaidah-kaidah keislaman. Sebelum Pemilu Legislatif 2014, PKS sendiri sudah memiliki sejarah di Pemilu Presiden 2009 saat harus menentukan tokoh yang akan didukung menjadi calon wakil presiden antara Jusuf Kalla (JK) atau Boediono, seperti pernyataan informan berikut ini:

Pemilihan isu jilbab antara Cawapres (calon wakil presiden) JK atau Boediono bersama SBY. Di kalangan internal PKS, ada keinginan harus memilih Cawapres sang istrinya berjilbab, yang waktu itu istri JK yang berjilbab. Tapi keputusan partai waktu itu memilih Boediono. Ini dipertanyakan karena PKS sejak awal memang memperjuangkan jilbab ketika mereka masih liqo'-liqo'. Di PKS juga sudah terbit buku seperti berdakwah di parlemen dan di eksekutif, artinya mereka mencari calon-calon, atau kader, atau orang-orang yang bisa merepresentasikan nilai Islam itu untuk didukung, ternyata mereka lebih bersifat pragmatis ketimbang memilih nilai-nilai Islam agar bisa lebih berjalan. Paradoks.¹⁵⁸

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa ada catatan ketidaksesuaian antara ideologi ideal yang selama ini diusung oleh PKS dengan realitas politik yang terjadi. Karena selama ini PKS diketahui memperjuangkan penggunaan pengenaan jilbab sebagai simbol ketaatan kaum Muslimah kepada Allah SWT, namun ketika berhadapan dengan realitas politik praktis, maka objek dakwah yang selama ini diperjuangkan justru ditinggalkan dan lebih memilih untuk bersikap pragmatis. Karena istri JK adalah wanita Muslimah yang mengenakan jilbab, sedangkan istri Boediono tidak mengenakan jilbab. Jika istiqomah pada perjuangan dakwahnya tentunya PKS akan memilih JK sebagai Cawapres yang diusung bersama SBY ketimbang Boediono, namun ternyata keharusan dalam kepentingan-kepentingan politik yang berlangsung menjadikan PKS lebih memilih Boediono. Hal seperti ini tidak saja bertentangan dengan apa yang sebelum diperjuangkan oleh PKS, namun juga bertolakbelakang dengan apa yang digariskan dalam buku yang beredari di internal partai ini sebagai panduan dakwah PKS di parlemen maupun di eksekutif yang membawakan nilai-nilai Islam. Namun nyatanya tarikan kepentingan yang

158 Wawancara Warjio.

bersifat pragmatis lebih dipilih ketimbang nilai dakwahnya. Inilah yang dipandang sebagai sebuah paradoks oleh informan. Karena di satu sisi, secara administrasi kepartaian, PKS adalah partai Islam tetapi dalam aplikasinya, tidak mempraktekkan nilai-nilai Islam sebagai jalan dakwah mengajak orang lain pada kebajikan dengan mengedepankan nilai-nilai Islam. Catatan di Pemilu Presiden 2009 tersebut dipandang memiliki konsistensi pelaksanaannya dengan Pemilu Legislatif 2014, yang ditunjukkan dari berbagai aktivitas politik PKS. Hal seperti ini, misalnya, dilihat dari aktivitas partai yang menyentuh langsung kebutuhan praktis masyarakat yang sudah berkurang dilakukan. Kalau dulu pada kadernya dinilai sering terjun ke lapangan, tetapi sekarang lebih jarang, ditambah lagi dengan berbagai kasus yang mulai menimpa para elit partai ini seperti kasus korupsi, CD porno, dan kabar-kabar yang menyebutkan ada elit partainya yang masuk panti pijat yang merupakan tempat yang diidentikkan sebagai tempat berlangsungnya aktivitas maksiat. Hal seperti ini menunjukkan aplikasi nilai-nilai keislaman oleh PKS telah mengalami degradasi atau penurunan *ghirah* atau semangat dakwahnya. Dengan kata lain, meski memiliki rekam jejak yang baik dan panduan yang sistematis dalam berdakwah di parlemen dan di eksekutif namun aplikasi bobot perjuangan dakwah yang dulu dilakukan oleh PKS saat ini semakin sedikit.

Akan halnya dengan PPP dinilai tak jauh berbeda dengan PKS dalam hal aplikasi nilai-nilai keislaman. Malahan dalam beberapa hal PPP justru lebih jauh tidak mencerminkan aplikasi nilai-nilai keislaman tersebut. Hal ini seperti pernyataan informan sebagai berikut:

PPP Memiliki nilai-nilai yang tersurat, menyatakan diri sebagai partai Islam tetapi ada praktik-praktik politik yang secara individual tidak mencerminkan itu (nilai-nilai keislaman). Misalnya (walaupun masih bersifat perdebatan), banyak ulama mengatakan bahwa merokok itu haram tapi dalam praktiknya ternyata banyak elit PPP termasuk di Sumut masih merepresentasikan di depan umum seolah-olah tak ada masalah ketika mereka merokok. Ini dari sisi komunikasi politik keislaman tidak memberikan pembelajaran yang baik.¹⁵⁹

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa secara administrasi politik atau yang tersurat dalam lembaran resmi partai, PPP adalah partai Islam bahkan dalam

159 Wawancara Warjio.

berbagai kesempatan menyebut diri sebagai satu-satunya partai Islam. Tetapi perilaku politik para elitnya, khususnya dalam komunikasi politik yang dilancarkan baik secara sadar maupun tak sadar tidak menunjukkan nilai-nilai keislaman, terlebih lagi tidak menunjukkan nilai aplikatif dari prinsip-prinsip komunikasi Islam. Perihal merokok meski masih dalam tataran perdebatan di kalangan ulama, namun di tataran praktis sebenarnya tidak ada lagi perdebatan bahwa merokok itu merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek ekonomi, medis, sosial, budaya, bahwa merokok lebih banyak menimbulkan kemudharatan ketimbang kemaslahatan. Apalagi lagi ketika kemudian perilaku merokok itu dilakukan di depan umum dengan cara demonstratif membuat seolah-olah tidak ada permasalahan dengan perilaku tersebut. Tidak jarang bahkan elit partai perokok ini tidak menghiraukan keberatan orang-orang di sekitarnya yang ditunjukkan melalui gesture tubuh mereka. Bahkan kalau secara sadar orang tidak merasa keberatan, namun secara tanpa sadar sebenarnya tubuh orang di sekitar orang merokok menolak kehadiran racun dari asap rokok yang terhisap tubuhnya. Maka sejatinya perilaku merokok ini berarti sebuah tindakan menganiaya diri sendiri dan juga menganiaya orang lain. Dalam pandangan informan bahkan acara-acara yang dilakukan PPP tidak begitu menunjukkan nilai keIslaman, misalnya, ketika tiba waktu shalat saat kegiatan berlangsung, mereka terikut arus kegiatannya. Padahal, semestinya yang terjadi adalah mempertimbangkan jadwal masuknya waktu shalat dengan kegiatan yang sedang dilakukan sehingga tidak harus mengabaikan panggilan azan untuk menunaikan ibadah shalat wajib. Hal-hal seperti ini kemudian dipandang sebagai pangkal dari kondisi kurangnya kepercayaan masyarakat pemilih Islam, terhadap partai-partai Islam. Apalagi kemudian banyak isu-isu miring yang dilakukan partai seperti sogokan jabatan, suap dalam pengajuan suatu Peraturan Daerah (Perda) tertentu yang bisa dikerjakan secara pragmatis. Mereka jadi kehilangan wibawanya, padahal mereka partai Islam yang seharusnya jauh dari nilai-nilai yang ada atau sering dialami partai-partai konvensional.

Pandangan lain disampaikan informan dalam hal implementasi prinsip-prinsip komunikasi Islam pada kampanye Pemilu Legislatif 2014, dalam pandangan informan, tidak ada tema-tema khusus yang diangkat partai politik Islam, seperti PPP dan PKS, yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam. Antara partai politik

Islam dan partai politik nasionalis sama-sama mengusung tema-tema soal kesejahteraan, keadilan, keamanan, yang lebih cenderung bersifat umum. Partai politik Islam tidak terdengar mengangkat tema dari segi agama umpamanya soal masjid, madrasah, atau mengenai tanah wakaf lembaga-lembaga Islam. Padahal persoalan tanah wakaf ini merupakan persoalan krusial yang merupakan kepentingan umat Islam, namun pengurusannya tidak beda dengan tanah lainnya. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada dorongan dari partai-partai Islam, sehingga banyak kasus tanah wakaf jadi hak pribadi, atau kasus perguruan Islam yang tidak mendapatkan advokasi dari partai politik. Oleh karenanya partai-partai politik Islam seperti PPP dan PKS tidak berbeda dengan partai politik lain.

Akan halnya PKS dalam mengimplementasikan nilai-nilai keIslaman dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014 untuk tujuan *electoral*-nya dinilai oleh informan masih sebatas hal-hal yang umum. Ini berarti PKS tidak jauh berbeda dengan partai politik lain yang tidak berazaskan Islam. Pernyataan informan tersebut sebagai berikut:

Substansi Islam dalam politik adalah perjuangan pada keadilan. Karena politik itu bicara kehidupan orang banyak, yang pasti ada kesenjangan karena itu keadilan jadi tuntutan. PKS malah menyebut dirinya partai keadilan. Keadilan dalam arti yang luas, termasuk keadilan sosial. Sebagian mungkin sudah mereka perjuangkan. Keadilan itu luas, dalam hukum, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam keamanan dan kesempatan belum diperjuangkan. Mungkin mereka sudah memperjuangkan beasiswa atau anggaran pendidikan, tapi itu-kan masih sebatas hal yang umum. Kalau umum, ya nggak ada bedanya dengan (partai politik) yang lain.¹⁶⁰

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa PKS dalam implementasi nilai-nilai Islam membawa satu jargon utama yakni keadilan. Keadilan merupakan inti dari ajaran Islam itu sendiri yang menjadi bagian dari nama PKS itu sendiri. Keadilan yang merupakan tuntutan dalam kehidupan dunia politik karena merupakan sektor yang berbicara dan menyangkut orang banyak. Karena itu melibatkan orang banyak maka kesenjangan di tengah-tengahnya menjadi suatu keniscayaan sehingga keadilan menjadi tuntutan masyarakat banyak. Makna keadilan dari penggalan nama PKS dimaknai sebagai *the ultimate goal* atau tujuan utama yang hendak dicapai, dalam

160 Wawancara Hasyimsyah Nasution, Guru Besar Fakultas Ushuluddin/Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sumut, di Medan tanggal 6 November 2015.

keberadaannya sebagai partai politik Islam. Namun keadilan yang diperjuangkan tersebut dinilai masih bersifat parsial seperti dalam bidang pendidikan dalam hal memperjuangkan anggaran pendidikan. Secara umum PKS mendorong jumlah anggaran pendidikan, tapi ketika penerapannya tidak diselusuri dan diawasi lebih jauh. Padahal jika pengawasan seperti ini dilakukan sampai ke tingkat pengawasan maka akan semakin bagus bagi PKS sendiri. Kenyataannya hal tersebut hanya dilakukan ketika menjelang masa kampanye tiba. Jadi tujuan *electoral* PKS dalam implementasi nilai-nilai Islam masih sangat dominan, atau dengan kata lain, nilai-nilai Islam diimplementasikan untuk tujuan *electoral* dalam Pemilu Legislatif. Di samping itu, keadilan dalam pandangan informan adalah sesuatu yang luas karena mencakup berbagai aspek, tidak hanya pendidikan saja. Keadilan juga meliputi berbagai aspek seperti keadilan dalam bidang hukum, dalam bidang ekonomi, dan seterusnya. PKS sebagai partai politik Islam baru sebatas parsial masih bersifat umum dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam bidang politik.

Dalam hal implementasi pemahaman nilai-nilai Islam, PPP dinilai hanya mengandalkan simbol-simbol Islam. Padahal cara seperti ini tidak besar artinya bagi umat Islam untuk terdorong memilih PPP dalam Pemilu Legislatif 2014. Hal ini seperti pernyataan informan sebagai berikut:

Tidak bisa hanya dengan simbol-simbol dengan Ka'bah, tulisan Arab, ayat-ayat yang disebut pada spanduk-spanduk. Kalau orang yang imannya sudah bagus, mungkin hal-hal tersebut bisa jadi pendorong (memilih PPP), tetapi orang yang hanya Islam sebagai "abangan" dengan cara seremonial, upacara-upacara keislaman, simbol-simbol itu tak besar artinya.¹⁶¹

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dianalisis bahwa PPP adalah partai yang lebih mengedepankan simbol-simbol Islam dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014. Simbol-simbol tersebut dikedepankan dalam gambar Ka'bah sebagai lambang partai, tulisan-tulisan Arab, dan ayat-ayat yang disebutkan dalam spanduk-spanduk yang ramai disebar dalam masa kampanye Pemilu Legislatif 2014. Implementasi nilai-nilai seperti ini tak terlalu banyak berarti, dan hanya bermakna bagi umat Islam yang memiliki keimanan yang bagus. Pernyataan ini tentang umat Islam yang imannya sudah bagus ini dipahami sebagai masyarakat Islam yang tradisional yang

161 Wawancara Hasyimsyah Nasution.

cenderung merespons dan tidak mengabaikan simbol-simbol agama Islam sebagai suatu bagian dari Islam itu sendiri. Bagi kelompok masyarakat ini simbol-simbol memang perlu bahkan sangat penting sebagai alat mendorong, mempersatukan, dan mengawasi bagi orang yang punya hubungan emosional. Sedangkan masyarakat Islam yang tergolong dalam Islam abangan, simbol-simbol tersebut tidak akan berdampak signifikan untuk menggerakkan mereka bersimpati atau memilih PPP. Islam abangan yang disebut di sini adalah istilah yang dipopulerkan Clifford Geertz yang membagi umat Islam di Jawa ke dalam tiga inti struktur sosial: desa, pasar, dan birokrasi pemerintah.¹⁶²

Apa yang disebut dengan “desa” adalah pengasosiasi masyarakat petani yang diistilahkan dengan “abangan” yakni masyarakat yang menekankan aspek-aspek animisme atau kepercayaan terhadap adanya makhluk halus yang dipercaya dapat memengaruhi kehidupan manusia. Masyarakat Islam seperti ini dicirikan dengan kekentalan pada tradisi agama yang berasal dari luar Islam, dan afiliasi politik di tahun 1960-an pada Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Partai Nasionalis Indonesia (PNI). Sedangkan inti struktur kedua yang disebut “pasar” diasosiasikan sebagai kelompok terdidik secara Islam yang melaksanakan ajaran Islam secara lebih murni, tidak saja dalam tataran fikih Islam yang mengatur cara beribadah, tetapi juga mencakup keseluruhan aspek dalam organisasi sosial yang kompleks. Kelompok ini dicirikan pada afiliasi politiknya pada partai politik Islam seperti Partai Nadhlatul Ulama (NU) ataupun Masyumi. Selanjutnya yang ketiga disebut “birokrasi pemerintah” yang merujuk pada kaum priyayi yang merupakan kelompok aristokrat yang diwariskan berdasarkan hubungan darah. Kelompok ini memiliki akar pada kerajaan Hindu-Jawa yang tidak menekankan pada elemen Hinduisme. Mereka dicirikan dengan afiliasi politiknya kepada PNI.

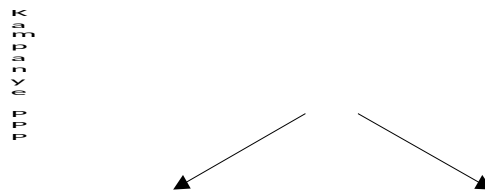
Implementasi pemahaman nilai-nilai Islam oleh para elit PPP juga dinilai tidak terjadi secara organisatoris. Artinya, bukan merupakan kebijakan partai dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam yang dipahami oleh para elitnya. Hal ini seperti pernyataan informan sebagai berikut:

¹⁶² Lihat lebih jauh Clifford Geertz, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin, (Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981), h.6-8.

Pelatihan pendidikan (yang dilakukan PPP) hanya ada pada individu tokohnya saja. Seperti menjadi ustadz di satu daerah, dan tidak merupakan program dari partai. Tapi biasanya partai mengklaim pekerjaan anggotanya sebagai bagian dari partai.¹⁶³

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa apa yang dilakukan oleh PPP dalam implementasi pemahaman nilai-nilai Islam adalah melakukan pelatihan pendidikan yang dilakukan oleh individu dalam kepengurusan PPP. Pelatihan pendidikan yang dimaksud seperti ceramah agama sebagaimana yang dilakukan oleh para *da'i* di tengah-tengah masyarakat. Pada umumnya para elit PPP adalah para *da'i* ada yang yang sebelum mereka menjadi anggota dan pengurus PPP, telah menjadi *da'i* yang menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada umat melalui berbagai bentuk pengajian. Oleh karenanya ketika mereka menjadi elit PPP, mereka juga melaksanakan pelatihan pendidikan serupa, sehingga secara praktis sebenarnya bukan merupakan program PPP dalam hal implelementasi pemahaman nilai-nilai Islam di tengah-tengah masyarakat. PPP dinilai hanya melakukan klaim atas apa yang dilakukan para elitnya sebagai pekerjaan partai, namun sebetulnya hal tersebut adalah aktivitas individu dari masing-masing orang yang berada di internal partai.

Gambar: 17 Kampanye PPP



163 Wawancara Hasyimsyah Nasution.

F. Pemahaman Elit Partai Islam Tentang Prinsip-prinsip Komunikasi Islam

1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Pemahaman atas prinsip-prinsip komunikasi Islam adalah pemahaman baik secara tekstual terhadap prinsip-prinsip yang tersebut dalam kitab suci Al-Qur'an maupun aplikasinya dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014.

Dalam setiap kali menjelang masa Pemilihan Umum (Pemilu), khususnya sebelum masa kampanye maka Parpol melakukan perencanaan, tak tekecuali PKS. Merujuk dari perencanaan yang merupakan desain gerakan partai ini yang merupakan refleksi dari pemahaman tentang ajaran Islam. Perencanaan meliputi dasar, idiologi dan struktur. Dasar merupakan landasan yang menjadi sumbu dari gerakan PKS. Dasar ini terurai dalam visi partai yang dimuat dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS. Namun secara khusus informan tidak mengenal istilah “prinsip-prinsip komunikasi Islam” yang merupakan prinsip

bagi umat Islam dalam melancarkan komunikasinya. Informan baru memiliki orientasinya sendiri ketika mendengar istilah *qaulan balighâ* dan *qaulan layyinâ*.

Kalau merujuk kepada Islam yang prinsip, memang suatu hal yang niscaya. Yaitu harusnya pola komunikasi Islam harus dibawa, dilaksanakan, diimplemetasikan oleh setiap Muslim dalam semua bidang kehidupan seperti keluarga, bidang ekonomi, politik, bahkan dalam bernegara, dan lain-lain. Seperti prinsip *qaulan balighâ* dalam arti tegas dalam menyampaikan pesan, tetapi tegas bukan secara ekstrim. Prinsip *qaulan layyinâ* atau berbicara lemah lembut dalam pola dakwah. Seperti nabi Musa as yang diperintahkan Allah SWT berdakwah dengan *qaulan layyinâ* kepada Fir'aun. Atau *qaulan Sadîdâ* perkataan yang benar, kalau ada salah sampaikan yang dengan cara yang baik, jangan disembunyikan tapi disampaikan. Tetapi cara penyampaian juga jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Misalnya dalam urusan rumah tangga, pola komunikasi Islam juga harus diterapkan, semuanya harus melekat dalam segmen apapun, sampai segmen keluarga yang terkecil. Dengan anak pun kita tak boleh bohong, walaupun ada yang boleh diketahui anak secara langsung, maka disampaikan dengan cara lebih baik, tetapi tidak boleh berkata bohong.¹⁶⁴

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa secara khusus, informan yang merupakan elit PKS Sumut belum memahami istilah “prinsip-prinsip komunikasi Islam”, namun memahami istilah-istilah dalam Al-Quran tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam seperti *qaulan balighâ* dan *qaulan layyinâ*. Informan menyebut dan menguraikan tiga dari enam prinsip komunikasi Islam dalam penelitian ini. Prinsip *qaulan balighâ* disebut menyampaikan pesan secara tegas, yang dibedakan dari penyampaian pesan secara ekstrim. Kemudian prinsip *qaulan layyinâ* yang dimaknai sebagai berbicara lemah lembut dalam pola dakwah. Seperti nabi Musa as yang diperintahkan Allah SWT berdakwah dengan *qaulan layyinâ* kepada Fir'aun. Sedangkan prinsip ketiga yang disebut informan adalah *qaulan Sadîdâ* yang dipahami sebagai perkataan yang benar, atau menyampaikan tanpa menyembunyikan sesuatu baik hal yang benar maupun yang salah dengan cara penyampaian yang baik. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman informan tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam masih bersifat memahami sebagian, dan belum memahami sebagian yang lain (parsial), baik menyangkut kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas, pemahaman tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam belum secara

164 Wawancara Muhammad Hafez.

komprehensif sedangkan secara kualitas, juga belum meliputi keseluruhan prinsip-prinsip komunikasi Islam itu. Pesan yang disampaikan belum dilihat berdasarkan kesesuaiannya dengan komunikan sebagai penerima pesan, atau belum memasuki poin tentang *content analysis* dan *audience analysis* bahwa pesan tertentu untuk orang atau khalayak tertentu pula.

Bagi PKS Sumut, dalam Pemilu Legislatif 2014 pemahaman tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam terwujud dalam bentuk-bentuk pelayanan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini seperti diutarakan informan berikut ini: “Prinsip-prinsip komunikasi Islam diwujudkan dalam pelayanan sosial di tengah-tengah masyarakat.”¹⁶⁵

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dianalisis bahwa dalam pandangan PKS, pemahaman tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam berada pada tataran aplikatif. Mereka yang bergaul secara kolektif di lingkungan masyarakatnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip komunikasi Islam adalah mereka yang memahami prinsip-prinsip tersebut. Dengan memberikan manfaat dari aktivitas kolektif kepartaian, maka dengan demikian dianggap sebagai bentuk-bentuk komunikasi yang bersifat Islami. Wujud pelayanan sosial di tengah masyarakat seperti disebut dalam pernyataan di atas adalah aktivitas para kader PKS seperti kegiatan bakti sosial serupa pengobatan gratis, pengajian dan sebagainya. Pernyataan ini mengisyaratkan bahwa untuk sampai kepada substansi ajaran Islam, PKS merasa perlu meminimalisir penggunaan simbol dan atribut-atribut keIslaman dalam kampanye Pemilu Legislatifnya, seperti mengenakan peci bagi para ikhwan, dan banyak yang tidak lagi memelihara janggutnya. Dalam bentuk pemahaman tentang ajaran Islam ini pun diukur dari keberhasilan dari apa yang dilakukan melalui kegiatan sosial di tengah masyarakat. Tentu saja apa yang dianggap sebagai substansi dari ajaran Islam, termasuk dalam prinsip-prinsip komunikasi Islam itu adalah hal yang penting bahkan utama, tetapi tidak untuk melepaskannya dari pemahaman setiap individu umat Islam. Para elit PKS sebagai partai yang mengemban tugas dakwah sebagaimana tertuang dalam *platform*-nya sudah semestinya memahami prinsip-prinsip

165 Wawancara Muhammad Hafez.

komunikasi Islam. Kiranya PKS lebih mengutamakan substansi sehingga mulai melupakan syariat dalam penerapan prinsip-prinsip komunikasi Islam dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014.

Analisis ini kiranya bertalian dengan apa yang dinyatakan selanjutnya oleh informan bahwa kekhawatiran PKS terhadap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat adalah phobia Islam dari kalangan umat non muslim. Hal ini seperti pernyataan informan berikut ini: “Kita ingin menampilkan Islam yang *rahmatan lil’alamiin*. Jangan sampai mereka (non muslim) phobia Islam.”¹⁶⁶

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa tujuan PKS adalah menjadi partai politik Islam yang eksis di pentas politik nasional yang memberikan manfaat bagi semua dan bagi apa saja (*rahmatan lil’alamiin*). Untuk tujuan ini apa yang harus dijaga oleh PKS adalah jangan sampai orang-orang di luar Islam (non muslim) menjadi phobia terhadap Islam, khususnya terhadap kehadiran partai Islam. Terminologi *rahmatan lil’alamiin* adalah Al-Quran seperti redaksi terjemahan ayat berikut ini:

Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS Al Anbiya’: 107)

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa Allah SWT mengabarkan bahwa Dia telah menjadikan Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Yaitu, Dia mengutus Beliau sebagai rahmat untuk semua manusia. Barang siapa menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan barang siapa yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.¹⁶⁷ Merujuk tafsir ayat ini bahwa yang dimaksud dengan *rahmatan lil’alamiin* adalah Rasulullah Muhammad SAW yang diutus oleh Allah SWT yang menebarkan rahmat kepada seluruh alam. Bagi siapa yang menerima akan mendapat rahmat tetapi sebaliknya bagi yang menolak apa saja yang disampaikan oleh Muhammad SAW akan rugi. Maka jika terminologi Al-Quran itu

166 Wawancara Muhammad Hafez.

167 Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu, Jilid 6*, h.154.

dirangkaikan dan menjadi ‘kami ingin menampilkan Islam yang *rahmatan ‘alamiin*’ artinya adalah Islam yang ingin ditampilkan adalah Islam yang seperti diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam konteks prinsip-prinsip komunikasi Islam, maka semestinya ia bermakna memahami ajaran Islam dalam prinsip-prinsip komunikasi Islam dan mengimplementasikannya dalam kampanye Pemilu Legislatif. Pernyataan tersebut bermakna menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW agar setiap orang yang mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman: *Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepadamu hingga kamu mengikuti agama mereka* (QS. A-Baqarah: 120)

Berkaitan ayat ini Ibnu Jarir mengatakan: “Yang dimaksud dengan firman-nya itu adalah: ‘Hai Muhammad, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu selamanya, karena itu tak usah kau cari hal yang dapat menjadikan mereka rela dan sejalan dengan mereka. Akan tetapi arahkan perhatianmu untuk mencapai ridha Allah dengan mengajak mereka kepada kebenaran yang kamu diutus dengannya’”¹⁶⁸ Dari uraian ayat dan tafsir ini menyebutkan bahwa orang-orang non muslim (Yahudi dan Nasrani) tidak akan pernah merasa senang terhadap Islam sebelum kita mengikuti mereka. Dalam tataran tertentu ketidaksenangan itu juga berarti ketakutan yang tak mendasar terhadap Islam (Islam phobia) karena ia adalah sebuah kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak senang atau membenci Islam tanpa alasan yang dipahaminya. Oleh karena adanya jaminan dari Al-Qur’an tentang keniscayaan ketidaksenangan terhadap Islam ini maka Ibnu Jarir menyatakan untuk tidak perlu mencari cara agar mereka menjadi rela dan senang terhadap Islam karena akan percuma. Apa yang perlu dilakukan oleh umat Islam adalah senantiasa mengajak mereka agar mendapatkan rahmat dengan mengikuti ajaran Islam seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karenanya dalam hal ini akan menjadi percuma pula mengkhawatirkan munculnya Islam phobia dari kalangan non muslim karena mereka akan terus berlaku seperti itu seperti dikabarkan dalam Al-Qur’an. Padahal prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam itu di antaranya adalah *qaulan Sadidâ*(berkata benar) dengan sifat pesan yang semestinya jelas, rinci, tahu

168 *Ibid*, Jilid 1, h.303.

sasaran dan arah yang dituju, serta tidak bengkok dan menyimpang hingga tepat ke sasaran. Ini artinya menjaga agar pihak non muslim tidak phobia Islam adalah tujuan *electoral*, karena semua orang tanpa memandang agama adalah sama-sama berpotensi menjadi konstituen atau pemilih bagi partai politik. Tetapi menjaga pihak non muslim tidak phobia Islam dengan tidak menampilkan simbol-simbol Islam yang *syar'i*, adalah **tidak sesuai dengan prinsip komunikasi Islam *qaulan sadidâ***. Tetapi pada sisi lain, model komunikasi seperti ini **sesuai dengan prinsip komunikasi Islam *qaulan layyinâ*** (berkata lemah lembut) atau menunjukkan kesopanan kepada pihak yang menyimpang dari kebenaran. Ini menunjukkan bahwa makna *rahmatan lil'alamiin* dalam pandangan elit PKS Sumut belum lengkap dan seimbang karena semestinya tetap harus menampilkan kebermanfaatan dan kelembutan (*qaulan layyinâ*) dan kebenaran sesuai ajaran Islam (*qaulan sadidâ*) sekaligus.

Wawancara selanjutnya dengan Satria Yuda Wibowo Sekretaris DPW PKS Sumut. Wawancara yang masih terkait dengan pemahaman elit PKS ini dilakukan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pemahaman elit PKS Sumut ini tentang prinsip komunikasi Islam. Dalam wawancara ini informan juga tidak mengenal istilah “prinsip komunikasi Islam”, namun dapat menyebutkan istilah dalam Al-Qur'an tentang prinsip komunikasi Islam. Informan menyebutkan seperti dalam kutipan wawancara berikut:

Ayat tentang komunikasi Nabi Musa seperti *qaulan layyinâ*, komunikasi itu dilihat siapa lawan komunikasinya. Karena memang Rasulullah SAW juga mengatakan berkomunikasi dengan orang sesuai dengan kadar kemampuannya tingkat pemahamannya terhadap suatu masalah. Jadi dikaitkan dengan konteks ayat tadi, kalau memang yang bersangkutan pada posisi ataupun kondisi yang keras berbicara, maka kita keras. Kalau memang harus lemah lembut, kita juga harus begitu. Jangan lupa ayat Rasulullah itu bersikap lemah lembut dengan sesama Muslim dan bersikap keras terhadap orang kafir. Namun tidak lantas hitam putih ya dengan kafir tegas, dalam konteks politik ya, bukan dalam konteks akidah. Dalam konteks politik kalau ada yang bisa bermanfaat dilakukan untuk masyarakat, ya kita harus berkomunikasi dengan cara-cara yang baik. Kecuali kalau dia (orang kafir) sudah melampaui batas, membuat keresahan, apalagi kalau sudah mengancam akidah, maka sudah lebih di atas itu lagi (lebih keras) komunikasinya bahkan harus dilawan secara *qital*. Jadi harus disesuaikan siapa yang diajak berkomunikasi.¹⁶⁹

169 Wawancara Satria Yuda Wibowo Sekretaris DPW PKS.

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa informan menyebutkan *qaulan layyinâ* sebagai satu dari enam prinsip-prinsip komunikasi Islam yang diteliti dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan kadar kualitas maupun kuantitas dari pemahaman elit PKS tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam. Namun informan juga menyebutkan satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang berkomunikasi dengan orang sesuai dengan kadar kemampuannya tingkat pemahamannya terhadap suatu masalah. Hal ini menunjukkan bahwa informan memahami tentang *audience analysis* atau memahami lawan bicara untuk menyesuaikan pesan yang akan disampaikan kepada lawan bicara tersebut. Meskipun untuk selanjutnya informan tidak menyebutkan tentang *source analysis*, *content analysis*, *media analysis* dan *effect analysis*. Atau dapat disimpulkan, informan memahami sebagian dari prinsip-prinsip komunikasi Islam, namun tidak memahami sebagian lagi dari prinsip-prinsip tersebut (parsial).

Dalam pandangan informan, partai politik ini merupakan partai dakwah yang kokoh dan transformatif untuk melayani bangsa. Dalam pengaplikasian prinsip-prinsip komunikasi Islam, pemahaman elit PKS Sumut lebih ditekankan pada kejujuran. Hal ini seperti dinyatakan oleh informan berikut ini: “Dalam kampanye harus menyampaikan kejujuran untuk meraih suara masyarakat. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak dilakukan atau ketidakjujuran.”¹⁷⁰

Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis bahwa prinsip-prinsip komunikasi Islam yang dipahami oleh informan elit PKS Sumut ini adalah berbicara dengan kejujuran dan tidak berbohong atau tidak menyampaikan sesuatu ketidakjujuran. Prinsip jujur memang diajarkan dalam agama Islam seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan (Q.S. As-Saff: 2-3)

170 Wawancara Satrya Yuda Wibowo Sekretaris DPW PKS, wawancara di Medan, 2 Januari 2013.

Dari redaksi ayat ini menunjukkan larangan untuk berlaku tidak jujur atau mengatakan sesuatu yang tidak diperbuat. Dalam konteks kampanye pengerahan massa di lapangan seperti dalam kampanye akbar Pemilu Legislatif 2014 dengan *audience* yang banyak, yang bertujuan menarik minat *audience* untuk memilih partai politik (tujuan *electoral*).

Selanjutnya meski prinsip komunikasi Islam dipahami dengan tidak berkata bohong oleh elit PKS Sumut, tetapi tidak pula dilarang untuk memberikan janji-janji kepada khalayak dalam kampanye. Hal ini seperti diutarakan informan berikut ini:

“Kalaupun berjanji akan ditepati, jadi tidak berbohong dalam berjanji. Berjanji dengan tidak melebihi dengan kemampuan yang dimiliki untuk menyanggupinya. Jadi sesuai dengan prinsip ajaran Islam.”¹⁷¹

Dari pernyataan tersebut di atas dapat difahami bahwa bagi elit PKS Sumut tidak dilarang untuk berjanji dalam kampanye. Janji-janji politik memang biasa disampaikan saat kampanye akbar di tengah massa yang banyak di sebuah lapangan terbuka. Jadi seorang juru kampanye (Jurkam) dibolehkan untuk menyampaikan janjinya di hadapan publik yang tujuannya untuk menarik perhatian dan selanjutnya untuk dipilih oleh para pemilih di hari pemilihan (tujuan *electoral*). Bagi informan sepanjang janji yang disampaikan akan ditepati, dan yang dijanjikan tidak melebihi kesanggupan untuk memenuhinya, maka hal tersebut merupakan bagian dari ajaran agama Islam. Pada praktiknya, janji kampanye meliputi sesuatu yang sederhana yang dibayangkan. Karena apabila seorang Jurkam berkampanye, jika dia berjanji dalam kampanye akbar di depan khalayak dari berbagai wilayah maka janjinya itu haruslah merupakan kebijakan partai yang memang sudah digariskan. Karena jika hanya berupa janji individu, maka akan menemukan kesulitan-kesulitan dalam realisasinya. Karena *pertama*, belum tentu si Jurkam yang berjanji adalah orang yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif, namun janji yang diucapkan sudah dianggap sebagai janji partai oleh khalayak. *Kedua*, walaupun ia terpilih menjadi seorang anggota legislatif, janji itu akan sulit diwujudkan jika hanya berupa keinginan pribadi tanpa berlandaskan kebijakan partai. Jika sebuah janji merupakan

171 Wawancara Satria Yuda Wibowo.

kebijakan partai meski berpeluang ditepati namun tetap akan menemukan kendala dalam hal konsistensi untuk menepatinya. Namun janji yang ditepati dan diucapkan dengan kata-kata yang sopan adalah **sesuai dengan prinsip komunikasi Islam *qaulan maysûrâ*** (berkata pantas). Janji ini adalah janji yang diberikan kepada para kerabat dekat, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan dan orang-orang yang meminta.

Janji kampanye yang dijelaskan oleh informan kemudian adalah janji-janji yang sudah terbukti dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat, seperti pernyataannya berikut ini: “Biasanya janji-janji dalam kampanye mereplika program-program yang sudah terbukti di masyarakat. Kalau yang belum terbukti akan dilaksanakan. Janji-janji tersebut seperti melakukan advokasi terhadap masyarakat, ambulance gratis dan sebagainya.”¹⁷²

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan janji kampanye oleh informan adalah kegiatan-kegiatan sosial kepartaian yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Program aksi sosial partai yang telah dilakukan direplika untuk menjadi janji-janji kampanye. Dalam perjalanannya sejak masih menjadi Partai Keadilan (PK), partai ini memang dikenal dengan berbagai kegiatan aksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Artinya yang disebut dengan janji kampanye yang sudah terbukti adalah apa yang memang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan lagi dalam periode mendatang. Tentu saja hal ini akan lebih mendekati realisasi yang sesuai janji, tetapi seperti diuraikan di atas, program partai seperti ini akan berhadapan dengan konsistensi sikap partai untuk kembali menjalankan program-programnya yang sudah terbukti tersebut.

Gambar: 18 Pemahaman Elit PKS Tentang Prinsip-prinsip Komunikasi Islam

172 Wawancara Satrya Yuda Wibowo.



Selanjutnya dalam pandangan informan yang merupakan akademisi yang memiliki *concern* meneliti partai Islam, elit PKS sebenarnya secara sistem PKS memiliki proses pengkaderan yang baik hingga sebenarnya memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai Islam. Hal dinyatakan seagai berikut:

Sistem pengaderan PKS cukup baik, mereka sebenarnya kader-kader yang pada umumnya dibentuk oleh *liqo'-liqo'* berdasarkan tingkatan-tingkatan tertentu, sehingga pada level tertentu mereka layak diajukan dalam Pemilu internal. Ini sebenarnya sudah bagus. Tapi identitas politik keIslamannya mengalami paradoks karena di satu sisi menyatakan Islam, tetapi di sisi lain relatif sama dengan partai-partai konvensional.¹⁷³

173 Wawancara Warjio.

Dari pernyataan ini tersirat adanya jarak antara tataran ideal di kalangan kader PKS dengan tataran praktis ketika sudah bersentuhan dengan kekuasaan. Pada tataran ideal kader-kader PKS yang dibentuk oleh dinamika gerakan partai membentuk para kader pada umumnya menjadi orang-orang yang memahami peta dakwah, termasuk dalam melancarkan komunikasi politik di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya terjadi paradoks dalam identitas politik PKS, karena di satu sisi menyatakan Islam sebagai landasai partai, tetapi di sisi lain relatif sama dengan partai-partai konvensional lainnya. Hal ini menunjukkan dari pemahaman tentang ajaran Islam seperti halnya prinsip-prinsip komunikasi Islam, para kader PKS Sumut memahaminya, namun berbeda dalam implementasinya. Cara-cara bersikap yang mereka tunjukkan di eksekutif dan di masyarakat tidak mencerminkan keIslaman. Hal ini dicontohkan informan pada sikap salah seorang elit PKS pusat:

‘Waktu di Pemilu Presiden pernyataan anggota PKS seperti Fachry Hamzah yang sebenarnya representasi PKS tetapi ketika menuangkan suatu isu-isu tertentu untuk dukungan kepada presiden misalnya, tidak menunjukkan suatu etika keIslaman dalam cara penyampaianya tetapi dengan kearogansian. Ini menunjukkan nilai-nilai Islam yang dibelakangkan.’¹⁷⁴

Dalam pandangan informan pada tataran ideal, para elit yang dibentuk oleh sistem internal PKS dinilai memahami prinsip-prinsip atau nilai-nilai komunikasi Islam, tetapi ketika memasuki dunia praktis yang cenderung menggoda, maka mereka kemudian lebih terlihat “keakuannya” atau sikap dan perilaku yang cenderung didasarkan pada egosentris. Hal yang ditunjukkan oleh Fachry Hamzah dalam berkomentar yang disiarkan secara luas oleh media massa elektronik dengan nada tinggi dan cenderung meledak-ledak dianggap sesuatu yang tidak menunjukkan etika keIslaman yang santun dan menghargai pihak lain. Contoh dari Fachry Hamzah yang merupakan politisi tingkat nasional (DPP PKS) yang disebut sebagai representasi partainya itu dianggap mewakili sikap dan perilaku sebagian elit PKS di Sumatera Utara yang menjadikan nilai-nilai keIslaman sungguh sangat tersurat dan tidak dijadikan pedoman untuk bertingkah laku. Padahal dalam Islam dituntut menunjukkan identitas keIslaman dan berperilaku atau berkomunikasi sesuatu etika

174 Wawancara Warjio.

Islam, tetapi mereka tidak melakukan hal tersebut malah justru keluar dari *mainstream* tersebut. Disebut secara tersurat karena dalam buku panduan PKS telah diuraikan hal-hal yang menjadi nilai-nilai dasar partai yang dilandaskan pada nilai-nilai Islam.¹⁷⁵ Dengan sistem pengkaderan yang dilakukan secara bertingkat, dan sistem Pemilu internal, maka tentunya para elit PKS sekarang ini sudah melalui tahapan yang panjang sebelum diterjunkan ke tengah-tengah dinamika politik praktis yang deras oleh arus godaan ekonomi dan kekuasaan.

Informan juga menggarisbawahi pemilihan komunikator politik atau orang-orang yang diusung untuk maju menjadi “jagoan” dalam kontestasi politik seperti Pemilu Legislatif ataupun Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) masih cenderung terpaku pada senioritas, seperti pernyataannya berikut ini: “PKS masih terfokus pada senioritas. Tetapi dalam politik tidak ada jaminan bahwa senioritas akan lebih berhasil”.¹⁷⁶

Dari pernyataan ini bisa dianalisis bahwa komunikator politik adalah para elit partai yang akan mereprestasikan partainya dalam kontestasi politik yang terjadi. Para komunikator politik ini adalah para kader partai yang dipilih melalui mekanisme yang berlaku internal. Dalam pandangan informan, pemilihan yang dilakukan PKS masih terfokus pada senioritas atau dengan kata lain menganggap kader yang telah menjadi elit partai adalah orang-orang yang dianggap lebih baik dibandingkan kader yang belum berpengalaman. Padahal dari senioritas ini tidak ada jaminan memenangkan kontestasi politik. Dia mencontohkan kader PKS Sigit Pramono Asri, SE yang merupakan *incumbent* anggota DPRD Sumatera Utara yang dipilih partainya menjadi calon Walikota Medan dan calon legislatif untuk DPR RI. Sigit yang merupakan senior di PKS Sumatera Utara ini dua kali gagal meraih kursi Walikota Medan, dan dia juga gagal menjadi anggota DPR RI di Pemilu Legislatif

175 Buku dimaksud berjudul *Memperjuangkan Masyarakat Madani* yang disusun oleh Majelis Pertimbangan Pusat PKS tahun 2008. Buku setebal 643 halaman ini memuat falsafah dasar perjuangan dan platform kebijakan pembangunan PKS.

176 Wawancara Warjio.

2014. Pernyataan ini juga menyiratkan bahwa di dalam PKS pemahaman tentang **nilai-nilai keIslaman termasuk di antaranya prinsip-prinsip komunikasi Islam tidak lebih utama dari senioritas** karena dianggap lebih memiliki pengaruh, modal sosial, dan juga materi.

Akan halnya para elit PKS, dalam pandangan informan lain yang merupakan akademisi ini, merupakan partai yang diisi dengan elit dari kalangan yang dekat dengan tradisi agama maupun kalangan umum, yang memengaruhi pemahamannya terhadap prinsip-prinsip komunikasi Islam. Pernyataan tersebut sebagai berikut:

Elit PKS banyak yang dekat dengan tradisi agama, tapi di Sumut mungkin berimbang orang yang berpendidikan umum dengan yang berpendidikan agama. Secara umum, dari pembicaraan mereka mengerti (nilai-nilai) Islam. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah, kita jadi bertanya-tanya. Berarti tidak benar mengerti karena ungkapan-ungkapannya tidak beda dengan tokoh-tokoh politik lain.¹⁷⁷

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa para elit PKS dengan latar belakang pendidikan agama maupun pendidikan umum dinilai memahami nilai-nilai Islam secara umum. Hal tersebut ditunjukkan ketika mereka berkampanye, atau dalam aktivitas politik yang dilakukan seperti ketika mengajukan pikirannya kepada orang lain. Namun ketika para elit ini ditimpa masalah, perilakunya dinilai berubah dan tidak lagi merefleksikan nilai-nilai keIslaman yang mereka fahami. Misalnya ketika dalam berkomunikasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau partai politik lain, mereka tidak ada beda dengan partai lain yang tidak mengedepankan prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam. Oleh karenanya informan mempertanyakan pemahaman yang dimiliki oleh para elit PKS yang tidak terimplementasi dalam perilaku komunikasi politiknya. Karena orang yang memiliki pemahaman tentang nilai-nilai keIslaman dalam melancarkan komunikasi yakni prinsip-prinsip komunikasi Islam, maka seharusnya terimplementasi ke dalam perkataan, sikap dan perilakunya sehari-hari. **Terjadinya bias antara pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip komunikasi Islam** tersebut, disebabkan karena pemahaman para elit PKS tentang prinsip-prinsip tersebut didasari oleh doktrin partai dalam proses pengkaderan yang dilakukan.

177 Wawancara dengan Hasyimsyah Nasution Guru Besar Fakultas Ushuluddin/Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN SU, 6 November 2014.

Hal ini seperti pernyataan informan berikut ini: “Komunikasi jadi bagian dari silabus yang disampaikan dalam pengkaderan atau orientasinya bersifat doktrin. Biasanya cenderung doktrin. Prinsip komunikasi Islam sebenarnya pelengkap tapi penting”.¹⁷⁸

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa salah satu kelebihan yang dimiliki PKS yang tidak dimiliki oleh partai politik lain adalah sistem pengkaderannya yang disebut informan sebagai sistem pengkaderan yang sangat hirarkhis dan berjenjang. Karena dalam pengkaderan tersebut ada waktu dan *maqam-maqam* yang harus dilalui para kader sebelum menjadi kader yang dilepas ke publik dengan menjadi wakil rakyat ataupun pejabat publik. Sistem pengkaderan ini merupakan tahap pertama dalam apa yang disebut oleh Anis Matta dengan pekerjaan dakwah¹⁷⁹ membangun organisasi yang kuat dan solid (*mihwar tanzhimi*). Nilai-nilai Islam dipandang sebagai salah satu, atau bagian dari materi dalam pengkaderan yang disampaikan kepada para kader PKS. Namun orientasinya dinilai lebih cenderung pada sifatnya yang berupa doktrin yang mesti diterima. Oleh karenanya pemahaman tentang nilai-nilai Islam masih sebatas pemahaman yang bersifat umum, karena untuk mengetahui lebih khusus tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam, tentunya para kader juga para elitnya harus mempelajari lebih jauh. Karena untuk menyampaikan ungkapan yang menyejukkan dan yang bijaksana hanya bisa dilakukan kalau mereka berilmu atau memahami ilmu dalam Islam yang mengajarkan hal tersebut. **Tanpa mempelajari dan menguasai ilmunya, maka para kader PKS Sumut hanya bisa secara umum memahami nilai-nilai Islam.** Inilah yang membuat munculnya *bias* antara pemahaman dan implementasi seperti disebutkan di atas. Kondisi seperti ini bisa terjadi karena dua hal, *pertama*, karena latar belakang pendidikan para elit yang terbagi antara pendidikan umum dan pendidikan agama. *Kedua*, karena adanya anggapan tentang politik sebagai hal biasa saja. Sehingga tidak selalu perlu berlatarbelakang politik untuk terjun ke dunia

178 Wawancara Hasyimsyah Nasution.

179 Matta, *Menikmati Dempkrasi*, h.9.

politik. Akibatnya banyak yang merasa bisa tapi sebenarnya tidak punya landasan keilmuan.

2. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sebagai Parpol yang mendasari diri terhadap ideologi Islam, PPP juga berupaya untuk mendepankan prinsip-prinsip Islam sebagai jati diri partai dalam melancarkan kampanye politiknya. Hal ini jelas terlihat baik dari simbol-simbol yang ditampilkan seperti gambar Ka'bah di lambang partai sampai pada slogan-slogan seperti tema besar yang diusung yakni "Indonesia Berkah Bersama Ka'bah" dengan sangat jelas memberikan identifikasi kepada khalayak atas identitas Islam yang diusung oleh Parpol ini. Dalam konteks kampanye tatap muka langsung yang dilancarkan pada Pemilu Legislatif 2014, PPP juga berupaya melandasinya dengan prinsip-prinsip ajaran dalam Islam seperti dengan cara yang baik. Hal ini seperti disampaikan informan dalam penelitian ini: "Prinsipnya kita menyeru dengan hikmah, dan kalau ada perdebatan lakukanlah dengan cara yang baik dan benar".¹⁸⁰

Kutipan wawancara ini menyiratkan bahwa pemahaman tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam yang dipahami oleh elit politik PPP adalah komunikasi yang dilancarkan dalam Pemilu Legislatif 2014 dengan menyeru atau mengajak khalayak untuk memilih PPP di hari pencoblosan atau pada tujuan *electoral*. Penekanannya adalah pada seruan yang disampaikan dengan melalui hikmah dan walaupun terjadi perdebatan maka hal tersebut dilakukan dengan baik dan benar. Berdakwah dengan hikmah menurut Sayyid Qutbh, menguasai keadaan dan kondisi (*zuruf*) *mad'u*-nya, serta batasan-batasan setiap kali memberikan penjelasan sehingga tidak memberatkan dan menyulitkan mereka sebelum mereka siap sepenuhnya, juga metode yang digunakan yang mana semua keragaman tersebut harus disesuaikan dengan konsekuensi-konsekuensinya. Jangan sampai berlebihan

180 Wawancara dengan Hasrul Azwar Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP. Dalam wawancara ini informan mengutip surah An-Nahl ayat 125 yang artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.*

dalam *hamasah* (semangat), *indifa* (motivasi) dan *ghirah*, sehingga ia merupakan sisi hikmah dari dakwah itu.¹⁸¹

Selain itu Sayyid Qutbh menyebut bahwa *maui'zah hasanah* (pelajaran/nasihat yang baik) dalam ayat ini adalah dakwah yang bisa menembus hati manusia dengan lembut dan diserap oleh hati nurani dengan halus. Bukan dengan bentakan dan kekerasan tanpa ada maksud yang jelas, tidak juga dengan cara membeberkan kesalahan-kesalahan yang kadang terjadi tanpa disadari atau lantaran ingin bermaksud baik. Karena kelembutan dalam memberikan nasihat akan lebih banyak menunjukkan hati yang bingung, menjinakkan hati yang membenci, dan memberi banyak kebaikan ketimbang bentakan, gertakan, dan celaan. Begitu juga dengan berdebat yang harus dilakukan dengan cara yang lebih baik tanpa bertindak zalim terhadap orang yang menentang ataupun sikap meremehkan dan mencelanya. Karena tujuan dakwah bukan untuk mengalahkan orang lain dalam berdebat, tetapi untuk menyadarkan dan menyampaikan kebenaran. Jiwa manusia pasti memiliki sifat sombong dan pembangkang yang tidak bisa dihadapi kecuali dengan kelembutan, sehingga jiwanya tidak merasa dikalahkan. Sesuatu yang paling cepat bergolak dengan hati adalah bobot sebuah ide, dan bobot itu ada pada jiwa-jiwa manusia. Maka meremehkan penggunaan pendapat, sama saja dengan merendahkan kewibawaan, kehormatan, dan eksistensinya.¹⁸²

Apa yang diuraikan oleh Sayyid Qutbh di atas, bahwa penyampaian sesuatu yang bersifat mengajak orang lain seperti dalam kampanye partai politik, adalah sangat terkait dalam konteks dakwah kiranya juga disadari pula oleh elit PPP. Artinya PPP sebagai partai politik mestinya merupakan “jalan Tuhan” sesuai dengan bunyi ayat dimaksud. Karena apabila di dalam hal ini PPP dalam implementasi kehidupan kepartaiannya sehari-hari tidak mencerminkan nilai-nilai Islam, atau tidak sesuai ajaran Islam, maka sesungguhnya ia bukanlah “jalan Tuhan” sebagaimana dimaksud ayat tersebut. Apalagi praktik komunikasi yang dilakukan tidak dengan hikmah dan

181 Qutbh, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid 7, h.224.

182 *Ibid*,

kelemahlembutan, yang nyatanya berbeda dengan apa yang terjadi.¹⁸³ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa yang dipahami oleh elit PPP ini berbeda dengan implementasinya yang terjadi dalam praktik komunikasi yang dilancarkan.

Selanjutnya informan juga “menyatunafaskan” antara dakwah dan jalan politik yang diusung PPP. Hal ini tercermin dari apa yang dikatakan oleh informan berikut: “Kampanye Pemilu Legislatif 2014 yang dilakukan itu adalah bagian dari dakwah melalui jalur politik. Selain para kader PPP, Jurkam juga para ulama.”¹⁸⁴

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dianalisis bahwa elit PPP berupaya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan dalam proses penyampaian pesan melalui kampanye adalah bagian dari itikad dakwah. Dakwah yang tentunya bersifat terstruktur dan terlembaga dalam suatu institusi partai politik. Karena informan juga mengatakan bahwa para juru kampanye (Jurkam) sebelum turun ke lokasi kampanye terlebih dahulu mengikuti *training*. Sebulan sebelum masa kampanye, para kader PPP juga dikumpulkan dalam rangka melakukan konsolidasi partai. Perencanaan komunikasi dalam kampanye akbar di Pemilu Legislatif 2014 di tubuh PPP ditangani oleh lembaga khusus yang disebut LP2 (*Lajnah Pemenangan Pemilu*). Apa yang dirumuskan oleh lembaga ini antara lain tentang biaya yang akan dikeluarkan, strategi yang diterapkan, dan lokasi kampanye yang akan ditetapkan, serta Jurkam yang akan dipilih. Namun diakui oleh informan bahwa Jurkam lebih banyak melakukan derivasi atau pengembangan dalam orasi politik di mimbar kampanye, karena tidak ada materi kampanye yang dirumuskan secara tertulis. Materinya sendiri dikembangkan dari visi misi PPP sesuai kemampuan masing-masing Jurkam. Hal ini menunjukkan bahwa belum ada kesefahaman antara tentang prinsip komunikasi Islam di kalangan elit PPP yang diturunkan sampai pada kegiatan kampanye di lapangan. Apa yang dilakukan hanya sampai pada pembentukan lembaga-lembaga teknis kampanye tanpa memasuki wilayah yang lebih khusus seperti penelitian

183 Pada tanggal 28 Oktober 2014, atau sekitar 7 bulan setelah wawancara dengan peneliti, Hasrul Azwar selaku Ketua Fraksi PPP di DPR RI diberitakan melakukan tindakan membalikkan meja pada rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR, Jakarta, Selasa (28/10/2014). Tindakan tersebut dilakukan sesudah pimpinan rapat Agus Hermanto menutup sidang paripurna, untuk menunjukan ketidaksetujuannya pada hasil sidang.

184 Wawancara Hasrul Azwar.

karakteristik khlayak, desain isu, metode penyampaian, dan evaluasi. Dengan kata lain pemahaman prinsip komunikasi Islam untuk kampanye PPP hanya terkait hal yang umum tanpa menyentuh hal yang khusus. Pemilihan Jurkam dari kalangan ulama juga menegaskan bahwa tujuan partai yang sebenarnya yakni tujuan elektoral.

Secara teknis pelaksanaan kampanye pengerahan massa dilakukan dengan berbicara tentang program-program partai yang akan dilakukan ke depan yang bersentuhan dengan kepentingan khalayak luas. Program-program tersebut disampaikan dengan mengharuskan di dalamnya nuansa Islami. Hal ini seperti diutarakan oleh informan sebagai berikut: “Di depan *audience* kampanye yang kita bicarakan adalah program-program partai secara umum. Meski demikian harus ada nuansa Islami di dalamnya”.¹⁸⁵

Dari pernyataan di atas bisa dianalisis bahwa dalam setiap program partai yang disampaikan kepada khalayak melalui kampanye, meskipun merupakan program partai secara umum, namun akan diwarnai oleh nuansa Islam di dalamnya. Kesadaran pada jati diri sebagai partai politik Islam menjadikan para elit PPP menjadikan kampanye di depan khalayak ramai dengan nuansa Islami di dalamnya. Pernyataan ini ingin menegaskan bahwa partai politik akan selalu menjadikan Islam sebagai sumber nilai dari segala kegiatan yang dilakukan PPP. Atau dengan kata lain ada ketersambungan yang linear antara sejarah partai, tujuan partai, cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, di mana semua dilandasi oleh ajaran Islam. Atau dengan kata lain ketiga dimensi yakni dimensi sejarah (*past*), dimensi cara yang dilakukan saat ini (*present*), serta dimensi tujuan yang hendak dicapai (*future*) sama-sama dilingkupi oleh kehendak Allah SWT melalui ajaran yang diturunkan-Nya melalui Rasul-Nya Muhammad SAW. Oleh karenanya, tentunya apabila ditemukan ada yang tidak sesuai dari ketiga dimensi tersebut maka semestinya ada sesuatu “sambungan” yang terputus dan tidak sesuai dengan jati diri partai itu sendiri. Pandangan ideal dari penyampaian program partai kepada khalayak seperti ini tentunya tidaklah mudah, meskipun bukan tidak mungkin dicapai, meskipun untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk tetap *istiqomah* dengan kualitas keimanan yang harus lebih baik atau di atas rata-rata. Hanya saja pola seperti

185 Wawancara Hasrul Azwar.

ini lebih kental pada tujuan elektoral ketimbang tujuan dakwah Islam. Dengan kata lain “nuansa Islam” yang dilancarkan adalah untuk tujuan elektoral partai dalam Pemilu.

Adapun program-program yang menjadi materi yang disampaikan dalam kampanye adalah seperti:

- Penguatan infrastruktur
- Permasalahan kelistrikan
- Soal pengadaan pupuk
- Persoalan bibit bagi petani
- Tenaga kerja
- Pendidikan
-

Program-program kerja partai ini disampaikan dengan dibungkus nuansa keIslaman terkait visi dan misi. Di samping program kerja yang bersifat umum tersebut, disebutkan ada juga program yang bersifat khusus keIslaman seperti keinginan PPP agar seluruh rumah tangga Islam bisa membaca Al-Qur'an.

Dalam wawancara berbeda, untuk memahami prinsip komunikasi Islam yang diterapkan dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014, elit PPP Sumatera Utara juga melihatnya sebagai suatu upaya berdebat dan mengajak orang lain dengan cara yang baik dan agar orang lain mengikuti dengan cara tidak terpaksa. Hal tersebut seperti tergambar dalam wawancara dengan informan: “Dalam berdebat dan mengajak orang lain dengan cara yang baik. Bagaimana caranya agar orang mengikuti kita tapi tidak dengan cara terpaksa.”¹⁸⁶

Dari petikan wawancara tersebut terlihat adanya upaya elit PPP Sumatera Utara untuk menjadikan ajaran Islam sebagai landasan melancarkan komunikasi politiknya dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014. Bahwa kampanye politik dinilai sebagai upaya untuk mengajak orang lain dengan cara-cara yang baik sehingga orang lain bisa mengikuti ajakan tersebut tanpa rasa terpaksa. Mengajak orang dengan hikmah menurut Ibnu Jarir yaitu dengan apa yang telah diturunkan kepada Beliau

186 Fadly Nurzal, Ketua DPW PPP Sumatera Utara, wawancara di Medan, 26 Maret 2014. Seperti halnya wawancara dengan Ketua DPP PPP H.Hasrul Azwar, dalam wawancara ini informan juga membacakan surah An-Nahl ayat 125. Konsistensi pernyataan kedua tokoh sentral PPP di Sumatera Utara ini menunjukkan pemahaman yang sama tentang prinsip komunikasi Islam.

(Muhammad SAW) berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah serta pelajaran yang baik, yang di dalamnya berwujud larangan dan berbagai peristiwa yang disebutkan agar mereka waspada terhadap siksa Allah Ta'ala.¹⁸⁷ Sedangkan membantah dengan cara yang lebih baik yakni barang siapa yang membutuhkan dialog dan tukar pikiran, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, lemah lembut, serta tutur kata yang sopan.¹⁸⁸

Dengan cara seperti ini para elit politik PPP berupaya menerapkan apa yang disebut dengan pola politik partisipatif, yang membagi khalayak kepada dua bagian yakni pemilih PPP karena komunikasi yang idiologis dan konvensional. Pada akhirnya, komunikasi seperti ini diharapkan akan mengenalkan PPP secara utuh kepada khalayak. Dari pernyataan dan penjelasan Ketua DPW PPP Sumut ini, memang jelas terlihat adanya upaya untuk menggunakan cara-cara yang diajarkan Islam dalam komunikasi politik dalam kampanye. Namun tentunya apa yang disebut dengan prinsip-prinsip komunikasi Islam atau cara teknis dalam menyampaikan komunikasi kepada khalayak dalam kampanye, belum tersentuh secara maksimal. Al-Qur'an sebagai tuntunan hidup memang telah digali dalam rangka mendapatkan nilai-nilainya sebagai petunjuk untuk melancarkan komunikasi politik dalam kampanye Pemilu Legislatif PPP 2014, meskipun belum secara lebih jauh, yang berarti **prinsip-prinsip komunikasi Islam seperti yang dimaksud dalam penelitian ini belum difahami secara utuh.**

Selain surah An-Nahl, informan juga mencari mengutarakan sumber Al-Qur'an lainnya untuk menjadi rujukan dan landasan dalam melakukan komunikasi politik PPP pada kampanye Pemilu Legislatif 2014. Perihal ini tergambar dari pernyataan informan yang juga menyinggung tentang surah al-Ahzâb sebagai berikut:

Dalam berkomunikasi kita juga mencontoh perilaku Rasul seperti dalam mengenalkan diri Beliau dengan sopan santun dan ramah. Selain itu Beliau juga menghargai dan menerima pendapat orang lain. Seperti ketika dalam Perang Khandaq atau disebut juga Perang "Parit" di mana Rasul mengikuti saran sahabat.

¹⁸⁷ Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu, Jilid 5*, h.257.

¹⁸⁸ *Ibid*,

Dalam peristiwa ini Rasul menunjukkan, pada intinya, bahwa tidak ada orang yang paling benar.¹⁸⁹

Dari kutipan pernyataan informan di atas dapat dianalisis bahwa dalam komunikasi politiknya pada kampanye Pemilu Legislatif 2014, PPP meniru cara-cara yang dilakukan Rasulullah SAW dalam hal memperkenalkan diri yang mengedepankan sopan santun dan ramah tamah. Selain itu yang menjadi titik tekan dari pernyataan ini adalah persoalan penerimaan pandangan dan pendapat orang lain dalam hal terjadi perbedaan pendapat terhadap suatu hal yang sedang dihadapi bersama. Bahwa prinsip-prinsip musyawarah untuk mufakat menjadi suatu bentuk yang ingin dicapai. Bersikeras pada pendapat sendiri tanpa mau mendengarkan pendapat orang lain adalah hal yang hendak dihindari dalam komunikasi politik PPP. Karena dalam perang *khandaq*, penggalian parit merupakan taktik yang pertama kali dikenal dalam sejarah bangsa Arab dan Islam. Karena taktik dan teknik peperangan seperti ini biasanya dikenal oleh bangsa Ajam (non-Arab). Rasulullah SAW sendiri mengagumi usulan Salmân al-Fârisi ini dan segera mengajak para sahabatnya untuk melaksanakannya. Ini merupakan salah satu dari sejumlah dalil yang menunjukkan bahwa “Pengetahuan adalah milik kaum Muslimin yang hilang. Di mana saja didapatinya maka mereka berhak mengambilnya daripada orang lain.” Pernyataan informan tersebut di atas menunjukkan pemahamannya tentang prinsip komunikasi Islam berkata lemah lembut (*qaulan layyinâ*)

Gambar: 18
Pemahaman Elit PPP Tentang Prinsip-prinsip Komunikasi Islam

¹⁸⁹ Wawancara Fadly Nurzal. Perihal perang *Khandaq* yang terjadi pada bulan Syawal tahun V Hijrah ini diceritakan dalam surah Al-Ahzâb. Ketika itu atas usul sahabat Nabi SAW, yakni Salmân al-Fârisi, Nabi SAW menggali parit (*khandaq*) pada arah Utara kota Madinah, tempat yang diduga keras akan menjadi arah serangan kaum musyrikin. Surah ini dinamai al-Ahzâb karena dari uraian surah ini yang menyebutkan koalisi/golongan yang bersekutu (*al-Ahzâb*) sekian banyak kelompok kaum musyrikin di bawah pimpinan suku Quraisy di Makkah yang berjumlah 12 ribu orang untuk menyerang Nabi SAW dan kaum Muslimin di Madinah yang hanya sekitar 3 ribu orang. Lihat lebih jauh Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.10*, h.403 & 426.

Selanjutnya dalam pandangan informan yang merupakan akademisi dan peneliti partai politik Islam, identitas keIslaman PPP juga bersifat tersurat, tetapi dalam praktik politiknya tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Penilaian tersebut sebagai berikut: “Cara mereka (elit PPP) bersikap, baik di eksekutif, di parlemen, dan di masyarakat tidak mencerminkan keIslaman”¹⁹⁰

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa cara berpartai baik di eksekutif maupun di legislatif yang ditunjukkan oleh PPP belum menunjukkan mereka memiliki pemahaman yang kuat dan baik akan nilai-nilai keIslaman. Apa yang dimaksud dengan tidak mencerminkan keIslaman adalah dengan tidak melandaskan

190 Wawancara Warjio.

diri pada pemahaman tentang Islam yang tersurat tersebut dalam bersikap termasuk dalam melancarkan komunikasi dalam kampanye Pemilu Legislatif 2014. Hal yang sama juga terjadi atas elit PPP di lingkungan eksekutif, parlemen dan di tengah-tengah masyarakat. Contoh yang terkait hal ini adalah perang ulama di lingkup internal partai yang semakin tereduksi oleh kepentingan-kepentingan praktis partai. Dalam catatan informan ada beberapa kasus yang menimpa elit PPP dari berita-berita yang tersiar, mereka masih suka mendatangi ke tempat-tempat seperti saloon yang tidak mencerminkan nilai Islam, atau isu sogokkan dalam penetapan calon legislatif. Kalau dulu ulama masih menjadi ciri dari struktur kepengurusan PPP di Sumatera Utara, tetapi sekarang ulama yang menjadi pengurus partai sudah sangat kurang, karena lebih banyak diisi oleh partai politisi yang tidak memiliki pemahaman agama layaknya para ulama. Hal ini masih ditambah lagi minimnya tradisi keilmuan dalam internal PPP yang ditandai dengan karya-karya ilmiah berupa buku-buku yang diterbitkan oleh kader-kader partai. Informan menyatakan bahwa para peneliti akan mendapatkan kesulitan ketika hendak meneliti PPP karena tidak banyaknya buku-buku referensi yang diterbitkan yang mengulas tentang tentang partai ini. Padahal, partai yang telah menjadi bagian sejarah bangsa ini tentu memiliki catatan sejarah yang panjang yang memiliki nilai-nilai pembelajaran bagi perjalanan sejarah bangsa ini.

Informan juga menyatakan bahwa pemahaman akan prinsip-prinsip komunikasi Islam cenderung dilandasi oleh nilai-nilai yang sebenarnya pragmatis. Pernyataan informan sebagai berikut: “Kesan yang ada, mereka (para elit PPP) memanfaatkan para pendukung Islam. Dengan memahami Islam simbol-simbol sebagai penarik minat pemilih Islam untuk mendukung mereka.”¹⁹¹

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa dalam pandangan informan, PPP secara administrasi adalah partai Islam, tetapi pada praktiknya tidak Islami. Pemahaman para elit partainya tentang nilai-nilai Islam termasuk terhadap prinsip-prinsip komunikasi Islam berada pada titik tekan kepentingan *electoral* semata. Itu sebabnya kemudian muncul penilaian bahwa Islam yang dimunculkan dalam bentuk

191 Wawancara Warjio.

simbolisasi tersebut adalah untuk memanfaatkan para pendukung Islam. Karena bagi para pemilih tradisional, simbol-simbol Islam masih merupakan sesuatu yang penting dan menarik perhatian.

Sedangkan dalam pandangan informan yang lain yang merupakan akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, di tubuh PPP memiliki orang-orang yang berlatarbelakang agama. Dengan demikian mereka berpeluang untuk memahami ajaran Islam. Pernyataan informan sebagai berikut: “Secara keilmuan sebetulnya orang PPP adalah orang yang faham tentang agama. Tetapi tentang komunikasi yang Islami, seharusnya mereka yang sudah lama di PPP itu mempelajari itu (prinsip-prinsip komunikasi Islam).”¹⁹²

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa informan berpandangan bahwa para elit PPP di Sumatera Utara adalah diisi oleh mereka yang berlatarbelakang pendidikan agama sehingga semestinya mereka faham tentang ilmu agama Islam. Mereka yang disebut elit dan pengurus PPP juga adalah orang-orang lama yang berada di lingkaran keluarga dan kerabat. Penelitian di Labuhanbatu yang pernah dilakukan adanya kecenderungan pengurus PPP berkuat di seputaran keluarga dan keturunan para elitnya. Mereka yang sudah lama di PPP inilah yang semestinya mempelajari tentang nilai-nilai Islam baik secara umum maupun secara khusus dalam kehidupan politik. Namun informan menilai mereka hanya memahami nilai-nilai Islam sebatas hal yang umum, namun dalam hal yang khusus seperti prinsip-prinsip komunikasi Islam tidak dipahami secara baik dan benar. Kondisi ini bisa terjadi karena memang mereka tidak mempelajari secara khusus ajaran Islam dalam konteks kehidupan politik, khususnya prinsip-prinsip komunikasi Islam.

Padahal sebetulnya, sebuah partai politik yang berlabelkan Islam, memiliki tanggung jawab untuk membawakan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik yang mereka jalani. Hal tersebut seperti diutarakan informan berikut ini:

Begitu menyebut sebagai partai Islam, sebetulnya mereka merupakan para *da'i* dalam lingkup politik. Tapi ini mungkin yang kurang dipelajari. Maududi, HAMKA menurut mereka kunci kesuksesan dari dakwah berada pada *da'i*. Seperti halnya para Nabi adalah *da'i* yang memang dipilih oleh Allah SWT khusus. Tidak

192 Wawancara Hasyimsyah Nasution.

semua orang bisa jadi *da'i*. Kelebihan mereka terutama pada kepribadiannya. Menumbuhkan kepribadian itu perlu ilmu.¹⁹³

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa ada tanggung jawab dari setiap partai Islam dan para elitnya untuk berperan sebagai *da'i* dalam wilayah dakwah di bidang politik. Tugas mereka tidaklah ringan, bahkan disamakan dengan tugas para Nabi yang juga berperan sebagai *da'i*. Bedanya jika para Nabi berperan dalam kehidupan secara umum, maka para elit partai politik Islam berperan dalam wilayah politik. Kalau para Nabi dipilih langsung oleh Allah SWT, maka para elit partai politik Islam semestinya dipilih oleh seleksi yang berlangsung di dalam internal partai politik Islam itu sendiri. Di sinilah sebetulnya penting dan strategis proses pengkaderan dalam sebuah partai politik Islam, yakni untuk menghasilkan para *da'i* yang memiliki pemahaman yang luas, baik dan benar akan ajaran Islam juga metode dakwah. Namun ironisnya di tubuh PPP, seperti penelitian yang diutarakan informan, justru dihasilkan berdasarkan pertimbangan ikatan keluarga dan kekerabatan, bukan berdasarkan keilmuan. Padahal menurut Abul A'la al-Maududi seorang *da'i* memiliki sifat-sifat:¹⁹⁴

1. Sanggup memerangi musuh dalam dirinya agar terus berada dalam ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya;
2. Sanggup berhijrah dari hal-hal yang maksiat yang dapat merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT dan di hadapan masyarakat;
3. Mampu menjadi *uswatun hasanah* bagi *mad'u*-nya;
4. Memiliki persiapan mental dengan berbagai turunannya seperti sabar, teguh pendirian, *welas asih*, semangat dan rela berkorban.

Dalam dakwah, untuk dapat memberikan informasi *mad'u* (komunikasikan) peran ilmu sangat penting. Seorang *da'i* perlu ilmu pokok yakni kandungan al-Qur'an dan al-Hadits, selain itu juga perlu ilmu bantu, termasuk di dalamnya ilmu komunikasi. Dengan penguasaan ilmu-ilmu pokok dan ilmu bantu tersebut seorang *da'i* tidak

193 Wawancara Hasyimsyah Nasution.

194 Abul A'la al-Maududi, *Tadzkirotul Du'atil, Beberapa Petunjuk Untuk Juru Dakwah*, Terj., Aswadi Syukur (Bandung: Al-Ma'arif, 1984), h.36-54 dalam Abdullah, Asep Dadang, *Urgensi Pemahaman Konsep Dasar Dakwah Dan Da'i Menuju Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Aktivitas Dakwah*, Jurnal Ilmu Dakwah, Vol.32, No.2, Juli-Desember 2012, h.272.

dapat lebih mudah mengintegrasikan ilmu spiritualitas dengan ilmu materialitas yang diperlukan dalam medan dakwah yang semakin kompleks sekarang ini.

Sedangkan HAMKA mengatakan bahwa “Jayanya atau suksesnya suatu dakwah memang sangat bergantung pada pribadi dari pembawa dakwah itu sendiri”.¹⁹⁵ Kepribadian *da'i* mencakup kepribadian jasmani dan rohani. Klasifikasi kepribadian seorang *da'i* yang bersifat rohaniyah yaitu:

1. Iman dan takwa kepada Allah SWT;
2. Tulus ikhlas dan tidak mementingkan kepentingan diri pribadi.
3. Ramah dan penuh pengertian
4. Sifat antusiasme (semangat)

Dari uraian di atas menunjukkan ada ketimpangan antara pemahaman prinsip-prinsip komunikasi Islam di kalangan elit PPP dengan tugas mereka sebagai *da'i* yang memiliki tanggung jawab besar dalam tugas dakwah. Ketimpangan tersebut membuat tidak tercapainya tujuan dakwah seperti diharapkan, karena titik tekan pada tujuan *electoral* yang seringkali mengabaikan prinsip-prinsip komunikasi Islam.

G.Strategi Komunikasi Politik Parpol Islam Dalam Pemilu Legislatif 2014

Strategi partai politik Islam untuk tujuan *electoral* adalah strategi yang disusun dan dipahami berada dalam satu tarikan nafas dengan nilai-nilai Islam. Rancangan dan aplikasinya adalah sebuah desain yang didasarkan oleh ajaran agama Islam yang terkandung di dalam Al-Qur'an maupun al-Hadis. Strategi ini meliputi tahapan perencanaan, persiapan dan eksekusi serta evaluasi yang dilakukan secara bertahap antara satu tahapan dengan tahapan yang selanjutnya.

1.Partai Keadilan Sejahtera

Seperti partai politik pada umumnya, penyusunan strategi dalam Pemilu Legislatif 2014 bagi PKS juga dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara internal untuk itu. Badan ini dibentuk dalam struktur dari tingkat pusat sampai daerah, yang juga merumuskan isu besar yang akan diusung dalam kampanye secara

195 Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1983), h.34-35.

nasional termasuk untuk masing-masing daerah-daerah. Hal tersebut seperti pernyataan informan berikut:

Untuk Pemilu ini dibentuk BP3 di tingkat pusat dan daerah. Badan ini merumuskan suatu isu besar kampanye yakni tema secara nasional, sedangkan di daerah-daerah disesuaikan dengan muatan lokal. Target PKS bukan kekuasaan politik tetapi ingin membangun peradaban. Karena politik ini sarana untuk mengapitalisasi kebajikan bukan untuk menunjukkan kesombongan.¹⁹⁶

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa ada badan yang secara khusus dibentuk PKS secara internal yang merumuskan tema besar kampanye. Badan ini dibentuk secara berjenjang dari tingkat pusat ke daerah ini juga merumuskan tema kampanye yang dalam hal ini adalah *Kobarkan Semangat Indonesia*. Tema ini diseragamkan di seluruh wilayah dan menjadi isu besar dalam setiap kampanye PKS. Badan ini pula yang menjalankan mekanisme pemilihan dan penetapan para kader atau orang-orang yang akan menjadi Caleg dalam Pemilu Legislatif 2014. Badan ini pula yang kemudian menetapkan 99 orang Caleg di Sumatera Utara dengan komposisi 80 persen kader partai dan sisanya 20 persen orang non partai. Jika mengacu pada tujuan membangun peradaban seperti yang disampaikan informan maka perencanaan yang matang sudah harus menjadi suatu keharusan. Hal ini juga berarti bahwa apa yang dijalani dan dicapai oleh PKS sejauh ini bukanlah tujuan yang sebenarnya, namun hanya perlengkapan dalam membangun peradaban yang tentunya memiliki usia yang jauh lebih panjang. Selanjutnya dalam tujuan ideal PKS bahwa jalan politik yang ditempuh adalah untuk mengapitalisasi kebajikan, dan bukan untuk menunjukkan kesombongan. Pernyataan ini secara tekstual menegaskan bahwa secara administratif, PKS memang memiliki perencanaan dalam mengikuti kampanye, bahkan Pemilu Legislatif 2014 secara keseluruhan, yang mana perencanaan ini membuat partai ini menjadi lebih siap. Tetapi secara kontekstual, ada kesadaran pada kondisi bahwa ada kader PKS yang duduk sebagai pejabat baik di legislatif khususnya di eksekutif yang dinilai telah menunjukkan kesombongannya. Pernyataan ini diucapkan informan di saat sebelumnya tersiar isu ketidakharmonisan hubungan antara PKS dengan Gatot Pujo Nugroho yang merupakan kader PKS yang

196 Wawancara Muhammad Hafez.

menjadi Gubernur Sumatera Utara. Ketidakharmonisan tersebut juga terefleksi dalam pertemuan-pertemuan antara Gubernur Sumatera Utara. Misalnya masalah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 Gubernur Sumatera Utara yang tidak didukung oleh Fraksi PKS di DPRD Sumatera Utara. Dari sembilan fraksi yang ada, delapan fraksi menyetujui Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012 tersebut disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), sedangkan Fraksi PKS yang merupakan partai pendukung Gatot Pujo Nugroho malah tidak memberikan opini dalam pandangan akhirnya di Sidang Paripurna. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagai partai politik PKS yang dulu dikenal sebagai partai yang solid dan massif ternyata memiliki bibit-bibit perpecahan di internal mereka. Lebih jauh lagi hal seperti ini menunjukkan bahwa pengaderan yang dilakukan di lingkup internal selama ini tidaklah merupakan jaminan akan membentuk tokoh binaan PKS menjadi sosok panutan yang membawa misi peradaban dengan nilai-nilai Islam yang menjadi pijakan. Artinya ada celah dalam sistem pengaderan internal PKS yang memungkinkan orang dengan potensi menjadi orang sombong untuk duduk di legislatif maupun eksekutif untuk mewakili PKS sebagai wakil rakyat maupun pejabat daerah.

Untuk menghadapi Pemilu Legislatif 2014, PKS melakukan beberapa persiapan baik dalam skala nasional maupun regional. Hal-hal tersebut merupakan bagian dari perencanaan dan strategi partai untuk tujuan *electoral*nya. Hal-hal tersebut seperti diutarakan informan berikut ini:

Kita melakukan *election up-date* sejak Oktober sudah lima kali dilakukan, secara regional sudah 3-4 kali di awal 2013. Ada juga jaringan eksternal bukan kader yang setiap bulan melakukan evaluasi. Selain itu dilakukan *direct selling* dari dulu sampai sekarang dengan evaluasi, juga ada survei even daerah.¹⁹⁷

Dari pernyataan informan di atas dapat dianalisis bahwa strategi PKS menghadapi Pemilu Legislatif 2014 antara lain dengan meng-*up-date* informasi tentang Pemilu atau memperbanyak asupan informasi tentang Pemilu melalui *election up-date* yang dengannya memberikan gambaran tentang peta kekuatan partai sendiri maupun lain. Hal ini seperti survei even daerah yang dilakukan untuk memetakan kondisi politik yang sedang berlangsung menjelang pelaksanaan

197 Wawancara Muhammad Hafez.

pemungutan suara 9 April 2014. Dalam survei yang dilakukan adalah untuk mencari tahu kekuatan dan kelemahan partai pada titik-titik wilayah tertentu. Metode survei yang dilakukan biasanya dengan mewawancarai responden yang ditetapkan di daerah-daerah tertentu dan menanyakan pilihan mereka pada Pemilu yang akan datang. Survei yang dilakukan secara internal biasa hanya untuk konsumsi internal partai dalam rangka menyusun strategi dan konsolidasi politik selanjutnya. Dalam konteks survei Pemilu Legislatif 2014, survei sering dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu untuk memengaruhi opini publik. Lembaga survei swasta yang memiliki kepentingan politik tertentu atau memang disewa oleh partai politik tertentu, akan merilis hasil surveinya yang menguntungkan partai tertentu atau menyudutkan partai tertentu. Di belakang hari, setelah KPU mengumumkan hasil faktual Pemilu baru terbukti ketidaksahihan hasil lembaga survei tersebut. Dalam Pemilu Legislatif 2014, partai berbasis Islam termasuk PKS adalah partai yang diperkirakan menempati posisi papan bawah atau bahkan tidak dapat bertahan di posisi 3,5 persen *parliamentary threshold* (ambang batas suara parlemen). Salah satunya adalah Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) dalam laporan 'Evaluasi Politik 2013 dan Political Outlook 2014'. Disebutkan kajian yang menggunakan metode meta analisis dan *focus grup discussio* (FGD) mengambil berbagai hasil survei dari 20 lembaga survei. Dari empat partai Islam yang berada di Pemilu 2014, Partai Bulan Bintang (PBB) berada di urutan paling bawah. PBB hanya mendapat perolehan 0,87 persen, sedangkan, di atasnya ditempati oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan perolehan 3,15 persen yang tentu saja tidak melampaui *parliamentary threshold*, dan dinyatakan tidak lolos *electoral threshold*. Posisi pertama, di antara partai Islam, ditempati Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendapat 4,18 persen. Di belakangnya, ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan perolehan 3,65 persen. Keduanya mampu menembus ambang batas 3,5 persen. Nyatanya kajian yang berdasarkan hasil dari 20 lembaga survei tersebut ternyata menyimpang dari hasil yang sebenarnya secara faktual yang dihitung secara manual oleh KPU selaku lembaga yang berwenang menghitung dan menetapkan hasil Pemilu Legislatif. Jika 20 lembaga survei memiliki hasil yang senada menempatkan partai politik Islam di posisi marginal, namun nyatanya masih mampu bertahan bahkan tetap eksis dalam dinamika politik nasional maka ada

kecenderungan untuk menyudutkan keberadaan partai politik Islam melalui hasil survei yang dirilis secara luas melalui media massa. Oleh karenanya, hasil survei internal PKS menjadi sangat strategis sepanjang dilakukan sesuai kaidah survei yang benar, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran ilmiahnya. Faktanya kemudian PKS secara nasional menetapkan target tiga besar yang sesuai dengan nomor urut 3 yang didapatkan berdasarkan undian, sedangkan dalam skala Sumatera Utara PKS menargetkan menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2014, sebagai konsekuensi target tiga besar secara nasional. Kedua target tersebut sama-sama tidak terpenuhi karena secara nasional PKS hanya berada di urutan ketujuh dengan perolehan suara 8.480.204 (6.8%), sedangkan di Sumatera Utara PKS berada di urutan keenam dengan perolehan suara 450.440 (7,26%). Hal ini menunjukkan beberapa kemungkinan, *pertama*, survei internal PKS tidak dilaksanakan secara objektif dan mengacu pada kaidah ilmiah yang membuat hasilnya keliru, sehingga menyimpang ketika dijadikan acuan untuk target perolehan suara. *Kedua*, PKS tidak menggunakan hasil survei internalnya sebagai instrumen utama penetapan target perolehan suara baik secara nasional maupun dalam skala Sumatera Utara. *Ketiga*, target yang ditetapkan hanya merupakan bagian dari strategis memengaruhi opini publik dan menambah kepercayaan diri pengurus dan kader PKS, meskipun secara kajian survei menunjukkan hal yang berbeda. Jika hal yang ketiga ini yang terjadi maka tentunya PKS menggunakan instrumen lain yang dalam hal ini bisa merupakan hasil kajian jaringan eksternal bukan kader yang setiap bulan melakukan evaluasi, atau juga merupakan kajian internal kader dan pengurus yang meramunya dari berbagai informasi yang mereka terima. Selanjutnya strategi PKS yang melakukan *direct selling* adalah kegiatan yang mempromosikan PKS dari rumah ke rumah melalui berbagai aksi simpatik yang dilancarkan para kader PKS. Ini adalah suatu *brand* khas PKS secara kelahiran partai ini yang masih terus dilakukan hingga sekarang. *Brand* ini sekaligus menjadi kelebihan PKS dibandingkan dengan partai politik lain yang cenderung memiliki pola berbeda. Para elit PKS mengklaim bahwa aksi sosial yang dilancarkan kader PKS tidak pernah surut dari dahulu hingga sekarang, namun hal ini berbeda dari pengamatan masyarakat dan para peneliti yang merasakan penurunan derajat kualitas dan kuantitas gerakan sosial PKS di tengah masyarakat.

Dalam mekanisme penetapan Caleg di PKS dilakukan melalui gelaran Pemilu internal yang menguji elektabilitas orang yang akan menjadi Caleg, sebelum diuji oleh publik melalui Pemilu Legislatif. Hal ini seperti diutarakan oleh informan berikut ini:

BP3 yang terdiri dari tim enam melakukan mekanisme pencalegan melalui jaringan struktur dan kader yang kemudian menggelar Pemilu internal. Dengan mekanisme ini maka setiap yang mencalonkan dirinya sendiri sudah pasti tidak terpilih.¹⁹⁸

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa PKS memiliki suatu struktur permanen dalam internal partai yang mengurus soal Pemilu dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) yang disebut dengan Badan Penyelenggara Pemilu dan Pemilukada (BP3). Badan inilah yang menjalankan mekanisme pemilihan orang-orang yang akan menjadi Caleg dalam Pemilu Legislatif 2014, termasuk yang memilih 99 Caleg Sumatera Utara, yang 20 persen di antaranya berasal dari orang-orang non kader. Tim ini memberi penilaian kepada orang-orang yang dianggap memiliki elektabilitas dan memiliki kemampuan untuk berkiprah mengemban amanat menjadi wakil rakyat. Dari orang-orang yang ditetapkan tersebut kemudian diikutkan ke dalam Pemilu internal yang akan menguji elektabilitas orang yang akan menjadi Caleg tersebut. Pemilu internal ini diikuti oleh para kader yang memilih dari orang-orang yang akan menjadi Caleg tersebut yang kemudian hasil Pemilu internal dijadikan acuan dalam menetapkan Daftar Caleg Tetap (DCT) dari PKS. Dengan mekanisme seperti ini tentunya orang-orang yang berambisi menjadi anggota legislatif dapat dihindari, selain penggunaan praktek *money politics* dalam penetapan Caleg. Mekanisme seperti ini juga merupakan ciri khas dari PKS yang membedakannya dari partai politik lainnya, yang membuat orang yang akan menjadi Caleg yang dicalonkan PKS harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan. Dengan kata lain, mekanisme seperti ini ditetapkan untuk menghasilkan para Caleg yang selain memiliki elektabilitas di kalangan kader PKS, juga memiliki kapasitas individu terutama sifat amanah karena merupakan orang-orang yang dicalonkan dan bukan mencalonkan serta tidak mengejar pangkat dan jabatan.

198 Wawancara Muhammad Hafez.

Selanjutnya strategi yang diterapkan PKS dalam Pemilu Legislatif 2014 juga dengan tidak lagi menonjolkan simbol-simbol Islam tetapi dengan mengedepankan substansi. Hal ini seperti pernyataan informan sebagai berikut:

PKS tidak menonjolkan keislaman tetapi membahas negara dengan substansi agama. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa kalau memimpin negara seperti Indonesia yang heterogen maka harus melebur. Hal ini seperti diajarkan Rasul dalam perjanjian Hudaibiyyah, juga seperti kisah keledai di pasar yang Madinah mengadu kepada Rasul.¹⁹⁹

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa dalam Pemilu Legislatif 2014 khususnya, PKS tidak lagi menonjolkan keislaman tetapi ingin lebih mengedepankan substansi agama. Dalam kampanye para kader PKS khususnya para ikhwan tidak lagi mengenakan simbol-simbol Islam seperti topi lobe ataupun memelihara janggut. Dalam penyampaian informasi kepada khalayak juga tidak lagi menggunakan ayat-ayat suci, tetapi berusaha menunjukkan identitas Islam yang lebih ramah. Apa yang dimaksud dengan substansi agama dan identitas yang lebih ramah kiranya adalah berbagai kegiatan-kegiatan sosial yang dianggap memberikan manfaat langsung kepada khalayak seperti pengobatan gratis, bakti sosial dan sebagainya. Strategi ini tentunya untuk menarik simpati orang-orang di luar kader dan simpatisan partai yaitu mereka yang beragama Islam pada umumnya yang dalam kehidupannya sehari-hari tidak kurang memahami ajaran Islam secara baik dan benar juga kurang mengamalkan ajaran Islam tersebut. Selain itu, strategi ini juga dimaksudkan untuk menarik simpati khalayak yang lebih luas, termasuk orang-orang non muslim. Karena dalam pemahaman PKS ketika untuk menjadi pemimpin bangsa seperti Indonesia yang heterogen maka harus meleburkan identitas PKS ke dalam keindonesiaan, dan bukan hanya pada keislaman. Pernyataan ini kiranya senada dengan apa yang disampaikan Presiden PKS Anis Matta dalam orasinya saat kampanye Pemilu Legislatif 2014 di Lapangan Gajah Mada Medan bahwa PKS berniat menuju istana, atau menempatkan kadernya menjadi pemimpin nasional. Namun peleburan identitas PKS dengan ciri keislaman kepada ciri keindonesiaan ini juga berarti paradoks ketika membaca kembali buah pikiran Anis Matta saat

199 Wawancara Muhammad Hafez.

mengkritisi sikap Amin Rais di awal masa Reformasi yang mengubah haluan Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikannya menjadi partai nasionalis. Siapa yang memimpin Indonesia pasca Soeharto, tulisan Anis Matta, tentulah mudah ditebak kalau sorot mata kita tertuju kepada tokoh yang memimpin Reformasi, Amin Rais. Tapi William Liddle seorang Indonesianis (pengamat politik Indonesia) asal Amerika Serikat mengatakan, “Kalau Amin Rais ingin menjadi pemimpin nasional, dia harus mentransformasikan diri dari pemimpin umat menjadi pemimpin bangsa.” Pikiran itu mengisyaratkan ada jarak yang jauh antara “umat” dan “bangsa”, bahwa memimpin umat ada dalam skala yang lebih sempit dibanding skala memimpin bangsa. Gagasan Liddle ini kemudian menjadi wacana dasar dalam proses pembentukan PAN, bahwa Amin Rais harus lebih jauh meraih konstituen bangsa dan tidak sekedar konstituen umat. Kenyataan yang terjadi kemudian adalah bahwa PAN menjadi partai nasionalis, dan kenyataan selanjutnya adalah bahwa suara PAN pada Pemilu 1999 jauh di bawah perkiraan, bahkan kalangan Muhammadiyah yang dianggap sebagai basis suara tidak banyak yang memilih PAN.²⁰⁰

Selanjutnya tentang perjanjian Hudaibiyah adalah catatan sebuah perjalanan dakwah dan perjuangan Rasulullah SAW dengan langkah-langkah politis untuk menopang kekuatan dakwah. Kala itu kota Makkah dikuasai kaum kafir Quraisy ketika Rasulullah SAW pada pada hari Senin bulan Dzul Qa’idah tahun ke-6 Hijriah berangkat datang bersama 1400 orang sahabat tanpa senjata perang kecuali pedang di dalam sarungnya. Setibanya di Dzulhulaifah, Rasulullah SAW mulai berihram untuk umrah. Tapi kaum kafir Quraisy hendak menghalangi kedatangan Rasul dan rombongan. Rasulullah SAW mengubah rute perjalanan dan singgah di Hudaibiyah. Kepada utusan kafir Quraisy, di tempat itu Rasulullah SAW menegaskan kedatangannya semata ingin menunaikan umrah, bukan berperang. Namun jika orang-orang Quraisy memerangi mereka, maka Rasulullah SAW tanpa ragu akan memerangi mereka pula Rasulullah SAW juga mengutus Utsman bin Affan ra mengabarkan kaum Quraisy bahwa kedatangan mereka semata-mata untuk umrah, bukan untuk berperang. Namun karena Utsman bin Affan ra sempat ditahan beberapa

200 Matta, *Menikmati Demokrasi*, h.139-140.

lama, kemudian terdengar kabar bahwa Utsman bin Affan ra dibunuh kafir Quraisy. Mendengar berita itu Rasulullah SAW meminta para sahabat melakukan *ba'iat* menuntut balas kematian Utsman. Maka mereka ber*bai'at* di bawah sebuah pohon yang dikenal dalam sejarah sebagai Bai'atur-Ridwan. Allah Ta'ala mengabarkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an: "*Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mu'min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon*" (QS. al-Fath : 18)

Namun ketika kaum Quraisy mengetahui adanya *ba'iat* yang dilakukan para sahabat Rasulullah SAW, mereka kemudian mengirim utusan yakni Suhail bin Amr untuk mengadakan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Meski terjadi perdebatan alot karena utusan Suhail merupakan orang yang sangat ketat dan tak mau kompromi sehingga membuat para sahabat merasa emosi. Namun Rasulullah SAW dengan penuh kesabaran menghadapi Suhail, bahkan terkesan terlalu mengalah. Namun akhirnya disepakati perjanjian damai Hudaibiyah yang di dalamnya terkandung empat hal: *Pertama*, tahun ini (6 H), Rasulullah SAW harus kembali (tidak boleh melaksanakan umrah). Tahun depan Beliau dan kaum Muslimin boleh memasuki Makkah dan tinggal di sana selama tiga hari. Mereka hanya boleh membawa persenjataan musafir sedangkan pedang-pedang mereka harus dimasukkan di dalam sarung. Pada saat itu kaum Quraisy tidak boleh menghalanginya. *Kedua*, menghentikan peperangan dari kedua belah pihak selama 10 tahun dan mewujudkan keamanan di tengah masyarakat. *Ketiga*, siapa yang menjalin persekutuan dengan Muhammad dan kaum Quraisy maka dia termasuk bagian dari kedua pihak tersebut. Maka penyerangan yang diarahkan kepada suku-suku tersebut, dianggap sebagai penyerangan kepada sekutunya. *Keempat*, siapa yang kabur dari kaum Quraisy (Makkah) dan mendatangi Muhammad (ke Madinah) maka harus dikembalikan (ekstradisi), sedangkan yang kabur dari Muhammad (Madinah) kepada kaum Quraisy (ke Makkah), tidak dikembalikan.

Meski sebelumnya banyak yang menyangsikan hikmah dari perjanjian damai tersebut, namun pada akhirnya tidak ada kesangsian lagi kalau Perjanjian Hudaibiyah ini adalah suatu kemenangan nyata bagi umat Muslim. Perjanjian tersebut besar sekali pengaruhnya terhadap masa depan Islam karena untuk pertama kali pihak Quraisy yang selama ini sebagai pihak yang dominan telah mengakui Rasulullah, bukan sebagai pihak yang memberontak terhadap mereka, tetapi adalah pihak yang

sama level dalam kehidupan sosial, sekaligus bahwa Islam adalah agama yang sah diakui, dan mengakui kedaulatan Islam. Selama gencatan senjata berarti membuka jalan buat Islam untuk berkembang pesat, padahal sebelumnya Quraisy adalah suku musuh Islam paling gigih yang sebelumnya tidak pernah mau tunduk. Setelah dua tahun perjanjian damai tersebut jumlah umat Islam yang tadinya datang ke Hudaibiyah sebanyak 1400 orang, tetapi tatkala Rasulullah SAW hendak membuka Makkah jumlah yang datang sudah 10 ribu orang. Bahkan klausul yang tadinya diragukan yakni tentang golongan Quraisy menyeberang kepada umat Muslim harus dikembalikan, dan jika umat Muslim menyeberang kepada Quraisy tidak akan dikembalikan kepada Rasulullah SAW ternyata memiliki makna yang lebih jauh. Karena orang yang beriman tidak mungkin akan menyeberang ke kubu Quraisy, karena jika itu terjadi tentulah dia orang kafir yang telah nyata kekafirannya. Untuk orang seperti itu, tidak ada ruginya bagi kaum Muslimin, dan siapa yang memeluk Islam dan bergabung dengan Rasulullah SAW, semoga Allah SWT membukakan jalan keluar baginya. Para sahabat yang pada awalnya keberatan dengan isi perjanjian tersebut, karena secara lahir terkesan memihak kepada kaum musyrikin. namun akhirnya menyadari bahwa keputusan Rasulullah SAW akan selalu mendatangkan kemaslahatan, karena semuanya berasal dari Allah SWT. Apalagi tidak lama setelah peristiwa tersebut Allah SWT menurunkan firman-Nya: *“Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.”* (QS.al-Fath/48: 1)

Dari sikap yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin dan, politisi, dan diplomat inilah yang kiranya menjadi strategi PKS, yakni bersikap seolah mengalah di hadapan lawan. Namun dalam konteks Pemilu Legislatif 2014 yang menunjukkan hasil kurang menggembirakan dalam perolehan suara PKS, sulit untuk dijelaskan sinkronisasi hubungan di antara Perjanjian Hudaibiyah dengan strategi politik PKS di Pemilu Legislatif 2014. Karena nyatanya suara partai ini tidak seperti yang ditargetkan baik dalam skala nasional maupun skala Sumatera Utara.

Meskipun PKS mengubah strateginya namun tidak serta merta mengubah jati dirinya yang terbentuk sejak kelahirannya yakni sebagai partai dakwah. Hal ini seperti pernyataan informan berikut ini:

Sebagai partai dakwah tentunya PKS mengemban tugas-tugas dakwah melalui jalur legislatif dalam sistem tata negara yang menganut pola *trias politica*. Dakwah sudah tentu memainkan suatu peran sentral dalam membangun pemahaman keagamaan antar umat manusia.²⁰¹

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa perubahan bentuk strategi yang diterapkan oleh PKS dengan menjalankan ajaran Islam secara substansi dipahami sebagai suatu kondisi yang merespons keadaan yang terjadi. Namun dalam jati dirinya PKS tetap sebagai partai dakwah yang mengusung nilai-nilai Islam. Bahkan disebutkan bahwa dakwah sebagai tugas yang tentunya harus senantiasa dijalankan dalam setiap dinamika politik yang dialami PKS. Dakwah yang dimaksud adalah dakwah dalam ranah legislatif, karena memang orang PKS yang menjadi Caleg dalam Pemilu Legislatif 2014 adalah orang-orang yang dipersiapkan mengisi kursi di parlemen, dan bukan di eksekutif. Tugas dakwah sebagai suatu peran sentral tentunya bukan hanya sebagai pelengkap akselerasi politik PKS di parlemen, tetapi bermakna dakwah adalah sesuatu yang dengannya segala aktivitas beranjak dan dijiwai. Apalagi kemudian hal tersebut diboboti dengan sasaran hentak membangun pemahaman keagamaan antar umat beragama, yang merupakan suatu kondisi yang tidak gampang untuk dicapai. Selain perlu sikap konsistensi yang tinggi (*istiqomah*), juga membutuhkan ketangguhan para kader yang menjadi anggota legislatif di hadapan terpaan godaan berupa kekuasaan dan berbagai fasilitas. Hal seperti ini tentu menyiratkan dengan sangat jelas bahwa berpartai meskipun terlibat dalam suatu kondisi yang praktis, namun dilarang untuk pragmatis, karena tujuan dakwah adalah hal yang lebih utama. Namun lagi-lagi jika harus dibandingkan dengan kondisi faktual ketika para kader PKS bersentuhan langsung dengan dunia politik praktis, maka nilai-nilai dan tugas dakwah tersebut menjadi lebih sulit untuk diaplikasikan.

Sepertinya PKS menyadari tantangan yang akan dihadapi tersebut, dan oleh karenanya sistem yang hendak dibangun adalah sistem yang kuat, seperti pernyataan informan berikut ini:

Perlu dibangun barisan yang kokoh yang memiliki struktur kuat yang berbasis kader partai. Kader partai adalah orang-orang yang telah memiliki orientasi

201 Wawancara Satrya Yudha Wibowo.

tentang partai dakwah. Mereka menyebar sampai ke struktur paling bawah yakni di tingkat lingkungan atau tingkat dusun, bahkan sampai ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).²⁰²

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa upaya untuk mewujudkan partai yang mengemban tugas dakwah dengan strategi menawarkan substansi Islam, maka diperlukan struktur yang kuat dalam basis kader PKS. Hal ini sangat dibutuhkan untuk bertahan ketika mengalami goncangan di jalan yang terjal. Setidaknya hal tersebut dibuktikan oleh Presiden PKS Anis Matta ketika partai ini diserang kondisi yang tak menguntungkan ketika Presiden PKS terdahulu yakni Luthfi Hassan Ishaaq terjerat kasus korupsi. Partai ini sempat menjadi bulan-bulanan media massa dan media sosial, namun dengan langkah cepat konsolidasi ke jaringan kader di berbagai daerah di Indonesia oleh Anis Matta, soliditas partai tetap terjaga, dan ini dapat terwujud karena jaringan kader yang terstruktur secara kokoh. Pada akhirnya PKS dapat memertahankan eksistensinya di tengah prediksi berbagai pengamat politik yang menduga partai ini tidak akan bisa bertahan. Selanjutnya jaringan kader yang kokoh sampai ke tingkat lingkungan merupakan kekuatan tersendiri dalam menjadi perpanjangan kepentingan partai sampai ke tingkat TPS. Karena Pemilu Legislatif 2014 seperti halnya Pemilu sebelumnya rawan akan tindakan manipulasi suara dan tindakan kecurangan lainnya, dan dengan kekuatan kader sampai ke level terbawah membuat PKS dapat mereduksi ancaman kecurangan yang terjadi. Bahkan dalam Pemilu sebelumnya kekuatan PKS ini sering digunakan untuk membantu partai politik lain untuk menjaga suaranya dari setiap TPS. Jaringan yang kokoh ini juga didesain untuk bersifat transformatif yakni melayani masyarakat secara langsung melalui berbagai kegiatan bakti sosial seperti pengobatan gratis, bantuan tanggap bencana dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut memang secara sah menjadi kekuatan PKS sebagai partai politik dalam Pemilu sebelumnya. Namun fakta bahwa melesetnya target PKS dalam perolehan suara Pemilu Legislatif 2014 menjadi suatu kenyataan bahwa tidak efektifnya strategis tersebut berlangsung. Disebut tidak

202 Wawancara Satrya Yudha Wibowo.

efektif karena telah terjadi degradasi pemahaman di kalangan kader yang dulunya aktivis murni menjadi aktivis sekaligus politikus partai.

Gambar: 20 Strategi Kampanye PKS

2. Partai Persatuan Pembangunan

Dari segi perencanaan pelaksanaan kampanye menghadapi Pemilu Legislatif 2014, PPP juga memiliki badan tersendiri yang memang sengaja dibentuk untuk menangani jalannya proses politik tersebut. Hal ini seperti pernyataan dari informan berikut ini:

Perencanaan dilakukan oleh lembaga khusus yakni Lembaga Pemenangan Pemilu (LP2) PPP. Lembaga ini yang menentukan biaya, strategi, lokasi kampanye dan Jurkam, serta visi-misi program. Untuk program regional yang ditetapkan adalah penguatan infrastruktur, listrik, pengadaan pupuk, bibit, tenaga kerja, pendidikan. Program-program tersebut dibungkus dengan nuansa keIslaman yang terkait visi misi. Kita juga menginginkan seluruh rumah tangga Islam bisa baca Al-Qur'an.²⁰³

203 Wawancara Hasrul Azwar.

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa PPP sebagai partai politik, sebagaimana partai politik pada umumnya, memiliki suatu badan khusus dalam menangani Pemilu Legislatif 2014. Lembaga ini yang mengorganisir jalannya kampanye Pemilu Legislatif 2014 PPP, termasuk dalam memproses nama-nama kader dan orang-orang yang akan diusung menjadi Caleg. Selain itu juga menentukan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye seperti besaran biaya yang digunakan, strategi yang diterapkan untuk tujuan *electoral*, lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan kampanye, dan siapa saja yang akan menjadi Jurkam saat kampanye. Sedangkan untuk tingkat regional program-program yang menjadi isu yang akan diangkat dalam kampanye adalah menyangkut infrastruktur, listrik, pengadaan pupuk, bibit, tenaga kerja, pendidikan, dan ketrampilan serta pengetahuan setiap keluarga Muslim untuk bisa membaca Al-Qur'an. Program-program tersebut disampaikan dibungkus dengan nuansa keIslaman. Dari pernyataan ini setidaknya ada tiga hal yang bisa dikemukakan. *Pertama*, program regional yang ditetapkan oleh LP2 PPP mestinya menjadi tema dan subtema dalam kampanye PPP di kawasan regional, termasuk Sumatera Utara. Namun dari catatan kampanye PPP di Kebun Lada kota Binjai, program-program ini sepertinya kurang menjadi perhatian, baik dari segi fokus pembahasan maupun dari segi pendalamannya. Para Jurkam yang berorasi di depan khalayak kampanye lebih menekankan, misalnya pada persoalan bantuan kepada para bilal mayit, nazir masjid dan usaha kecil, juga pada pembingkai isu negatif yang tidak menguntungkan PPP, seperti pernyataan para lembaga survei seperti isi orasi politik Fadly Nurzal.²⁰⁴ *Kedua*, dengan tidak terkoneksinya antara program regional yang ditetapkan LP2 PPP dengan tema kampanye yang disampaikan para Jurkam menunjukkan koordinasi yang tidak efektif di antara keduanya. Hal ini juga mengisyaratkan kurang seriusnya PPP dalam perencanaan kampanyenya sehingga perencanaan yang ditetapkan tidak selalu harus menjadi sesuatu yang *applicable* dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif 2014 yang dilakukan PPP. Dalam kondisi seperti ini maka keseriusan para elit dalam menjalankan partai sesuai dengan tujuan ideal seperti memperjuangkan

204 Lihat kembali pembahasan implementasi prinsip-prinsip komunikasi Islam.

kepentingan umat Islam, mendorong pembangunan dan sebagainya, jadi dipertanyakan ketika ia bersanding dengan kepentingan pragmatis yang menjadi kelaziman dalam politik. Hal-hal seperti jual-beli nomor basah dalam penetapan Caleg, atau konflik kepentingan antara pribadi dan sejenisnya merupakan praktek pragmatis yang sering merundung keberadaan partai politik. Hanya dengan keseriusan untuk taat pada azas, dan mekanisme yang disepakati dalam partai-lah yang dapat meminimalisir, bahkan menutup celah praktek pragmatis tersebut terjadi. Namun hal seperti ini sulit terwujud apabila tidak serius melaksanakan konsep-konsep, strategi ideal partai. *Ketiga*, bahwa membungkus program-program kampanye dengan nuansa Islam kembali menunjukkan bahwa PPP masih sangat berkepentingan dengan simbol-simbol keIslaman untuk menarik simpati pemilih dari umat Islam. Dengan demikian PPP dengan sangat kuat mengesankan bahwa persoalan bungkus keIslaman lebih strategis dan lebih menjadi fokus perhatian ketimbang persoalan aplikasi program-program partai yang pada lebih bersifat substansial.

Dalam hal koordinasi penyampaian materi kampanye, para Jurkam diberikan keleluasaan untuk mengembangkan dari tema yang telah ditetapkan oleh LP2 PPP. Hal ini seperti pernyataan informan berikut ini:

Program yang dirancang LP2 PPP secara tertulis dalam bentuk visi misi yang pengembangannya oleh para Jurkam yang di antaranya dipilih dari para ulama. Kita melakukan kajian politik beberapa kali (tidak berkala), kita juga mengenali para audience kampanye melalui keterangan dari para ketua DPC serta melalui googling (melalui mesin pencari di internet).²⁰⁵

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa ada tema kampanye yang dirumuskan LP2 PPP dalam bentuk visi dan misi yang diterjemahkan oleh para Jurkam saat kampanye Pemilu Legislatif 2014. Para Jurkam ini kemudian diberi kebebasan untuk mengembangkan tema kampanye tersebut sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Merujuk ke pembahasan sebelumnya tentang adanya ketidaksinkronan antara tema dan pembahasan kampanye menunjukkan lemahnya koordinasi PPP dalam perhelatan kampanye Pemilu Legislatif 2014. Akibatnya apa

205 Wawancara Hasrul Azwar.

yang dirancang secara tertulis menjadi tema kampanye tidak menjadi acuan dalam penyampaian para Jurkam di lapangan. Jurkam yang disebut sebagai di antaranya ulama ingin menunjukkan konsistensi PPP kepada Islam. Ulama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan:

Ulama orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam: ia seorang--besar pada zaman kebangkitan Islam—khalaf ulama yang hidup pada masa sekarang;-- alah 1 para ahli ilmu agama mulai dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, sampai ke pengikut terdekak sesudahnya; 2 ulama yang mendasarkan pandangannya pada paham kemurnian ortodoks.²⁰⁶

Di samping penjelasan tentang ulama dari KBBI tersebut di atas, ada juga penjelasan tentang ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW dari tinjauan kajian ilmu hadis dalam ajaran agama Islam, bahwa yang disebut ulama adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi. Sungguh para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak (Sunan At-Tirmidzi No. 2681).²⁰⁷

Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari hamba-hamba. Akan tetapi Dia mencabutnya dengan diwafatkannya para ulama sehingga jika Allah tidak menyisakan seorang alim pun, maka orang-orang mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Kemudian mereka ditanya, mereka pun

206 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, diambil dari situs bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php dan diakses pada tanggal 16 Oktober 2014 pukul 10:35 WIB.

207 Hadis ini diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi di dalam Sunan beliau no. 2681, Ahmad di dalam Musnad-nya (5/169), Ad-Darimi di dalam Sunan-nya (1/98), Abu Dawud no. 3641, Ibnu Majah di dalam Muqaddimah-nya dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan: "Hadisnya shahih." Lihat kitab Shahih Sunan Abu Dawud no. 3096, Shahih Sunan At-Tirmidzi no. 2159, Shahih Sunan Ibnu Majah no. 182, dan Shahih At-Targhib, 1/33/68.

berfatwa tanpa dasar ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. (HR. Al-Bukhari no. 100 dan Muslim No.2673)

Dari beberapa sumber yang menjelaskan tentang ulama di atas, dan melihat latar belakang para Jurkam yang berorasi dalam kampanye di Lapangan Kebun Lada Binjai yang pada umumnya merupakan pengurus PPP, kiranya ulama yang dimaksud dalam pernyataan informan di atas lebih mendekati pada makna yang diuraikan KBBI yakni *orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam*. Atau dengan kata lain Jurkam adalah orang yang dianggap memiliki pengetahuan agama Islam. Mereka yang menjadi Jurkam ini berinteraksi kepada massa yang berkumpul di lapangan tersebut dengan pengetahuan tentang latar belakang menyangkut *audience* yang berkumpul di sana. Pemahaman tentang karakteristik *audience* sangat penting menyangkut dengan apa dan bagaimana pesan komunikasi disampaikan. Tanpa pemahaman atau memetakan terlebih dahulu *audience* yang akan menjadi komunikasi dalam proses komunikasi yang berlangsung, maka komunikator berpeluang untuk tidak saja berlaku tidak efektif dalam komunikasinya tetapi dapat juga berlaku salah dalam menyampaikan pesan komunikasinya. Namun dengan metode yang digunakan belum secara sistematis melalui pendekatan keilmuan yang lebih serius sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang *audience* kampanye. Hal ini terkait dengan pernyataan informan bahwa PPP tidak melakukan kajian mendalam tentang Pemilu Legislatif 2014 secara berkala sehingga menguatkan lagi kesimpulan di atas tentang tidak seriusnya PPP memenej kampanye Pemilu Legislatif 2014 dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip komunikasi Islam untuk tujuan *electoral*-nya.

Untuk terjadinya kesamaan pandangan atau terjadinya resistensi akan suatu materi kampanye, dilakukan *cross check* kepada *audience*. Tujuan adalah untuk menunjukkan perhatian agar berdampak secara psikologi kepada khalayak. Hal ini seperti dinyatakan oleh informan berikut ini:

Biasanya setelah kampanye akbar, kita akan bertanya dan berdialog dengan khalayak yang menghadiri kampanye. Usai kampanye kita biasanya tidak langsung pulang meninggalkan lokasi kampanye, namun singgah dulu di warung-warung kopi atau tempat-tempat biasa khalayak berkumpul. Kita berdialog sekaligus melakukan

evaluasi atas kampanye yang baru dilakukan dan secara psikologis memberikan perhatian kepada khalayak.²⁰⁸

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa pendekatan dalam kampanye politik PPP tidak saja dilakukan secara formal namun juga dilakukan secara informal. Ada pendekatan secara individual melalui dialog langsung setelah melancarkan kampanye politik kepada khalayak dalam jumlah yang banyak. Pendekatan terhadap individu-individu ini merupakan bagian dari evaluasi atau apa yang baru disampaikan dalam orasi politik kepada khalayak yang ramai dari atas podium kampanye. Evaluasi ini akan lebih memberi kepastian terhadap penerimaan maupun resistensi yang muncul di tengah-tengah khalayak atas materi kampanye yang disampaikan. Melalui pendekatan individu-individu tersebut sekaligus sebagai bentuk perhatian yang memberi makna secara psikologi kepada khalayak.

Upaya untuk mendekatkan Islam bagi PPP juga terlihat dari tema besar yang sengaja dipilih dalam Pemilu 2014. Hal ini seperti disebutkan informan bahwa:

Tema besar kita dalam Pemilu 2014 ini adalah “Indonesia Berkah Bersama Ka’bah”. Berkah dalam hal ini bermakna mengundang Tuhan dalam pengelolaan politik yang dilakukan dan dalam sikap partai. Artinya semua langkah yang dilakukan harus bermanfaat untuk orang banyak.²⁰⁹

Pernyataan ini merupakan penegasan bahwa PPP ingin mengidentifikasi kampanye politiknya dalam Pemilu Legislatif 2014 berdasarkan ajaran agama Islam. “Tuhan” yang dimaksud dalam kalimat di atas tentunya Allah SWT, Tuhan semesta alam yang menurunkan Al-Qur’an sebagai pedoman hidup manusia dan Muhammad Rasulullah SAW sebagai teladan yang harus diikuti. Konteks “mengundang Tuhan” yang disebut dalam kalimat di atas disambung dengan penggalan kata “harus bermanfaat untuk orang banyak” yang berarti adanya keterkaitan yang kuat antara landasan ajaran Islam dalam sikap dan tindakan politik PPP—termasuk di dalamnya dalam melancarkan komunikasi politik dalam Pemilu Legislatif 2014 harus memiliki

208 Wawancara Fadly Nurzal.

209 Wawancara Fadly Nurzal.

manfaat bagi orang banyak. Hal ini juga terlihat dari pernyataan selanjutnya dari informan dalam menjawab pertanyaan tentang proses penetapan calon legislatif (Caleg) PPP dan kriteria yang disyaratkan. Pernyataan tersebut berbunyi:

Dalam memilih Caleg kita mensyaratkan tidak adanya *money politics*, atau setidaknya kita meyakini tidak ada terjadi *money politics* tersebut dalam proses pencalegannya. Kemudian mereka yang menjadi Caleg adalah orang yang memiliki kemampuan meyakinkan publik. Mereka adalah individu yang harus bisa meyakini publik bahwa ber-PPP adalah suatu hal yang baik dan benar.²¹⁰

Pernyataan di atas ingin menegaskan bahwa sesuai dengan landasan ajaran Islam yang menjadi identitas PPP, maka dalam praktiknya partai ini tidak melakukan hal-hal yang tidak diizinkan dalam hukum Islam. *Money politics* dalam proses penetapan Caleg dipandangan sebagai praktik politik yang melanggar ajaran Islam. Pernyataan di atas ingin menegaskan bahwa kriteria dalam penetapan Caleg di Sumatera Utara adalah berdasarkan kapasitas dan kapabilitas seseorang yang dinilai memiliki kemampuan *electoral* dalam Pemilu Legislatif 2014.²¹¹ Kemampuan *electoral* adalah kemampuan meyakini publik sehingga memiliki massa pendukung yang akan memilih Caleg bersangkutan di TPS, dengan demikian Caleg seperti ini diharapkan menjadi lumbung suara dalam Pemilu Legislatif 2014. Apa yang dimaksud meyakini publik tentunya kemampuan mengajak publik untuk memilih Caleg di maksud atau PPP dengan ajakan yang didasarkan sesuai nilai-nilai Islam. Untuk itu pula seorang Caleg harus memahami prinsip-prinsip komunikasi Islam yakni tata cara melancarkan komunikasi kepada publik sesuai dengan ajaran Islam. Pernyataan di atas dinyatakan di tengah wacana yang ramai dibicarakan khalayak bahwa untuk menjadi seorang Caleg setidaknya ada dua hal yang harus ada yakni kedekatan dengan pengambil keputusan (elit partai) dan uang untuk menyuap pengambil keputusan (*money politics*).

210 Wawancara Fadly Nurzal.

211 Fadly Nurzal juga menjelaskan bahwa proses pencalegan di Sumut juga menyusun strategi dilakukan sebuah lembaga internal yang disebut Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) PPP. Meski demikian keputusan akhir penetapan Caleg dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetap dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris DPW PPP Sumut.

Informan juga mengatakan bahwa secara internal ada doktrin bagi para kader seperti yang diutarakan informan berikut ini:

“Kita melakukan doktrin terhadap para kader untuk mengenalkan PPP secara utuh. Para kader PPP harus bisa meyakinkan publik bahwa ber-PPP itu baik dan benar.”²¹²

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa ada mekanisme kaderisasi dalam tubuh internal PPP yang di dalamnya dilakukan doktrin politik kepada para kader. Mereka yang telah mendapatkan doktrin tentang PPP diharapkan bisa melakukan sosialisasi, kampanye kepada publik bahkan meyakinkan publik bahwa ber-PPP adalah sesuatu yang baik dan benar. Apa yang disebut dengan PPP secara utuh tentu saja dimulai dari sejarah terbentuknya PPP di ranah politik tanah air dan bagaimana visi misi perjuangan PPP sebagai sebuah partai politik. PPP secara utuh yang dimaksud tentunya bukan hal-hal yang dimaksud dengan praktik *money politics* tujuan jabatan dan uang dalam berpolitik dan sebagainya.

Dalam pandangan informan yang merupakan akademisi yang banyak meneliti tentang partai politik Islam Indonesia, ada perbedaan strategi *electoral* di antara kedua partai Islam ini. PKS sebagai sebuah partai politik memiliki suatu sistem yang lebih baik dibandingkan dengan PPP. Namun telah terjadi degradasi muatan nilai-nilai keislaman dalam gerakan politik yang dilakukan PKS dalam Pemilu 2014 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sedangkan PPP masih menggunakan pola lama yakni menjadikan simbol-simbol Islam sebagai penarik pemilih tradisional, pada sisi lain mendegradasi peran ulama di dalam kepemimpinan partai tersebut. PKS memiliki buku panduan tentang etik cara berpartai yang diatur sedemikian rupa dalam buku PKS yang setebal lebih 600 halaman yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam konteks pembumih pembangunan Islam. Namun hal yang sama tidak dimiliki oleh PPP. Mengenai sistem yang ada di PKS, informan menyatakan sebagai berikut:

PKS punya suatu sistem yang lebih kuat dalam penentuan di legislatif seperti Pemilu internal. Siapa yang jadi Caleg ditentukan dalam suatu Pemilu yang secara sistematis ditentukan siapa yang punya kelayakan. Namun pemilihan itu sebenarnya

212 Wawancara Fadly Nurzal.

masih terfokus pada senioritas yang saya kira juga strategi yang agar bisa terpilih, tapi dalam politik ini tidak merupakan suatu jaminan.²¹³

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa di dalam internal PKS ada suatu mekanisme yang berjalan secara baik dalam hal penentuan orang-orang yang akan diusung menjadi Caleg. Partai ini menggunakan mekanisme Pemilu internal, artinya melakukan pemilihan terhadap sosok-sosok kader partai yang dianggap layak diajukan sebagai Caleg. Para pemilih dalam Pemilu internal tersebut tidak lain adalah para kader PKS itu sendiri yang berada di berbagai wilayahnya masing-masing. Artinya secara internal, para kader PKS dilibatkan untuk menilai orang yang telah dipilih lebih dahulu untuk diuji kepantasannya di arena Pemilu internal. Orang-orang yang mengikuti Pemilu internal tersebut dipilih oleh suatu mekanisme partai, dan bukan merupakan orang yang mengajukan diri untuk mengikuti Pemilu internal tersebut. Dengan demikian Caleg yang diajukan terhindar dari orang-orang yang berambisi untuk posisi jabatan sebagai wakil rakyat. Karena dalam beberapa hadis disebutkan larangan meminta jabatan, seperti hadis berikut ini:

Rasulullah pernah menasihatkan kepada Abdurrahman bin Samurah. Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Karena jika engkau diberi tanpa memintanya niscaya engkau akan ditolong (oleh Allah dengan diberi taufik kepada kebenaran). Namun jika diserahkan kepadamu karena permintaanmu niscaya akan dibebankan kepadamu (tidak akan ditolong). (Hadis Shahih Bukhari No.7146)

Hadis riwayat Abu Dzar al-Ghifari z. Ia berkata, Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menjadikanku sebagai pemimpin?" Mendengar permintaanku tersebut, beliau menepuk pundakku seraya bersabda: Wahai Abu Dzar, engkau seorang yang lemah sementara kepemimpinan itu adalah amanat. Dan nanti pada hari kiamat, ia akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikan apa yang seharusnya ia tunaikan dalam kepemimpinan tersebut. (Sahih Muslim No.1825)

Meski mekanisme internal PKS dapat menghempang orang-orang yang berambisi untuk suatu jabatan, selain itu juga menutup peluang terjadinya praktek suap menyuap dalam proses pencalegan di tubuh PKS, namun bukan berarti

213 Wawancara Warjio.

mekanisme internal ini tidak memiliki celah karena masih ada subjektivitas dalam penentuan orang yang akan mengikuti Pemilu internal tersebut. Hal ini disebabkan pada penentuan orang-orang yang akan mengikuti Pemilu internal masih dinilai terfokus berdasarkan senioritas. Pilihan terhadap senioritas tersebut boleh jadi merupakan suatu strategi PKS untuk tujuan *electoral*-nya, namun kenyataannya, di antara kader senior yang ditunjuk sebagai Caleg tersebut ada juga yang tidak lolos atau tidak terpilih seperti misalnya Sigit Pramono Asri, SE yang merupakan Caleg PKS untuk DPR-RI. Padahal, Sigit adalah mantan Ketua DPW PKS Sumut dan merupakan anggota DPRD Sumut terpilih untuk periode sebelumnya. Sigit juga tidak berhasil melanggang ke kursi Walikota Medan, meski sudah dua kali dicalonkan oleh PKS.

Sistem pengkaderan dan mekanisme Pemilu internal di PKS juga dinilai tidak menjamin para anggota legislatif PKS akan lebih menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam keberadaannya. Hal ini seperti diutarakan informan berikut ini:

PKS karena memiliki sistem pengkaderan sehingga pada level tertentu baru kader dinyatakan layak diajukan dalam Pemilu internal. Tapi yang jadi persoalan, ketika selama ini mereka berada di dalam tatanan ideal, ketika masuk politik praktis, mereka masuk dalam godaan politik praktis sehingga nilai-nilai yang ada itu dibelakangkan (tidak diprioritaskan).²¹⁴

Dari pernyataan tersebut dapat dianalisis, bahwa meskipun sistem pengkaderan telah berlangsung dengan baik di internal PKS, namun tidak menjamin para kader yang menjadi Caleg kemudian membawakan nilai-nilai Islam di parlemen. Apa yang berlangsung dalam sistem pengkaderan PKS berada dalam nuansa yang ideal dan padat nilai-nilai Islam, maka hal tersebut adalah suatu strategi yang tentunya baik dan sesuai sebagaimana mestinya. Namun *output* yang dihasilkan dari sistem pengkaderan tersebut ternyata belum menunjukkan hasil yang maksimal karena para Calegnya belum merepresentasikan nilai-nilai Islam tersebut. Sebenarnya baik secara individu maupun kepartaian mereka para Caleg tersebut sudah memiliki modal yang kuat, karena kader-kader ini dibina dengan cukup baik. Tetapi ketika mereka masuk politik praktis, yang terjadi justru mereka terlibat arus

214 Wawancara Warjio.

yang secara kekuasaan dan ekonomi memang menjanjikan sehingga nilai-nilai keislaman mereka kebelakangan atau tidak lagi menjadi prioritas.

Hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat PKS mengalami pergeseran jati dirinya dari partai Islam yang bergerak untuk umat, kepada partai yang cenderung pragmatis. Hal ini seperti diutarakan informan berikut:

PKS mengalami degradasi identitas, dulu orang PKS banyak yang menggunakan simbolisasi Islam seperti mengenakan peci yang hal seperti ini menutup kesempatan untuk terlibat lebih banyak (melakukan kesalahan dan dosa). Sekarang ini banyak kader PKS yang melupakan itu sehingga identitas itu dikalahkan nilai-nilai pragmatis. Mereka paham prinsip-prinsip Islam, tetapi godaan itu lebih besar. Dan setelah mereka jadi pejabat seolah akunya (egonya) lebih besar.²¹⁵

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa PKS telah mengalami degradasi identitas diri, kalau dulu dikenal sebagai partai dakwah yang menyampaikan nilai-nilai Islam dalam gerakannya, tetapi kini telah bergeser. Apa yang dimaksud dengan partai dakwah diartikan sebagai partai yang baik secara perilaku, aktivitas, dan gerakannya maupun simbolisasinya membawakan identitas keislaman. Dari sisi aktivitas, partai ini sering melakukan pengobatan gratis, pengajian secara berkala dan aktivitas yang memberi manfaat secara langsung kepada khalayak. Sedangkan dari sisi penampilan mereka membawa simbol-simbol Islam seperti para prianya mengenakan peci serta memelihara jenggot, dan para wanitanya mengenakan jilbab panjang yang menjulur menutupi tubuhnya. Mereka secara tegas menunjukkan corak Islam sebagai agama yang diaplikasikan ke dalam dunia politik secara bersih dan lebih peduli—sesuai jargon pertama kali mereka hadir di pentas politik tanah air. Pada tahun 2009 muncul misalnya, semangat berdakwah melalui jalur partai ini sampai memunculkan *statement* yang menunjukkan strategi partai ini, bahwa PKS adalah partai yang menjual es di musim hujan. Tetapi hal tersebut tetap dilakukan karena mereka tahu kalau ada rezeki maka pembeli akan datang kalau Allah berkehendak. Strategi yang dijalankan dulu adalah strategi *Illahiyyah* yakni melakukan apa yang terbaik, karena kebbaikannya Allah lah yang akan menilai. Tapi sekarang sudah tidak dilakukan lagi, orang PKS kini tidak begitu

215 Wawancara Warjio.

lagi karena nilai keihlasan sudah diukur dengan kekuasaan dan uang sehingga tidak menarik gerbong masyarakat untuk bisa memercayai mereka. Kalau dulu (1999-2004) mereka menggunakan strategi dari bawah ke atas (*down-top*) untuk mendapat dukungan dengan cara bakti sosial, dengan semangat keislaman tapi kini didominasi pola dari atas ke bawah (*top-down*) yang banyak ditentukan dari elit partai dan tidak memberikan ruang besar ke bawah, dan ini lebih didasarkan pada relasi kekuasaan dan uang dan lebih bersifat individu. Kalau dulu berbagai hal bisa dikoordinasikan dengan kepertaian, tetapi sekarang individu bergerak dengan uang dan relasi kekuasaan. Inilah yang disebut dengan degradasi nilai-nilai dakwah itu. Walaupun sebenarnya PKS punya satu level lebih baik dari sisi aplikasi praktek dan strategi keIslaman, tetapi dalam tatanan praktik nilai-nilai dakwah sudah tereduksi pada nilai-nilai duniawi dan tidak memerhatikan tujuan jangka panjang, yakni akhirat. Strategi PKS secara administrasi masih merupakan partai dakwah dan itu bisa dilihat dari AD/ART mereka, tetapi pada prakteknya sudah banyak yang menyimpang. Salah satu contohnya adalah kampanye Pemilu Legislatif PKS di tahun 2009 yang diselenggarakan di Sulawesi, menyajikan hiburan berupa tari-tarian daerah yang mempertontonkan aurat penarinya. Ada juga yang menampilkan grup *band rock* yang tentunya dipertanyakan nilai keislamannya. Karena degradasi ini PKS kini tidak lagi menarik keinginan khalayak untuk memilih mereka, dan kalau kalau masih ada yang menjadi pemilih, mereka pada umumnya para kader solid. Kemenangan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur di Jawa Barat dan di Sumatera Utara merupakan keberhasilan konsolidasi yang dilakukan PKS pasca kasus korupsi yang menimpa Presiden PKS Luthfi Hassan Ishaq. Namun aktivitas kegiatan *underbow* PKS tidak lagi massif seperti dulu. Hal seperti disebabkan beberapa alasan, yang dalam pandangan informan salah satunya adalah karena para elit PKS merasa seolah sudah suatu pencapaian tertentu, yang kemudian mereka merasa tidak perlu susah payah lagi. Karena PKS yang sudah menjadi partai terbuka, mereka mulai merasa nyaman dengan apa yang dilakukan pemerintah karena Menteri Sosial adalah orang PKS, sehingga dianggap representasi PKS. Inilah yang kemudian menjadi penyebab, mengapa PKS tidak menjadi partai gerakan sosial dan cenderung mengubah strateginya dalam Pemilu Legislatif 2014 dan praktis berbeda dengan jati diri PKS sebelumnya.

Perubahan atau degradasi nilai-nilai keislaman dalam tubuh PKS yang berdampak pada strategi yang diterapkan dalam Pemilu Legislatif 2014. Hal ini disebabkan beberapa faktor, di antaranya isu global, seperti pernyataan informan berikut ini:

Kasus Ikhwanul Muslimin (IM) yang terjadi di Mesir, membuat PKS mencoba agar tidak disamakan. PKS mencoba memotong hubungan agar tidak terlalu terlalu diidentikkan dengan IM. Karena yang dilakukan PKS selama ini seperti apa yang dilakukan IM seperti pelayanan publik, kesehatan yang memang diambil PKS dari IM untuk diterapkan di Indonesia. Demikian juga dengan isu terorisme yang kemudian berdampak terhadap partai-partai Islam.²¹⁶

Dari pernyataan informan di atas dapat dianalisis bahwa di samping faktor internal seperti yang diuraikan di atas, bahwa ada pergeseran pemahaman dan strategi para elit PKS yang menyebabkan degradasi nilai-nilai keislaman, ada juga faktor eksternal yang memengaruhi kondisi tersebut. Kasus IM yang terjadi di Mesir, yang mana sebagai pemenang Pemilu dan menduduki wakilnya yakni Mohammad Moursi sebagai presiden, tapi justru IM dikudeta oleh militer dan dinyatakan sebagai gerakan yang dimusuhi oleh negara. Ratusan tokoh dan pemimpinnya dihukum mati, dan presidennya ditangkap serta dipenjara. Kondisi yang terjadi di Mesir tersebut kemudian *diblow-up* sedemikian rupa oleh media-media sekuler yang semakin menyudutkan posisi IM. Sebagai pihak pemenang Pemilu yang dikudeta IM kemudian diposisikan sebagai pesakitan dan sebagai pihak yang bersalah sehingga semakin terpojok. Kondisi ini rupanya dirasakan getarannya oleh PKS yang selama ini diidentikkan dengan IM sehingga kemudian PKS mengambil langkah untuk mengambil jarak dengan IM. Konsekuensi logisnya adalah terjadinya perubahan dari gerakan yang selama ini dengan strategi baru yang relatif tidak sama dengan jati diri PKS sebelumnya. Hal yang sama juga dengan isu terorisme yang secara serampangan telah mencoba mengidentikkan tindak kekerasan dengan agama Islam dan simbol-simbol Islam. Pascaperistiwa meledaknya gedung World Trade Centre (WTC) di New York, dan markas Pertahanan Pentagon Amerika Serikat pada 11 September 2001, Presiden George W. Bush mengumumkan perang dengan terorisme

216 Wawancara Warjio.

dan mengancam negara-negara di dunia agar berpihak dengan Amerika Serikat, “*You’re either with us or against us in the fight against terror*/Kalian bersama kami atau melawan kami dalam memerangi terorisme,” kata Bush dalam pidatonya di depan kongres Amerika Serikat. Sejak saat itu berlangsunglah apa yang disebut dengan gerakan memerangi terorisme di berbagai belahan dunia. Di Indonesia gerakan ini juga dilakukan dengan kerjasama antara Indonesia dengan Australia selaku sekutu Amerika Serikat di kawasan Asia pada tanggal 7 Februari 2002 dengan ditandatanganinya *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia yang diwakili Dirjen Hubungan sosial, Budaya, dan Penerangan, Departemen Luar Negeri RI Abrurrachman Mattalilitti dengan Duta Besar Australia untuk Indonesia Richard Smith di Jakarta.²¹⁷ Selanjutnya dibentuklah Densus 88 sebagai salah satu unit yang secara khusus menangani masalah terorisme di Indonesia. Beberapa tahun kemudian penangkapan disertai dengan penembakmatian orang-orang yang diduga sebagai teroris marak terjadi di berbagai kawasan Nusantara. Seperti halnya dalam kasus Presiden Mesir Mohammad Moursi, dalam kasus ini media massa mainstream yang pada umumnya merupakan media sekuler kemudian mem-*blow-up* masalah ini sedemikian rupa sehingga terkesan sebagai serangan terhadap umat Islam. Dengan kata lain perang terhadap terorisme yang dilakukan secara tidak langsung juga berdampak pada partai-partai Islam yang mengedepankan simbol-simbol Islam. Dalam kondisi seperti ini langkah PKS kemudian menjauhkan simbol-simbol Islam tersebut dan menunjukkan penampilannya yang baru.

Sedangkan menurut informan, para elit PPP sebenarnya hanya memahami nilai-nilai Islam secara tersurat. Prinsip-prinsip komunikasi Islam hanya dipahami sebagai simbolisasi. Pernyataan informan sebagai berikut:

Mereka (PPP) tidak memiliki suatu sistem pengkaderan yang masih kurang, walaupun ada tidak dilakukan dengan lebih sistematis. Ini membuat PPP jadi kehilangan pegangan terhadap nilai-nilai Islam, ditambah lagi tuntutan pragmatis yang lebih menjanjikan karena memang secara sistem dia dibangun dengan yang tidak benar.²¹⁸

217 Silvia Haryani, “Kerjasama Kotra-Terrorisme Indonesia-Australia: Perbandingan Antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono”, *Universita Airlangga, Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Volume 21, Nomor 4:352-360.

Dari pernyataan ini dianalisis bahwa secara praktis pemahaman para elit PPP terhadap nilai-nilai Islam khususnya prinsip-prinsip komunikasi Islam masih bersifat tersurat dan cenderung berorientasi pada simbolisasi. Penyebabnya adalah tidak kurang baik dan tidak dilakukan secara sistematis yang membuat keberadaan PPP sebagai partai Islam justru menjadi “miskin” nilai-nilai Islam dalam praktiknya atau dalam bahasa informan disebut dengan “kehilangan pegangan terhadap nilai-nilai Islam”. Kalau di PKS para elitnya di tataran ideal sebenarnya memahami nilai-nilai Islam tetapi dibandingkan dengan di tataran praktis godaannya lebih kuat, maka di PPP pemahaman cenderung bersifat simbolisasi ditambah lagi godaan dunia praktis yang menyebabkan partai ini “terjebak” pada Islam simbol.

Jika dibandingkan dengan PKS, sistem pengkaderan yang ditunjukkan PPP masih tidak lebih baik dari PKS. PPP malah menunjukkan adanya praktek suap dalam penempatan Calegnya. Hal ini seperti pernyataan informan berikut ini:

Mereka (PPP) tidak memiliki suatu sistem pengkaderan sebaik PKS dan masih terfokus pada senioritas dan siapa yang memiliki uang dalam penetapan Calegnya. Untuk Caleg nomor-nomor atas memberikan sejumlah uang meski diberi istilah lain dan tidak diberinama dengan suap. Hal yang sama juga terjadi dalam penempatan wilayah atau daerah pemilihan (Dapil). PPP masih mengedepankan simbolisasi Islam dengan sasaran para pemilih tradisional. Pola pangkaderan masih kurang dan tidak sistematis ditambah godaan pragmatis.²¹⁹

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa sistem pengkaderan di tubuh PPP tidak lebih baik dari yang dilakukan PKS karena PPP cenderung tidak menunjukkan pola sistematis dalam membentuk generasi penerusnya dengan pola rekrutmen dan pendidikan partai yang memadai. Salah satu indikator adanya pola pengkaderan adalah adanya buku-buku yang menjadi panduan atau rujukan kader-kader partai. Selain itu buku-buku yang diterbitkan internal PPP baik itu sebagai panduan kader ataupun membahas dinamika yang terjadi tubuh partai, sangat minim ditemukan. Hal ini dirasakan oleh informan dan juga penulis ketika mencoba membahas lebih jauh tentang PPP, dan juga bagi siapapun yang akan meneliti tentang

218 Wawancara Warjio.

219 Wawancara Warjio.

PPP kiranya akan menemukan persoalan serupa yakni kurangnya bahan-bahan yang bisa dijadikan referensi penelitian. Ini menunjukkan bahwa sistem pengkaderan dan tradisi keilmuan di tubuh PPP memang masih belum memadai. Akibatnya para tokoh partai sering muncul bukan dilandaskan pada mekanisme yang sistematis melalui gerakan organisasi sayap partai yang berlangsung secara kontiniu, melainkan muncul dari dinamika yang terjadi di partai yang sering berlangsung justru pada saat momen politik tertentu seperti Pemilu atau Pemilukada. Para elit PPP tidak jarang dibentuk oleh suatu sistem yang berada di luar PPP atau dengan kata lain PPP tidak dengan sengaja mencetak sendiri kader-kader partainya, namun mengambilnya dari luar partai. Oleh karenanya pilihan terhadap orang yang ditetapkan sebagai Caleg cenderung dilakukan tidak berdasarkan pertimbangan karir politiknya di partai, tetapi pada faktor senioritas dan faktor uang. Faktor senioritas menentukan penetapan Caleg karena dia lebih memiliki akses di internal partai sedangkan faktor uang adalah orang yang banyak memberikan uang kepada partai atau pihak-pihak yang melakukan penetapan Caleg. Dalam kondisi minimnya pola pengkaderan ditambah dengan godaan pragmatis membuat PPP semakin hanya mengandalkan simbolisasi Islam ketimbang menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam berpartai.

Namun begitu, dalam pandangan informan, PPP masih bisa bertahan karena di Indonesia masih ada pemilih yang memang mementingkan simbolisasi Islam. Hal tersebut seperti pernyataan informan berikut ini: “Bagi pemilih Muslim dari golongan orang-orang tua, simbol-simbol Islam masih penting dan menarik.”²²⁰

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa ceruk pemilih PPP adalah para pemilih tradisional dengan karakteristik umat Muslim yang mementingkan simbol-simbol Islam. Dalam pandangan informan, pemilih ini digolongkan pada kelompok pemilih tua yang sejak masa Orde Baru ketika cuma ada tiga partai politik, mereka menjatuhkan pilihannya kepada PPP karena merepresentasikan aspirasi umat Islam karena keberadaan PPP adalah sebagai fusi dari beberapa partai Islam. Dengan

220 Wawancara Warjio.

strategi yang dilancarkan, maka eksistensi PPP dalam perpolitikan nasional sangat bergantung pada eksistensi para pemilih tradisional ini. Karena dalam akselerasi politiknya PPP lebih menekankan pada simbol-simbol Islam, sehingga cenderung melupakan untuk menggarap ceruk pemilih muda yang memiliki *frame of references* (FOR) dan *field of experiences* (FOE) yang relatif berbeda dengan para pemilih tua. Di era informasi sekarang ini, generasi muda memiliki akses informasi yang lebih luas dan lebih cepat dibandingkan dengan generasi tua sebelumnya. Demikian juga dengan pengalaman yang banyak dihasilkan dari cepatnya dinamika kehidupan sosial di era sekarang ini. Hal-hal tersebut membuat profile pemilih muda menjadi sama sekali berbeda dengan pemilih tua yang mengakibatkan konsekuensi perbedaan pendekatan ketika partai politik hendak menggarapnya untuk tujuan *electoral*. Oleh karenanya jika PPP dalam strategi politiknya hanya menggantungkan diri kepada pemilih tua dengan strategi simbol-simbol Islam, maka partai politik ini hanya akan eksis selama masih ada kelompok pemilih seperti ini di dalam Pemilu. Sejauh ini strategi PPP masih mampu membuat partai ini bertahan di pentas politik nasional dan menjadi partai papan tengah dalam Pemilu Legislatif 2014.

Informan juga menilai bahwa PPP pada hakikatnya bukanlah partai Islam karena tidak mengamalkan ajaran Islam dalam perilakunya. Hal ini seperti dinyatakan oleh informan sebagai berikut ini: “Secara administrasi mereka (PPP) partai Islam tetapi tetapi pada prakteknya tidak Islami. Ada keinginan untuk berIslam dalam berpartai tetapi nilai-nilai pragmatis lebih kuat.”²²¹

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa ada jarak yang jauh antara nilai-nilai Islam yang tertulis di satu sisi dengan aplikasi nilai-nilai Islam tersebut dalam interaksi para elit PPP pada kehidupan politiknya. Nilai-nilai Islam dinilai lebih banyak tertulis dalam bentuk AD/ART serta visi misi partai, namun dalam pratiknya nilai-nilai tersebut tidak menjiwai sikap dan perilaku para elit PPP. Hal ini bukan disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan karena tidak adanya niat untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ajaran Islam tetapi lebih disebabkan godaan pragmatis seperti kekuasaan dan uang. Dari pernyataan ini dilihat perbedaan strategi

221 Wawancara Warjio.

PKS dan PPP dalam pandangan informan yakni PKS adalah partai politik yang memiliki mekanisme kaderisasi yang masif dengan memberikan asupan nilai-nilai Islam untuk menjadi bekal dalam kehidupan politik para kadernya. Namun pada kenyataannya mereka yang menjadi terlalu ideal di masa pengkaderan tidak jarang justru kalah dengan godaan pragmatis ketika mereka tiba di wilayah politik praktis dengan kekuasaan dan uang yang menjadi tujuan utamanya. Sementara PPP yang tidak memiliki mekanisme pengkaderan yang baik ditambah lagi dengan godaan dunia politik praktis membuat partai ini semakin jauh dari pengaplikasian nilai-nilai Islam dalam kehidupan politiknya.

Apa yang dialami PPP, tak terkecuali oleh PKS tidak terlepas dari kondisi global yang tengah berlangsung. Hal ini seperti pernyataan informan berikut ini: “Dalam perspektif internasional PPP juga terpengaruh efek samping isu gerakan Islam seperti terorisme dan gerakan kaum liberal yang didukung media seperti kasus-kasus menolak poligami yang digerakkan secara internasional.”²²²

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa ada situasi internasional yang memengaruhi keberadaan PPP seperti isu gerakan Islam seperti terorisme. Karena isu terorisme meski secara langsung menyerang tindakan orang-orang yang dipahami telah melakukan tindak kekerasan sambil membawa simbol-simbol Islam, namun secara tidak langsung juga menyerang Islam itu sendiri, tak terkecuali partai Islam. Gerakan partai Islam kemudian lebih mudah untuk dicurigai jika ia menonjol, sebaliknya akan tetap nyaman apabila berada di wilayah menengah ke bawah. Atau dengan kata lain isu terorisme ini menjaga keberadaan partai Islam seperti PPP, tak terkecuali PKS untuk tetap berada di papan tengah ke bawah peta perpolitikan nasional. Para penjaga kondisi ini dikenali dengan kaum liberal yang selalu terdengar berseberangan dengan partai Islam. Ungkapan yang kesohor dari seorang tokoh liberal Indonesia seperti Nurcholish Madjid dalam salah satu tema makalahnya pada Januari 1970 yang menyebutkan “*Islam? Yes. Partai Islam? No*” menunjukkan penolakan atas keberadaan partai Islam di Indonesia. Menurut Nurcholish semangat konteks makalahnya itu mempertanyakan, disertai sedikit kekhawatiran beralasan

222 Wawancara Warjio.

atau tidaknya sikap yang menerima agama Islam sambil menolak partai Islam, dengan juga mempertibangkan citra partai Islam saat itu.²²³ Sedangkan masalah penolakan terhadap poligami adalah sesuatu hal yang sangat terasa di kalangan umat Islam, sehingga seringkali pada penceramah tidak membahas isu poligami dalam ceramah-ceramahnya karena akan menuai penolakan khususnya kaum ibu. Contoh yang dialami oleh KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) yang memutuskan berpoligami kemudian disudutkan sedemikian rupa melalui berbagai media, dan dakwahnya melalui media televisi yang sebelumnya banyak diminati pun harus dihentikan. Ajaran poligami yang khas ajaran Islam ini berada dalam posisi berhadapan-hadapan dengan pemahaman umum tentang hubungan antara pria dan wanita dewasa dalam ikatan perkawinan. Oleh karenanya ia lebih gampang memprovokasi khususnya para wanita terhadap para elit politik yang melakukan praktek poligami, meskipun dilakukan sesuai syariat yang diajarkan dalam Islam. Dalam pandangan informan, meluasnya isu penolakan terhadap praktek poligami adalah isu yang digerakkan secara internasional dengan kaum liberal sebagai pemain lapangannya. Indikasi ke arah ini dengan sangat mudah dilihat dari akselerasi media massa mainstream dan pernyataan-pernyataan kaum liberal Indonesia yang akan menyudutkan praktek poligami elit partai Islam, sebaliknya tidak memberikan respons yang sama ketika masyarakat umum yang melakukan praktek poligami.

Pandangan lain disampaikan informan dari UIN Sumut. Dalam konteks tujuan *electoral*, penerapan prinsip-prinsip komunikasi Islam dalam strategi Pemilu Legislatif 2014 harus dilakukan integral antara perilaku, perkataan, simbol, dan orang-orang atau komunikator politik yang terlibat di dalamnya. Hal seperti ini tidak bisa dilakukan secara parsial atau setengah-setengah, harus dilakukan pada perilaku yang diinspirasi oleh pemahaman yang benar, ucapan-ucapan, tindakan, urusan yang didorong oleh partai dari hasil kebijakannya baik formal maupun tidak formal. Kesadaran akan perjuangan Islam itu bisa dilakukan bersama elemen umat Islam termasuk partai politik Islam, tapi ini antar partai Islam itu sepertinya tak ada terjadi.

223 Pernyataan Nurcholish Madjid tersebut seperti diutarakan dalam surat korespondensinya kepada Mr Mohammad Roem pada 15 September 1983. Lihat lebih jauh lihat Laksmi Pamuntjak, *et.al.*, (ed), *Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid - Mohammad Roem* (Jakarta: Djambatan, cet.kedua 2000), h.110.

Karena partai politik Islam selalu berpikir simplisit atau sederhana untuk mengejar perolehan suara di satu Pemilu tapi tidak melihat efek lebih jauh ke depan. Strategi yang ideal bagi partai politik Islam dalam pandangan informan adalah kalau suatu partai politik menyebut diri sebagai partai Islam, maka harus sepenuhnya Islam, dan yakinilah ajaran Islam akan membawa partai bisa menjadi besar. Dicontohkan seperti Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir yang terus menerus ditekan malah pernah dibubarkan, tapi mereka konsisten dengan perjuangan keislamannya itu, dan dalam Pemilu terakhir ternyata mereka unggul.

Sedangkan strategi PKS dalam pandangan informan adalah dengan mengonsentrasikan akselerasi politik di tingkat perkotaan dengan kekuatan kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang. Berbeda dengan PPP, partai ini tidak menyandarkan diri pada kekuatan simbol-simbol Islam seperti pernyataan informan berikut ini:

Basis massanya banyak di perkotaan. Pengkaderannya orang-orang terdidik, maka simbol-simbol itu tidak menjadi sesuatu yang besar artinya. Tapi ketaatan mereka dilihat dari ketika shalat di awal waktu, berinfak, berkata yang santun, memulainya dengan bahasa agama seperti *bismillah*, itu jauh lebih penting. Kemudian bersifat langsung menolong turun tangan, ringan tangan orang kesulitan.²²⁴

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa PKS memiliki basis massa di perkotaan yang merupakan kalangan terdidik seperti para mahasiswa. Masyarakat perkotaan memang merupakan basis masyarakat dengan populasi yang lebih banyak dibandingkan di daerah pedesaan. Selain itu jumlah kalangan terdidik biasa berkumpul di daerah perkotaan dibanding pedesaan karena institusi pendidikan tinggi lebih banyak berada di daerah perkotaan. Antara basis massa PKS dengan sistem pengkaderan yang melibatkan orang-orang terdidik memiliki korelasi yang kuat sehingga memunculkan pemahaman yang lebih baik tentang Islam maupun tentang politik. Hal seperti ini menimbulkan kondisi tidak lagi terlalu penting simbol-simbol Islam sebagai penarik perhatian apalagi disajikan dengan *minus* substansi. Tetapi strategi yang mencirikan nilai-nilai keislaman baru terlihat dari perilaku individu maupun perilaku kolektif para elit PKS dalam kehidupan sehari-

224 Wawancara Hasyimsyah Nasution.

hari. Karena ketaatan terhadap perintah agama dilihat dari cara mereka menunaikan shalat di awal waktu, rajin berinfaq, berkata santun kepada orang lain, dan membasahi bibirnya dengan bahasa agama seperti *bismillah* dan salam dan seterusnya. Satu hal yang tak kalah pentingnya adalah menunjukkan sikap ringan tangan menolong orang lain. Misalnya ketika melihat orang yang sedang butuh bantuan langsung memberikan pertolongan baik diminta maupun tidak diminta. Hal-hal seperti ini adalah bagian dari strategi yang electoral yang efektif karena segala atribusi yang ditampilkan akan mengerucutkan PKS sebagai partai yang pantas didukung dan dipilih. Namun apa yang terjadi masih jauh dari ideal, karena perilaku yang ditunjukkan para elit PKS tidak selalu sesuai dengan strategi ideal seperti diutarakan di atas.

Informan juga memandang bahwa penampilan PKS pada Pemilu Legislatif 2014 ini terkait dengan kebijakan partai untuk membuka dirinya (inklusif) di tahun 2010 lalu. Perubahan tersebut dijalankan dalam strategi politik dalam Pemilu Legislatif kali dengan tujuan meraih suara dari pemilih dengan segmentasi yang lebih luas. Hal tersebut seperti pernyataan informan berikut ini:

Kenapa PKS membuka diri setelah tahun 2010, pertama, basis yang melahirkan PKS dulu cenderung beragama sangat “salafi ketat” kalau cara beragama seperti ini dibawa ke persoalan politik, sangat kaku jadinya dan partai ini jadi tidak berkembang. Kedua, dia harus menggarap orang lain, karena orang lain ada yang simpati pada dia terutama karena PKS itu di Bali, NTT, Taput sangat sulit padahal memungkinkan untuk dapat suara. Jadi membuka diri supaya lebih besar.²²⁵

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa strategi PKS di Pemilu Legislatif 2014 dipengaruhi kebijakan sebagai partai terbuka partai ini. Alasan yang dikemukakan adalah karena dulu PKS dinilai sebagai pihak yang menjalankan agama secara ketat yang diistilahkan dengan “salafi ketat” sehingga dinilai tidak cocok dengan kondisi perpolitikan di tanah air dan menyulitkan bagi PKS untuk bisa berkembang. Ada anggapan bahwa untuk menjadi partai besar maka PKS harus membuka dirinya agar pihak-pihak yang berasal dari non muslim yang merasa simpati dengan partai ini dapat ikut memilih. Daerah-daerah minoritas pemeluk agama Islam seperti di Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), atau di Tapanuli Utara (Taput)

225 Wawancara Hasyimsyah Nasution.

bisa mendapatkan suara secara lebih maksimal. Namun jika merujuk hasil Pemilu keberadaan PKS justru bertahan bahkan sempat menjadi fenomena di Pemilu 2009 sebagai partai Islam yang memiliki warna sendiri dengan gerakan kader yang massif ke kantong-kantong pemilih. Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa strategi PKS untuk menjadi partai yang inklusif tidak terlepas dari aturan main yang mengharuskan setiap partai politik aliran seperti partai politik Islam untuk membuka diri. Namun secara substansial PKS sebenarnya tidak mengalami perubahan yang berarti dari segi ideologi partai, namun dari pola gerakan dan posisi para elitnya yang dulu di luar pemerintahan sekarang ini banyak yang sudah berada di pemerintahan. Namun informan juga menggarisbawahi bahwa segmentasi politik yang jelas dalam kontestasi Pemilu adalah hal yang penting. Partai politik Islam tidak harus menggarap semua kalangan.

Dalam hal strategi komunikasi dalam Pemilu Legislatif 2014 untuk tujuan *electoral*-nya, PPP tidak beda dengan implementasi pemahaman tentang nilai-nilai Islamnya. Mereka cenderung mengedepankan symbol-simbol Islam untuk menarik minat pemilih dari umat Islam. Namun cara seperti ini dipandang tidak lagi efektif dalam hal memengaruhi pemilih untuk menjatuhkan pilihannya kepada PPP. Hal ini dinyatakan informan sebagai berikut.

Memang pada masyarakat tertentu, sorban, peci dan kain sarung masih memengaruhi. Tapi khusus di Sumut sangat-sangat kecil, tidak menentukan lagi (penggunaan simbol Islam seperti peci dll). Apalagi orang yang memakai ini orang tahu sebelumnya tidak berpenampilan seperti itu—peci, misalnya merupakan hal yang melekat pada dirinya.²²⁶

Dari pernyataan di atas dapat dianalisis bahwa strategi simbol yang dilancarkan PPP dalam Pemilu Legislatif 2014 dinilai tidak efektif karena pada masyarakat tertentu simbol-simbol tersebut tidak lagi memengaruhi, meskipun dinilai masih punya daya tarik bagi masyarakat yang lain. Namun di Sumatera Utara strategi seperti ini dianggap tidak merupakan faktor penentu bagi pemilih umat Islam untuk menjatuhkan pilihannya dalam Pemilu Legislatif 2014. Nyatanya memang pada Pemilu Legislatif 2014 di DPRD Sumatera Utara, PPP hanya memperoleh 4 kursi, padahal di Pemilu sebelumnya tahun 2009, PPP memperoleh 7 kursi atau dapat

226 Wawancara Hasyimsyah Nasution

membentuk satu fraksi sendiri di parlemen. Semakin tidak menimbulkan efek yang diinginkan apabila para elit partai yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak mengenakan simbol-simbol agama Islam, tetapi hanya dalam masa kampanye dia mengenakan simbol-simbol tersebut untuk menarik perhatian pemilih umat Islam. Meskipun di dalam Islam mengajak orang untuk berbuat kebaikan dimulai dari diri, tetapi tidak berarti ajakan tersebut hanya berupa dari simbol yang melekat pada diri seperti peci, sorban, pakaian, tapi pada perilaku. Dalam masyarakat Sumatera Utara yang sudah mulai merata tingkat pendidikannya, dengan media menyumbangkan informasi untuk membantu orang bisa berpikir lebih rasional, maka yang dulu dianggap sebagai simbol Islam, akan dianggap hanya sebagai pensakralan.

Apalagi kemudian ketika penggunaan apa yang dianggap sebagai simbol-simbol Islam tersebut hanya bersifat sementara atau ketika saat kampanye saja, sehingga cenderung menimbulkan kesan mengelabui khalayak kampanye. Hal tersebut seperti pernyataan informan berikut:

Saya ketemu beberapa kader PPP hanya waktu kampanye saja pake peci. Di hari-hari yang lain orang juga melihatnya tidak pake peci. Apalagi kalau mengenakan sorban, pastilah ini jadi bumerang. PPP masih menganggap masyarakat tidak mengalami perubahan, sehingga penerapan progamnya, upaya dia menerapkan masyarakat madani, masyarakat yang berbudaya yang intinya berilmu dan juga mengamalkan agama.²²⁷

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa simbol-simbol Islam yang dilekatkan kepada PPP dan para elitnya hanya bersifat sementara atau hanya digunakan pada saat masa kampanye saja. Artinya simbol-simbol itu sendiri bukanlah hal yang memang menjadi jati diri semua elit PPP, baik di masa kampanye maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini para elit yang mengenakan simbol Islam seperti peci di arena kampanye dan tidak mengenakannya di kehidupan sehari-hari, telah menunjukkan wajah politik yang sebenarnya yakni wajah di atas panggung dan wajah aslinya. Hal seperti ini dijelaskan dalam Teori Dramaturgi Ervin Goffman²²⁸ yang mengenalkan dua konsep penting, yaitu panggung depan (*front stage*) dan panggung belakang (*back stage*). Kalau panggung depan adalah ruang publik atau tempat pertemuan yang digunakan seseorang atau sekelompok orang

227 Wawancara Hasyimsyah Nasution.

untuk mempresentasikan diri dan memberikan kesan kepada orang lain melalui pengelolaan kesan (*management of impression*). Sementara panggung belakang adalah ruang privat yang tidak diketahui orang lain, tempat seseorang atau sekelompok orang leluasa menampilkan wajah aslinya. Panggung depan ditampilkan oleh individu dengan cara yang teratur yang bertujuan mendefinisikan situasi bagi khalayak yang menyaksikan penampilan itu. Apa yang dimaksud Goffman adalah dalam konteks pertemuan atau interaksi tatap muka dan pada struktur sosial. Interaksi tatap muka yang dimaksud adalah adanya bentuk komunikasi yang mempertemukan secara langsung pihak komunikator dan komunikan. Analisanya tentang *principles* dan *techniques* yang membentuk interaksi sosial sehari-hari yang digunakan untuk mengekspresikan diri dan untuk memahami perilaku orang lain. Ketika seseorang berada di depan orang lain mereka mempunyai banyak motif untuk mencoba mengontrol kesan yang diciptakan. Tidak ada yang esensial mengenai diri sebagai *performed character*/karakter yang ditampilkan karena hal tersebut adalah suatu produk interaksi sosial dan bukan *a course of it*/akibatnya. Dan apa yang ditunjukkan oleh para elit PPP di atas panggung kampanye merupakan penampilan *front stage* yang tidak hal esensial atas karakter para elit tersebut, atau dengan kata lain penampilannya tidak mencerminkan dirinya yang sebenarnya, tetapi dirinya di belakang panggung (*back stage*)-lah yang sebenarnya.

Apa yang dilakukan oleh PPP dengan strategi simbol-simbolnya itu adalah akibat tidak efektifnya partai ini berjalan. Akibatnya tidak ada perubahan yang dilakukan menyahut perubahan yang berlangsung di tengah masyarakat atau lebih tepatnya perubahan di tengah umat Islam. Hal tersebut seperti diutarakan informan sebagai berikut:

PPP terlena, terayun oleh rasa percaya dirinya yang tinggi dengan simbol-simbolnya. PPP menyebut rumah besar umat Islam, tapi tokoh-tokoh politik, komunikator politik yang ada di masyarakat tidak diikutkan dalam membicarakan atau mengambil simpati mereka (umat Islam). Ini tidak benar dari segi agama, dari segi strategi sesaat dapat satu, tapi melepas lebih besar (peluang) partai ke depan.²²⁹

228 Lihat lebih jauh Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*, (Edinburgh: University of Edinburgh, Social Sciences Research Centre, 1956), h.8 & 245.

229 Wawancara Hasyimsyah Nasution.

Dari pernyataan ini dapat dianalisis bahwa elit politik PPP khususnya di Sumatera Utara tidak menyadari bahwa telah terjadi perubahan dalam masyarakat, termasuk dalam pandangannya terhadap simbolisasi kampanye. Informan menyebutkan bahwa dalam setiap 10 tahun Indonesia mengalami perubahan besar dalam sikap kehidupan beragama. Jadi kalau kalau masih menjadikan simbol-simbol formal sebagai daya tarik, maka langkah seperti itu tidak benar. Apalagi PPP sebagai partai yang sudah tua yang sudah delapan kali ikut Pemilu Legislatif yang nyatanya perolehan suaranya malah terus menurun yang disebabkan oleh strategi yang diterapkannya hanya berpikir sesaat tidak panjang. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam strategi kampanye, PPP melakukan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain sehingga banyak melakukan kesalahan yang merugikan partai politik itu sendiri. Dengan mengedepankan strategi simbol-simbol Islam, itu artinya PPP sedang membawa kepada politik yang cenderung pragmatis. Padahal politik Islam itu tidak bisa dibawa pragmatis, tidak bisa hanya dengan berpikir untuk mendapatkan uang yang banyak dan berharap yang lain nanti akan selesai belakangan. Slogan PPP sebagai rumah besar umat Islam tidak diiringi tindakan untuk mengambil simpati para kontituennya yang merupakan umat Islam. Simpati dari Islam akan didapat PPP apabila partai politik ini melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umat Islam dan memperjuangkan berbagai aspirasi umat Islam. Namun karena kepentingan politik pragmatis PPP lebih kental, maka aspirasi umat Islam banyak yang diabaikan bahkan tak terdeteksi secara presisi. Indikator sikap politik pragmatis ini terlihat ketika interaksi dengan konstituen lebih cenderung dilakukan hanya pada saat kampanye saja.

Gambar: 21 Strategi Kampanye PPP

H. Analisis Isi Berita PKS Dan PPP Di Harian *Waspada* Dan *Analisa*

1. Kecenderungan Pemberitaan *Waspada* Dan *Analisa*

Penelitian ini melakukan analisis isi kuantitatif deskriptif terhadap pemberitaan tentang kampanye politik PKS dan PPP yang disiarkan Harian *Waspada* dan Harian *Analisa* pada periode 1 Desember 2013 sampai 6 April 2014.

Tabel 7:

Pemberitaan PKS dan PPP Di Harian *Waspada* Dan *Analisa*

Jenis	PKS						PPP					
	Waspada		Analisa		Total		Waspada		Analisa		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Berita	25	34	17	71	42	43	14	74	6	67	20	71

Feature	8	11	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-
Opini	2	3	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
Foto	38	51	7	29	45	46	5	26	3	33	8	29
TOTAL	73	100	24	100	97	100	19	100	9	100	28	100

Dari pemberitaan Harian *Waspada* dan *Analisa* selama periode yang ditetapkan, peneliti menemukan bahwa Harian *Waspada* menurunkan sebanyak 73 laporan untuk PKS dan sebanyak 19 laporan untuk PPP. Laporan untuk PKS terdiri dari jenis berita 25 kali (34%), *feature* 8 kali (11%), opini 2 kali (3%) dan foto sebanyak 38 kali (51%). Laporan untuk PPP terdiri dari jenis berita 14 kali (74%), dan foto sebanyak 5 kali (26%). Sedangkan Harian *Analisa* menurunkan 24 laporan tentang PKS dan sebanyak 9 laporan untuk PPP. Laporan untuk PKS terdiri dari jenis berita 17 kali (71%), dan foto 7 kali (29%), sedangkan untuk PPP berita 6 kali (67%), dan foto 3 kali (33%). Dari data ini dapat dilihat bahwa Harian *Waspada* laporan lebih banyak menurunkan laporan terhadap kedua partai politik Islam ini dibandingkan dengan laporan yang diturunkan oleh Harian *Analisa*. Sedangkan laporan untuk PKS baik di Harian *Waspada* maupun di Harian *Analisa* memiliki frekuensi yang lebih banyak dibandingkan dengan laporan PPP. Jumlah laporan jenis berita yang diturunkan oleh kedua surat kabar ini menunjukkan adanya intensitas interaksi antara PKS dan PPP dengan wartawan kedua surat kabar. Karena berita baik dalam bentuk wawancara (*talking news*) maupun laporan berita peristiwa merupakan hasil interaksi di antara pihak partai politik dengan sebagai objek berita dan pihak surat kabar sebagai subjek berita yang merancang dan merencanakan pemuatan berita. Frekuensi yang ditunjukkan dalam pemuatan berita PKS dan PPP di kedua surat kabar ini menunjukkan lebih tingginya intensitas interaksi yang dilakukan PKS pada masa sebelum kampanye maupun pada saat kampanye Pemilu Legislatif 2014 digelar. Selanjutnya frekuensi diturunkannya laporan dalam bentuk *feature* menunjukkan adanya perhatian yang lebih khusus terhadap isu partai politik. Melihat laporan dalam bentuk *feature* yang diturunkan Harian *Waspada* yang lebih banyak terhadap isu PKS (8 kali/11%) menunjukkan bahwa surat kabar ini menurunkan berita PKS dengan perhatian khusus dibanding dengan PPP, dan juga dibanding Harian *Analisa* terhadap isu partai politik Islam PKS dan PPP. Sebab sajian tulisan

dalam bentuk *feature* lebih lentur dan lebih mendalam, tidak terikat secara kaku pada aturan 5 W + 1 H dan dapat menggunakan gaya bahasa yang lebih memikat sehingga lebih memungkinkan untuk sampai pada efek konatif yakni efek yang menggerakkan khalayak untuk terlibat secara perasaan dan melakukan *action* tertentu. Karena *feature* adalah gaya penulisan yang dapat dikembangkan lebih jauh menjadi *interpretative news* yang sifatnya lebih analisis. Karena dalam dunia yang dikuasai oleh berbagai informasi di internet dengan berbagai *breaking news*, maka kekuatan surat kabar terletak pada analisis dan interpretasinya terhadap berbagai persoalan.²³⁰ Dengan demikian gaya penulisan *feature* dapat menjadi penyalur pendapat masyarakat yang baik, karena bila sebuah persoalan ditulis dengan gaya *hardnews*...²³¹ Dari hasil data lebih banyaknya Harian *Waspada* menyajikan laporan jenis *feature* untuk PKS menunjukkan bahwa harian ini selain sebagai surat kabar “politik-Islam”, juga menunjukkan bahwa interaksi yang intens terjadi antara Harian *Waspada* dengan PKS dibandingkan dengan PPP atau dibandingkan antara Harian *Analisa* dengan PKS atau PPP. Interaksi ini menunjukkan akselerasi politik yang dilakukan PKS dalam bentuk komunikasi massa-nya²³² lebih baik jika dibandingkan dengan PPP dalam kampanye politiknya di Pemilu Legislatif 2014. Hal ini terkait dengan pemahaman, perencanaan dan persiapan untuk meluncurkan komunikasi politik melalui media massa.

230 Kristanto Hartadi, “Analisis Framing Studi Kasus Kompas Dan Media Indonesia Dalam Liputan Keerusuhan Di Temanggung 8 Februari 2011”, (Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, 2012), h.47-48.

231 Nurzain, Umar Nur, *Penulisan Feature* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), dalam Kristanto, h.47.

232 Komunikasi massa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah komunikasi bermedia yaitu komunikasi dengan menggunakan media massa sebagai alat untuk menjangkau massa, yakni khalayak dengan sifat-sifat heterogen, sporadis, dan anonim. Komunikasi massa merupakan suatu keniscayaan dalam kampanye partai politik dalam Pemilu seperti Pemilu Legislatif 2014. Ini karena kampanye tatap muka memiliki keterbatasan ruang gerak dan jumlah khalayak yang bisa dijangkau. Oleh karenanya komunikasi partai politik untuk tujuan electoral-nya harus menjadi komunikasi massa sebagai bagian yang tak terpisahkan dari strategi komunikasi yang diterapkan.

2. Penempatan Halaman Pemberitaan PKS Dan PPP di Harian *Waspada* Dan *Analisa*

Tabel 8:
Penempatan Halaman Pemberitaan PKS Dan PPP
Di Harian *Waspada* Dan *Analisa*

Jenis	PKS						PPP					
	Waspada		Analisa		Total		Waspada		Analisa		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Pertama	13	18	2	8	15	15	1	5	-	-	5	16
Dalam	60	82	22	92	82	85	18	95	9	100	27	84
	73	100	24	100	97	100	19	100	9	100	32	100

Data dari tabel di atas menunjukkan bahwa pada umumnya pemberitaan yang diturunkan Harian *Waspada* dan *Analisa* ditempatkan di halaman dalam, baik laporan jenis berita, opini, maupun *feature*. Harian *Waspada* menempatkan pemberitaan mengenai PKS di halaman pertama sebanyak 13 kali (18%), dan sebanyak 60 kali (82%) di halaman dalam, sedangkan laporan tentang PPP dimuat di halaman pertama Harian *Waspada* sebanyak 1 kali (5%), dan di halaman dalam sebanyak 18 kali (95%). Sementara Harian *Analisa* menempatkan laporan PKS di halaman pertama sebanyak 2 kali (8%), dan sebanyak 22 kali (92%) di halaman dalam, sedangkan laporan PPP tidak ada yang ditempatkan di halaman pertama dan menempatkan 9 kali di halaman dalam. Jika diukur secara kuantitas Harian *Waspada* lebih banyak menurunkan laporan di halaman pertama daripada Harian *Analisa*, baik untuk laporan tentang PKS maupun PPP. Begitu juga secara kualitas penempatan halaman, Harian *Waspada* lebih banyak menempatkan laporan PKS di halaman pertama dan laporan PPP dibanding dengan Harian *Analisa* untuk PKS, dan untuk PPP tidak ada laporan di halaman pertama. Namun baik Harian *Waspada* maupun Harian *Analisa* memiliki pola yang sama yakni sama-sama memiliki kekerapan lebih banyak menempatkan laporan PKS dan PPP di halaman dalam ketimbang di halaman pertama, dan sama-sama malaporkan lebih banyak untuk PKS dibandingkan dengan PPP, baik di halaman pertama maupun di halaman dalam. Halaman pertama sendiri adalah etalase bagi sebuah surat kabar, yang merupakan alokasi tempat bagi berita yang dinilai penting dan memiliki nilai berita yang lebih baik dibandingkan laporan di halaman dalam. Artinya secara kuantitas maupun secara kualitas, surat kabar

membingkai laporan untuk PKS secara lebih baik dan lebih penting dibandingkan dengan laporan tentang PPP.

3. Tampilan Warna/*Black White* (B/W) Pemberitaan PKS Dan PPP Di Harian *Waspada* Dan *Analisa*

Tabel 9:

Pemuatan Halaman Warna dan *Black/White* (B/W)
Pemberitaan PKS dan PPP Di Harian *Waspada* Dan *Analisa*

Tampilan	PKS						PPP					
	Waspada		Analisa		Total		Waspada		Analisa		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Warna	41	56	10	42	83	65	5	26	6	67	11	39
B/W	32	44	14	58	45	35	14	74	3	33	17	61
	73	100	24	100	128	100	19	100	9	100	28	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perbandingan pemberitaan tentang PKS yang diturunkan Harian *Waspada* di halaman warna sebanyak 41 kali (56%), dan 32 kali (44%) untuk B/W. Sedangkan untuk laporan tentang PPP dimuat 5 kali warna (26%), dan 14 kali B/W (74%). Sementara Harian *Analisa* menurunkan laporan tentang PKS di halaman warna sebanyak 10 kali (42%), dan di halaman B/W 14 kali (58%), sedangkan tentang PPP diturunkan 6 kali di halaman warna (67%) dan di halaman B/W sebanyak 3 kali (33%). Dalam konteks produk jurnalistik khususnya surat kabar, maka faktor tampilan atau *layout* yang mana peran warna menjadi sangat penting dapat memengaruhi ketertarikan dan kepuasan pembaca. Tampilan laporan dalam bentuk warna bisa lebih *eyes catching* ketimbang tampilan laporan dalam bentuk B/W. Margareth Van Hakereen dalam jurnal berjudul *Navigating The News Site: The Impact Of Page Design On Story Preference* mengatakan bahwa desain *layout* sebuah surat kabar merupakan kunci terhadap tingkat keterbacaan untuk pembaca.²³³ Wirya mengatakan bahwa *layout* atau tata letak adalah meramu semua

²³³ Margareth Van Heekeren, *Navigating The News Site: The Impact Of Page Design On Story Preference* (University Bahturst: School Of Communications Charles Sturt, 2005), dalam Paulina Brillianti, Dan Yohanes Widodo, *Jurnal Fisipol Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*, 2012, h.3

unsur grafis, meliputi warna, bentuk, merek, ilustrasi, tipografi menjadi suatu kesatuan baru yang disusun dan ditempatkan pada halaman kemasan secara utuh dan terpadu. Tujuan utama *layout* atau tata letak adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang disajikan.²³⁴ Oleh karenanya melihat kualitas laporan PKS yang lebih banyak ditempatkan di halaman warna baik di Harian *Waspada* maupun *Analisa*, seperti halnya dengan penempatan halaman, maka kedua surat kabar ini telah menurunkan dengan lebih baik laporan tentang PKS ketimbang PPP. Selain itu secara kuantitas, Harian *Waspada* juga menurunkan lebih banyak laporan baik PKS maupun PPP di halaman warna dibandingkan dengan laporan yang diturunkan PPP. Ini menunjukkan konsistensi Harian *Waspada* dalam identitasnya sebagai surat kabar “politik-Islam”.

4. Sumber Laporan PKS dan PPP di Harian *Waspada* dan *Analisa*

Tabel 10:

Sumber Pemberitaan Non Foto
PKS Dan PPP Di Harian *Waspada* Dan *Analisa*

Sumber Laporan	PKS						PPP					
	Waspada		Analisa		Total		Waspada		Analisa		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
<i>Talking News</i>	15	43	5	28	20	41	10	71	3	50	13	65
Peristiwa	18	51	13	72	30	59	4	29	3	50	7	35
Opini	2	6	-	-			-	-	-	-	-	-
	35	100	18	100	51	100	14	100	6	100	20	100

Sumber laporan dalam tabel di atas adalah sumber yang menjadi asal dari laporan yang diturunkan, yang dibedakan bersumber dari wawancara (*talking news*) atau dari sebuah peristiwa yang terjadi. Berdasarkan pembagian tersebut, Harian

²³⁴ Iwan Wirya, *Kemasan yang Menjual, Menang Bersaing Melalui Kemasan* (Jakarta: PT. Gramedia, 1999), dalam Paulina Brillianti, Dan Yohanes Widodo, *Jurnal Fisipol Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*, 2012, h.3.

Waspada menurunkan laporan *talking news* tentang PKS sebanyak 15 laporan (45%), dan peristiwa sebanyak 18 laporan (55%), ditambah dua merupakan tulisan opini. Sedangkan laporan *talking news* tentang PPP diturunkan 10 laporan (71%), dan laporan peristiwa 4 sebanyak 4 (29%). Sementara *Harian Analisa* menurunkan laporan tentang *talking news* PKS sebanyak 5 laporan (28%), dan laporan yang bersumber dari peristiwa sebanyak 13 (72%), sedangkan untuk *talking news* dan sumber laporan dari peristiwa PPP yang diturunkan masing-masing 3 (50%). Perbedaan mendasar antara *talking news* dengan laporan berita yang bersumber dari peristiwa adalah pada perencanaannya. Pada umumnya *talking news* merupakan laporan *follow-up* dari laporan terdahulu atau merupakan pernyataan yang dikeluarkan seorang sumber berita yang mengomentari suatu peristiwa. Jika laporan tersebut merupakan *follow-up*, maka ia adalah inisiatif dari redaksi, sedangkan apabila bukan merupakan *follow-up* biasanya merupakan inisiatif narasumber yang mengundang wartawan dan dinilai oleh redaksi memiliki *news value*. Sedangkan berita peristiwa biasanya dipilih untuk diliput dan dipublikasi berdasarkan *news value* yang terkandung di dalamnya. Ashadi Siregar menyebut *talking news* biasanya mengandung kecenderungan subyektif narasumber, sehingga mengabaikan fakta empiris secara obyektif. Format *talking news* ini membawa implikasi ke dalam sikap jurnalis yang submisif terhadap narasumber.²³⁵ Dari penyajian laporan yang bersumber dari *talking news* berbanding sumber peristiwa, *Harian Waspada* lebih banyak menyajikan laporan peristiwa dari lampiran *talking news* (18 berbanding 15) untuk PKS, tetapi menyajikan lebih banyak *talking news* dari laporan yang bersumber dari peristiwa (10 berbanding 4) untuk PPP. Pada umumnya laporan yang bersumber dari *talking news* PPP di *Harian Waspada* bukan merupakan laporan *follow-up* sehingga merupakan inisiatif dari PPP. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Pemilu Legislatif 2014, PPP minim kegiatan yang memiliki *news value* sehingga melakukan aktivitas komunikasi massa dalam Pemilu Legislatif 2014 melalui *talking news*. Hal ini segaris dengan laporan yang diturunkan *Harian Analisa* yang sama-

235 Ashadi Siregar, "Democratic Governance dan Hak Azasi Manusia: Makna Kebebasan Pers dalam Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Sosial Politik Yogyakarta*, Vol.14, No.3, Maret 2011, h.329.

sama berjumlah tiga laporan untuk laporan yang bersumber dari *talking news* maupun sumber peristiwa.

5. Tema Berita PKS Dan PPP Di Harian *Waspada* Dan *Analisa*

Tabel 11:

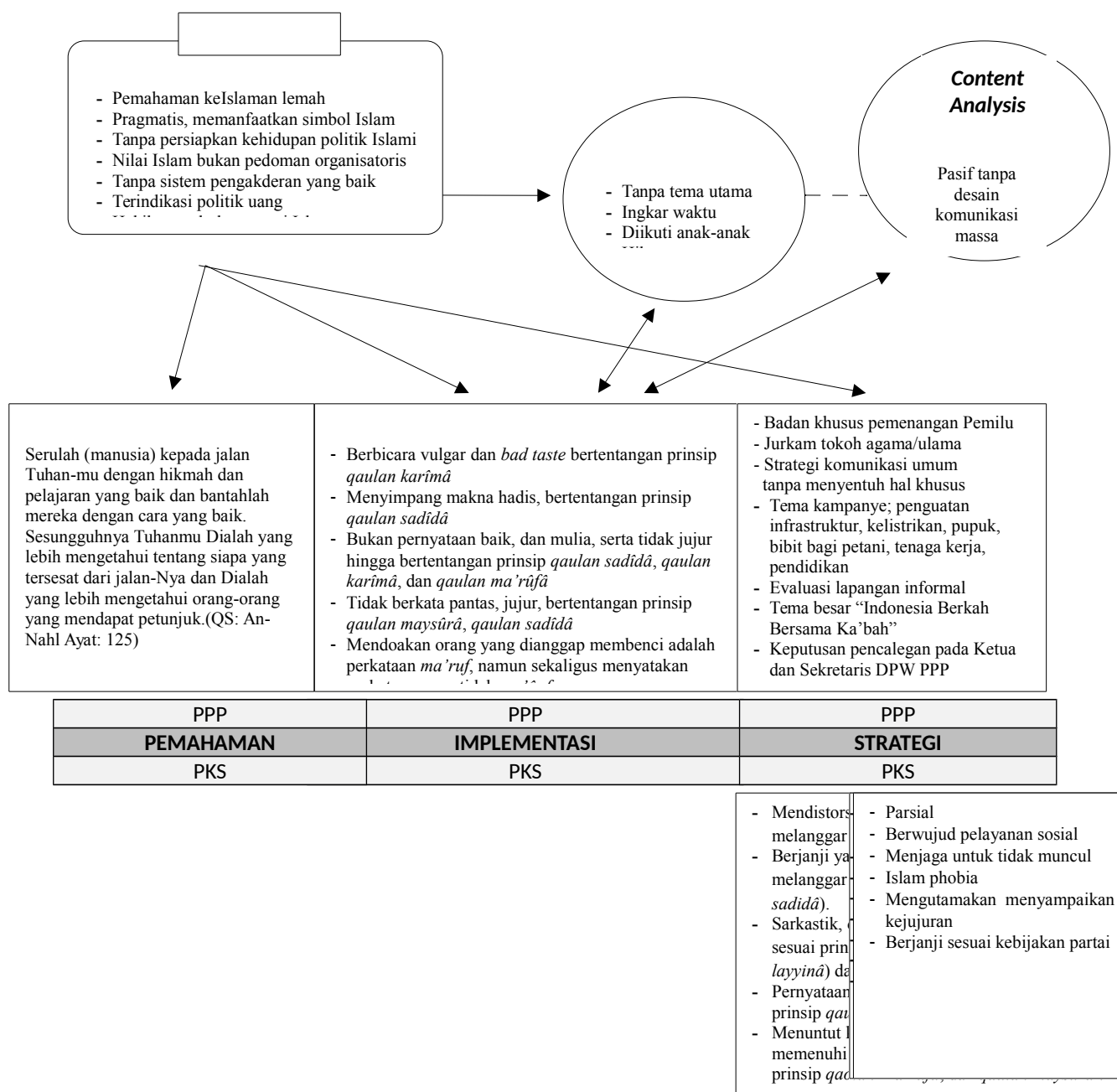
Tema Pemberitaan Non Foto PKS dan PPP Di Harian *Waspada* Dan *Analisa*

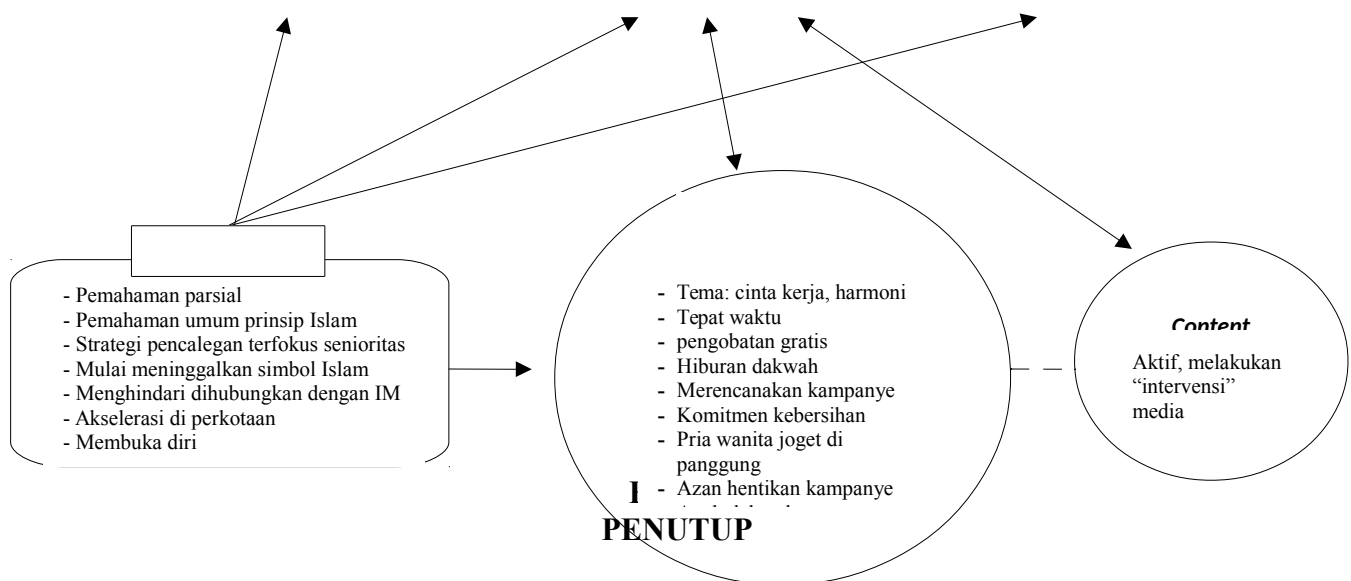
Tema	PKS						PPP					
	Waspada		Analisa		Total		Waspada		Analisa		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Kritik	1	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Analisis	1	3	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
Pernyataan	12	34	5	29	17	33	11	79	3	50	14	70
Kegiatan	21	60	12	71	33	64	3	21	3	50	6	30
	35	100	17	100	52	100	14	100	6	100	20	100

Dari segi tema laporan berita tentang PKS dan PPP yang dimuat oleh Harian *Waspada* dan *Analisa* dilihat dari empat tema yakni tema mengkritik partai politik Islam, analisis terhadap partai politik Islam, pernyataan dari partai politik Islam, dan kegiatan partai politik Islam yang dilakukan selama tahapan Pemilu Legislatif 2014. Laporan yang bernada kritik ataupun analisis selama durasi penelitian diturunkan masing-masing satu kali di harian *Waspada* dalam bentuk tulisan opini, namun tidak ada yang dimuat Harian *Analisa*.

Selanjutnya, baik Harian *Waspada* maupun *Analisa* sama-sama memberikan porsi yang lebih banyak baik secara kuantitas maupun secara kualitas untuk PKS daripada untuk PPP. Hal ini dipengaruhi oleh akselerasi media massa yang dilakukan PKS dalam komunikasi massa-nya dalam Pemilu Legislatif 2014. PKS lebih agresif dan sadar media dan melakukan langkah-langkah “intervensi” media ketimbang PPP yang lebih pasif dan cenderung tidak melakukan apapun dalam desain komunikasi massanya.

Gambar 20 Rangkaian Implementasi dan Strategi PKS dan PPP





A. Kesimpulan

Meskipun Indonesia dihuni mayoritas umat Islam, tetapi tidak secara otomatis partai politik Islam menjadi pemenang dan mendominasi parlemen. Kekuatan politik partai politik Islam yang lemah berdampak dengan tidak terimplementasikannya ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, semisal persoalan riba yang menjadi kelaziman, dan sulitnya menyepakati regulasi jaminan produk halal yang merupakan aspirasi umat Islam. Penelitian ini membahas relasi antara ajaran Islam dengan partai politik Islam. Dari pembahasan yang dilakukan, maka penelitian ini menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemahaman elit partai PKS Sumatera Utara terhadap prinsip-prinsip komunikasi Islam tidak utuh dengan memahami sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Pemahaman para elit PKS masih bersifat umum dan belum memasuki pemahaman secara khusus tentang prinsip-prinsip komunikasi Islam. Sedangkan para elit PPP Sumatera Utara tidak memahami prinsip-prinsip komunikasi Islam secara baik dan benar. Pemahaman yang terjadi tidak tepat dan bersifat verbal dengan penghayatan yang lemah.
2. Implementasi prinsip-prinsip komunikasi Islam PKS Sumatera Utara dalam Pemilu Legislatif 2014 dilakukan secara parsial, dengan memenuhi sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Tujuan elektoral memengaruhi implementasi

tersebut sehingga meski terlihat upaya mengimplementasikan prinsip-prinsip komunikasi Islam, tetapi dalam pada kenyataannya mengalami pergerusan. Sedangkan PPP Sumatera Utara tidak menunjukkan upaya mengimpelementasikan prinsip-prinsip komunikasi Islam dan lebih didominasi oleh tujuan elektoralnya semata. PPP adalah partai politik yang berazaskan Islam dan menggunakan simbol-simbol Islam namun pada hakikatnya tidak berbeda dengan partai politik nasionalis.

3. Strategi PKS Sumatera Utara dalam Pemilu Legislatif 2014 dengan mulai meninggalkan simbol-simbol Islam, namun pada saat yang sama belum juga menyentuh substantif ajaran Islam secara menyeluruh. Pernyataan ini didukung atribusi kampanye PKS yang pada bagian tertentu menyandarkan diri pada prinsip-prinsip komunikasi Islam, termasuk dalam hubungannya dengan media massa, namun pada bagian lain prinsip-prinsip komunikasi Islam itu justru ditinggalkan. Sedangkan strategi PPP Sumatera Utara menekankan pada penggunaan simbol-simbol Islam, namun secara substantif justru cenderung meninggalkannya. Pernyataan ini didukung atribusi PPP yang tidak menunjukkan penerapan strategi yang berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi Islam, PPP Sumatera Utara juga tidak melakukan hubungan yang baik dengan media massa dalam mendukung diseminasi informasi kepada khalayak.
4. Partai politik Islam cenderung mengikuti tujuan *electoral*nya daripada mengimplementasikan prinsip-prinsip komunikasi Islam dalam kampanye politiknya. Tujuan *electoral* adalah tujuan utama yang ditetapkan baru kemudian menggunakan sebagian dari prinsip-prinsip komunikasi Islam atau hanya menggunakan simbol-simbolnya saja untuk tujuan *electoral* tersebut. Partai politik Islam belum tiba pada kondisi mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan politiknya dengan tujuan *electoral* sebagai bagian dari pengimplementasian ajaran Islam tersebut.

B. Saran

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi sebagai pisau analisis bagi relasi antara ajaran Islam dengan partai politik Islam. Oleh karenanya, secara teoritis kajian dengan pendekatan lain seperti hukum, pendidikan, sosial-budaya,

dan ekonomi yang dilakukan mahasiswa pascasarjana/akademisi kiranya akan mengagregasi pandangan terhadap perilaku politik partai politik Islam.

2. Secara metodologis, penelitian ini mencoba melihat implementasi prinsip-prinsip komunikasi Islam bagi partai politik Islam. Namun akan lebih menarik apabila para mahasiswa pascasarjana/akademisi meneliti juga dilakukan untuk mencari sinkronisasi antara ajaran Islam, partai politik Islam, dan demokrasi itu sendiri. Karena dalam sejarah sistem demokrasi di Indonesia belum pernah menempatkan partai politik Islam sebagai pemenang Pemilu.
3. Secara praktis, bagi partai politik Islam seperti PKS dan PPP yang memiliki komitmen mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan politiknya, maupun para akademisi untuk secara khusus dan terus melakukan kajian terhadap ajaran Islam untuk menjadi panduan praktis dalam kehidupan politik.
4. Dalam memetakan penduduk Indonesia, khususnya berdasarkan agama, data BPS selalu menjadi satu-satunya sumber tanpa adanya data pembanding. Penulis menemukan data yang sebangun dengan data BPS dari sumber lain di luar Indonesia, namun tidak menemukan data yang sama dari sumber umat Islam seperti partai politik Islam, ataupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam. Oleh karenanya penulis menyarankan lembaga Islam yang memiliki basis sumber daya manusia yang besar seperti partai politik Islam (PKS dan PPP) juga Ormas Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Al-Washliyah dan sebagainya melakukan riset data peta umat umat Islam sebagai data pembanding data BPS.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Maududi, Abul A'la, *Tadzkiratud Du'atil, Beberapa Petunjuk Untuk Juru Dakwah*, Terj., Aswadi Syukur. Bandung: Al-Ma'arif, 1984.
- Alu Syaikh, Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2013
- Arbi, Armawati, *Psikologi Komunikasi dan Tabligh*. Jakarta: Amzah, 2012.
- At-Thabrani, *Al-Mu'jam Al Awsath*.
- Berger, Peter L., *Langit Suci; Agama Sebagai Realitas Sosial*, alihbahasa Hartono. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Bryson, L. (Ed)., *Communication of ideas*. New York: Harper & Row, 1948.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Eadie, William F. (Ed), *21st Century Communication A Reference Handbook*. London: SAGE, 2009.
- Dainton, Marianne, dan Elaine D. Zelle, *Applying Communication Theory for Professional Life*. Thousand Oaks, California; Sage Publication, 2005.
- Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2011-2015, *Rumah Besar Umat Islam; Ketetapan Muktamar VII Partai Persatuan Pembangunan tentang Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga*.
- Drajat, Amroeni (Ed), *Komunikasi Islam & Tantangan Modernitas*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008.
- Effendy, Onong Uchjana, *Hubungan Masyarakat Suatu Studi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.
- Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Fisher, Aubrey, *Teori-teori Komunikasi*. Bandung: Rosdakarya, 1986.
- Frans Anthonissen, Peter, *Crisis Communication, practical PR strategies for reputation management and company survival*. London and Philadelphia:

- Kogan Page, 2008.
- Hatta, Mohammad, *Simbiotika Dakwah Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Hefner, Robert W., *Islam in Indonesia's Political Future*. Alexandria, Virginia: The CNA Corporation, 2002.
- Geertz, Clifford, *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, terj. Aswab Mahasin. Bandung: Dunia Pustaka Jaya, 1981.
- Goffman, Erving, *The Presentation of Self in Everyday Life*. Edinburgh: University of Edinburgh, Social Sciences Research Centre, 1956.
- Katimin, *Politik Islam Indonesia, Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*. Bandung: Ciptapustaka Media, 2007.
- Kholil, Syukur, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Ciptapustaka Media, 2006.
- Krippendorff, Klaus, *Content Analysis; An Introduction to Its Methodology, Second Edition*. California: Sage Publications, 2004.
- Little Jhon, Stephen W., *Theories of Human Communication, 6th Edition*. California: Wadawort Publishing Company, 1999.
- Lubis, Ridwan Lubis, *Agama Dalam Perbincangan Sosiologi*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010.
- Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, *Memperjuangkan Masyarakat Madani Partai Keadilan Sejahtera* Maret 2008.
- Matta, Anis Matta, *Menikmati Demokrasi; Strategi Dakwah Meraih Kemenangan*. Jakarta: Pustaka Saksi, 2002.
- Miles, M & Huberman, A, *Qualitative Data Analysis*. Newbury Park: Sage, 1994.
- Muhtadi, Burhanuddin, *Dilema PKS, Suara dan Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Munn, Fernald, & Fernald, *Basic Psychology*, Houghton Mifflin, 1969.
- McQuail, DeniS, *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar, Edisi Kedua*. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Neuendorf, Kimberly A., *The Content Analysis Guidebook*. Thousand Oak: Sage Publications, 2002.

- Nugraha, Aditya, *et.al.*, *Wajah Perekonomian Indonesia Dan Prospeknya*, Paket Informasi Publik Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia.
- Nurzain, Umar Nur, *Penulisan Feature*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Pamuntjak, Laksmi *et.al.*, (ed), *Tidak Ada Negara Islam: Surat-Surat Politik Nurcholish Madjid – Mohammad Roem*. Jakarta: Djambatan, cet.kedua 2000.
- Punch, Keith F., *Introduction To Research Methods In Education*. Los Angeles: SAGE, 2009.
- Qutbh, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Rakhmat, Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Robbins, Stephens P., *Organizational Behavior*. Prentice Hall Inc., 2003.
- Said, Prabudi, *Berita Peristiwa 60 Tahun WASPADA*. Medan: PT Prakarsa Abadai Press, 2006.
- Sambas, Syukri, *Komunikasi Penyiaran Islam: Mengembangkan Tabligh melalui Mimbar, Media Cetak, Radio, Televisi, Film, dan Media Digital*. Bandung: Benang Merah Pers, 2004.
- Schement, Jorge Reina (Ed.), *Encyclopedia of Communication and Information*. New York, Gale Group, 2002.
- Schermerhorn Jr, Jhon, *et.al.*, *Organizational Behavior Sevent Editions*. Amerika Serikat, Wiley. 2002.
- Shihab, M.Quraish., *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Suryadinata, Leo, dkk, *Penduduk Indonesia: Etnis dan Agama dalam Era Perubahan Politik*. Jakarta: LP3ES, 2003.
- Syukir, Asmuni, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.
- Taimiyah, Ibnu, *al-Siyasash al-Syar'iyyah*. Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1952.
- _____, *Majmu' Fatawa Syaykh al-Islam Ahmad Ibnu Taimiyah*, Jilid XXVIII, disunting oleh Muhammad Abdurrahman Ibnu Qasim, Riyadh:

Matabi' al-Riyadh, 1963.

Thoha, Miftah, *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Van Heekeren, Margareth, *Navigating The News Site: The Impact Of Page Design On Story Preference*. University Bahturst: School Of Communications Charles Sturt, 2005.

Wilson, J.Laurie dan Ogden, D.Joseph, *Strategic Communications Planning*. Iowa: Kendall/Hunt Publishing Company, 2008.

Wickham, Carrie R., *Mobilising Islam: Religion, Activism, and Political Change in Egypt*. New York: Columbia University Press, 2002.

Wirya, Iwan, *Kemasan yang Menjual, Menang Bersaing Melalui Kemasan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1999.

World Almanac Of Islamism yang dilansir *America Foreign Policy Council*.

DISERTASI

Platzdash, Bernhard., “Religious Dogma, Pluralism and Pragmatism: Constitutional Islamism in Indonesian Politics 1998-2002” . RSPAS, ANU, 2005 (desertasi Ph.D tidak diterbitkan).

Rizki, Sri, Dan Wati, Juni, *Kepemilikan Media Dan Ideologi Pemberitaan*. Bandung: Disertasi Universitas Padjadjaran, 2013.

TESIS

Hartadi, Kristanto, “Analisis Framing Studi Kasus Kompas Dan Media Indonesia Dalam Liputan Keerusuhan Di Temanggung 8 Februari 2011”, (Tesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, 2012.

JURNAL

Abdullah, Asep Dadang, “Urgensi Pemahaman Konsep Dasar Dakwah Dan Da’i

- Menuju Partisipasi Aktif Masyarakat Dalam Aktivitas Dakwah”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol.32, No.2, Juli-Desember 2012.
- Ayyub, Mohammad, “Political Islam: Image and Reality”, *World Policy Journal*, 21, 3. Fall 2004.
- Brillianti, Paulina Dan Widodo, Yohanes *Jurnal Fisipol Universitas Atma Jaya*, Yogyakarta.
- Buehler, Michael, “Islam and Democracy in Indonesia”, *Insight Turkey*, Vol. 11/No. 4/2009.
- Carnegie, Paul J., “Political Islam and Democratic Change in Indonesia,” *Asian Social Science Journal*, Vol.4, No.11, November 2008.
- Christopher, *Jurnal E-Komunikasi Universitas Kristen Petra*, Surabaya, Vol I. No.3 Tahun 2013.
- Febriyenti, Mega, *et.al.*, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Cadangan Devisa Dan Net Ekspor Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ekonomi*, Juli 2013, Vol. II, No.03.
- Ghazali, Effendi, “Menuntut Kelengkapan Peran Media: Tidak Hanya Membawa Tetapi Juga Membongkar Pencitraan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 14, Nomor 3, Maret 2011 (275-296) ISSN 1410-4946.
- Haryani, Silvia, “Kerjasama Kotra-Terrorisme Indonesia-Australia: Perbandingan Antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono”, *Universita Airlangga, Jurnal Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, Volume 21, Nomor 4:352-360.
- Heilmann, Matthias, “Islamismus in Indonesien: Der Erfolg der Gerechtigkeits- und Wohlfahrtspartei und seine möglichen Auswirkungen”, *ASEAS – Österreichische Zeitschrift für Südostasienwissenschaften*, No. 1, 2008.
- Hidayanto, Fajar M., “Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial,” *La_Riba Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II, No. 2, Desember 2008.
- Ismi, Dian, “Konsep Komunikasi Islam Dalam Sudut Pandang Formula Komunikasi”, *Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)*, *Jurnal Wacana* Volume XII No.1, Februari 2013.
- Kholil, Syukur, “Komunikasi Efektif Pembimbing Manasik Haji: Tinjauan Dari Sudut Psikologi Komunikasi”, *Analytica Islamica*, Vol.16, No.1, Mei 2014.
- Karim, Abdul Gafar, “Islam Di Panggung Politik Indonesia: Latar Belakang, Dinamika, dan Pergeserannya”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JSP) Fisipol UGM*.

Rinardi, Haryono, “Dari Negara Federal Menjadi Negara Kesatuan, Proses Perubahan Negara Republik Indonesia Serikat Menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Jurnal Jurusan Sejarah Universitas Diponegoro*, Bandung, 2010.

Siregar, Ashadi, “Democratic Governance dan Hak Azasi Manusia: Makna Kebebasan Pers dalam Otonomi Daerah”, *Jurnal Ilmu Sosial Politik Yogyakarta*, Vol.14, No.3, Maret 2011.

Selma, Muhammad Yahya, “Perjalanan Panjang Pemilu Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Muhammadiyah Palembang*, Volume I Nomor 1, Juni 2009.

Tim Litbang Kompas, *Partai-Partai Politik Indonesia; Ideologi dan Program 2004 – 2009*. Jakarta: Kompas, 2004.

Woischnik, Jan dan Müller, Philipp, “Islamic Parties And Democracy In Indonesia”, *Kas International Reports*, 10|2013.

MAKALAH

Agustono, Budi, “Pemikiran Sosial Mohammad Said (Medan: Makalah Seminar The Big Thinkers; Melacak Pemikiran Mohammad Said dan Ani Idrus dalam rangka HUT *Waspada* ke-67”. Medan, 2013 (makalah tidak diterbitkan).

Damanik, Ahmad Taufan, “Hajjah Ani Idrus, Perempuan Pejuang Tak Kenal Lelah (Medan: Makalah Seminar The Big Thinkers; Melacak Pemikiran Mohammad Said dan Ani Idrus dalam rangka HUT *Waspada* ke-67”. Medan, 2013 (makalah tidak diterbitkan).

WEBSITE

www.bi.go.id.

www.kpu.go.id.

WAWANCARA

Muhammad Hafez, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS Sumatera Utara).

Satrya Yudha Wibowo, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS Sumatera Utara).

Hasrul Azwar, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP).

Fadly Nurzal, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Sumatera Utara.

Prof Dr Hasyimsyah Nasution, MA Guru Besar Universitas Islam Sumatera Utara.

Warjo, Ph.D, Dosen Politik Islam Universitas Sumatera Utara.

SUMBER LAIN

Radio Smart FM.

Badan Pusat Statistik 2010.

Shahih At-Targhib.

Shahih Sunan Abu Dawud.

Shahih Sunan At-Tirmidzi.

Shahih Sunan Ibnu Majah.

Statistik Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Agustus 2013.

World Almanac Of Islamism yang dilansir *America Foreign Policy Council*.

LAMPIRAN: Transkrip Wawancara

Wawancara Muhammad Hafez
Ketua DPW PKS Sumatera Utara

Kalau merujuk kepada Islam yang prinsip, memang suatu hal yang niscaya. Yaitu harusnya pola komunikasi Islam harus dibawa, dilaksanakan, diimplemetasikan oleh setiap Muslim dalam semua bidang kehidupan seperti keluarga, bidang ekonomi, politik, bahkan dalam bernegara, dan lain-lain. Seperti prinsip *qaulan balîghâ* dalam arti tegas dalam menyampaikan pesan, tetapi tegas bukan secara ekstrim. Prinsip *qaulan layyinâ* atau berbicara lemah lembut dalam pola dakwah. Seperti nabi Musa as yang diperintahkan Allah SWT berdakwah dengan *qaulan layyinâ* kepada Fir'aun. Atau *qaulan Sadîdâ* perkataan yang benar benar, kalau ada salah sampaikan yang dengan cara yang baik, jangan disembunyikan tapi disampaikan. Tetapi cara penyampaiannya juga jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Misalnya dalam urusan rumah tangga, pola komunikasi Islam juga harus diterapkan, semuanya harus melekat dalam segemen apapun, sampai segemen keluarga yang terkecil. Dengan anak pun kita tak boleh bohong, walaupun ada yang boleh diketahui anak secara langsung, maka disampaikan dengan cara lebih baik, tetapi tidak boleh berkata bohong. Selanjutnya dalam mengikuti Pemilu ada BP3 Badan Pemenangan Partai Pusat sampai dengan daerah. Isu besar dalam kampanye diusung BP3 Pusat, yang disesuaikan dengan muatan lokal. Pemilu kali ini tema besarnya adalah: Kobarkan semangat Indonesia yang diseragamkan di seluruh Indonesia. Sebelum Pemilu kita juga melakukan *election up-date* yang sejak Oktober 2013 sudah lima kali dilakukan. Sedangkan secara regional dilakukan tiga atau empat kali di awal tahun 2013. BP3 yang terdiri dari tim enam yang membuat mekanisme pencalegan, yang terdiri dari dua jalur yakni jalur struktur dan jalur kader yang kemudian diboboti oleh Pemilu internal PKS. Karenanya dalam PKS orang yang mencalonkan diri sendiri sudah pasti tidak dipilih. Di Sumatera Utara kita memiliki 99 orang Caleg yang 20 persen di antaranya dari non kader PKS yang berasal dari jaringan eksternal bukan kader yang setiap bulan dievaluasi. Sedangkan secara nasional kita memiliki 300 orang juru kampanye. Selain itu kita juga melakukan survei pada Oktober lalu. *Survey by event* juga dilakukan di daerah-daerah, selain kegiatan partai seperti *direct selling* oleh para kader yang telah dilakukan sejak lama. Ada evaluasi yang dilakukan dari kegiatan ini dan ada *rewards* kepada para kader seperti jalan-jalan ke Jakarta. Jadi prinsip-prinsip komunikasi Islam diwujudkan dalam pelayanan sosial di tengah-tengah masyarakat. Dalam mendanai kegiatan partai kita memiliki tabungan setiap bulan dari para kader yang menjadi anggota dewan selain itu para kader juga ada tabungan Pemilu. PKS tidak lagi menonjolkan keIslaman, tapi lebih membahas negara dengan menggunakan substansi agama. Ini merupakan konsekuensi dari target tiga besar yang telah ditetapkan secara nasional. Hal ini didasari keyakinan kita bahwa kalau PKS untuk memimpin negara maka harus melebur. Strategi ini dilakukan agar jangan sampai mereka menjadi phobia Islam. Strategi ini juga seperti apa yang diajarkan Rasul dalam perjanjian Hudaibiyah juga seperti kisah keledai di pasar yang Madinah mengadu kepada Rasul. Karena politik itu adalah sarana untuk mengaplikasikan kebajikan, bukan untuk menunjukkan kesombongan. Politik itu bebas nilai, tergantung siapa yang mengisinya. Oleh karenanya politik akan berbentuk sesuai pemahaman, dalam hal ini pemahaman umat Islam sendiri. Lebih jauh target PKS bukanlah untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi adalah ingin membangun peradaban. Peradaban ini dibangun dengan landasan nilai-nilai Islam karenanya kita ingin menampilkan Islam yang *rahmatan lil'alamiin*.

Wawancara Satrya Yudha Wibowo
Sekretaris DPW PKS Sumatera Utara

Prinsip komunikasi Islam kalau dikaitkan dengan konteks politik tentu saja kita bukan ingin sembarangan menggunakan ayat. Tapi kalau ayat tentang komunikasi Nabi Musa seperti *qaulan layyinâ*, komunikasi itu dilihat siapa lawan komunikasinya. Karena memang Rasulullah SAW juga mengatakan berkomunikasi dengan orang sesuai dengan kadar kemampuannya tingkat pemahamannya terhadap suatu masalah. Jadi dikaitkan dengan konteks ayat tadi, kalau memang yang bersangkutan pada posisi ataupun kondisi yang keras berbicara, maka kita keras. Kalau memang harus lemah lembut, kita juga harus begitu. Jangan lupakan ayat Rasulullah itu bersikap lemah lembut dengan sesama Muslim dan bersikap keras terhadap orang kafir. Namun tidak lantas hitam putih ya dengan kafir tegas, dalam konteks politik yabukan dalam konteks akidah. Dalam konteks politik kalau ada yang bisa bermanfaat dilakukan untuk masyarakat, ya kita harus berkomunikasi dengan cara-cara yang baik. Kecuali kalau dia (orang kafir) sudah melampaui batas, membuat keresahan, apalagi kalau sudah mengancam akidah, maka sudah lebih di atas itu lagi (lebih keras) komunikasinya bahkan harus dilawan secara *qital*. Jadi harus disesuaikan siapa yang diajak berkomunikasi. Dalam kampanye harus menyampaikan kejujuran untuk meraih suara masyarakat. Tidak boleh menyampaikan sesuatu yang tidak dilakukan atau ketidakjujuran. Kalaupun berjanji akan ditepati, jadi tidak berbohong dalam berjanji. Berjanji dengan tidak melebihi dengan kemampuan yang dimiliki untuk menyanggupinya. Jadi sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Oleh karenanya PKS memiliki mekanisme pelatihan juru kampanye dari tingkat nasional. Biasanya janji-janji dalam kampanye mereplika program-program yang sudah terbukti di masyarakat. Kalau yang belum terbukti akan dilaksanakan. Janji-janji tersebut seperti melakukan advokasi terhadap masyarakat, ambulance gratis dan sebagainya. Sebagai partai dakwah tentunya PKS mengemban tugas-tugas dakwah melalui jalur legislatif dalam sistem tata negara yang menganut pola *trias politica*. Dakwah sudah tentu memainkan suatu peran sentral dalam membangun pemahaman keagamaan antar umat manusia. Perlu dibangun barisan yang kokoh yang memiliki struktur kuat yang berbasis kader partai. Kader partai adalah orang-orang yang telah memiliki orientasi tentang partai dakwah. Mereka menyebar sampai ke struktur paling bawah yakni di tingkat lingkungan atau tingkat dusun, bahkan sampai ke tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam perencanaan kampanye kita mengacu pada dasar partai berupa visi partai yakni partai dakwah yang kokoh dan transformatif untuk melayani bangsa. Partai dakwah adalah partai yang menjalankan nilai-nilai Islam dan kokoh berarti memiliki struktur yang kuat berbasis kader. Kita memiliki basis kader di Medan sampai dengan tingkat lingkungan (Korling/Kordus). Untuk Medan kita memiliki 100 persen basis kader sedangkan di Deli Serdang mencapai 80 persen. Dengan basis kader ini kita menempatkan dua orang kader di setiap TTPS. Sedangkan yang dimaksud transformatif adalah melayani masyarakat secara langsung melalui kegiatan bakti sosial seperti pengobatan gratis dan sebagainya. Dasar kedua yakni misi PKS yang terbagi ke dalam lima sektor yaitu *character building* yakni karakter yang soleh; *institution building* yaitu institusi yang tidak hanya bekerja pada saat Pemilu; *social*

building yaitu melayani dan melakukan advokasi; *political building* yaitu sistem politik yang sehat dan baik dengan memberikan pilihan kepada masyarakat; *nation building* yaitu menjadi bangsa yang kuat, dipandang secara internasional. Kelima sektor tersebut di atas juga teraplikasi dalam sasaran partai. Dari *character building* dibangun *halaqah* seminggu sekali minimal setia pertemuan selama dua jam. Di setiap *halaqah* ada seorang pembina (*murrobbi*) dengan anggota sebanyak 5-12 orang (*mottarobbi*). Pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat pemula, tingkat muda, tingkat madya, tingkat madya, dan tingkat ahli. Di sektor *institutional building*, di Sumatera Utara PKS kini memiliki 33 DPD, dan tersebar di 80 persen kecamatan serta 70 persen ranting. Jaringan ini terdiri dari para kader dan anggota. Dari sektor *social building* kita melakukan kegiatan sosial seperti Sembako murah, kesehatan gratis, ambulance gratis, dan kegiatan peduli 40 tetangga selama Ramadhan. Di sektor *political building* kita membangun politik dengan, kejujuran memelopori untuk tidak melakukan kecurangan dengan Pemilu tanpa *money politics*, dengan hubungan politik jangka panjang. Ada kewajiban para kader yang menjadi anggota dewan untuk menjalankan roda organisasi dengan kewajiban sumbangan maksimal 30 persen dari slip gaji dan minimal 10 persen dari slip gaji. Selain itu para kader juga tidak dibenarkan untuk “bermain” proyek. Kita berkomitmen untuk melawan budaya instan masyarakat seperti anggapan masyarakat bahwa kalau sudah menjadi anggota dewan maka uangnya berlebih.

Wawancara Hasrul Azwar Ketua DPP PPP Pusat

Perencanaan kampanye di PPP dilakukan oleh lembaga husus (Lembaga Pemenangan Pemilu/LP2) yang khusus dibentuk untuk menghadapi Pemilu. Di lembaga ini dibahas berbagai hal menyangkut Pemilu seperti tentang biaya atau anggaran yang akan digunakan, strategi yang diterapkan, lokasi kampanye yang ditetapkan, serta siapa saja yang akan menjadi juru kampanye dalam Pemilu. Hal tersebut dirancang sesuai dengan visi misi serta program yang telah ditetapkan. Untuk program regional yang ditetapkan adalah penguatan infrastruktur, listrik, pengadaan pupuk, bibit, tenaga kerja, pendidikan. Penguatan infrastruktur adalah termasuk pembangunan jalan dan jembatan sebagai dukungan bagi perekonomian di tengah-tengah masyarakat yang harus didorong. Kemudian pembangunan kelistrikan yang kita ketahui mengalami krisis disebabkan berbagai hal. Yang kita inginkan energi listrik yang penting bagi pembangunan ini bisa lebih baik. Kemudian pengadaan pupuk dan bibit bagi petani. Hal ini adalah persoalan krusial bagi kalangan petani yang merupakan pemasuk produk-produk hasil tanaman kebutuhan dalam negeri. Karena jika hal tersebut terganggu maka Indonesia akan tergantung pada impor barang dari luar negeri. Sedang permasalahan tenaga kerja adalah permasalahan nasional yang juga menjadi fenomena di Sumatera Utara. Tingkat pengangguran semakin tinggi dan menyebar ke berbagai kelompok usia, karenanya kita *concern* pada permasalahan ini untuk menjadi program yang akan disampaikan dalam kampanye. Sementara persoalan permasalahan pendidikan seperti sama kita ketahui adalah permasalahan yang juga penting dan kondisinya juga tidak baik. Selain tingkat pendidikan Indonesia yang melorot, keberadaannya juga masih belum

merata, sehingga masih ada saja kasus anak putus sekolah atau sekolah di pedalaman yang minim fasilitas. Program-program tersebut dibungkus dengan nuansa keIslaman yang terkait visi misi. Kita juga menginginkan seluruh rumah tangga Islam bisa baca Al-Qur'an. Program yang dirancang LP2 PPP secara tertulis dalam bentuk visi misi yang pengembangannya oleh para Jurkam yang di antaranya dipilih dari para ulama. Kita melakukan kajian politik beberapa kali (tidak berkala), kita juga terlebih dahulu mencari tahu siapa orang-orang yang hadir dalam kampanye, mengenali para *audience* kampanye melalui keterangan dari para ketua DPC serta melalui *googling* (melalui mesin pencari di internet). Program-program tersebut dilakukan secara tertulis dalam bentuk visi misi dengan derivasi atau pengembangan oleh masing-masing juru kampanye pada saat kampanye. Oleh karenanya sebelum kampanye dilakukan kegiatan konsolidasi dengan mengumpulkan para kader. Ada juga dilakukan penataran bagi para juru kampanye dengan dalam bentuk *training* kampanye dan itu bagian dari dakwah yang dilakukan. Konsolidasi dan pertemuan kader tersebut di Sumatera Utara sudah kita lakukan sebanyak dua kali, dan secara nasional juga dua kali di Bogor yakni pada 9 Maret dan 12 Maret (2014). Prinsip komunikasi Islam adalah prinsipnya kita menyeru dengan hikmah, dan kalau ada perdebatan lakukanlah dengan cara yang baik dan benar (mengutip surah an-Nahl:125). Kampanye Pemilu Legislatif 2014 yang dilakukan itu adalah bagian dari dakwah melalui jalur politik. Selain para kader PPP, Jurkam juga para ulama. Di depan *audience* kampanye yang kita bicarakan adalah program-program partai secara umum. Meski demikian harus ada nuansa Islami di dalamnya. Tentang kajian politik internal partai ada dilakukan tapi memang tidak sering, dan dalam Pemilu 2014 kita menargetkan secara nasional memperoleh 12 persen suara, dan secara regional di Sumatera antara 10-12 persen. Target pesimis adalah target seperti pencapaian suara sekarang ini, target optimis kita 12 persen, dan target realistik kita 10 persen. Selanjutnya mengenai evaluasi tentunya harus ada kita lakukan.

Wawancara Fadly Nurzal Ketua DPW PPP Sumatera Utara

Prinsip komunikasi Islam berarti dalam berdebat dan mengajak orang lain dengan cara yang baik. Bagaimana caranya agar orang mengikuti kita tapi tidak dengan cara terpaksa (mengutip surah an-Nahl:125). Berdebat atau menyanggah orang lain dengan cara yang baik, bagaimana caranya agar orang lain mengikuti kita tapi tidak dengan cara terpaksa. Dan apa yang dilakukan PPP supaya massif adalah komunikasi yang ideologis dan konvensional kepada para pemilih PPP. Artinya juga ada pola politik partisipatif bagi para pemilih PPP dengan melakukan doktrin mengenalkan PPP seara utuh ke masyarakat luas. Dalam berkomunikasi kita juga mencontoh perilaku Rasul seperti dalam mengenalkan diri Beliau dengan sopan santun dan ramah. Selain itu Beliau juga menghargai dan menerima pendapat orang lain. Seperti ketika dalam Perang Khandaq atau disebut juga Perang "Parit" di mana Rasul mengikuti saran sahabat. Dalam peristiwa ini Rasul menunjukkan, pada intinya, bahwa tidak ada orang yang paling benar. Dalam kampanye kita mengevaluasi kampanye yang kita lakukan, biasanya setelah kampanye akbar, kita akan bertanya dan berdialog dengan khalayak yang menghadiri kampanye. Usai kampanye kita

biasanya tidak langsung pulang meninggalkan lokasi kampanye, namun singgah dulu di warung-warung kopi atau tempat-tempat biasa khalayak berkumpul. Kita berdialog sekaligus melakukan evaluasi atas kampanye yang baru dilakukan dan secara psikologis memberikan perhatian kepada khalayak. Tema besar kita dalam Pemilu 2014 ini adalah “Indonesia Berkah Bersama Ka’bah”. Berkah dalam hal ini bermakna mengundang Tuhan dalam pengelolaan politik yang dilakukan dan dalam sikap partai. Artinya semua langkah yang dilakukan harus bermanfaat untuk orang banyak. Artinya secara individu dengan ber-PPP harus bisa meyakini publik bahwa ber-PP adalah sesuatu yang baik dan benar. Kita melakukan doktrin terhadap para kader untuk mengenalkan PPP secara utuh. Para kader PPP harus bisa meyakinkan publik bahwa ber-PPP itu baik dan benar. Dalam memilih calon legislatif yang akan dipilih dalam Pemilu, kita mensyaratkan tidak adanya *money politics*, atau setidaknya kita meyakini tidak ada terjadi *money politics* tersebut dalam proses pencalegannya. Kemudian mereka yang menjadi Caleg adalah orang yang memiliki kemampuan meyakinkan publik. Mereka adalah individu yang harus bisa meyakinkan publik bahwa ber-PPP adalah suatu hal yang baik dan benar. Sebagai partai Islam, kita tidak mengusung partai Islam, karena seluruh Caleg PPP adalah umat Muslim. Proses ini berlangsung di lembaga Lajnah Pemenangan Pemilu Legislatif (LP2) PPP yang merupakan lembaga yang mengatur Pemilu PPP. Selanjutnya kampanye dilaksanakan secara bersama-sama antara pengurus PPP di provinsi Sumatera Utara dengan pengurus PPP di kabupaten/kota di Sumatera Utara. Hal-hal yang merupakan kegiatan partai seperti melakukan konsolidasi partai dengan mengumpulkan para kader membicarakan berbagai hal untuk pemenangan Pemilu. Juga ada kegiatan evaluasi tentang apa yang telah dilakukan dalam menghadapi Pemilu dan apa yang dilakukan dalam Pemilu. Selanjutnya melakukan pembenahan partai dari berbagai aspeknya sehingga menjadi partai yang memang siap untuk mengikuti Pemilu dan menjadi perwakilan rakyat atau menjadi perpanjangan suara rakyat dalam menyuarakan aspirasinya. Pembenahan-pembenahan terus dilakukan sampai dengan pelaksanaan Mutktamar nanti.

LAMPIRAN: Perolehan Suara Partai Politik

HASIL PEMILU 1955 UNTUK ANGGOTA DPR

NO.	PARTAI/NAMA DAFTAR	SUARA	%	KURSI
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	8.434.653	22,32	57
2.	Masyumi	7.903.886	20,92	57
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.955.141	18,41	45
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.179.914	16,36	39
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.091.160	2,89	8
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	1.003.326	2,66	8
7.	Partai Katolik	770.740	2,04	6
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	753.191	1,99	5

9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	541.306	1,43	4
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	483.014	1,28	4
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	242.125	0,64	2
12.	Partai Buruh	224.167	0,59	2
13.	Gerakan Pembela Pancasila (GPPS)	219.985	0,58	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	206.161	0,55	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	200.419	0,53	2
16.	Murba	199.588	0,53	1
17.	Baperki	178.887	0,47	1
18.	Persatuan Indonesia Raya (PIR) Wongsonegoro	178.481	0,47	1
19.	Grinda	154.792	0,41	1
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	149.287	0,40	1
21.	Persatuan Daya (PD)	146.054	0,39	1
22.	PIR Hazairin	114.644	0,30	1
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	85.131	0,22	1
24.	AKUI	81.454	0,21	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	77.919	0,21	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	72.523	0,19	1
27.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	64.514	0,17	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	53.306	0,14	1
29.	Lain-lain	1.022.433	2,71	-
Jumlah		37.785.299	100,00	257

Sumber: KPU.go.id

HASIL PEMILU 1955 UNTUK ANGGOTA KONSTITUANTE²³⁶

NO.	PARTAI/NAMA DAFTAR	SUARA	%	KURSI
1.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	9.070.218	23,97	119
2.	Masyumi	7.789.619	20,59	112
3.	Nahdlatul Ulama (NU)	6.989.333	18,47	91
4.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	6.232.512	16,47	80

236 Pemilihan anggota konstituante Pemilu 1955 tidak diikuti Irian Barat yang berjatah enam kursi, sehingga jumlah kursi diperebutkan hanya 514 kursi. Pemilu ini menunjukkan PNI, NU, dan PKI mendapat dukungan meningkat sementara partai Islam terbesar kala itu, Masyumi memperoleh suara terbanyak kedua dalam Pemilu DPR, dan dalam Pemilu konstituante ini berkurang 114.267 suara atau dapat 7.789.619 suara dibandingkan Pemilu DPR 7.903.886 suara. Pemilu 1955 anggota Dewan Konstituante dilakukan tanggal 15 Desember 1955 dengan jumlah kursi sebanyak 520.

5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.059.922	2,80	16
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	988.810	2,61	16
7.	Partai Katolik	748.591	1,99	10
8.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	695.932	1,84	10
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	544.803	1,44	8
10.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	465.359	1,23	7
11.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	220.652	0,58	3
12.	Partai Buruh	332.047	0,88	5
13.	Gerakan Pembela Pancasila (GPPS)	152.892	0,40	2
14.	Partai Rakyat Indonesia (PRI)	134.011	0,35	2
15.	Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI)	179.346	0,47	3
16.	Murba	248.633	0,66	4
17.	Baperki	160.456	0,42	2
18.	Persatuan Indoenesia Raya (PIR) Wongsonegoro	162.420	0,43	2
19.	Grinda	157.976	0,42	2
20.	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai)	164.386	0,43	2
21.	Persatuan Daya (PD)	169.222	0,45	3
22.	PIR Hazairin	101.509	0,27	2
23.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	74.913	0,20	1
24.	AKUI	84.862	0,22	1
25.	Persatuan Rakyat Desa (PRD)	39.278	0,10	1
26.	Partai Republik Indonesis Merdeka (PRIM)	143.907	0,38	2
27.	Angkatan Komunis Muda (Acoma)	55.844	0,15	1
28.	R.Soedjono Prawirisoedarso	38.356	0,10	1
29.	Gerakan Pilihan Sunda	35.035	0,09	1
30.	Partai Tani Indonesia	30.060	0,08	1
31.	Radja Keprabonan	33.660	0,09	1
32.	Gerakan Banteng Republik Indonesis (GBRI)	39.874	0,1	1
33.	PIR NTB	33.823	0,09	1
34.	L.M.Idrus Effendi	31.988	0,08	1
35.	Lain-lain	426.856	1,1	3
Jumlah		37.837.105		514

HASIL PEMILU 1977

NO	PARTAI	SUARA	%	KURSI
1.	Golkar	34.348.673	62,82	236
2.	Nahdlatul Ulama (NU)	10.213.650	18,68	58
3.	Parmusi	2.930.746	5,36	24
4.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	3.793.266	6,93	20
5.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	1.308.237	2,39	10
6.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	733.359	1,34	7
7.	Partai Katolik	603.740	1,10	3
8.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	381.309	0,69	2
9.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	338.403	0,61	-

10.	Murba	48.126	0.08	-
Jumlah		54.669.509	100.00	360

Sumber: KPU.go.id

HASIL PEMILU 1977

NO	PARTAI	SUARA	%	KURSI	% (1971)	KET
1.	Golkar	39.750.096	62,11	232	62,80	-0.69
2.	PPP	18.743.491	29,29	99	27.12	+2.17
3.	PDI	5.504.757	8,60	29	10.08	-1.48
Jumlah		63.998.34	100.00	360	100,00	
		4				

Sumber: KPU.go.id

HASIL PEMILU 1982

NO	PARTAI	SUARA	%	KURSI	% (1971)	KET
1.	Golkar	48.334.724	64,34	242	62,11	+2.23
2.	PPP	20.871.880	27,78	94	29.29	-1.51
3.	PDI	5.919.702	7,88	24	8.60	-0.72
Jumlah		75.126.30	100.00	364	100,00	
		6				

Sumber: KPU.go.id

HASIL PEMILU 1987

NO	PARTAI	SUARA	%	KURSI	% (1971)	KET
1.	Golkar	62.783.680	73,16	299	68,34	+8.82
2.	PPP	13.701.428	15,97	61	27.78	-11.81
3.	PDI	9.384.708	10,87	40	7.88	+2.99
Jumlah		85.869.816	100.00	400	100,00	

Sumber: KPU.go.id

HASIL PEMILU 1992

NO	PARTAI	SUARA	%	KURSI	% (1971)	KET
1.	Golkar	66.599.331	68,10	282	73,16	-5.06
2.	PPP	16.624.647	17,01	62	15,97	+1.04
3.	PDI	14.565.556	14,89	56	10,87	+4.02
Jumlah		97.789.53	100.00	400	100,00	
		4				

Sumber: KPU.go.id

HASIL PEMILU 1997

NO	PARTAI	SUARA	%	KURSI	% (1971)	KET
1.	Golkar	84.187.907	74,51	325	68.10	+6.41
2.	PPP	25.340.028	22,43	89	17.00	+5.43
3.	PDI	3.463.225	3,06	11	14,90	-11.84
Jumlah		112.991.150	100.00	425	100,00	

*Sumber: KPU.go.id***HASIL PEMILU 1999**

No.	Partai	Suara DPR	Kursi Tanpa SA	Kursi Dgn SA
1.	PDIP	35.689.073	153	154
2.	Golkar	23.741.749	120	120
3.	PPP	11.329.905	58	59
4.	PKB	13.336.982	51	51
5.	PAN	7.528.956	34	35
6.	PBB	2.049.708	13	13
7.	Partai Keadilan	1.436.565	7	6
8.	PKP	1.065.686	4	6
9.	PNU	679.179	5	3
10.	PDKB	550.846	5	3
11.	PBI	364.291	1	3
12.	PDI	345.720	2	2
13.	PP	655.052	1	1
14.	PDR	427.854	1	1
15.	PSII	375.920	1	1
16.	PNI Front Marhaenis	365.176	1	1
17.	PNI Massa Marhaen	345.629	1	1
18.	IPKI	328.654	1	1
19.	PKU	300.064	1	1
20.	Masyumi	456.718	1	-
21.	PKD	216.675	1	-
22.	PNI Supeni	377.137	-	-
23.	Krisna	369.179	-	-
24.	Partai KAMI	289.489	-	-
25.	PUI	269.309	-	-
26.	PAY	213.979	-	-
27.	Partai Republik	328.564	-	-
28.	Partai MKGR	204.204	-	-
29.	PIB	192.712	-	-
30.	Partai SUNI	180.167	-	-
31.	PCD	168.087	-	-
32.	PSII 1905	152.820	-	-

33.	Masyumi Baru	152.589	-	-
34.	PNBI	149.136	-	-
35.	PUDI	140.980	-	-
36.	PBN	140.980	-	-
37.	PKM	104.385	-	-
38.	PND	96.984	-	-
39.	PADI	85.838	-	-
40.	PRD	78.730	-	-
41.	PPI	63.934	-	-
42.	PID	62.901	-	-
43.	Murba	62.006	-	-
44.	SPSI	61.105	-	-
45.	PUMI	49.839	-	-
46.	PSP	49.807	-	-
47.	PARI	54.790	-	-
48.	PILAR	40.517	-	-
Jumlah		105.786.661	462	462

Sumber: KPU.go.id

HASIL PEMILU 2004

NO	PARTAI/No.Urut	SUARA	%	KURS I
1.	Partai Golkar (20)	24,480,757	21.58	128
2.	PDIP (18)	21,026,629	18.53	109
3.	PKB (15)	11,989,564	10.57	52
4.	PPP (5)	9,248,764	8.15	58
5.	Partai Demokrat (9)	8,455,225	7.45	57
6.	PKS (16)	8,325,020	7.34	45
7.	PAN (13)	7,303,324	6.44	52
8.	PBB (3)	2,970,487	2.62	11
9.	PBR (17)	2,764,998	2.44	13
10.	PDS (19)	2,414,254	2.13	12
11.	PKPB (14)	2,399,290	2.11	2
12.	PKPI (10)	1,424,240	1.26	1
13.	PDK (6)	1,313,654	1.16	5
14.	PNBK (8)	1,230,455	1.08	1
15.	PP Pancasila (21)	1,073,139	0.95	0
16.	PNI Marhaenisme (1)	923,159	0.81	1
17.	PNUI (12)	895,610	0.79	0
18.	Partai Pelopor (24)	878,932	0.77	2
19.	PPDI (11)	855,811	0.75	1
20.	Partai Merdeka (4)	842,541	0.74	0
21.	PSI (22)	679,296	0.60	0

22.	PIB (7)	672,952	0.59	0
23.	PPD (23)	657,916	0.58	0
24.	PBSD (2)	636,397	0.56	0
Jumlah		54.669.509	100.00	360

Sumber: KPU.go.id

Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Nasional Pemilu Legislatif 2009

No.	Partai Politik (No Pemilu)	Suara	%
1.	Demokrat (31)	21.703.137	20,85
2.	Golkar (23)	15.037.757	14,45
3.	PDIP (28)	14.600.091	14,03
4.	PKS (8)	8.206.955	7,88
5.	PAN (9)	6.254.580	6,01
6.	PPP (24)	5.533.214	5,32
7.	PKB (13)	5.146.122	4,94
8.	Gerindra (5)	4.646.406	4,46
9.	Hanura (1)	3.922.870	3,77
10.	PBB (27)	1.864.752	1,79
11.	PDS (25)	1.541.592	1,48
12.	PKNU (34)	1.527.593	1,47
13.	PKPB (2)	1.461.182	1,40
14.	PBR (29)	1.264.333	1,21
15.	PPRN (4)	1.260.794	1,21
16.	PKPI (7)	934.892	0,90
17.	PDP (16)	896.660	0,86
18.	Barnas (6)	761.086	0,73
19.	PPPI (3)	745.625	0,72
20.	PDK (20)	671.244	0,64
21.	RepublikaNusantara (21)	630.780	0,61
22.	PPD (12)	550.581	0,53
23.	Patriot (30)	547.351	0,53
24.	PNBK (26)	468.696	0,45
25.	Kedaulatan (11)	437.121	0,42
26.	PMB (18)	414.750	0,40
27.	PPI (14)	414.043	0,40
28.	Pakar Pangan (17)	351.440	0,34
29.	Pelopor (22)	342.914	0,33
30.	PKDI (32)	324.553	0,31
31.	PIS (33)	320.665	0,31
32.	PNI Marhaenisme (15)	316.752	0,30
33.	Partai Buruh (44)	265.203	0,25

34.	PPIB (10)	197.371	0,19
35.	PPNUI (42)	146.779	0,14
36.	PSI (43)	140.551	0,14
37.	PPDI (19)	137.727	0,13
38.	Merdeka (41)	111.623	0,11

Sumber: KPU.go.id

LAMPIRAN: Berita PKS Dan PPP Di Harian *Waspada* Dan *Analisa*

No	Tgl	Judul	Jumlah Kolom		Halaman	Tampilan	Jenis
			Berita	Foto			
BERITA PKS DI HARIAN WASPADA							
1	1/12	Jadi Capres PKS, Gatot Jagokan Calon Lain	2	2	A1	Warna	Berita
2	3/12	Pemira Capres RI PKS Sangat Demokratis	6	2	B9	B/W	Berita
3	13/12	Gubsu Silaturahmi Dengan 8 Puak Suku Sumut Di Jakarta Besok	3	1	A8	B/W	Berita
4	13/12	PKS Ditanduk Sapi Obral Kambing Hitam	6.5	-	C6	B/W	Opini
5	14/12	Survei Bukan Acuan Utama PKS	3	-	A8	B/W	Berita
6	14/12	PKS Versus Politik Pembangunan	6.5	1	C6	B/W	Opini
7	9/1	PKS Duga Adanya Kejanggalaan Raibnya Logistik Pemilu	3	-	A4		Berita
8	22/1	Persiapan Pemilu 2014 PKS Silaturhmi Ke KPUD Medan	3	-	A4	B/W	Berita
9	26/1	Pemilu 2014 Untuk PKS	4	2	B6	B/W	Berita
10	3/2	PKS Umumkan Tiga Kandidat Capres 2014	2	-	A1	Warna	Berita
11	17/2	Gatot Bakar Semangat Kader PKS Di Lapangan Merdeka	6	3	A1	Warna	Berita
12	18/2	PKS Klaim Menguasai 25% Penduduk	2	-	A4	?	Berita
13	19/2	PKS Kota Medan Targetkan 17 Kursi DPRD	5	3	A4	B/W	Berita
14	28/2	PKS Kota Medan Gelar Pemenang Pemilu 2014	2	2	B1	Warna	Berita
15	6/3	Gatot Dan Erry Tidak Masuk	3	-	A2	B/W	Berita

		Jurkam Provinsi					
16	6/3	Fraksi PKS DPRD Medan Sosialisasikan Perda KTR	3	3	A4	B/W	Berita
17	11/3	Jadi Jurkam, Gubsu Dan 3 Kdh Di Sumut Ajukan Cuti	2	-	A2	B/W	Berita
18	12/3	Gubsu Ajak Pelajar Gunakan Hak Pilih	5	3	A6	B/W	Berita
19	22/3	Gubsu: Suara Anak Muda Sangat Menentukan	3	3	A4	B/W	Berita
20	25/3	Ribuan Siswa Akan Meriahkan Gebyar Gendre	5	3	B2	B/W	Berita
21	26/3	Ketua DPW PKS Sumut Ustadz HM.Hafez, Lc Optimis, PKS Pemenang Pemilu Sumut	8	4	A3	Warna	Feature
22	26/3	Supriadi: Berjuang Perbaiki Pendidikan Warga	8	4+3	A3	Warna	Feature
23	26/3	Hidup Saya Mengalir Saja	8	2	A3	Warna	Feature
24	26/3	15 Ribu Massa Akan Ramaikan Kampanye PKS -Gatot Jurkam Dampingi Anis	2	2	A1	Warna	Berita
25	27/3	Lapangan Gajah Mada Diputihkan Kampanye PKS Kemenangan Bakal Direbut Di Sumut	2	4	A1	Warna	Berita
26	31/3	PKS Putihkan Lapangan Parasamya Kisaran	4	4	A5	B/W	Berita
27	1/4	H.Zulkarnaen ST Caleg PKS DPR RI Dapil Sumut III Anak Kisaran Menuju Senayan	8	3+3	A3	Warna	Feature
28	1/4	PKS Sayangkan Perdebatan Pemilu didominasi Hasil Survei Partai	3	-	A6	B/W	Berita
29	1/4	Caleg PKS Sosialisasikan Cara Pencoblosan	2	1	A6	B/W	Berita
30	2/4	H.Mahmud Soleh, MA Sosok Sentral Kaderisasi PKS	8	5+3+2	A3	Warna	Feature
31	2/4	Erna Hastuti Daulay, Caleg PKS No.Urut 2 Dapil Sumut II Menolak Jadi Pengharum Ruang Sidang	8	3+3+3	A3	Warna	Feature
32	3/4	Hari Ini PKS Gelar Dua Kampanye Nasional	2	1	A1	Warna	Berita
33	3/4	Satrya Yudha Wibowo, Caleg PKS DPRD Sumut Dapil III Sang Insinyur Spesialis Rohani	8	8+2+3	A3	Warna	Feature

34	4/4	PKS Tetap Partai Dakwah	7	3+3	A1	Warna	Berita
35	4/4	Muhammad Hafez, Caleg PKS Dari Dapil Sumut I Tak Pernah Memilih Untuk Menyerah	8	4+2,5 + 2,5+2	B3	Warna	Feature
BERITA PKS DI HARIAN ANALISA							
1	3/12	Hasil Pemira DPD PKS Kota Medan. Anis Matta, HNW Dan Tifatul Sembiring Bersaing	3	5	10	B/W	Berita
2	3/12	Pemilu Raya Capres PKS (Berita foto)	-	5	-	-	-
3	24/1	DPD PKS Kota Medan Tinjau Persiapan Pemilu	3	3	19	Warna	Berita
4	8/1	Ketua DPD PKS Kota Medan H.Azhar Arifin Polisi Diminta Usut Logistik Pemilu Yang Hilang	3	-	6	B/W	Berita
5	5/2	Hadapi Pemilu, PKS Kuatkan Caleg Dan Kadernya	2	-	29	B/W	Berita
6	17/2	Gatot Pimpin Apel Pemenangan PKS Targetkan 17 Kursi di DPRD Medan	5	2	9	Warna	Berita
7	20/2	PKS Minta Pemko Perhatikan Nelayan	3	-	10	B/W	Berita
8	25/2	Setelah 18 Tahun Ditetapkan Dua Legislator PKS Pasang Plang Jl.Syeckh HA.Wahab Rokan	2	2	10	Warna	Berita
9	26/2	PKS Kota Medan Gelar Rakor Pemenangan Pemilu	2	-	6		Berita
10	3/3	Reses Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS Muhammad Nasir Warga Pekan Labuhan Harapkan Fasilitas Air Bersih, Drainase, Penanggulangan Sampah	2	-	9	B/W	Berita
11	5/3	Gubsu Dorong PKS Sediakan Pembangkit Listrik	2	-	6	B/W	Berita
12	12/3	PKS Kota Medan Gelar Silaturahmi Dengan 500 Tokoh	2	-	6	B/W	Berita
13	24/3	Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Dirikan Bank Sampah	2	-	4	B/W	Berita
14	26/3	PKS Putihkan Kota Medan Gatot Pujo Nugroho Jadi Jurkam Dampingi Anis Matta	2	-	?	B/W	Berita
15	27/3	PKS Target Juara Di Sumut	2	2	1	Warna	Berita

16	3/4	Hari Ini PKS Gelar Kampanye Nasional	2	-	10	B/W	Berita
17	4/4	Kampanye Putaran Akhir Di Medan Marelan PKS Tekadkan Perubahan Untuk Selamatkan Bangsa Dan Negara	2	2	10	Warna	Berita
18	4/4	PKS Dan PDI Perjuangan Populer Di Media Sosial	2	-	3	B/W	Berita

BERITA PPP DI HARIAN WASPADA

1	9/1 2	Kader PPP Bantu Penyandang Cacat	3	3	B1	Warna	Berita
2	7/1	Suasana Religius Warnai Peringatan Harlah PPP Sumut	3	-	-	B/W	Berita
3	8/1	PPP Belum Punya Capres	3	1	B3	B/W	Berita
4	17/ 1	Sejumlah Nama Beredar Sebagai Capres PPP	4	-	A5	B/W	Berita
5	22/ 1	PPP Siap hadapi tantangan	2	2	B1	Warna	Berita
6	3/2	Mukernas Akan Tetapkan SDA Sebagai Capres PPP	2	-	A1	Warna	Berita
7	7/2	Hasrul: Internal PPP, Capres Hanya SDA	3	1	A8	B/W	Berita
8	7/2	SDA Sambut Baik Kdh Yang Kembangkan Ponpes	3	-	A8	B/W	Berita
9	8/2	PPP Tak Ingin Pemilu Jadi Ratapan	3	3	A8	B/W	Berita
10	10/ 2	PPP Sumut Akan Persiapkan Capres Di Rapimnas PPPP	3	-	A8	B/W	Berita
11	24/ 2	PPP Dukung Tambahan Anggaran Pemilu Rp1,5 T	2	-	A7	B/W	Berita
11	25/ 2	PPP Apreiasi Keputusan MK Soal UU Pilpres	3	-	A8	B/W	Berita
12	26/ 3	Kampanye PPP Di Deliserdang	2	-	B4	B/W	Berita
13	1/4	PPP Ingatkan “Euforia” Survei	2	-	A6	B/W	Berita

BERITA PPP DI ANALISA

1	7/1	Suasana Religius Warnai Peringatan Harlah PPP Sumut	3	-	9	B/W	Berita
2	19/	Caleg PPP Suyono:	3	-	14	B/W	Berita

	2	Batubara Harus Kontap					
3	24/ 2	Menjadi Anggota Dewan Tidak Bisa Jalan Melenggang DPW PPP Sumut Gelar Rakor Pemenangan Pemilu Legislatif	5	2	10	Warna	Berita
4	17/ 3	PPP Parpol Pertama Kampanye Di Kota Binjai Fadly Nurzal: PPP Junjung Tinggi Semangat Persatuan	3	2	31	Warna	Berita
5	20/ 3	Mulya Syahputra Nst: Jangan Ada Dusta di Antara Kita	1	2	16	Warna	Berita
6	22/ 3	Usulan PAW PPP Tak Gubris Pimpinan DPRD Paluta	2	-	30	B/W	Berita



BIODATA PENULIS Dedi Sahputra kelahiran Medan pada 18 Juni 1972, adalah anak pertama dari lima bersaudara, dari ibu yang bernama Jumilah, dan ayahnya bernama M.Idris. Ia menikah dengan Henny Indriati teman seprofesinya di harian *Waspada* yang

kini hanya berkonsekrasi di rumah membesarkan anak-anak mereka yang berjumlah tiga orang, masing-masing Nabil Al-Hafidz Sahputra, Zahira Nufus Sahputra, dan Samudera As-Sajjad Sahputra. Ia berkarir sebagai seorang jurnalis di Harian *Waspada* Medan sejak tahun 1997 tepatnya ketika masih duduk di semester III pendidikan sarjananya di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi "Pembangunan" (STIK-P). Kini ia dipercaya menjabat Redaktur Pelaksana (Redpel) Artikel/Opini yang bertanggungjawab menurunkan semua tulisan/artikel/feature non berita di harian *Waspada* Medan. Dia juga merupakan salah seorang wartawan penulis kolom yang diberinama *Foliopini*. Kolom ini terbit setiap hari Senin dan Kamis yang membahas berbagai persoalan dari sudut yang unik. Setiap kali terbit kolom ini selalu dengan panjang tulisan opini yang sama yakni satu folio—yang menjadi dasar pemberian nama *Foliopini*, atau opini satu folio.

Sebagai wartawan dia memulainya dari dasar sekali saat menjadi "wartawan keliling" tanpa pos penugasan tertentu, sampai menjadi wartawan yang menempati beberapa bidang tugas, seperti hukum, pendidikan, politik, pemerintahan, ekonomi, dan sebagainya. Dia kemudian banyak ditugaskan untuk liputan khusus yang menyangkut isu-isu penting dan strategis baik di dalam maupun di luar negeri. Beragamnya bidang tugas yang pernah dijalani menjadikannya memiliki modal pengalaman dan punya *view* yang luas dalam melihat suatu masalah. Pengalaman liputannya ini ditopang oleh pendidikan formalnya yang linear dalam bidang ilmu komunikasi. S1 bidang Ilmu Komunikasi ditamatkannya di STIK-P Medan tahun 2000, S2 Komunikasi Islam ditamatkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumut (sekarang Universitas Islam Negeri/UIN) Sumut tahun 2008, dan kini menyelesaikan pendidikan S3 (jenjang Doktor) Komunikasi Islam di UIN Sumut. Dia kini juga tercatat sebagai dosen di almamaternya di STIK-P.

Di samping pendidikan formal, dia juga memiliki pengalaman dan pendidikan non formal di antaranya seperti yang diselenggarakan Nihon Shinbun Kyokai-Confederation of ASEAN Journalists (NSK-CAJ) di Tokyo, Jepang (2001), Internationale Journalisten Programme di Berlin, Jerman (2006), International Visitor Leadership Program/IVLP di Washington DC, Amerika Serikat (2007), International News Writing Thomson Reuters Foundation di London, Inggris (2008).

Dengan pengalamannya itu, dia sering diundang sebagai pembicara di berbagai forum. Dia juga tercatat sebagai seorang jurnalis dengan jenjang kompetensi Wartawan Utama sekaligus menjadi penguji kompetensi wartawan Indonesia yang saat ini di Sumatera Utara baru ada lima orang. Bersamaan dengan penyelesaian disertasi ini, dia juga meluncurkan buku pertamanya yang berjudul “Mendekati Kesulitan” yang merupakan kumpulan tulisannya di kolom *Foliotopini* harian *Waspada*.